Pemerintah
Kota Pasuruan



Rancangan Akhir

RPJMD

Kota Pasuruan

Tahun 2025 - 2029

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PASURUAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentan Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentan Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 1);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALI KOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelengaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa jabatan Kepala Daerah.

8. Rencana ...

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan:

a. penjabaran RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 Tahap pertama;
b. penjabaran Visi dan Misi Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program prioritas, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah;
c. dokumen perencanaan daerah yang dalam penyusunannya memperhatikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Timur, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJPD Kota Pasuruan; dan
d. dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah kebijakan sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Maksud penetapan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:

a. penyusunan RKPD;

b. penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan

c. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Tujuan penetapan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:

a. penjabaran Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 yang mempertimbangkan Isu Strategis dan permasalahan Daerah aktual; dan

b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 6

(1) Penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 dilakukan sesuai dengan sistematika penjabaran RPJMD.

(2) Sistematika penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8 ...

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

(1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD bersifat indikatif.

(2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJMD dituangkan dalam RKPD.

Pasal 10

Program dan kegiatan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui sebagai program dan kegiatan Tahun 2025.

Pasal 11

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur RPJMD yang memuat visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA PASURUAN,

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 157-2/2025

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PASURUAN TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJMD dijabarkan ke dalam siklus rencana tahunan sebagai RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan beserta rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, kemudian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akun tabel, partisipatif, terulrur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan RPJMD sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman serta komitmen Bersama antara semua pemangku kepentingan di Kota Pasuruan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

yang dimaksud terjadi perubahan mendasar yaitu mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan atau pemekaran daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN 1
1.2. DASAR HUKUM 4
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 8
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 11
1.5. SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2025 – 2029 12
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 14
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 14
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis 14
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 54
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 71
2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 149
2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 150
2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 221
2.3.1. Identifikasi Permasalahan dan Potensi 221
2.3.2. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 224
2.3.3. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 – 2045 235
2.3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan 240
2.3.5. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis 249
2.3.6. Isu Strategis 252
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 261
3.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 261
3.1.1. Visi 261
3.1.2. Misi 266
3.1.3. Tujuan dan Sasaran 269
3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 276
3.2.1. Strategi 276
3.2.2. Pentahapan Pembangunan 277
3.2.3. Arah Kebijakan 278
3.2.4. Program Prioritas 281
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 326
4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH 326
4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 424
4.2.1. Indikator Kinerja Utama 424
4.2.2. Indikator Kinerja Daerah 425
BAB V PENUTUP 438

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Wilayah Administrasi Kota Pasuruan 14
Tabel 2. 2 Kondisi Sungai Di Kota Pasuruan 17
Tabel 2. 3 Klimatologi Kota Pasuruan Tahun 2024 18
Tabel 2. 4 Persentase Daerah Rawan Pangan Kota Pasuruan Yang Tertangani 26
Tabel 2. 5 Status Daya Dukung Air Kota Pasuruan Tahun 2023 29
Tabel 2. 6 Status Daya Dukung Daya Tampung Air Ambang Batas Kota Pasuruan Tahun 2023 29
Tabel 2. 7 Status Daya Dukung Daya Tampung Bahan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2023 30
Tabel 2. 8 Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Bahan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2023 Berdasarkan Ambang Batas 31
Tabel 2. 9 Status Mutu Air Pada Daerah Aliran Sungai Di Kota Pasuruan Berdasarkan Nilai Indeks Pencemaran (IP) Tahun 2024 33
Tabel 2. 10 Perbandingan Hasil Pengukuran Kualitas Udara Kota Pasuruan Tahun 2024 34
Tabel 2. 11 Data Pengolahan Sampah Di Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 38
Tabel 2. 12 Jumlah KK Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Pasuruan Tahun 2022-2023 41
Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk Miskin Dan Garis Kemiskinan Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 57
Tabel 2. 14 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Di Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 60
Tabel 2. 15 Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja Dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2020-2024 62
Tabel 2. 16 Kemampuan Literasi Dan Numerasi Pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP Tahun 2021 - 2024 68
Tabel 2. 17 Indeks Perlindungan Anak Kota Pasuruan 2021-2023 69
Tabel 2. 18 IDSD Kota Pasuruan Tahun 2022-2024 84
Tabel 2. 19 Capaian Indikator SPM Urusan Pendidikan Kota Pasuruan 85
Tabel 2. 20 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kota Pasuruan 87
Tabel 2. 21 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 88
Tabel 2. 22 Rasio Posyandu Per Balita Kota Pasuruan Tahun 2020 -2024 91
Tabel 2. 23 Rasio Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu Dan Poliklinik Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 91
Tabel 2. 24 Data Indikator Jumlah Tenaga Kesehatan Dan Rasio Tenaga Medis Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 92
Tabel 2. 25 Jumlah Kunjungan Dan Ikm Atas Layanan Puskesmas Di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 92
Tabel 2. 26 Capaian Indikator Penanganan Penyakit Menular Dan Tidak Menular Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 93
Tabel 2. 27 Capaian SPM PUPR Kota Pasuruan Tahun 2021-2023 94

Tabel 2. 28 Capaian Spm Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 98
Tabel 2. 29 Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 - 2024..... 101
Tabel 2. 30 Capaian SPM Urusan Sosial Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 103
Tabel 2. 31 Jumlah Pencari Kerja Dan Penempatan Kerja Di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 105
Tabel 2. 32 Indikator Urusan Pertanahan Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 109
Tabel 2. 33 Rata-Rata Konsentrasi Bahan Pencemar Udara Parameter No2 dan So2 Tiap Area Di Kota Pasuruan Tahun 2024..... 111
Tabel 2. 34 Nilai Indeks Pencemaran Air Sungai Di Kota Pasuruan Tahun 2022 - 2024 113
Tabel 2. 35 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 114
Tabel 2. 36 Capaian Indikator Urusan PPKB Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 117
Tabel 2. 37 Kinerja Urusan Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2020-2024..... 118
Tabel 2. 38 Produksi Komoditi Peternakan Di Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 133
Tabel 2. 39 Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Kota Pasuruan Kota Pasuruan 2020-2024 143
Tabel 2. 40 Jumlah Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024..... 144
Tabel 2. 41 Data Penanganan Pelanggaran Pegawai Tahun 2020 - 2024 144
Tabel 2. 42 Capaian Opini BPK Atas LKD Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 146
Tabel 2. 43 Capaian Urusan Pemerintahan Umum Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 148
Tabel 2. 44 Realisasi Dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020-2024..... 161
Tabel 2. 45 Neraca Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020-2024..... 164
Tabel 2. 46 Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas Neraca Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 171
Tabel 2. 47 Proporsi Komponen Pembentuk PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020- 2024 Kota Pasuruan 178
Tabel 2. 48 Rasio Kemandirian Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 182
Tabel 2. 49 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 184
Tabel 2. 50 Rasio Antara Pad Dengan Total Penerimaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tanpa Subsidi (Dana Perimbangan). Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024..... 185
Tabel 2. 51 Rasio Efektivitas Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 187
Tabel 2. 52 Analisis Proporsi Komponen Belanja Daerah Kota Pasuruan terhadap Belanja Tahun 2020-2024 190
Tabel 2. 53 Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Tahun 2024 197
Tabel 2. 54 Besaran Nilai Anggaran Belanja Insfrastruktur Tahun 2020 - 2024..... 200
Tabel 2. 55 Besaran Nilai Anggaran Belanja Pendidikan Tahun 2020 - 2024 201
Tabel 2. 56 Besaran Nilai Anggaran Belanja Insfrastruktur Tahun 2020 - 2024..... 202
Tabel 2. 57 Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 204
Tabel 2. 58 Defisit Riil Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2020 – 2024..... 206

Tabel 2. 59 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2020 – 2024 207
Tabel 2. 60 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2020 – 2024 209
Tabel 2. 61 Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Pasuruan Tahun 2020– 2024 210
Tabel 2. 62 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2025 – 2030 212
Tabel 2. 63 Proyeksi Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2030 217
Tabel 2. 64 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 – 2029 220
Tabel 2. 65 Identifikasi Permasalahan Dan Potensi Daerah 221
Tabel 2. 66 Target Sasaran Visi Berdasarkan Periodesasi RPJPD Kota Pasuruan 237
Tabel 2. 67 Kawasan Utama Dan Kawasan Bertampalan Di Kota Pasuruan 246
Tabel 2. 68 Capaian TPB KLHS Kota Pasuruan 250
Tabel 2. 69 Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis Kota Pasuruan 251
Tabel 2. 70 Linearitas Isu Strategis 256
Tabel 3. 1 Linearitas Misi Kota Pasuruan 266
Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Pasuruan 274
Tabel 3. 3 Tematik dan Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan 277
Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pasuruan 278
Tabel 3. 5 Linieritas Agenda dan Program Prioritas Kota Pasuruan Tahun 2025-2029. 281
Tabel 3. 6 Linieritas Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 285
Tabel 4. 1 Program Pembangunan Dan Pagu Indikatif 327
Tabel 4. 2 Target Idikator Kinerja Utama 424
Tabel 4. 3 Target Indikator Kinerja Daerah 425
Tabel 4. 4 Target Indikator Kinerja Kunci 430

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 11
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Pasuruan 15
Gambar 2. 2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2020 - 2024 27
Gambar 2. 3 Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Tahun 2020 - 2024 36
Gambar 2. 4 Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 43
Gambar 2. 5 Penurunan Emisi Berdasarkan Bidang Mitigasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) Di Kota Pasuruan Tahun 2021-2024 45
Gambar 2. 6 Indeks Risiko Bencana Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 48
Gambar 2. 7 Indeks Ketahanan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 49
Gambar 2. 8 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 51
Gambar 2. 9 Proyeksi Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 52
Gambar 2. 10 Proyeksi Jumlah Dan Rasio Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 52
Gambar 2. 11 Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu) Berdasarkan Kelompok Usia Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 53
Gambar 2. 12 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 53
Gambar 2. 13 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Dan Nasional Tahun 2020-2024 55
Gambar 2. 14 Persentase Kemiskinan Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Nasional Tahun 2020-2024 56
Gambar 2. 15 Grafik Kedalaman Dan Keparahan Kemiskinan Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 57
Gambar 2. 16 PDRB Per Kapita Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 59
Gambar 2. 17 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB-Milyar) Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 60
Gambar 2. 18 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Nasional Tahun 2020-2024 61
Gambar 2. 19 Gini Rasio Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Nasional Tahun 2020-2024 63
Gambar 2. 20 Indeks Pembangunan Manusia Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 64
Gambar 2. 21 Usia Harapan Hidup Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 65
Gambar 2. 22 Prevalensi Stunting Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 66
Gambar 2. 23 Indeks Pendidikan, Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 67
Gambar 2. 24 Indeks Pembangunan Gender Kota Pasuruan 2020-2024 70
Gambar 2. 25 Angka Ketergantungan Kota Pasuruan 2020-2024 71
Gambar 2. 26 Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan 2020-2024 72
Gambar 2. 27 Nilai PDRB Sektor Perdagangan 2020-2024 73
Gambar 2. 28 Nilai PDRB Sektor Pariwisata 2020-2024 74
Gambar 2. 29 Indikator Indeks Inovasi Daerah Di Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 74
Gambar 2. 30 Persentase Capaian Aksi HAM Tahun 2021-2024 77

Gambar 2. 31 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Di Kota Pasuruan Tahun 2022-2024 78
Gambar 2. 32 Laju Inflasi Kota Pasuruan Dan Nasional Tahun 2020-2024 82
Gambar 2. 33 Indeks Spbe Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 83
Gambar 2. 34 Jumlah Posyandu Utama Dan Mandiri Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 90
Gambar 2. 35 Capaian Indikator Urusan PUPR Kota Pasuruan 2020-2024 95
Gambar 2. 36 Persentase Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 97
Gambar 2. 37 Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 99
Gambar 2. 38 Indikator Urusan Trantibumlinmas Di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 101
Gambar 2. 39 Indikator Sub Urusan Kebencanaan Dan Kebakaran Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 102
Gambar 2. 40 Perkembangan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 - 2024 103
Gambar 2. 41 Indikator Sub Urusan Kebencanaan Dan Kebakaran Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 104
Gambar 2. 42 Angka Sengketa Pengusaha Dan Pekerja Di Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 106
Gambar 2. 43 Rasio KDRT Per 10.000 Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 107
Gambar 2. 44 Skor Pola Pangan Harapan Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 108
Gambar 2. 45 Capaian Indikator Persentase Penduduk Ber KTP Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 116
Gambar 2. 46 Indeks SPBE Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 120
Gambar 2. 47 Jumlah Jaringan Komunikasi Di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 121
Gambar 2. 48 Jumlah Koperasi Aktif Di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 121
Gambar 2. 49 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 123
Gambar 2. 50 Indikator Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 124
Gambar 2. 51 Capaian Indikator Urusan Persandian Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 125
Gambar 2. 52 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 126
Gambar 2. 53 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 127
Gambar 2. 54 Capaian Indikator Jumlah Arsip Yang Dikelola Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 128
Gambar 2. 55 Produksi Perikanan Tangkap Dan Budidaya di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 129
Gambar 2. 56 Produksi Perikanan Budidaya di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 130
Gambar 2. 57 Indikator Urusan Pertanian di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 132
Gambar 2. 58 Jumlah UTTP Yang Bertanda Sah Di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 134
Gambar 2. 59 Nilai PDRB Sektor Perdagangan di Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 135
Gambar 2. 60 Pertumbuhan Sektor Perdagangan di Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 136
Gambar 2. 61 Kontribusi Sektor Perdagangan Di Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 137

Gambar 2. 62 Capaian Indikator Urusan Perindustrian di Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 138
Gambar 2. 63 Capaian Indikator Urusan Penunjang Sekretariat Daerah di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 139
Gambar 2. 64 Capaian Indikator Urusan Sekretariat Dewan di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 140
Gambar 2. 65 Capaian Indikator Komponen Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 141
Gambar 2. 66 Pertumbuhan PAD Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 142
Gambar 2. 67 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 142
Gambar 2. 68 Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengembangan Sebagai Inovasi Oleh Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2024 145
Gambar 2. 69 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 146
Gambar 2. 70 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan di Kota Pasuruan Tahun 2021 - 2024 147
Gambar 2. 71 Pendapatan Daerah Kota Pasuruan (Dalam Milyar) Tahun 2020-2024 152
Gambar 2. 72 Perkembangan Nilai Belanja Daerah Beserta Komponenya Tahun 2020 - 2024 157
Gambar 2. 73 Rasio Lancar Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 172
Gambar 2. 74 Rasio Solvabilitas Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 174
Gambar 2. 75 Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 176
Gambar 2. 76 Perbandingan Rata-Rata Proporsi dari Komponen Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 178
Gambar 2. 77 Perkembangan Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Pada Tahun 2020 – 2024 180
Gambar 2. 78 Perkembangan Nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 – 2024 181
Gambar 2. 79 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Pasuruan Tahun 2020 – 2024 183
Gambar 2. 80 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 – 2024 185
Gambar 2. 81 Rasio Efektivitas Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 187
Gambar 2. 82 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 188
Gambar 2. 83 Tingkat Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 – 2024 192
Gambar 2. 84 Proporsi Belanja Modal Terhadap Dana Transfer Umum Kota Pasuruan Tahun 2020 – 2024 193
Gambar 2. 85 Proporsi SILPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 195
Gambar 2. 86 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 196
Gambar 2. 87 Proporsi Anggaran Belanja Insfrastruktur Pelayanan Publik Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2020 - 2024 199
Gambar 2. 88 Mandatory Spending bidang pendidikan Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 200

Gambar 2. 89 Mandatory Spending Bidang Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024 201
Gambar 2. 90 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden 225
Gambar 2. 91 Program Prioritas Presiden 232
Gambar 2. 92 Program Hasil Terbaik Cepat / Quick Wins 234
Gambar 2. 93 Peta Sistem Pusat Pelayanan Kota Pasuruan 242
Gambar 2. 94 Peta Struktur Ruang Kota Pasuruan 243
Gambar 2. 95 Rencana Pola Ruang Kota Pasuruan 246
Gambar 2. 96 Kawasan Utama Dan Kawasan Bertampalan Di Kota Pasuruan 249
Gambar 3. 1 Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 267
Gambar 3. 2 Tujuan dan Sasaran MISI 1 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 269
Gambar 3. 3 Tujuan Dan Sasaran MISI 2 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 270
Gambar 3. 4 Tujuan Dan Sasaran MISI 3 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 271
Gambar 3. 5 Tujuan Dan Sasaran MISI 4 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 272
Gambar 3. 6 Tujuan Dan Sasaran MISI 5 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 273

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD). Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, mulai dari Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD, dimana sebagian substansinya menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Berdasarkan hal-hal tersebut dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, *logic model*, berpikir sistem, dan sistem dinamik.

Selain itu, sebagai komitmen pembangunan berkelanjutan, penyusunan RPJMD memperhatikan *Sustainable Development Goals* yang mana termuat dalam KLHS, sehingga penyusunan RPJMD Kota Pasuruan memperhatikan KLHS Kota Pasuruan. Sebelum penyusunan RPJMD, Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS terlebih dahulu sebagaimana Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS. Dengan demikian, KLHS menjadi dasar atau acuan untuk memastikan bahwa RPJMD tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga

memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. KLHS menilai dampak kebijakan dan program dalam RPJMD terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan. Melalui KLHS, analisis terhadap potensi risiko dan peluang dari rencana pembangunan dilakukan.

Dokumen RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 memainkan peran krusial dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, yang secara sinergis mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan bahwa daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Sebagai pelaksanaan tahap pertama pembangunan jangka menengah pada periode RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045. Dokumen RPJMD Kota Pasuruan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota Pasuruan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Oleh karenanya RPJMD Kota Pasuruan menekankan tentang pentingnya menerjemahkan Visi, Misi dan Agenda Wali Kota terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025–2029 disusun sebagai tindak lanjut dari pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan terpilih, yaitu Adi Wibowo, S.TP, M.Si dan M. Nawawi, S.Kom, M.M., yang dilantik pada **20** Februari 2025, sesuai dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Adapun visi pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025–2029 adalah **Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya Dan Indah Kotanya.** Oleh karena itu dalam penyusunan RPJMD Kota Pasuruan mengintegrasikan antara perencanaan Teknokratik dengan Visi - Misi Wali Kota Pasuruan sebagai representasi pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh,

dan tanggap terhadap perubahan, dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Secara keseluruhan, Dokumen RPJMD merupakan fondasi yang kuat untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif, sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat Kota Pasuruan.

1.2. DASAR HUKUM

Aturan hukum yang menjadi dasar penyusunan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801:
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
10. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 4 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);

19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 11);
20. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
21. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 204);
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017;
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2021–2041 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 – 2045 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 6).
35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 2025);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang berfungsi sebagai pedoman utama pembangunan Kota Pasuruan selama lima tahun masa jabatan kepala daerah terpilih. Dokumen ini memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat disusun secara terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun dokumen sektoral dan teknis lainnya.

Secara vertikal, RPJMD Kota Pasuruan disusun dengan mengacu dan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, guna menjamin sinkronisasi dan keterpaduan pembangunan antara pusat dan daerah. Selain itu, RPJMD juga harus selaras dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025–2045 serta RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025–2029, agar capaian pembangunan daerah mendukung pencapaian target pembangunan provinsi. Lebih lanjut, RPJMD Kota Pasuruan juga perlu memperhatikan keterkaitan dengan RTRW Provinsi Jawa Timur, mengingat kebijakan pemanfaatan ruang menjadi landasan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Permendagri No. 8 Tahun 2017 Pasal 21 ayat (4) huruf c yang menegaskan bahwa RPJMD kabupaten/kota harus memperhatikan kesesuaian dengan RTRW nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Secara horizontal, RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Pasuruan 2025–2045. Oleh karena itu, arah kebijakan dan sasaran RPJMD harus selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah. Dokumen ini juga menjadi dasar penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) setiap tahunnya, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan APBD Kota Pasuruan. Selanjutnya, setiap Renstra (Rencana Strategis) dan Renja (Rencana Kerja) perangkat daerah wajib disusun mengacu pada program, kegiatan, dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD agar tercipta keterpaduan antara kebijakan makro dan operasional.

RPJMD juga harus memperhatikan dokumen sektoral dan tematik, seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Pasuruan untuk memastikan keterpaduan spasial program pembangunan, dan dokumen lingkungan seperti KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) agar kebijakan pembangunan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan dan daya dukung lingkungan hidup, serta Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) Kota Pasuruan yang merupakan dokumen teknis untuk mendukung perencanaan dan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi daerah secara terarah dan terintegrasi. Di samping itu, RPJMD juga wajib mengakomodasi berbagai dokumen tematik, sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan nasional ke tingkat daerah yaitu antara lain:

1. Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals (SDG's);*
2. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG);
3. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
4. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK);
5. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Timur,
7. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Timur,
8. Grand Design Reformasi Birokrasi;
9. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Pasuruan;
10. Rencana Penanggulangan Bencana Kota Pasuruan.;
11. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender PUG dan Pengembangan Kota Layak Anak;
12. Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial;
13. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting;
14. Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi;
15. Rencana Aksi Daerah Pengendalian Inflasi;
16. Rencana Aksi Daerah Perubahan Iklim.
17. Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal

Dengan demikian, RPJMD Kota Pasuruan 2025–2029 berfungsi sebagai dokumen yang menjembatani visi-misi kepala daerah dengan kerangka perencanaan nasional, provinsi, dan teknis sektoral. Keterkaitan ini bertujuan agar seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Pasuruan berjalan secara terarah, terpadu, konsisten, serta mampu mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

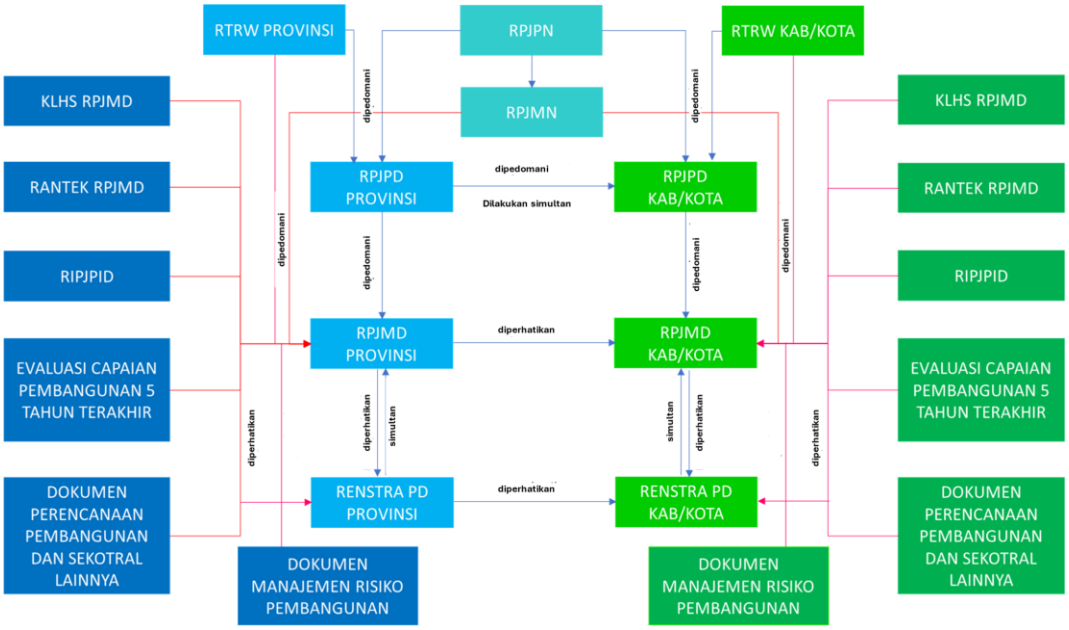

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah pembangunan jangka menengah Kota Pasuruan lima tahun kedepan yang holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Pasuruan Tahun 2025-2029.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kota Pasuruan selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kota Pasuruan selama kurun waktu 2025-2029;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;

4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Daerah Lainnya;
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
7. Menjadi pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD) bagi Pemerintah Daerah dan pedoman setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
8. Menjadi dasar penilaian pencapaian kinerja pembangunan daerah selama 5 tahun.

1.5. SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2025 – 2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan disusun dalam 5 (Lima) Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Daerah

Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain hasil evaluasi capaian pembangunan daerah periode RPJMD 2021-2026. Penyajian hasil evaluasi capaian pembangunan daerah diutamakan berkaitan dengan capaian utama. Gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir, gambaran Keuangan Daerah yang memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2030 serta Permasalahan dan Isu Strategis.

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini berisikan 2 (dua) sub bab yang berisi Sub bab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029. Sub bab kedua adalah Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat strategi dan arah kebijakan daerah dalam

mencapai tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029, serta program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini berisikan 2 (dua) sub bab yakni Sub bab Program Perangkat Daerah dan Sub bab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sub bab pertama memuat daftar program perangkat daerah tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah serta Indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah 2025-2029. Adapun Sub bab kedua memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Pasuruan adalah kota pesisir di Provinsi Jawa Timur yang terletak 60 km sebelah tenggara Kota Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur dan 355 km sebelah barat laut Kota Denpasar, Bali. Lokasinya yang strategis berada di persimpangan segitiga emas rute regional Surabaya - Probolinggo - Malang, menjadikannya pusat penting bagi perindustrian dan perdagangan. Secara geografis, kota ini terletak di Pulau Jawa dengan bagian utara dibatasi Laut Jawa, sedangkan bagian lainnya memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Barat : Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gondangwetan dan Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan

Secara administratif, Kota Pasuruan terbagi menjadi empat kecamatan: Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Bugul Kidul, dan Kecamatan Panggungrejo sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2021–2041. Berikut merupakan tabel luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan di masing-masing kecamatan di Kota Pasuruan:

Tabel 2. 1 Wilayah Administrasi Kota Pasuruan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (hektar)	Persentase Luas Wilayah (%)
1	Bugul Kidul	1.094	29,63%
2	Gadingrejo	881	23,86%
3	Purworejo	811	21,97%
4	Panggungrejo	905	24,51%
TOTAL		**3.691**	**100%**

Sumber: RTRW Kota Pasuruan Tahun 2021-2041

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Bugul Kidul dengan luas 1.492,06 Ha, sedangkan kecamatan yang tersempit yaitu Kecamatan Panggungrejo dengan luas 709,93 Ha.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kota Pasuruan terletak antara 112°45' - 112°55’ Bujur Timur dan 7°35' - 7°45’ Lintang Selatan dengan luas wilayah mencapai 3.900,07 hektar. Kota ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 meter di atas permukaan laut dan memiliki garis pantai sepanjang ± 4,5 km yang membentang dari barat ke timur.

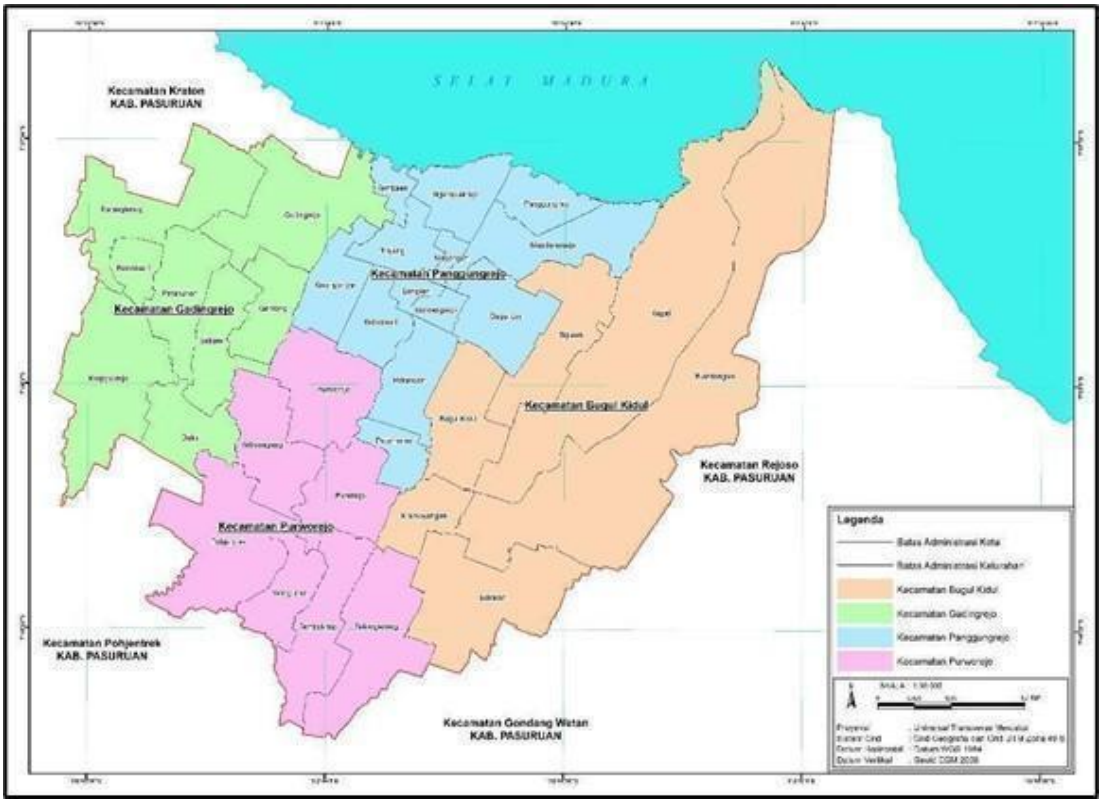

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Pasuruan

Sumber: RTRW Kota Pasuruan Tahun 2021-2041

3. Topografi

Topografi mengacu pada keadaan tinggi rendahnya permukaan bumi yang sangat penting untuk perencanaan penggunaan lahan yang tepat. Kondisi topografi berfungsi sebagai aspek penting dalam mempertimbangkan penggunaan lahan. Kota Pasuruan adalah daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 4 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Pasuruan memiliki tingkat kemiringan 0-3%, yang melandai dari selatan ke utara. Di bagian utara, terdapat daerah yang agak cekung sehingga membuat pembuangan air menjadi lambat.

4. Geologi

Proses pembentukan tanah di Kota Pasuruan dipengaruhi oleh sedimentasi yang disebabkan oleh 3 (tiga) sungai yang melintasi daerah tersebut, yaitu sungai Gembong, sungai Petung, dan sungai Welang. Tanah ini dikenal sebagai tanah aluvial yang terbentuk dari pengendapan aliran air permukaan. Aliran ini berasal dari daerah vulkanis intermedier Pegunungan Tengger di sebelah bukit lipatan dan batuan endapan berkapur di daerah Raci bagian barat dan Grati di bagian timur, membuat batuan bersifat intermedier hingga agak basis.

Tanah aluvial umumnya terbentuk di sekitar daerah garis pantai dan muara sungai. Tanah hasil sedimentasi ini banyak dimanfaatkan sebagai lahan tambak dan kawasan mangrove. Tanah ini bertekstur liat, sehingga ketika basah akan mengembang dan menjadi lekat, sedangkan saat kering akan menyusut dan membentuk celah keras. Tingginya kadar unsur Na dan Cl di bagian utara membuat tanah ini kurang cocok untuk budidaya tanaman pertanian, tetapi sangat ideal untuk budidaya tambak dan penggaraman. Tanaman utama pertanian di Kota Pasuruan adalah padi yang ditanam baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Budidaya tambak lebih banyak dikembangkan di sepanjang pantai bagian timur daripada di bagian barat.

5. Hidrologi

Wilayah Kota Pasuruan dilalui oleh 3 (tiga) sungai utama, yaitu Sungai Welang, Sungai Gembong, dan Sungai Petung. Sungai Gembong memiliki panjang 7,5 km dan hulunya berada di Kabupaten Pasuruan, membentang hingga perbatasan Kelurahan Mandaranrejo dengan Kelurahan Ngemplakrejo. Sedangkan Sungai Welang, dengan panjang 1 km, hulunya terletak di Kabupaten Malang dan mengalir melalui Kecamatan Kraton di Kabupaten Pasuruan. Adapun Sungai Petung memiliki panjang 6 km dengan hulu di Kabupaten Pasuruan, mengalir hingga perbatasan Kelurahan Kepel dengan Kelurahan Blandongan.

Ketiga sungai ini memiliki debit maksimum yang bervariasi dan seringkali mengalami masalah banjir karena aliran sungai yang sempit serta luas penampang sungai yang tidak memadai untuk menampung curah hujan tinggi. Kandungan sedimen yang terlarut dalam air di Sungai Gembong dan Welang pada saat banjir juga cukup

besar, sehingga memperburuk kondisi banjir. Hal ini menunjukkan perlunya penanganan dan pengelolaan sungai yang lebih baik untuk mengurangi risiko banjir di Kota Pasuruan.

Tabel 2. 2 Kondisi Sungai Di Kota Pasuruan

No	Sungai	Panjang (km)	Hulu	Hilir
1	Sungai Welang	1,00	Kab Malang	Kec. Kraton, Kab. Pasuruan
2	Sungai Gembong	7,50	Kab Pasuruan	Perbatasan Kelurahan Mandaranrejo dengan Kelurahan Ngemplakrejo
3	Sungai Petung	6,00	Kab Pasuruan	Perbatasan Kelurahan Kepel dengan Kelurahan Blandongan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, 2025

6. Klimatologi

Iklim suatu daerah memainkan peran penting dalam berbagai aktivitas usaha, terutama curah hujan yang sangat mempengaruhi kegiatan di bidang pertanian dan perikanan. Intensitas dan volume curah hujan sangat menentukan dan mempengaruhi jenis serta pola penggunaan lahan di suatu wilayah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kota Pasuruan memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tinggi rata-rata wilayah Kota Pasuruan yang hanya 4 meter di atas permukaan laut (mdpl) membuat kota ini rentan terhadap banjir di musim hujan. Kerawanan banjir disebabkan oleh kemiringan wilayah kota yang hanya 0-3%, dengan sebagian wilayah berupa cekungan. Kota Pasuruan memiliki iklim tropis basah yang mengenal 2 (dua) perubahan musim, yaitu musim kemarau (Mei-Oktober) dan musim hujan (November-April). Berdasarkan data dari BPS Kota Pasuruan dalam Angka Tahun 2025, suhu rata-rata di Kota Pasuruan berkisar antara 21,41°C hingga 23,51°C dengan kelembapan rata-rata mencapai 94,31% di bulan Februari dan menurun hingga 53,29% di bulan Juli. Kecepatan angin rata-rata berkisar antara 0,18 m/det hingga 7,2 m/det.

Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Desember dengan 864,50 mm/tahun dengan jumlah hari hujan pada bulan tersebut mencapai 31 hari. Sebaliknya, curah hujan terendah terjadi di bulan Mei dengan hanya 12,80 mm/tahun dan jumlah hari hujan hanya 3 hari. Rata-rata harian penyinaran matahari bervariasi, puncaknya di bulan Agustus dengan 6,1 jam dan terendah di bulan Desember dengan 0,9 jam. Iklim Kota Pasuruan termasuk dalam tipe D.2 (agak kering), meskipun masih memiliki pola musim yang jelas antara kemarau dan hujan. Faktor-faktor iklim ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan penggunaan lahan dan mitigasi risiko bencana, terutama banjir, untuk meningkatkan keberlanjutan aktivitas pertanian dan perikanan di wilayah ini.

Tabel 2. 3 Klimatologi Kota Pasuruan Tahun 2024

Bulan	Suhu Rata-rata (°C)	Kelembapan Rata-rata (%)	Kecepatan Angin Rata-rata (m/det)	Tekanan Udara (mbar)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	22,43	91	0,39	-	382,7	26	2,2
Februari	22,03	94,31	0,36	-	454	20	2,2
Maret	22,55	91,94	0,89	-	487,3	23	1,9
April	22,97	91,41	0,45	-	399,9	20	3,8
Mei	22,81	84,61	0,41	-	12,8	3	5,3
Juni	22,04	81,56	0,46	-	104,1	11	3,7
Juli	21,51	53,29	0,55	434,35	38	26	4,4
Agustus	21,41	82,78	0,82	999,06	213	31	6,1
September	22,6	77,1	0,47	999	63,8	30	5,2
Oktober	23,48	73,2	0,41	999	35,4	31	5
November	23,51	84,15	0,38	999	169,3	30	3,5
Desember	22,13	88,88	0,18	999	864,5	31	0,9

Sumber: BPS Kota Pasuruan Tahun 2025

7. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Pasuruan memiliki potensi wilayah yang beragam. Kawasan peruntukan pengembangan kota adalah wilayah yang ditetapkan untuk kegiatan pengembangan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Di Kota Pasuruan, kawasan ini mencakup badan jalan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, permukiman (termasuk perumahan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial seperti peribadatan, pendidikan, kesehatan, dan olahraga), ruang terbuka non hijau, tempat evakuasi bencana, infrastruktur perkotaan, perdagangan dan jasa, perkantoran, transportasi, serta pertahanan dan keamanan.

1. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian di Kota Pasuruan berupa kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, serta kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 397 ha.

a) Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan pertanian berupa tanaman pangan di Kota Pasuruan terletak pada Kecamatan Gadingrejo (Kelurahan Krapyakrejo dan Sebani), Kecamatan Purworejo (Kelurahan Karanganyar, Purworejo, Pohjentrek, Wirogunan, Tembokrejo, dan Sekargadung), Kecamatan Bugul Kidul (Kelurahan Bakalan, Blandongan dan Kepel), Kecamatan Panggungrejo (Kelurahan Petamanan). Selain itu juga terdapat Kawasan tanaman pangan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 27,52 ha yang terdapat di Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul.

b) Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kota Pasuruan berupa perkebunan mangga, kelapa, kapuk dan lain sebagainya. Kawasan perkebunan terletak di Kecamatan Panggungrejo Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Bugul Kidul Kelurahan Bugul Kidul dan Kecamatan Purworejo Kelurahan Pohjentrek dimana untuk pemanfaatan dilakukan dengan peningkatan produktivitas dan perlindungan kawasan.

2. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan yang terdapat di Kota Pasuruan berupa perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 yaitu 10.619,80 ton. Sedangkan perikanan budidaya juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun baik tambak maupun kolam. Kawasan perikanan di Kota Pasuruan memiliki luas kurang lebih 143 ha terdapat di Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul. Kawasan perikanan di Kota Pasuruan berupa kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya, penjelasannya dapat dilihat dibawah ini.

a) Kawasan Perikanan Tangkap

Kota Pasuruan dibatasi oleh Selat Madura. Dengan adanya Selat Madura, Kota Pasuruan memiliki potensi perikanan tangkap di wilayah utara. Kawasan perikanan tangkap, terdapat di Kelurahan Tamba'an, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Mandaranrejo dan Kelurahan Kepel.

b) Kawasan Perikanan Budidaya

Kawasan perikanan budidaya di Kota Pasuruan berupa tambak. Kawasan perikanan budidaya terdapat di Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul. Kota Pasuruan memiliki rencana pelabuhan perikanan yang terdapat di Kelurahan Ngemplakrejo.

3. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukkan industri di Kota Pasuruan memiliki luas kurang lebih 437 ha. Pengembangan industri dilakukan atas dasar trend yang sudah ada, aglomerasi pada kawasan yang sudah berkembang dan pengembangan kawasan peruntukkan industri baru. Untuk pengembangan industri baru menggunakan pendekatan

ketersediaan lahan, dengan pertimbangan dekat pada akses JLU, dekat pelabuhan, dan memungkinkan dikembangkan untuk dijadikan sebuah kawasan. Perkembangan industri di Kota Pasuruan tergolong cukup pesat terutama untuk home industri mebel yang terkonsentrasi di Kelurahan Bukir, Randusari, Krapyakrejo, Sebani, Petahunan dan Gentong. Untuk kawasan pergudangan banyak ditemukan di Kelurahan Gadingrejo, Karangketug dan Mandaranrejo. Rencana kawasan peruntukkan industri terdapat di:

a) Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul;
b) Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul;
c) Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul;
d) Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo;
e) Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo;
f) Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo;
g) Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo;
h) Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo;
i) Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo
j) Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo;
k) Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo;
l) Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo;
m) Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo;
n) Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo;
o) Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo;
p) Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo;
q) Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo;
r) Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo; dan
s) Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo.

4. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata berupa wisata buatan dengan luas kurang lebih 102 ha, terdapat di Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Pohjentrek Kecamatan

Purworejo dan Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo. Jenis objek wisata yang diusahakan dan dikembangkan di Kota Pasuruan terbagi menjadi wisata budaya, wisata buatan dan wisata alam, sebagai berikut:

a) Wisata Budaya meliputi :

- Makam Mbah Slagah terdapat di Kelurahan Pekuncen;
- Makam KH. Abdul Khamid terdapat di Kelurahan Bangilan;
- Makam dan Petilasan Untung Suropati terdapat di Kelurahan Pohjentrek;
- Pengembangan Wisata Kota Lama dan Kota Pusaka;
- Rumah Dinas Wakil Walikota di Jalan Balaikota;
- Gedung P3GI di Jalan Pahlawan;
- Rumah Mebel Quick di Jalan Balaikota;
- SDN Pekuncen di Jalan Pahlawan;
- SMPN 2 di Jalan Sukarno Hatta;
- Rumah Singa di Jalan Hasanudin;
- GPIB PNIEL di Jalan Cemara;
- Markas Kompi Bantuan Yon Zipur 10 di Jalan Balaikota;
- Masjid Agung Al-Anwar di Jalan Alun-alun; dan
- Rumah HT (Rumah Keluarga Han) di Jalan Sukarno Hatta.

b) Wisata Buatan

Wisata buatan di Kelurahan Bukir, Kelurahan Randusari, Kelurahan Krapyakrejo, Kelurahan Sebani, Kelurahan Petahunan, Kelurahan Gentong, Kelurahan Mayangan, Kelurahan Trajeng dan Kelurahan Karanganyar.

c) Wisata Alam

Wisata alam meliputi Wisata Mangrove di Kelurahan Blandongan, Kepel, Mandaranrejo, Panggungrejo, Ngemplakrejo, Tamba'an dan Gadingrejo.

d) Wisata Minat Khusus

- Objek wisata belanja dan edukasi industri mebel;
- Wisata belanja dan edukasi kerajinan logam di Kelurahan Mayangan, Ngemplakrejo, Mandaranrejo, Trajeng dan Sekargadung;
- Objek wisata belanja dan rekreasi di seluruh Kecamatan Kota;

- Wisata belanja pusat Kota;
- Wisata petik mangga di Kelurahan Pohjentrek;
- Pengembangan wisata kampung tematik: Kampung bandeng jelak, Kampung Mebel Bukir, Taman tematik krampyangan;
- Pengembangan pusat kuliner di pusat kota; dan
- Pengembangan Wisata Religi: Payung Madinah.

5. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kota Pasuruan berupa kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan sumber daya air, kawasan ruang terbuka non hijau, tempat evakuasi bencana, kawasan transportasi dan kawasan infrastruktur perkotaan dengan luas kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar.

A. Kawasan Perumahan

B. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kota Pasuruan terdiri dari kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan olahraga dan kawasan peribadatan.

6. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa di Kota Pasuruan cenderung berkembang di sepanjang jalan utama Kota Pasuruan. Seiring dengan perkembangan Kota Pasuruan maka perkembangan perdagangan dan jasa juga akan meningkat. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yaitu diarahkan untuk menyebar. Kawasan perdagangan dan jasa, terdiri atas:

a) Pasar tradisional meliputi:
   1. Pasar Gadingrejo;
   2. Pasar Kebonagung;
   3. Pasar Karangketug; dan
   4. Pasar Besar Pasuruan;

b) Pasar Khusus meliputi:
   1. Pasar mebel bukir;
   2. Pasar loak; dan
   3. Pasar hobi.

c) Pusat Perbelanjaan, meliputi:
   1. Revitalisasi Pasar Poncol di Kelurahan Kebonsari sebagai perdagangan jasa skala kota;
   2. Perdagangan skala regional dan kota di koridor Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Wachid Hasyim; dan
   3. Perdagangan skala BWP dan lingkungan di Jalan Panglima Sudirman, Jalan Veteran, Jalan Diponegoro, Jalan Hasanuddin, Jalan Kartini, Jalan KH. Abdul Hamid, Jalan Gajah Mada, Jalan Wahidin Selatan dan Jalan Untung Suropati.

d) Toko modern di seluruh kota; dan

e) Toko dan warung di Seluruh Kota Pasuruan.

7. Kawasan Perkantoran

Perkembangan kawasan perkantoran di Kota Pasuruan saat ini cenderung menyebar. Kawasan perkantoran yang terdapat di Kota Pasuruan meliputi Kantor Kecamatan Gadingrejo, Kantor Kecamatan Panggungrejo, Kantor Kecamatan Bugul Kidul, Kantor Kecamatan Purworejo, Kantor Walikota Pasuruan, Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kantor Kementerian Agama, DPRD Kota Pasuruan, Samsat, Dinas Pariwisata, Bappelitbangda, kantor kelurahan yang tersebar di seluruh Kota Pasuruan, dan lain sebagainya.

8. Tempat Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan di Kota Pasuruan berupa Yonzipur, Kodim, Koramil, Polres dan polsek. Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar terdiri atas:

a) Batalyon Zeni Tempur (Yon Zipur) 10/JP/2 KOSTRAD

b) Komando Distrik Militer (Kodim) 0819 Kota Pasuruan di Jalan Veteran Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo;

c) Kepolisian Resor (Polres) Kota Pasuruan di Jalan Gajahmada Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo;

d) Lembaga Permasyarakatan di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo, Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul;

e) Subdenpom V/3-4 Kota Pasuruan di Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo;

f) Komando Rayon Militer (Koramil) 0819/1 Kota meliputi wilayah teritorial Kecamatan Purworejo dan Bugul Kidul;

g) Komando Rayon Militer (Koramil) 0819/25 Gadingrejo meliputi wilayah teritorial Kecamatan Gadingrejo dan Panggungrejo; dan

h) Kepolisian Sektor (Polsek) Purworejo meliputi wilayah hukum Kecamatan Purworejo, Kepolisian Sektor (Polsek) Polsek Bugul Kidul meliputi wilayah hukum Kecamatan Bugul Kidul dan Kecamatan Panggungrejo serta Kepolisian Sektor (Polsek) Gadingrejo meliputi wilayah hukum Kecamatan Gadingrejo.

9. Kawasan Transportasi

Kawasan Transportasi di Kota Pasuruan berupa Terminal Tipe B Untung Suropati, Terminal Tipe C di Kelurahan Karangketug dan Kelurahan Kebonagung, dan stasiun di Kelurahan Trajeng. Pengembangan pelabuhan di Kelurahan Panggungrejo dan Kelurahan Ngemplakrejo, pengembangan terminal barang di Kelurahan Panggungrejo didasarkan pada pengembangan jalan lingkar utara (JLU) dan keberadaan rencana kawasan peruntukkan industri. Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar terdapat di:

a) Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo;

b) Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo;

c) Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo;

d) Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo;

e) Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo;

f) Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo; dan

g) Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo.

10. Kawasan Infrastruktur Perkotaan

Kawasan infrastruktur perkotaan berupa TPA, terminal penumpang, terminal barang dan parkir wisata terletak di:

a) Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul;

b) Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo;

11. Kawasan Industri Logam

Kawasan industri logam menghasilkan produk-produk meliputi suku cadang kendaraan bermotor (roda dua dan roda empat), aksesoris kendaraan, peralatan mesin pabrik, spare part alat perkebunan, ornamen makan, lencana logam, hingga berbagai engsel untuk mebel dan kebutuhan rumah tangga. Adapun kawasan industri logam berlokasi di Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo. Meskipun sempat mengalami penurunan akibat persaingan dengan produk impor, Pemerintah Kota Pasuruan saat ini memiliki fokus untuk mengembangkan kembali kawasan industri logam di Ngemplakrejo.

8. Potensi Sumber Daya Alam Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Kondisi Ketahanan Pangan

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobot an, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (kelurahan) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (kelurahan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (kelurahan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (kelurahan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 34 kelurahan yang ada di Kota Pasuruan maka didapatkan bahwa 0 kelurahan pada Prioritas 1 dan 2. Sedangkan kelurahan Prioritas 3 sebanyak 3 kelurahan (Kelurahan Bukir, Kelurahan Gadingrejo dan

Kelurahan Bakalan). Kelurahan Prioritas 4 sebanyak 21 kelurahan (Kelurahan Karangketug, Kelurahan Gentong, Kelurahan Sebani, Kelurahan Petahunan, Kelurahan Krapyakrejo, Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Blandongan, Kelurahan Kepel, Kelurahan Tapaan, Kelurahan Krampyangan, Kelurahan Bugul Kidul, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Trajeng, Kelurahan 27 Laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2024 Laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2024 28 Kebonsari, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Petamanan, Kelurahan Bugul Lor, Kelurahan Kandangsapi, Kelurahan Panggungrejo dan Kelurahan Mandaranrejo). Kelurahan Prioritas 5 sebanyak 9 kelurahan (Kelurahan Randusari, Kelurahan Tembokrejo, Kelurahan Purutrejo, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Sekargadung, Kelurahan Tambaan, Kelurahan Bangilan dan Kelurahan Mayangan). Kelurahan Prioritas 6 sebanyak 1 kelurahan (Kelurahan Pekuncen).

Tabel 2. 4 Persentase Daerah Rawan Pangan Kota Pasuruan Yang Tertangani

No	Tahun	Daerah Rawan Pangan (Kelurahan)		Daerah Penanganan Rawan Pangan (Kelurahan)		Persentase Daerah Rawan Pangan Yang Tertangani (%)
		Jumlah	Lokasi	Jumlah	Lokasi	
1	2021	10	Kel. Bakalan, Kel. Kepel, Kel.Blandongan, Kel. Gadingrejo, Kel. Pohjentrek, Kel. Tapaan, Kel. Petamanan, Kel. Karanganyar, Kel. Trajeng, dan Kel. Ngemplakrejo	0	-	0%
2	2022	13	Kel. Gadingrejo, Kel. Bakalan, Kel.Blandongan, Kel. Panggungrejo, Kel. Krapyakrejo, Kel.Bukir, Kel. Pohjentrek, Kel. Kepel, Kel. Petamanan, Kel. Bugul Lor, Kel. Trajeng, Kel. Mandaranrejo, dan Kel. Ngemplakrejo	34	Seluruh Kelurahan di Kota Pasuruan	262%
3	2023	3	Kel. Bukir, Kel. Gadingrejo dan Kel. Bakalan	34	Seluruh Kelurahan di Kota Pasuruan	1133%
4	2024	3	Kel. Bukir, Kel. Gadingrejo dan Kel. Bakalan	3	Kel. Bukir, Kel. Gadingrejo dan Kel. Bakalan	100%

Sumber: FSVA Kota Pasuruan Tahun 2024

2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Kota Pasuruan telah menunjukkan progres yang dinamis dan fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana tercermin dari berbagai indikator pembangunan

utama. Kinerja pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi dapat dilihat dari tren data Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Indeks Inovasi Daerah, serta capaian di sektor pengelolaan lingkungan seperti sanitasi dan sampah. Seluruh data ini secara kolektif menggambarkan perjalanan Kota Pasuruan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sekaligus menyoroti area-area yang telah berhasil dioptimalkan dan tantangan yang masih perlu diatasi.

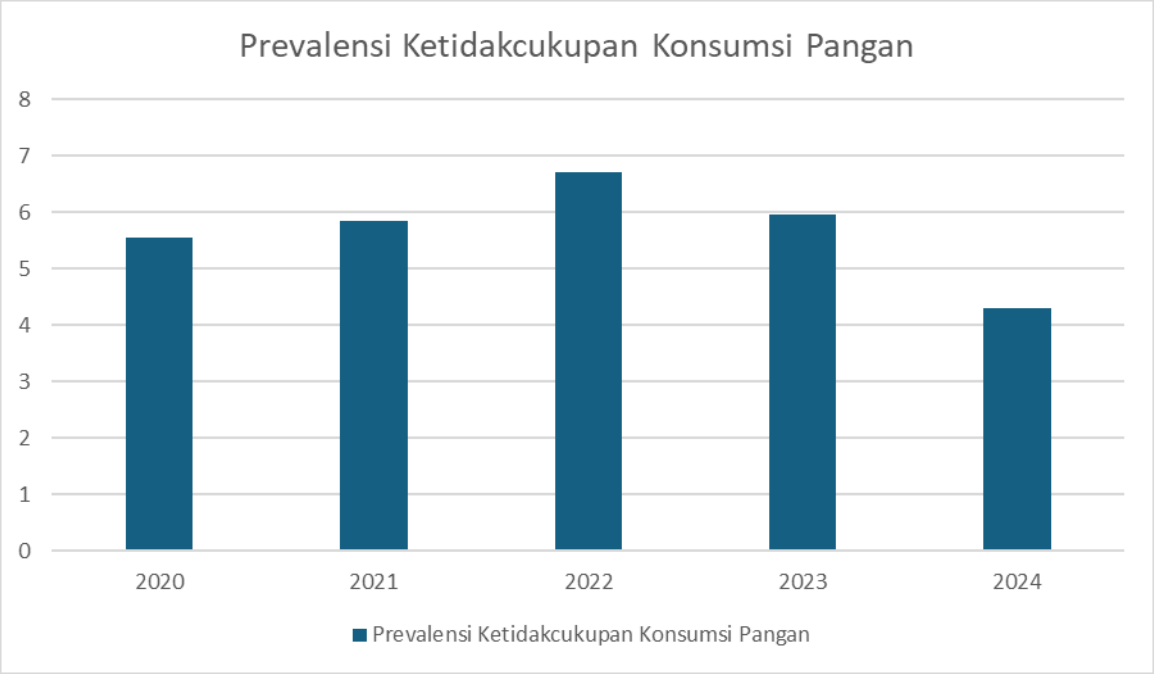

Gambar 2. 2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2020 - 2024
Sumber: Dinas Pertanian Kota Pasuruan, 2025

Berdasarkan data grafik mengenai Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kota Pasuruan dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya pola fluktuatif yang menarik untuk dianalisis. Pada awal periode, tepatnya tahun 2020, prevalensi tercatat sekitar 5.5%. Angka ini kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun berikutnya, 2021, mencapai hampir 6%. Peningkatan ini berlanjut hingga puncaknya di tahun 2022, di mana prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan melonjak tajam hingga mencapai angka sekitar 6.7%, menjadi angka tertinggi sepanjang periode yang diamati. Peningkatan signifikan ini bisa menjadi indikasi adanya tantangan baru atau kondisi ekonomi yang memengaruhi akses masyarakat terhadap pangan.

Namun, tren tersebut tidak berlangsung lama. Pada tahun 2023, prevalensi mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan, kembali ke level yang hampir sama dengan

tahun 2021, yaitu sekitar 6%. Penurunan yang paling signifikan dan menggembirakan terjadi pada tahun 2024, di mana angka prevalensi turun drastis ke titik terendah selama lima tahun terakhir, yaitu sekitar 4.3%. Penurunan tajam ini menunjukkan bahwa ada perubahan positif yang berhasil dilakukan, baik melalui kebijakan pemerintah, program sosial, atau peningkatan kondisi ekonomi masyarakat yang secara langsung berdampak pada ketersediaan dan akses pangan.

2.1.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Pasuruan merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Dalam perencanaan pembangunan, pertimbangan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi acuan penting untuk mengetahui batas maksimal kapasitas lingkungan dalam pemanfaatan ruang serta untuk mengurangi potensi kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengevaluasi kapasitas lingkungan alam dan sumber daya dalam mendukung kegiatan manusia atau penduduk yang memanfaatkan ruang untuk kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas ini di suatu tempat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik sumber daya yang terdapat di wilayah tersebut. Adapun 3 sumber daya yang digunakan dalam daya dukung ini yakni:

1. **Daya Dukung Lingkungan**
   a) **Daya Dukung Air**

      Daya dukung air adalah kemampuan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan meninjau jumlah ketersediaan air yang ada. Untuk mengetahui status daya dukung daya tampung air di Kota Pasuruan dapat dilihat dari selisih antara kebutuhan dan ketersediaan air. Selisih ketersediaan dan kebutuhan air tiap grid untuk menentukan status D3T penyedia air. Kondisi status Daya Dukung dan Daya Tampung Air belum terlampaui merupakan kondisi dimana kebutuhan lebih rendah dibandingkan ketersediaan airnya. Kondisi ini ditandai dengan hasil perbandingan nilai kebutuhan air yang lebih rendah daripada air yang tersedia, begitupun

sebaliknya. Berikut data profil daya dukung daya tampung air di Kota Pasuruan berdasarkan hasil analisa.

Tabel 2. 5 Status Daya Dukung Air Kota Pasuruan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa) (Grid Sistem 150x150)	Ketersediaan Air Grid Total (M^3/Tahun)	Kebutuhan Air Grid Total (M^3/Tahun)	Status
1	Bugul Kidul	31.557	31.557	8.653.048,96	2.482,13	Belum Terlampaui
2	Gadingrejo	44.263	44.263	7.829.330,36	1.865,61	Belum Terlampaui
3	Panggungrejo	63.993	63.993	6.277.037,97	600,72	Belum Terlampaui
4	Purworejo	56.389	56.389	7.574.434,62	836,91	Belum Terlampaui

Sumber: D3TLH Kota Pasuruan Tahun 2023

Nilai status daya dukung air di Kota Pasuruan masih berada di bawah ambang batas, sehingga dikategorikan sebagai surplus air. Ini berarti ketersediaan air di Kota Pasuruan sudah mencukupi untuk kebutuhan domestik dan kegiatan ekonomi berbasis lahan berdasarkan parameter yang diukur, meskipun sumber air yang diwakili oleh grid tersebut berada di luar Kota Pasuruan. Sebaran luas wilayah dengan status daya dukung dan daya tampung air, baik yang melebihi maupun yang belum melebihi ambang batas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Status Daya Dukung Daya Tampung Air Ambang Batas Kota Pasuruan Tahun 2023

No	Kecamatan	Belum Melebihi Ambang Batas	Prosentase (%)	Melebihi Ambang Batas	Total
1	Bugul Kidul	1492.06	100	0	1492.06
2	Gadingrejo	867.14	100	0	867.14
3	Panggungrejo	709.93	100	0	709.93
4	Purworejo	830.94	100	0	830.94
Total		3,900.07	100	0	3,900.07

Sumber: D3TLH Kota Pasuruan Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis perhitungan status daya dukung air, diketahui bahwa seluruh wilayah Kota Pasuruan, sebesar 3.900,07 hektar atau 100%, masih berada dalam status belum terlampaui atau surplus, sementara wilayah yang melebihi ambang batas adalah 0 hektar atau 0%. Kedepannya, diperlukan upaya pengelolaan dan pengendalian sumber daya air agar ketersediaannya tetap dalam status surplus, mengingat jumlah penduduk yang terus meningkat sementara sumber pasokan air mengalami penurunan.

b) Daya Dukung Pangan

Analisis daya dukung pangan dilakukan dengan membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan, khususnya kebutuhan padi atau beras. Perhitungan daya dukung pangan didasarkan pada pendapat ahli seperti yang disampaikan oleh Fuad et al., dalam makalah Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI: 255–266. Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan pangan dilakukan berdasarkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun yang direncanakan. Dalam penyusunan KLHS RPJP Kota Pasuruan, terdapat tiga tahapan utama dalam perhitungan daya dukung pangan, yaitu perhitungan ketersediaan (*supply*), perhitungan kebutuhan (*demand*), dan penentuan status daya dukung pangan. Hasil perhitungan mengenai daya dukung pangan di Kota Pasuruan untuk tahun 2023 dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Status Daya Dukung Daya Tampung Bahan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk BPS (Jiwa)	Jumlah Penduduk Sistem Grid (Jiwa) (150 X 150M)	Jumlah Kebutuhan Bahan Pangan (kg/th)	Jumlah Ketersediaan Bahan Pangan (kg/th)	Status
1	Bugul Kidul	31.557	31.557	2.188.477,95	470.000,00	Belum Terpenuhi
2	Gadingrejo	44.263	44.263	3.069.639,05	368.000,00	Belum Terpenuhi
3	Panggungrejo	63.993	63.993	4.437.914,55	131.000,00	Belum Terpenuhi
4	Purworejo	56.389	56.389	3.910.577,15	367.000,00	Belum Terpenuhi
Total		196.202	196.202	13.606.608,70	1.336.000,00	Belum Terpenuhi

Sumber: D3TLH Kota Pasuruan Tahun 2023

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas, kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan di Kota Pasuruan masih belum terpenuhi secara memadai, sehingga memerlukan pemasukan bahan pangan dari wilayah sekitarnya. Hal ini terlihat dari perbandingan antara jumlah ketersediaan bahan pangan yang hanya mencapai 1.336.000,00 kg per tahun, sementara kebutuhan bahan pangan mencapai 13.606.608,70 kg per tahun. Ketidakseimbangan ini sangat terlihat pada kecamatan dengan kebutuhan tertinggi, seperti Kecamatan Panggungrejo

yang membutuhkan 4.437.914,55 kg per tahun, namun hanya memiliki ketersediaan bahan pangan sebesar 131.000,00 kg per tahun. Situasi ini memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan sumber daya pangan di Kota Pasuruan untuk menjaga kestabilan bahan pangan yang tersedia dan memenuhi kebutuhan wilayah sekitar.

Status daya dukung dan daya tampung pangan di Kota Pasuruan terbagi menjadi dua kategori: belum terpenuhi dan terpenuhi. Status terpenuhi dikategorikan sebagai surplus pangan, sementara status belum terpenuhi menunjukkan adanya defisit pangan. Dengan kata lain, beberapa wilayah di Kota Pasuruan mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya sendiri, sementara wilayah lain memerlukan pasokan dari luar. Sebaran luas wilayah yang berada dalam status belum melebihi ambang batas kebutuhan pangan dan yang melebihi ambang batas kebutuhan pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 8 Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Bahan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2023 Berdasarkan Ambang Batas

No	Kecamatan	Belum Melebihi Ambang Batas Kebutuhan Pangan (Ha)	Prosentase (%)	Melebihi Ambang Batas Kebutuhan Pangan (Ha)	Prosentase (%)	Total
1	Bugul Kidul	669	45	824	55	1.493
2	Gadingrejo	45	5	822	95	867
3	Panggungrejo	208	29	502	71	710
4	Purworejo	73	9	758	91	831
Total		995	26	2.906	74	3.901

Sumber: D3TLH Kota Pasuruan Tahun 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 26% atau 995 hektar dari luas wilayah Kota Pasuruan berada dalam status belum melebihi ambang batas kebutuhan pangan. Persentase tertinggi wilayah yang belum melebihi ambang batas kebutuhan pangan terdapat di Kecamatan Bugul Kidul, yaitu sebesar 45% atau 669 hektar, sedangkan persentase terendah berada di Kecamatan Gadingrejo dengan 5% atau 45 hektar. Sementara itu, wilayah yang berada dalam status melebihi ambang batas kebutuhan pangan mencapai 74% atau 2.906 hektar.

Tabel 2. 8 Proyeksi Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Bahan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2029

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2029	Produksi atau Ketersediaan Beras (ton)	Kebutuhan Beras (ton/tahun)	Total Selisih Ketersediaan Dengan Kebutuhan Beras ton/tahun)	Nilai D3T Pangan	Status D3T Pangan
1	Bugul Kidul	56.067	4.243.110,77	4.554.342,14	-311.231,36	0,93	Defisit
2	Gadingrejo	66.985	2.018.198,35	5.441.180,93	-3.422.982,57	0,37	Defisit
3	Panggungrejo	35.845	296.751,36	2.911.694,99	-2.614.943,63	0,10	Defisit
4	Purworejo	71.290	1.284.683,51	5.790.860,69	-4.506.177,17	0,22	Defisit
Total		**230.187**	**7.842.744,00**	**18.698.078,74**	**-10.855.334,74**	**0,42**	**Defisit**

Sumber: D3TLH Kota Pasuruan Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kota Pasuruan pada tahun 2029 telah terlampaui atau defisit. Dengan nilai D3T Pangan Kota Pasuruan tahun 2029 yang sebesar 0,42 menunjukkan bahwa status D3T pangan di Kota Pasuruan adalah Defisit atau tidak mampu melaksanakan swasembada pangan. Diketahui bahwa Kecamatan Bugul Kidul di tahun 2023 yang masih bisa melakukan swasembada pangan, akan tetapi di tahun 2029 D3T pangan di Kecamatan Bugul Kidul diproyeksikan dengan nilai 0,93 atau tidak swasembada pangan. Bila dibandingkan nilai SA atau Ketersediaan Beras lebih kecil dibandingkan dengan Kebutuhan besar (SA<DA), sehingga Status D3T Pangan dinyatakan defisit/terlampaui dengan selisih kebutuhan dan ketersediaan pangan sebesar -10.855.334,74 ton/tahun. Dapat disimpulkan bahwa ketersediaan beras Kota Pasuruan sudah tidak mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Kota Pasuruan.

2. Daya Tampung Lingkungan

a) Kualitas Air

Air memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air bersih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan salah satu sumber utama air bersih adalah air sungai. Air sungai sering digunakan karena merupakan air permukaan yang lebih mudah diakses tanpa perlu penggalian atau pengeboran tanah. Namun, air sungai yang berpotensi tinggi ini juga dapat menjadi sumber penyakit bagi manusia jika tercemar atau kualitasnya tidak memenuhi standar baku mutu. Oleh karena itu, penting

untuk melakukan pengujian kualitas air bersih yang dikonsumsi oleh penduduk.

Berdasarkan hasil analisis terhadap tiap parameter pengujian air sungai, kondisi DAS di wilayah Kota Pasuruan secara umum telah memenuhi baku mutu untuk parameter pH, DO, BOD, COD, TSS, dan Nitrat. Namun, analisis juga menunjukkan bahwa seluruh DAS di Kota Pasuruan telah melampaui baku mutu untuk parameter fosfat dan fecal coli. Status mutu air di berbagai DAS di Kota Pasuruan bervariasi, dengan beberapa DAS seperti Kedunglarangan dan Sumber Umbulan yang memenuhi baku mutu di bagian hulu, namun umumnya menunjukkan status ringan di bagian tengah dan hilir. Data lengkap mengenai status mutu air di DAS Kota Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut, yang mencakup nama DAS dan status mutu wilayah sungai di hulu, tengah, dan hilir serta status mutu keseluruhan DAS.

Tabel 2. 9 Status Mutu Air Pada Daerah Aliran Sungai Di Kota Pasuruan Berdasarkan Nilai Indeks Pencemaran (IP) Tahun 2024

No	Nama DAS	Status Mutu DAS
1	Gembong	Ringan
2	Kambeng	Ringan
3	Kedunglarangan	Ringan
4	Laweyan	Ringan
5	Masangan	Ringan
6	Petung	Ringan
7	Raci	Ringan
8	Rejoso	Ringan
9	Welang	Ringan
10	Sumber Umbulan	Ringan

Sumber: D3TLH Kota Pasuruan Tahun 2025

b) Kualitas Udara

Kualitas udara di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai aktivitas, terutama dari sektor industri dan transportasi yang menghasilkan emisi gas yang mempengaruhi udara ambien. Pencemaran udara biasanya terjadi akibat kegiatan transportasi, industri, rumah tangga atau pemukiman, dan pengelolaan sampah. Pengukuran kualitas udara dilakukan dengan beberapa parameter kunci yang berkontribusi terhadap pencemaran udara dan mampu menggambarkan kondisi kualitas udara di wilayah Kota Pasuruan. Parameter

yang diukur meliputi temperatur, kelembaban, arah angin dominan, kecepatan angin rata-rata, dan keadaan cuaca.

Tabel 2. 10 Perbandingan Hasil Pengukuran Kualitas Udara Kota Pasuruan Tahun 2024

Kategori Lokasi Pemanfaatan	SO_2		NO_2	
	2023	2024	2023	2024
Transportasi	8,82	7,88	21,11	12,2
Industri	8,83	10,19	13,39	5,69
Perumahan	8,97	7,49	16,13	5,69
Perkantoran	8,2	8,98	14,82	10,01

Sumber: D3TLH Kota Pasuruan Tahun 2025

Dari data tersebut, terlihat adanya kecenderungan peningkatan konsentrasi SO_2 dan NO_2 di wilayah dengan aktivitas transportasi yang padat, kawasan industri, dan daerah perkantoran. Sebaliknya, konsentrasi kedua bahan pencemar tersebut mengalami penurunan di kawasan perumahan. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kualitas udara dipengaruhi oleh perubahan aktivitas masyarakat, dari yang sebelumnya dibatasi selama pandemi menjadi kembali normal. Perbandingan hasil pengukuran kualitas udara di empat kategori lokasi pemantauan pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan peningkatan terbesar dalam konsentrasi SO2 dan NO2 terjadi di kawasan industri dan transportasi padat. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan pencemaran udara ambient di wilayah Kota Pasuruan lebih banyak disebabkan oleh aktivitas kendaraan bermotor daripada emisi dari kegiatan industri.

c) Pengelolaan Persampahan

Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah Kota Pasuruan berlokasi di Kelurahan Blandongan dengan luas 7,19 ha. Sistem pengelolaan sampahnya menggunakan *landfill controlled*, dengan kapasitas penampungan sampah 274 m3/hari. Berdasarkan proyeksi produksi sampah dan kapasitas pengelolaan sampah, diperkirakan TPA Blandongan masih bisa digunakan sampai dengan 10 tahun ke depan. Hal tersebut berdasarkan kondisi total sampah yang dihasilkan di Kota Pasuruan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan, dari total sampah yang dihasilkan pada tahun 2023 sebesar 162.000 m3, sebanyak 97.200 m3 merupakan sampah

anorganik dan sisanya adalah sampah organik. Peningkatan jumlah timbulan sampah selama 5 tahun terakhir juga diiringi dengan peningkatan kinerja pengelolaan sampah. Selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cakupan pengelolaan sampah mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 seluruh timbulan sampah yang ada di Kota Pasuruan telah terkelola dengan baik.

Limbah cair domestik merupakan buangan dari kegiatan domestik manusia, yang terdiri dari dua jenis: *grey water* yang berasal dari dapur, kegiatan mencuci pakaian, dan kamar mandi, serta black water yang berasal dari WC. Pencemaran air limbah domestik dapat terjadi di air permukaan/sungai dan air tanah. Karakteristik limbah cair domestik adalah tingginya kandungan bahan organik (karbohidrat, protein, dan lemak), deterjen, dan partikel bahan anorganik lainnya.

d) Sanitasi Masyarakat

Sanitasi lingkungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan termasuk sanitasi pembuangan kotoran manusia. Menurut data capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Pasuruan, persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai mengalami tren peningkatan. Tahun 2018, persentase rumah tangga yang yang terlayani sistem air limbah yang memadai sebesar 84,94% dan terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 88,61%. Sebanyak 11,39% rumah tangga belum terlayani sistem air limbah yang memadai. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Pasuruan (2024), jumlah pengguna jamban sehat permanen mencapai 49.935 KK, jamban sehat semi permanen 0 KK, dan jamban sharing atau komunal (bersama) 4339 KK. Dengan demikian, pencapaian masyarakat Kota Pasuruan dalam pemenuhan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) non BABS (Buang Air Besar Sembarangan) mencapai 54.274 KK atau sebesar 100%.

Dalam menunjang pengolahan limbah domestik, Kota Pasuruan difasilitasi IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) berjumlah 1 unit dengan kapasitas 50 m3/hari yang berlokasi di Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul.

Berdasarkan data Strategis Sanitasi Kota Pasuruan Tahun 2022-2027 (SSK), persentase rumah tangga yang menggunakan tangki septik individual dan komunal aman (yang pernah disedot dan dibuang ke IPLT) baru sekitar 3,1%.

2.1.1.3. Lingkungan Hidup Berkualitas

A. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Kondisi akses sanitasi aman di Kota Pasuruan menunjukkan variasi antar wilayah dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-ekonomi, kepadatan penduduk, infrastruktur yang tersedia, serta tingkat kesadaran dan perilaku masyarakat. Wilayah dengan tingkat ekonomi yang lebih baik dan perencanaan tata ruang yang terstruktur cenderung memiliki cakupan akses sanitasi aman yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah padat penduduk atau kawasan dengan kondisi ekonomi marginal.

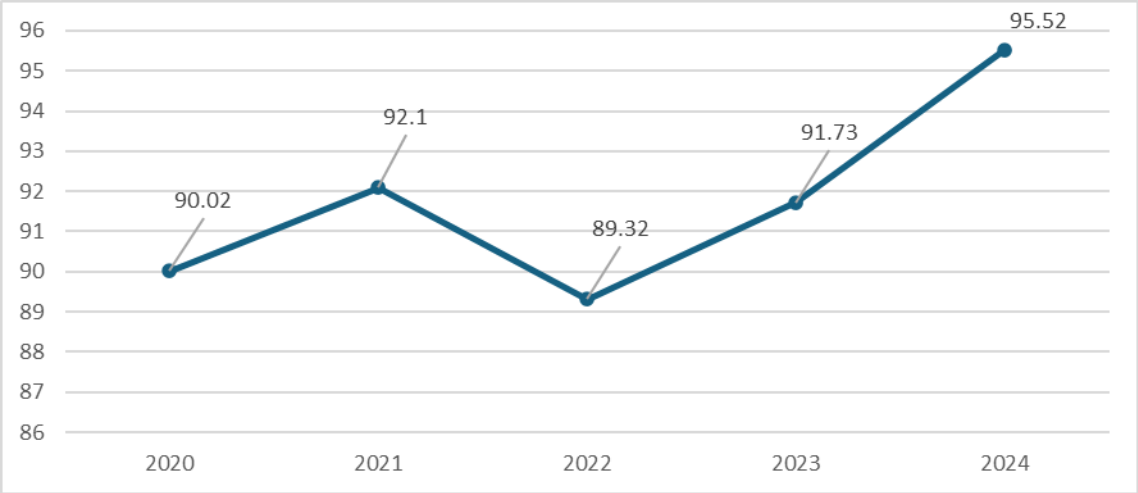

Gambar 2. 3 Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Tahun 2020 - 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025

Berdasarkan grafik yang diberikan, persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman di Kota Pasuruan menunjukkan perubahan yang fluktuatif, tetapi akhirnya mencapai hasil yang sangat baik dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, angkanya dimulai dengan 90,02%, lalu meningkat menjadi 92,1% di tahun 2021, namun mengalami penurunan kecil hingga 89,32% di tahun 2022. Perubahan ini menunjukkan adanya perbedaan dalam proses penerapan program sanitasi di wilayah tersebut.

Namun, pada dua tahun terakhir, hasil sanitasi Kota Pasuruan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Angka kembali naik menjadi 91,73% di tahun 2023, dan mencapai titik tertingginya di tahun 2024 dengan capaian 95,52%. Kemajuan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memastikan semua rumah

tangga memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman, yang merupakan indikator penting dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat. Pada tahun 2024 rumah tangga di Kota Pasuruan telah 100% memiliki akses terhadap sanitasi layak dan telah melaksanakan deklarasi Open Defecation Free (ODF) pada tanggal 11 Juli 2024.

Berbagai upaya telah dilakukan salah satunya dengan bermitra bersama USAID melalui program IUWASH Tangguh untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi aman. Namun terdapat tantangan yaitu akses yang telh mencapai 100% harus diikuti dengan pembangunan sarana sanitasi individual agar perubahan perilaku dapat bertahan dan berkelanjutan.

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dengan:

Bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau

Tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) Adapun metode perhitungannya sebagai berikut:

$$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} x100\%$$

PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman

JRTST = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T

JRTIPLT= Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)

JRTS = jumlah rumah tangga seluruhnya

Catatan : Perhitungan exercise Provinsi menggunakan data presentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman yang dirilis oleh BPS

B. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Di Kota Pasuruan, timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah hanya berada di satu lokasi yaitu di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Blandongan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan, jumlah timbulan sampah selama tahun 2021 mencapai 135,21 m3/hari atau 49.351,65 m3 /tahun, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 4.213,54 m3 /hari atau 153,859 m3 /tahun. Beberapa pengolahan sampah yang dilakukan di Kota Pasuruan diantaranya seperti *komposting* dan daur ulang melalui TPS3R dan pengadaan bank sampah untuk meningkatkan nilai tambah dari sampah yang masih bisa diolah. Kegiatan tersebut mampu mereduksi sampah yang masuk ke TPA hingga 20,71%. Berikut adalah data pengelolaan sampah di Kota Pasuruan pada tahun 2020-2024

Tabel 2. 11 Data Pengolahan Sampah Di Kota Pasuruan Tahun 2020-2024

Keterangan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Sampah yang Terolah di TPA (Persentase penanganan sampah)	%	67,74	72,38	73,43	72,07	67,44
Persentase Sampah Terkelola	%	94,33	98,7	98,04	96,24	88,15
Persentase Pengurangan / Reduksi Sampah	%	27,23	26,32	24,61	24,17	20,71
Cakupan Pengelolaan Sampah	%	93,88	98,7	98,04	97,64	100

Sumber: DLHK Kota Pasuruan Tahun 2025

Dari data tersebut, pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan berbagai upaya diantaranya memanfaatkan hasil residu pengolahan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Residu hasil pengolahan sampah memiliki karakteristik yang beragam tergantung jenis sampah yang masuk dan teknologi pengolahan yang digunakan. Hal ini menjadi tantangan pada standarisasi proses pemanfaatan atau pembuangan akhir.

Capaian persentase sampah yang terkelola menunjukkan tren positif di awal periode. Angkanya meningkat dari 94,33% pada tahun 2020 menjadi 98,7% pada tahun 2021. Kenaikan ini menunjukkan adanya program pengelolaan sampah yang efektif, baik dalam pengangkutan maupun pengolahan, yang didukung oleh komitmen pemerintah daerah. Puncaknya, cakupan pengelolaan sampah mencapai 100% pada tahun 2024. Hal ini berarti tidak ada lagi sampah yang tidak terlayani oleh sistem pengelolaan, menunjukkan keberhasilan dalam memperluas layanan dan infrastruktur.

Namun, ada beberapa hal yang menghambat. Salah satunya adalah penurunan konsisten dalam persentase pengurangan sampah. Angkanya turun dari 27,23% pada tahun 2020 menjadi 20,71% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya

pengurangan sampah dari sumber, seperti program daur ulang atau bank sampah, belum berjalan dengan baik. Penurunan ini memberi beban yang lebih berat pada sistem pengolahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, meskipun cakupan pengelolaan mencapai 100%, persentase sampah yang berhasil diolah justru menurun drastis menjadi 88,15% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah yang dikumpulkan tidak diolah dengan baik. Meskipun cakupan layanan pengumpulan sampah sudah mencapai 100%, efektivitas penanganan dan pengolahan di hilir masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih kuat untuk meningkatkan program pengurangan sampah di tingkat sumber dan memperbaiki kapasitas serta teknologi pengolahan di hilir agar semua sampah dapat dikelola secara efektif.

Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari *waste recovery* sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (*recovery*) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan daur ulang adalah pengolahan sampah anorganik high value untuk dikembalikan ke siklus manufaktur, pengemasan, dan/atau distribusi produk. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Material dan *energy recovery* adalah pengolahan sampah organik, anorganik low value, dan residu menjadi; (1) produk seperti; kompos, pakan, perkakas rumah,

material konstruksi, dsb. dan (2) energi dan/atau bahan bakar lainnya seperti; PLTSa, pirolisis, insinerasi, gasifikasi, *Refuse Derived Fuel* (RDF), dll. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), PLTSa, RDF Plant atau fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah, swasta dan/atau lembaga non pemerintah berbadan hukum (koperasi, KSM, dan lainnya).

Langkah-Langkah menghitung Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) adalah sebagai berikut:

ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah

ke-2: Menghitung Timbulan Sampah

ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah dengan Rumus:

$$\%SO = \frac{SO}{TS} x\ 100\%$$

Keterangan:

%SO: Tingkat Sampah Terolah (%)

SO: Sampah terolah (ton/hari)

TS: Timbulan Sampah (ton/hari)

C. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah didapatkan melalui data Pengelolaan sampah rumah tangga (PS RT) dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) milik Dinas Kesehatan Kota Pasuruan pada Buku Profil Kesehatan Kota Pasuruan. STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku *hygiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode 306 pemicuan. Program STBM memiliki indikator *outcome* yakni menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Dan untuk mencapai *outcome* tersebut diperkuat dengan landasan hukum Permenkes No. 3 tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat. STBM menekankan pada 5 pilar yakni : 1. Stop buang air sembarangan (SBS); 2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS); 3. Pengelolaan air minum-

makanan rumah tangga (PAMM RT); 4. Pengelolaan sampah rumah tangga (PS RT); 5. Pengelolaan limbah cair rumah tangga (PLC RT).

Pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Pasuruan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 sebanyak 18061 KK melakukan pengelolaan sampah rumah tangga atau sekitar 33,2% KK. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah KK menjadi 20.477 KK atau sebesar 37,7%. Keterangan lebih lanjut dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel 2. 12 Jumlah KK Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Pasuruan Tahun 2022-2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Kelurahan	Jumlah KK (Jiwa)	2022 KK Pengelolaan sampah RT (PSRT) (Jiwa)	%	2023 KK Pengelolaan Sampah RT (PSRT) (Jiwa)	%
1	Gadingrejo	Gadingrejo	4	6515	2372	64,4	1291	19,8
2	Gadingrejo	Karang Ketug	4	6401	1223	19,1	2250	35,2
3	Purworejo	Kebon Agung	3	7756	768	9,9	768	9,9
4	Purworejo	Sekargadung	4	7969	2057	25,8	4018	50,4
5	Bugul Kidul	Bugul Kidul	6	8286	2484	30	6033	72,8
6	Panggungrejo	Kandangsapi	6	6745	910	13,5	1026	15,2
7	Panggungrejo	Trajeng	4	5820	5818	100	638	11,0
8	Panggungrejo	Kebonsari	3	4849	2429	50,1	4453	91,8
Kota Pasuruan			**34**	**54341**	**18061**	**33.2**	**20477**	**37.7**

Sumber: Profil Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2022-2023

Dalam menangani pengurangan sampah, Pemerintah Kota Pasuruan mengembangkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang juga berkontribusi pada pengurangan beban sampah organik ke TPA. Namun, infrastruktur yang kurang memadai menjadi hambatan tersendiri yang harus segera diatasi agar pengolahan sampah dapat berjalan dengan lebih baik dan berkelanjutan.

Data menunjukkan bahwa persentase keluarga kependudukan (KK) yang terlibat dalam pengelolaan sampah terus meningkat secara keseluruhan. Pada tahun 2022, ada 18.061 KK yang terlibat dari total 54.341 KK, yang artinya sekitar 33,2%. Angka ini meningkat menjadi 20.477 KK pada tahun 2023, yang senilai dengan 37,7%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa program dan upaya pemerintah terus berlangsung dan berhasil mengajak masyarakat lebih aktif berpartisipasi. Di tingkat kecamatan, ada perbedaan yang cukup signifikan. Kecamatan Gadingrejo dan Panggungrejo menunjukkan hasil terbaik. Di Gadingrejo, meskipun jumlah KK yang terlibat masih relatif rendah pada tahun 2022, yaitu 19,1% di Karang Ketug, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2023. Di sisi lain, di Panggungrejo, Kelurahan Kebonsari berhasil mencapai 91,8% pada tahun 2023,

angka yang sangat tinggi dan menunjukkan keberhasilan besar di wilayah tersebut. Namun, masih ada kecamatan lain seperti Purworejo yang meskipun menunjukkan peningkatan, capaian mereka masih di bawah 10%.

Berdasarkan analisis data diatas, terdapat beberapa faktor yang mendukung peningkatan pengelolaan sampah di Kota Pasuruan. Faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah peningkatan partisipasi masyarakat yang sangat signifikan, terlihat dari peningkatan jumlah keluarga yang terlibat dalam pengelolaan sampah dari 33,2% pada tahun 2022 menjadi 37,7% pada tahun 2023. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Di tingkat kecamatan, capaian program bervariasi, terutama pada beberapa kelurahan seperti Kebonsari dan Bugul Kidul yang mencapai tingkat partisipasi yang sangat tinggi, menjadi contoh yang bisa diikuti oleh wilayah lain. Adanya inovasi di tingkat lokal, seperti pembentukan bank sampah atau kelompok pengelola sampah mandiri, dianggap sebagai pendorong utama kesuksesan program tersebut. Peran serta komitmen pemerintah kota juga sangat berpengaruh dalam mendukung inisiatif-inisiatif tersebut.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan secara serius. Faktor utama yang menghambat adalah kesenjangan partisipasi antar wilayah yang sangat besar. Meskipun beberapa kelurahan berhasil mencapai tingkat partisipasi yang tinggi, masih banyak kelurahan yang partisipasinya rendah, bahkan di bawah 10%, yang mengindikasikan adanya kesulitan dalam meratakan hasil program di seluruh wilayah. Faktor lainnya adalah rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap hukum dan lingkungan, yang masih membuang sampah secara sembarangan seperti ke sungai, sehingga menghambat upaya pengelolaan sampah secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan anggaran yang tidak cukup juga menjadi penghambat utama, terutama jika pertumbuhan volume sampah tidak diimbangi dengan optimalisasi fasilitas pengolahan.

D. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan dalam konteks urusan lingkungan hidup adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem bumi kita. Ini mencakup berbagai upaya, mulai dari perlindungan habitat alami hingga pengembangan teknologi ramah lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama, di mana pemerintah dan organisasi di seluruh dunia berupaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan kebijakan yang mendukung pelestarian sumber daya alam. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga berperan penting dalam pembangunan urusan lingkungan hidup, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan dan bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Kota Pasuruan. Hasil dari upaya-upaya yang dilakukan dapat dilihat pada grafik berikut:

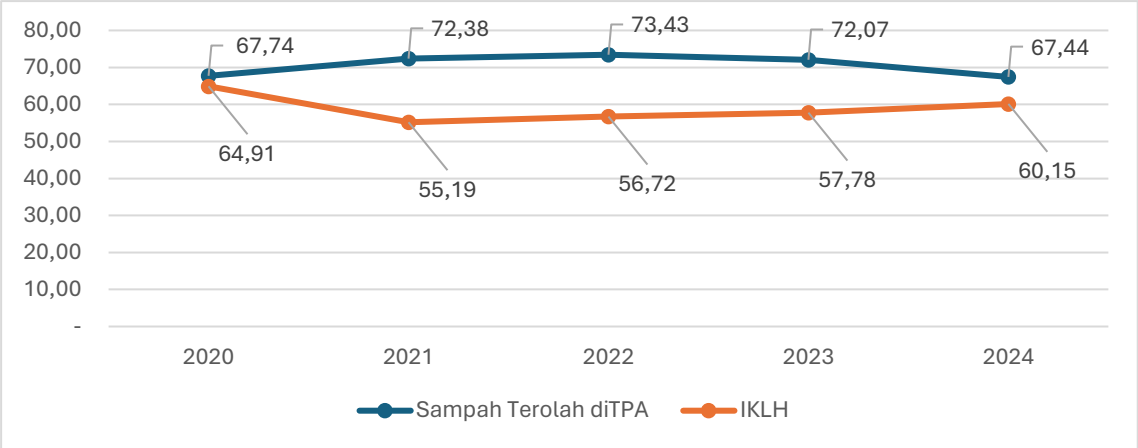

Gambar 2. 4 Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan, 2025

Berdasarkan grafik di atas dapat kita ketahui bahwa persentase sampah yang diolah di TPA memiliki tren peningkatan pada tahun 2020-2022 dan puncaknya sebesar 73,43% sampah terolah di TPA. Namun sejak itu pengolahan sampah di TPA mengalami tren penurunan hingga tahun 2024 sebesar 67,44%. Hal tersebut menunjukkan arah yang tepat dalam pengelolaan sampah yang lebih difokuskan pada penanganan di fasilitas pengolahan sampah lingkungan, sehingga proporsi sampah yang dikirim ke TPA dapat terus menurun. Perumusan pengelolaan sampah yang lebih efektif juga perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar permasalahan persampahan bisa dilakukan secara tuntas.

Adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki tren yang terus meningkat. Angka IKLH pada tahun 2020 sebesar 64,91 merupakan angka tertinggi, namun pada tahun berikutnya terdapat perubahan metode perhitungan sehingga terlihat menurun pada tahun 2021 menjadi 55,19 dan di tahun berikutnya berangsur angsur naik. Aspek yang dinilai pada IKLH Kota Pasuruan merupakan indeks komposit yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), yang selanjutnya dijelaskan lebih lanjut pada sub pembahasan berikut ini.

Permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Pasuruan adalah sebagai berikut: pencemaran air akibat adanya parameter fosfat dan fecal coli yang tinggi; pengelolaan sampah capaian persentase sampah yang diolah di TPA dari tahun 2022 terus menurun; Permasalahan ini menyebabkan beberapa komponen IKLH turun di 3 tahun terakhir.

Pencemaran air terjadi akibat tingginya kandungan fosfat dan fecal coli, yang umumnya bersumber dari limbah domestik tanpa pengolahan memadai, seperti buangan rumah tangga, septic tank bocor, serta penggunaan deterjen yang berlebihan. Fosfat yang tinggi memicu eutrofikasi, menurunkan kadar oksigen terlarut, dan merusak ekosistem perairan, sementara fecal coli menjadi indikator pencemaran bakteri yang meningkatkan risiko penyakit diare, tifus, dan hepatitis A. Kondisi ini secara langsung menurunkan Indeks Kualitas Air (IKA), salah satu komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Di sisi lain, persentase sampah yang berhasil diolah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terus menurun sejak 2022. Penurunan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan kapasitas TPA, infrastruktur pengangkutan yang kurang memadai, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya, serta kemungkinan berkurangnya dukungan anggaran operasional. Dampaknya, sampah yang tidak terangkut menumpuk di lingkungan, mencemari tanah, memicu bau dan penyakit, serta menghasilkan emisi gas metana yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kombinasi dari pencemaran air dan pengelolaan sampah yang memburuk ini memicu penurunan nilai IKLH Kota Pasuruan secara konsisten dalam tiga tahun terakhir, mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan secara keseluruhan semakin tertekan.

Permasalahan/ Ancaman/ Potensi:

- Persentase sampah yang diolah di TPA dari tahun 2022 terus menurun, hal tersebut menunjukkan kinerja pengolahan sampah skala lingkungan telah berjalan baik. Kinerja tersebut perlu diiringi dengan upaya pemerintah Kota Pasuruan dalam menyediakan teknologi dan kebijakan yang efektif dalam mengelola sampah di TPA
- IKLH dalam empat tahun terakhir cenderung memiliki skor yang rendah walaupun memiliki tren yang meningkat.

2.1.1.1. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

A. Penurunan Emisi GRK Kumulatif dan Tahunan

Data Emisi GRK Kota Pasuruan didapatkan pada Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) Bappenas. Berdasarkan data AKSARA, sebanyak 578 kegiatan Aksi PRK Perubahan Iklim telah dilaksanakan oleh Kota Pasuruan mulai tahun 2021 hingga tahun 2024. Selama pelaksanaan kegiatan PRK tersebut, potensi penurunan emisi kumulatif adalah sebanyak 812,73 Ton CO_2 eq dan 10,92 milyar rupiah intensitas emisi. Aksi PRK atau Pembangunan Rendah Karbon di Kota Pasuruan berfokus pada sektor limbah, energi dan lahan yang tersebar di berbagai kelurahan dan kecamatan di Kota Pasuruan. Data capaian Penurunan Emisi Berdasarkan Bidang Mitigasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) (Ton CO_2 eq) di Kota Pasuruan dari tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat ditinjau pada diagram berikut

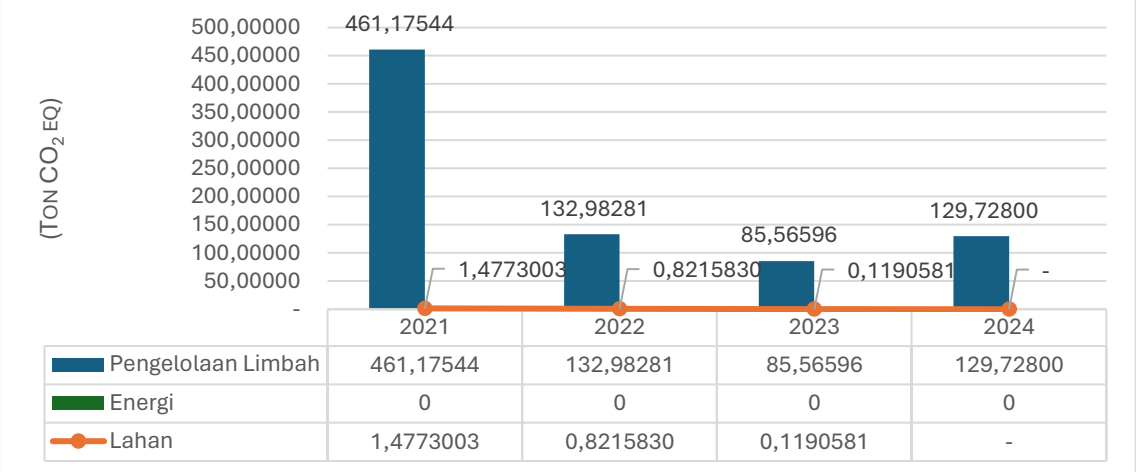

Gambar 2. 5 Penurunan Emisi Berdasarkan Bidang Mitigasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) Di Kota Pasuruan Tahun 2021-2024

Sumber: Bappenas, 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebesar 812,73 Ton CO_2 eq potensi penurunan emisi kumulatif dari sektor pengelolaan limbah dan lahan yang telah dilaksanakan di Kota Pasuruan dari tahun 2021 hingga 2024. Di tahun 2024 terdapat penurunan emisi dari sektor limbah sebesar 129.7282 Ton CO_2 eq. Sementara terdapat data dengan capaian 0 yang berarti belum terjadi penurunan emisi pada sektor tertentu. Bentuk mitigasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang telah dilakukan Kota Pasuruan secara keseluruhan berjumlah 578 kegiatan.

Dalam melakukan penurunan emisi GRK terdapat beberapa sektor yang ikut berkontribusi diantaranya:

1. Sektor Pengelolaan Limbah : Sektor pengelolaan limbah menjadi salah satu kontributor utama dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di Kota Pasuruan. Dalam tiga tahun terakhir, terjadi penurunan emisi yang signifikan, dari 461.175,44 ton CO2 setara di tahun 2021 menjadi 129.728,00 ton CO2 setara di tahun 2024. Mitigasi emisi di sektor ini berupa optimalisasi pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan penggunaan metode yang lebih baik, seperti pengumpulan dan pemanfaatan gas metana. Gas metana merupakan salah satu gas rumah kaca yang sangat berpengaruh terhadap pemanasan global. Upaya ini juga didukung oleh berbagai program di tingkat sumber, seperti pengomposan sampah organik, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pemilahan dan daur ulang sampah di rumah tangga, serta pembentukan bank sampah. Berbagai tindakan tersebut secara bersama-sama berhasil mengurangi volume sampah yang menumpuk dan membusuk di TPA, sehingga emisi gas metana yang dilepaskan ke atmosfer dapat dikurangi secara signifikan.
2. Sektor Lahan : Sektor lahan juga memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Dalam tahun 2021, emisi dari sektor ini mencapai 1.477.300,3 ton CO2 setara, namun di tahun 2024 tidak ada data penurunan yang tercatat. Mitigasi emisi yang mungkin telah dilakukan mencakup upaya pencegahan kebakaran lahan serta rehabilitasi lahan kritis melalui program penghijauan. Pohon dan vegetasi memiliki peran penting sebagai penyerap karbon alami, sehingga penanaman pohon di area publik, taman, dan ruang terbuka hijau lainnya dapat membantu menyerap CO2 dari atmosfer. Selain itu, praktik

pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan penggunaan pupuk yang efisien di sektor pertanian juga dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca.

3. Sektor Energi : Sektor energi belum memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, dengan data menunjukkan angka nol sepanjang periode 2021 hingga 2024. Ini menunjukkan bahwa belum ada upaya mitigasi yang signifikan dilakukan, seperti transisi ke sumber energi bersih atau peningkatan efisiensi energi yang benar-benar dijalankan atau tercatat. Untuk periode mendatang, upaya mitigasi di sektor ini sebaiknya fokus pada penggunaan energi terbarukan, seperti pemasangan panel surya di bangunan pemerintah dan fasilitas umum. Selain itu, program efisiensi energi juga sangat penting, misalnya kampanye penghematan listrik, penggunaan teknologi yang lebih efisien, serta pengembangan transportasi umum yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi dari bahan bakar fosil.

B. Indeks Risiko Bencana

Resiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Penilaian tingkat resiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan resiko bencana di suatu daerah. Parameter atau komponen yang digunakan dalam Indeks Risiko Bencana, diantaranya a) Bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya 311 berupa data frekuensi dan *magnitude* dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. b) Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. c) Kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

Capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Pasuruan pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami penurunan setiap tahunnya. IRB Kota Pasuruan pada tahun 2020 adalah 129,28 atau pada kelas risiko sedang dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2024 mencapai 96,70 dengan kelas risiko sedang. Trend penurunan capaian IRB di Kota Pasuruan tersebut memberikan pertanda yang baik karena berkurangnya risiko

bencana yang terjadi di Kota Pasuruan. Capaian IRB Kota Pasuruan pada tahun 2020 hingga 2024 dapat ditinjau pada diagram berikut.

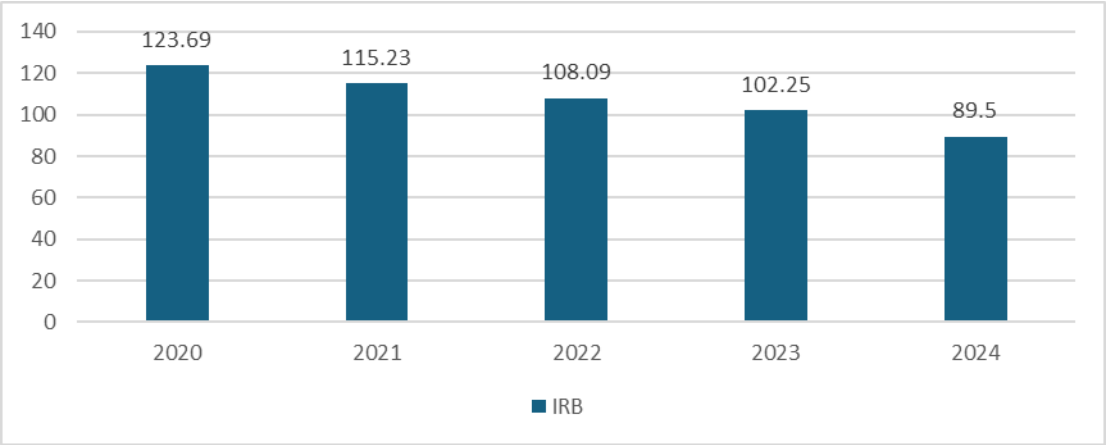

Gambar 2. 6 Indeks Risiko Bencana Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan, 2025

Grafik Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Pasuruan menunjukkan tren penurunan yang terus-menerus mulai dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai IRB mengalami penurunan dari 123,69 pada tahun 2020 menjadi 96,7 pada tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang dilakukan oleh pemerintah kota telah berhasil menghasilkan dampak yang nyata. Turunnya indeks berarti risiko bencana secara keseluruhan telah terkontrol dengan baik, baik dalam hal ancaman, kerentanan maupun kemampuan penanggulangan bencana.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) yang menunjukkan penurunan dari tahun 2020 hingga 2024, Kota Pasuruan telah berhasil mengurangi tingkat risiko bencana secara keseluruhan. Namun, berdasarkan kondisi geografis dan riwayat bencana sebelumnya, kota ini masih berpotensi menghadapi bencana, terutama banjir, angin kencang (puting beliung), dan kebakaran. Banjir merupakan ancaman yang paling besar, sering terjadi karena luapan sungai besar seperti Gembong, Petung, dan Welang, terutama ketika hujan deras. Risiko banjir ini diperparah oleh kondisi lingkungan seperti penurunan tinggi air tanah. Selain itu, angin kencang terkadang muncul ketika musim berubah dan bisa merusak infrastruktur, sedangkan kebakaran, baik di permukiman maupun lahan kosong, menjadi ancaman serius terutama pada musim kemarau.

Potensi bencana tersebut mendorong identifikasi kawasan rawan bencana yang perlu diperhatikan secara khusus. Beberapa kecamatan seperti Panggungrejo, Gadingrejo, dan Bugul Kidul secara historis dan geografis diketahui sebagai daerah

rawan banjir karena letaknya di dataran rendah dan dekat aliran sungai yang sering meluap. Sementara itu, daerah padat penduduk dan lahan kering yang luas menjadi rawan terjadinya kebakaran. Meskipun IRB menunjukkan tren penurunan risiko, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana harus terus ditingkatkan, terutama di kawasan yang sudah dikenal rawan, agar risiko bencana terus berkurang dan masyarakat terlindungi secara optimal.

C. Indeks Ketahanan Daerah

Selaras dengan penurunan IRB, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Pasuruan menunjukkan peningkatan. Nilai IKD yang semula 0,46 pada tahun 2020 sempat menurun menjadi 0,45 pada tahun 2021, namun kemudian meningkat kembali, hingga tahun 2024 menjadi 0,52. Peningkatan IKD ini mencerminkan peningkatan kapasitas pemerintah Kota Pasuruan dalam mengelola bencana, yang meliputi komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan.

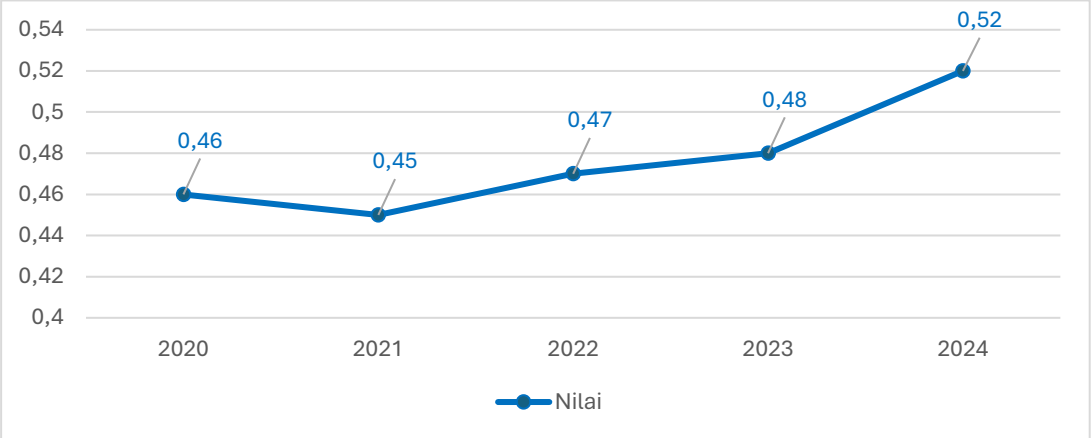

Gambar 2. 7 Indeks Ketahanan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan, 2025

Sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat, Kota Pasuruan telah melibatkan berbagai strategi dan kebijakan untuk mengurangi risiko bencana serta mengoptimalkan potensi yang ada di kota. Dengan melibatkan berbagai pihak dan memanfaatkan sumber daya yang ada, Kota Pasuruan berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh. Berikut ini adalah beberapa faktor penting yang mendukung turunnya risiko bencana di Kota Pasuruan:

a. **Penetapan Kawasan Rawan Bencana**: Pemerintah Kota Pasuruan telah menetapkan kawasan darurat dan rawan bencana untuk meminimalisasi dampak

kerugian dan mengantisipasi korban jiwa akibat bencana alam. Dengan penetapan ini, dilakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana.

b. **Peningkatan Kewaspadaan dan Mitigasi**: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pasuruan meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi alam yang berpotensi menyebabkan bencana, terutama selama musim penghujan. Kewaspadaan ini termasuk himbauan kepada masyarakat untuk sadar bencana, seperti pemapasan pohon-pohon yang berpotensi roboh dan pembersihan saluran air dari sampah.

c. **Koordinasi dengan Instansi Terkait**: BPBD Kota Pasuruan bekerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dalam melakukan mitigasi bencana. Koordinasi ini mencakup pengiriman data curah hujan dan penanganan bencana hidrometeorologi.

d. **Pengaturan Penanggulangan Bencana**: Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh, serta mengoptimalkan potensi yang ada di Kota Pasuruan. Peraturan ini mencakup tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, serta mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal.

e. **Dukungan Anggaran dan Relawan**: Pemerintah Kota Pasuruan menyiapkan anggaran darurat untuk penanggulangan bencana dan memiliki relawan yang siap membantu masyarakat dalam menghadapi bencana.

2.1.1.4. Demografi

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Pasuruan dalam kurun waktu 2020-2024 terus mengalami perubahan angka yang fluktuatif. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 1.07% dan laju pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar 0,55%. Penurunan laju pertumbuhan penduduk tersebut diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk Kota Pasuruan berada pada angka 0,66%, angka ini mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu 0,71% Data laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada gambar berikut.

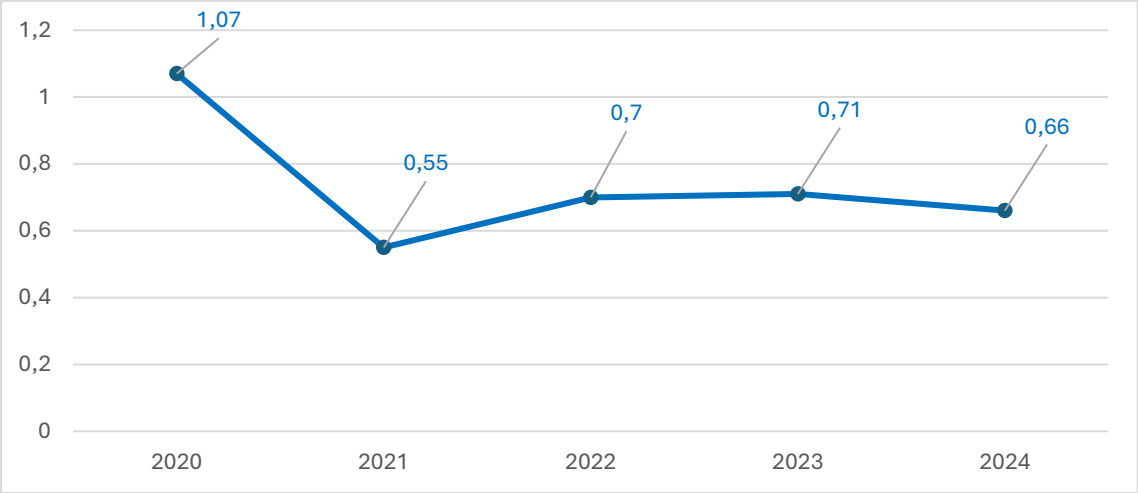

Gambar 2. 8 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Kota Pasuruan Dalam Angka Tahun 2020-2024

Struktur usia penduduk Kota Pasuruan bertipe muda didominasi oleh penduduk usia produktif sebesar 70% dengan jumlah 147.992 penduduk dalam rentang 15-64 tahun. Sisanya sebesar 30% dan berjumlah 64.474 penduduk merupakan penduduk tidak produktif, dengan rentang usia 0-14 tahun dan 65-75 tahun. Kondisi ini menginformasikan bahwa Kota Pasuruan masih berpotensi menikmati bonus demografi, yaitu peluang sekaligus ancaman ketika proporsi penduduk usia produktif lebih mendominasi dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.

B. Proyeksi dan Analisis Penduduk 5 tahun ke depan (RPJPD 2025-2045)

Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi. Proyeksi penduduk dilakukan untuk memprediksi jumlah penduduk di masa depan dengan beberapa metode yaitu geometri, aritmatika, dan eksponensial. Dari ketiga metode akan dipilih metode terbaik yang dapat mewakilkan data proyeksi sehingga data proyeksi bisa mendekati data yang sebenarnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, berikut merupakan proyeksi penduduk Kota Pasuruan Tahun 2025-2029:

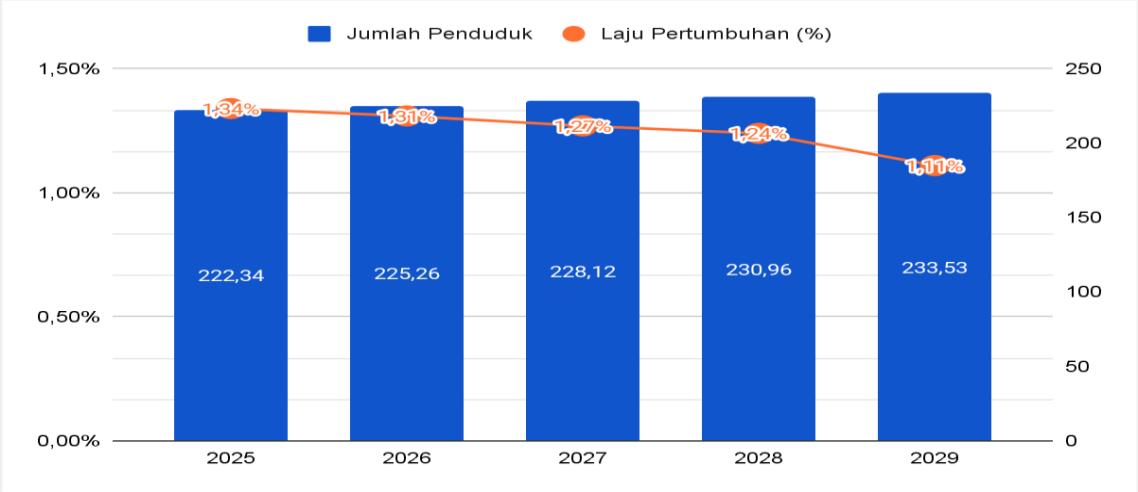

Gambar 2. 9 Proyeksi Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2025-2029
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Diolah, 2024

Berdasarkan perhitungan di atas, jumlah penduduk Kota Pasuruan dalam lima tahun ke depan mengalami tren kenaikan, meskipun secara laju pertumbuhan dalam rentang tahun 2025-2029 mengalami penurunan. Proyeksi penduduk Kota Pasuruan tahun 2025-2029 juga dihitung berdasarkan jenis kelamin sebagaimana berikut:

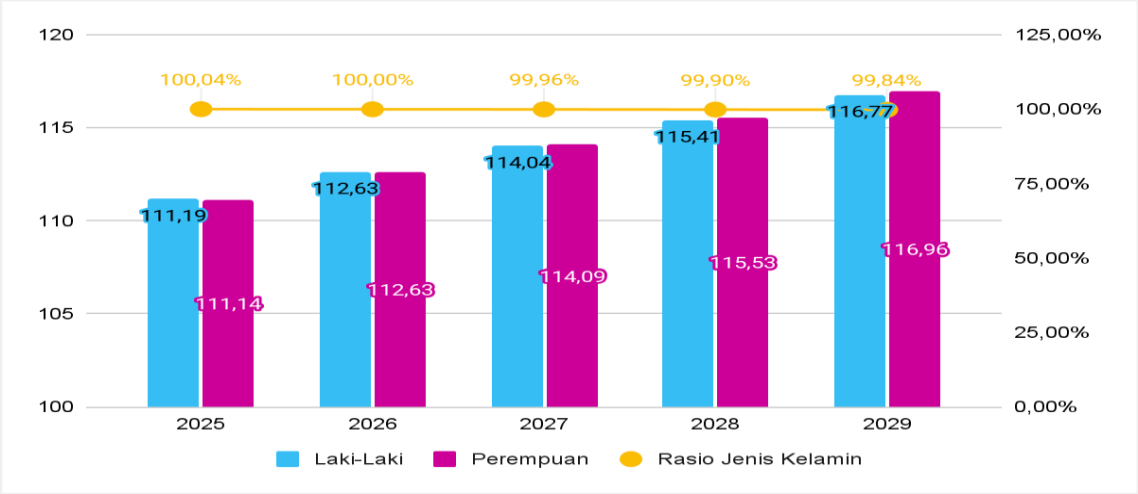

Gambar 2. 10 Proyeksi Jumlah Dan Rasio Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Pasuruan Tahun 2025-2029
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Diolah, 2024

Rasio jenis kelamin di Kota Pasuruan dalam lima tahun ke depan diproyeksikan mengalami tren penurunan meskipun tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan dalam rentang tahun 2025-2029, jumlah laki-laki di Kota Pasuruan relatif terhadap jumlah perempuan akan berkurang. Selanjutnya, proyeksi penduduk Kota Pasuruan juga dilihat berdasarkan komposisi penduduknya sebagaimana berikut:

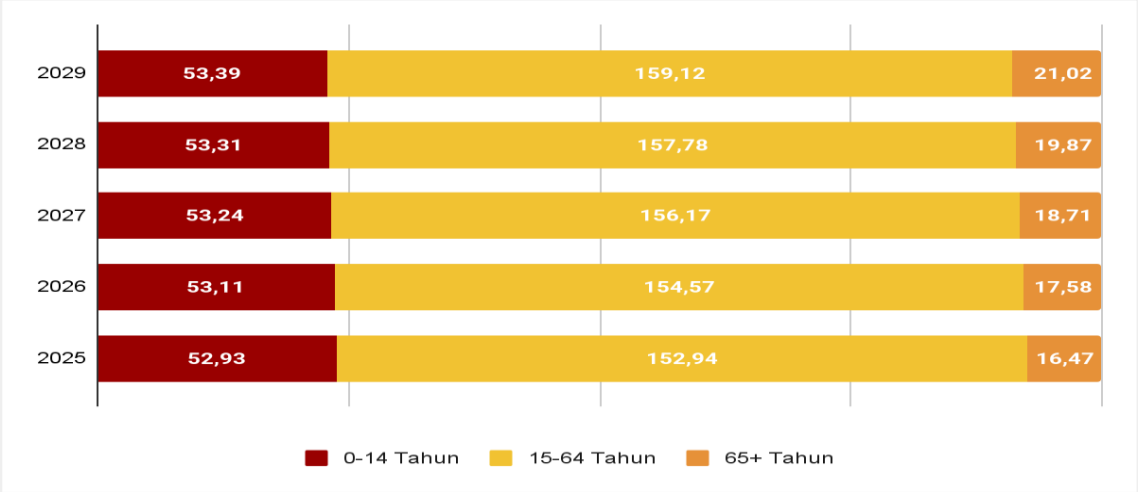

Gambar 2. 11 Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu) Berdasarkan Kelompok Usia Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Diolah, 2024

Proyeksi penduduk dari tahun 2025 hingga 2029 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk pada semua kelompok usia. Penduduk usia 0-14 tahun sedikit meningkat dari 52.930 menjadi 53.390, sementara penduduk usia 15-64 tahun naik dari 152.940 menjadi 159.120, mencerminkan bertambahnya populasi usia kerja. Jumlah penduduk usia 65+ tahun mengalami peningkatan signifikan dari 16.470 menjadi 21.020, menunjukkan tren penuaan. Peningkatan ini mengharuskan penyesuaian dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di semua kelompok usia. Hasil proyeksi ini menghasilkan perhitungan rasio ketergantungan sebagaimana grafik berikut:

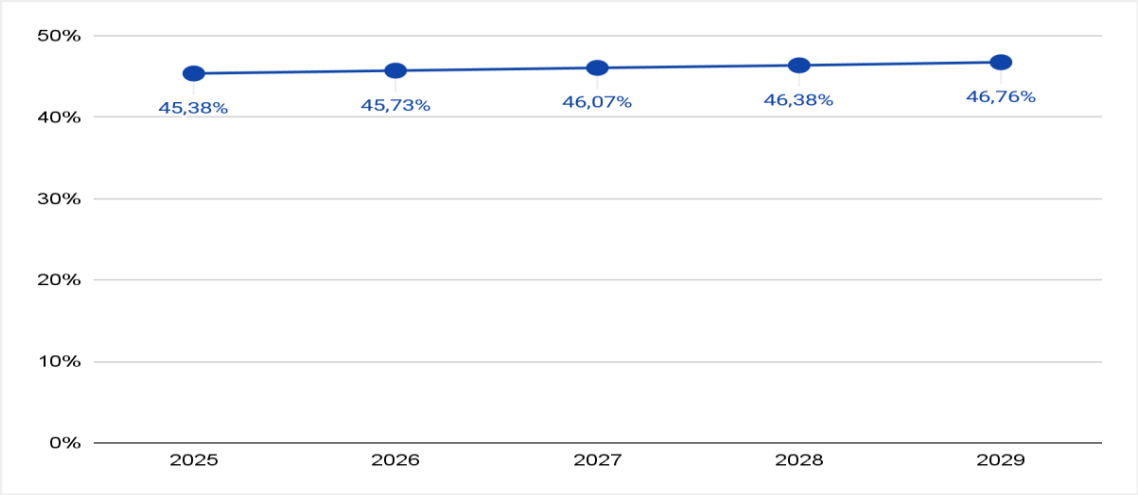

Gambar 2. 12 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Diolah, 2024

Proyeksi angka ketergantungan dari 2025 hingga 2029 menunjukkan peningkatan dari 45,38% menjadi 46,76%, yang mengindikasikan pertumbuhan jumlah penduduk usia tidak produktif lebih cepat dibandingkan usia produktif. Peningkatan ini berpotensi meningkatkan beban ekonomi, terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan, karena lebih banyak individu yang memerlukan dukungan dari penduduk usia kerja. Implikasi dari tren ini meliputi kebutuhan akan kebijakan sosial yang efektif, peningkatan produktivitas ekonomi, dan perencanaan sumber daya yang lebih baik. Secara keseluruhan, bonus demografi usia produktif yang menggambarkan sebuah keuntungan bagi Kota Pasuruan harus diimbangi dengan persiapan dalam kebijakan ekonomi dan sosial untuk memastikan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam fokus pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor penting. Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi pendapatan per-kapita dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Jika kita meninjau data pertumbuhan ekonomi di tahun 2020-2024 Kota Pasuruan maka dapat diketahui bahwa Kota Pasuruan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Meskipun di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan mengalami penurunan hingga mencapai angka -4,33% yang disebabkan oleh pandemi Covid, lonjakan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai di tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2021 angka pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan meningkat hingga menyentuh angka 3,64%. Prestasi ini berlanjut hingga tahun 2022 dimana pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan mencapai angka 6,22%. Angka tersebut jauh diatas skor rata-rata pertumbuhan ekonomi baik di tingkat Provinsi maupun Nasional. Namun sangat disayangkan, pada tahun 2023 Kota Pasuruan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang menjadikan skornya berada di angka 5,65 dan kembali menurun pada 2024 menjadi 5,45. Berikut merupakan sajian grafik pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan 2020-2024:

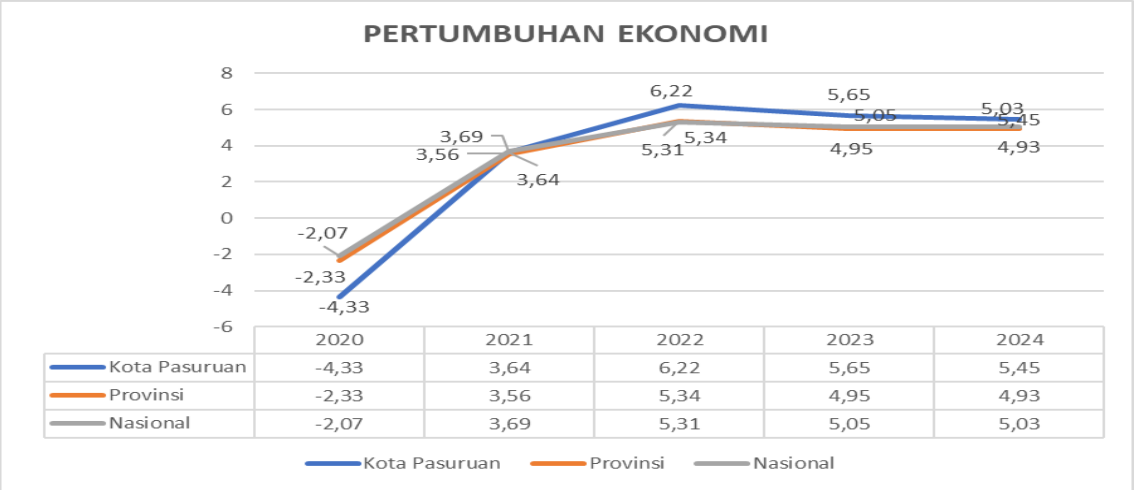

	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Pasuruan	-4,33	3,64	6,22	5,65	5,45
Provinsi	-2,33	3,56	5,34	4,95	4,93
Nasional	-2,07	3,69	5,31	5,05	5,03

Kota Pasuruan Provinsi Nasional

Gambar 2. 13 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Pusat 2025

Skor pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan memiliki angka yang dinamis, namun apabila disandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi dan nasional perolehan skor Kota Pasuruan menunjukkan angka yang positif. Jika kita bandingkan pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan dengan tingkat Provinsi, Kota Pasuruan selalu mengungguli skor rata-rata Provinsi. Begitu pula jika dibandingkan dengan rata-rata skor Nasional, di tahun 2022, 2023, 2024 Kota Pasuruan bahkan memperoleh skor di atas rata-rata skor Nasional. Adapun penurunan skor pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan yang terjadi di tahun 2024 juga dialami oleh Provinsi dan Nasional, namun ditengah penurunan masal tersebut Kota Pasuruan tetap memiliki skor yang lebih unggul.

Permasalahan/ Ancaman/ Potensi:

Kota Pasuruan memiliki prestasi yang baik dalam pertumbuhan ekonomi, persentase pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan hampir selalu mengungguli persentase pertumbuhan ekonomi di tingkat Provinsi dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 hingga seterusnya perlu dikawal, mengingat di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi di Provinsi dan Nasional mengalami penurunan.

B. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk

memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Secara garis besar persentase kemiskinan di Kota Pasuruan cenderung memiliki dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2020 persentase kemiskinan di Kota Pasuruan berada pada angka 6,66%. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata persentase kemiskinan di tingkat Provinsi dan Nasional. Kemudian pada tahun 2021 persentase kemiskinan di Kota Pasuruan mengalami kenaikan hingga menyentuh angka 6,88%. Di tahun 2022 persentase kemiskinan berhasil diturunkan hingga sampai pada angka 6,37%. Namun sayangnya di tahun 2023 persentase kemiskinan Kota Pasuruan kembali mengalami kenaikan hingga berada pada angka 6,6%. Dan terakhir pada tahun 2024 persentase kemiskinan kembali turun menyentuh angka 6,32%. Berikut merupakan sajian data grafik persentase kemiskinan di Kota Pasuruan 2020-2024:

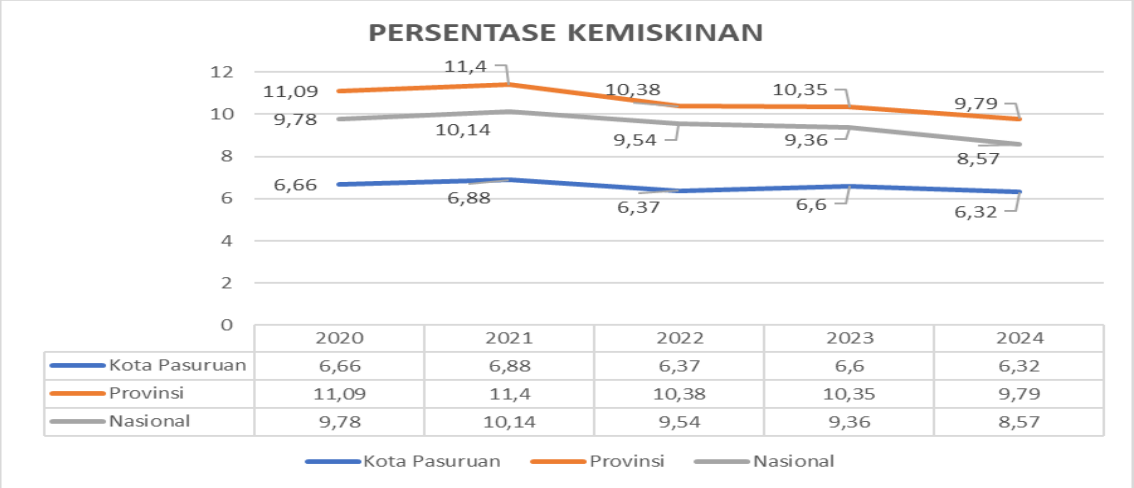

Gambar 2. 14 Persentase Kemiskinan Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Jika dilihat dari Garis Kemiskinan (GK) yang mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan, Garis kemiskinan di Kota Pasuruan setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini juga akan berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk miskin yang ada. Apabila kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat

tidak sejalan dengan penghasilan yang didapatkan maka peningkatan jumlah penduduk miskin tidak dapat terhindarkan. Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kota Pasuruan pada tahun 2020 hingga 2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk Miskin Dan Garis Kemiskinan Kota Pasuruan Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu/jiwa)	13,40	13,97	13,02	13,56	13,07
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	441.531	461.624	486.893	529.512	554.195

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Persoalan kemiskinan pada dasarnya tidak terbatas hanya tentang jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi kesenjangan di antara penduduk miskin. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan dapat diketahui dengan melihat indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* - P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* - P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Untuk mengetahui perkembangan hasil perhitungan dari kedua indeks tersebut di Kota Pasuruan dapat dilihat pada gambar berikut:

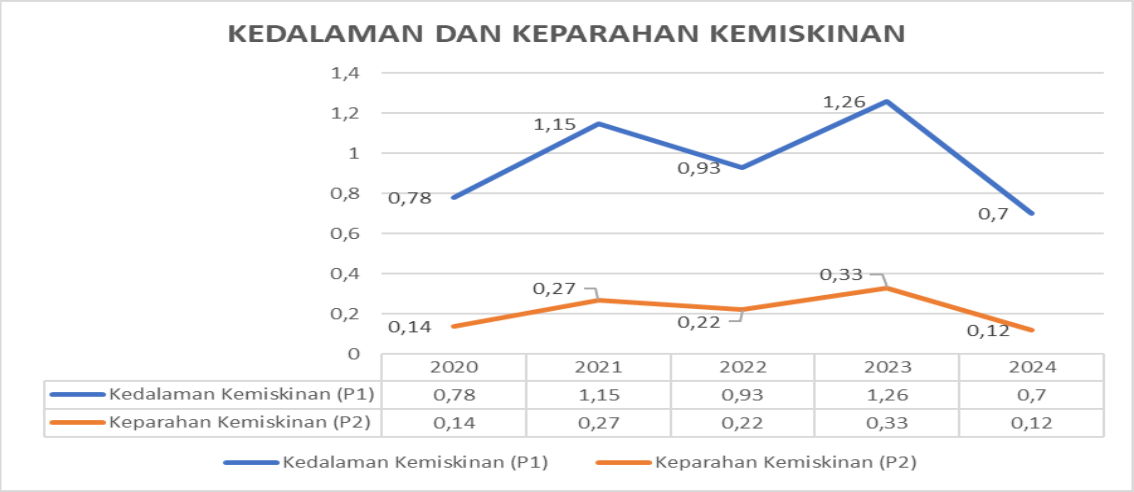

Gambar 2. 15 Grafik Kedalaman Dan Keparahan Kemiskinan Kota Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Pasuruan tahun 2020-2024 cenderung memiliki tren yang sama yakni fluktuatif. Pada

tahun 2020 Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Pasuruan berada di angka 0,78 dan ditahun yang sama Keparahan Kemiskinan (P2) berada di angka 0,14. Pada tahun 2021 keduanya mengalami kenaikan, Kedalaman Kemiskinan (P1) berada di angka 1,15 dan Keparahan Kemiskinan (P2) berada di angka 0,27. Namun hal ini dapat teratasi di tahun berikutnya. Pada tahun 2022 Kota Pasuruan mampu menurunkan kedua indeks ini dengan hasil P1 sebesar 0,93 dan P2 pada angka 0,22. Di tahun berikutnya yakni 2023 kedua indeks ini kembali mengalami kenaikan dengan P1 memiliki skor 1,26 dan P2 memiliki skor 0,33. Dan terakhir pada tahun 2024 Kota Pasuruan kembali mampu untuk menurunkan kedua indeks ini dengan hasil akhir Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,7 dan Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,12.

Permasalahan/ Ancaman/ Potensi:

Secara umum Kota Pasuruan memiliki capaian yang baik dalam hal persentase kemiskinan. Meskipun persentase kemiskinan Kota Pasuruan cenderung dinamis dan fluktuatif namun angkanya selalu berada di bawah rata-rata skor provinsi dan nasional

Meskipun memiliki persentase kemiskinan yang cenderung aman yakni dibawah rata-rata skor provinsi dan nasional namun jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan provinsi perlu menjadi perhatian karena angkanya yang sangat fluktuatif.

Pada tahun 2025 dan seterusnya jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan dikhawatirkan akan mengalami kenaikan jika melihat pola selama lima tahun terakhir. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus.

Pada tahun 2025 dan seterusnya indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan dikhawatirkan akan mengalami kenaikan jika melihat pola selama lima tahun terakhir. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus.

C. PDRB Per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan rata-rata pendapatan yang didapatkan oleh setiap penduduk dalam suatu negara. Dalam melihat atau mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur kesejahteraan penduduk. Selain untuk mengukur kesejahteraan penduduk, pendapatan perkapita juga dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan digunakan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Pendapatan per kapita pada suatu daerah dapat dihitung dengan membagi pendapatan daerah dengan penduduknya. Berikut merupakan grafik PDRB per Kapita Kota Pasuruan 2020-2024:

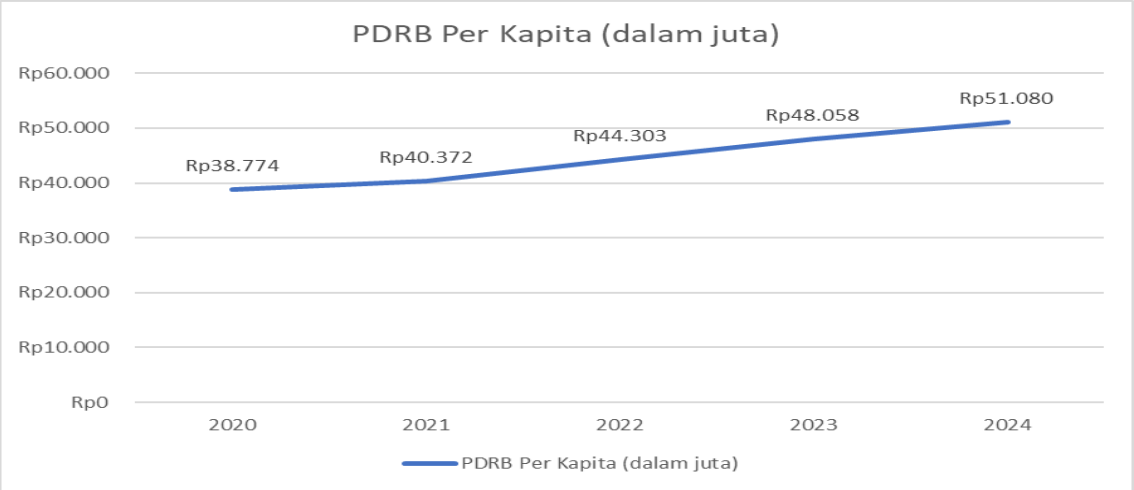

Gambar 2. 16 PDRB Per Kapita Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Melalui data di atas dapat disimpulkan bahwa nilai PDRB per kapita Kota Pasuruan 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Selama lima tahun angka PDRB terus meningkat dan tidak mengalami penurunan angka. Hal ini mencerminkan kesejahteraan hidup masyarakat yang turut meningkat.

Secara keseluruhan, tren peningkatan nilai PDRB per kapita dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa Kota Pasuruan berhasil melewati masa sulit pandemi dan terus berkembang menuju kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Peningkatan ini juga menandakan adanya optimisme dan kepercayaan masyarakat serta pelaku usaha terhadap prospek ekonomi kota ini. Dengan mempertahankan kebijakan yang mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta mengadopsi inovasi dan teknologi, Kota Pasuruan memiliki potensi untuk terus meningkatkan kesejahteraan ekonominya di masa mendatang.

D. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dikategorikan menjadi dua, yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Perbedaan dari kedua jenis ini adalah cara perhitungan harga. PDRB ADHB nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini, sedangkan PDRB ADHK dihitung

menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pasuruan dihitung dengan pendekatan produksi. Nilai produksi tersebut didasarkan pada harga berlaku maupun konstan. Nilai yang didasarkan harga berlaku digunakan untuk mengetahui perkembangan struktur ekonomi secara riil pada tahun yang bersangkutan. Berikut ini merupakan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kota Pasuruan Tahun 2020 hingga tahun 2024:

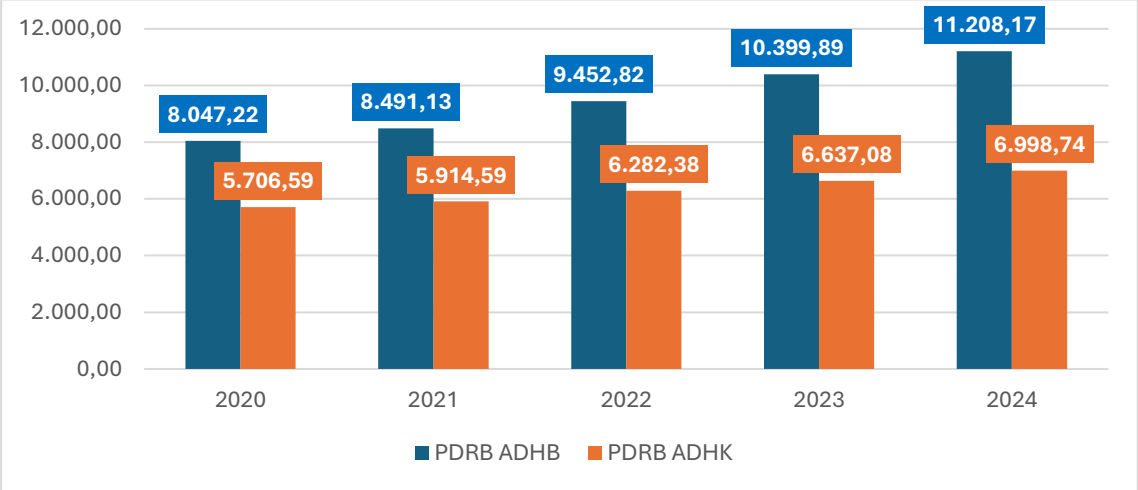

Gambar 2. 17 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB-Milyar) Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kota Pasuruan, 2025

Tabel 2. 14 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Di Kota Pasuruan Tahun 2020-2024

	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	198,39	193,47	213,93	228,86	240,00
B	Pertambangan dan Penggalian	1,97	2,01	0,00	0,80	0,90
C	Industri Pengolahan	1566,84	1670,74	1883,73	2095,17	2220,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,68	5,93	6,44	6,59	7,07
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	18,96	19,59	19,51	20,99	22,93
F	Konstruksi	493,06	504,44	547,28	571,11	603,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2297,26	2478,65	2807,57	3082,87	3305,66
H	Transportasi dan Pergudangan	481,41	525,26	695,59	861,10	972,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	425,94	451,20	505,47	558,35	616,18
J	Informasi dan Komunikasi	682,07	724,88	741,82	812,22	852,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	602,09	617,58	661,44	708,07	744,19
L	Real Estat	214,30	217,88	227,43	237,49	250,61
M,N	Jasa Perusahaan	51,20	53,84	55,77	62,11	70,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	373,06	370,46	391,66	404,39	455,37
P	Jasa Pendidikan	357,38	360,77	366,44	395,66	428,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,93	80,31	85,82	89,22	99,28
R,S,T,U	Jasa Lainnya	200,71	214,13	242,92	266,27	319,39
	Produk Domestik Regional Bruto	8047,23	8491,13	9452,82	10.399,89	11.208,17

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2025

E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pasuruan sejak tahun 2020 hingga 2024 memiliki tren yang terus menurun. Hal ini mengindikasikan hal yang positif karena dari tahun ke tahun tingkat pengangguran semakin berkurang. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran di Kota Pasuruan berada di angka 6,33. Kemudian di tahun 2021 kembali mengalami penurunan hingga berada pada angka 6,23. Pada tahun 2022 angka ini kembali turun sehingga menjadikan angka tingkat pengangguran 6,18. Kemudian pada tahun 2023 kembali turun hingga menyentuh angka 5,64. Puncak penurunan angka tingkat pengangguran terbuka di Kota Pasuruan berada di tahun 2024, di tahun tersebut tingkat pengangguran Kota Pasuruan sebesar 4,63. Berikut merupakan sajian data perkembangan tingkat pengangguran terbuka Kota Pasuruan 2020-2024:

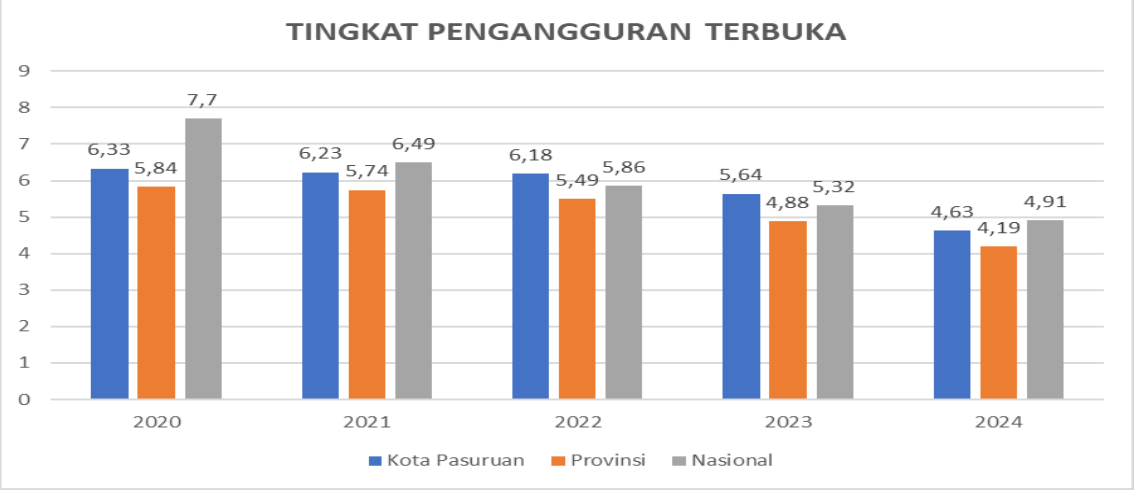

Gambar 2. 18 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Meskipun dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, tingkat pengangguran terbuka di Kota Pasuruan cenderung berada di atas rata-rata angka provinsi. Kembali kepada definisi tingkat pengangguran terbuka yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, maka penting bagi kita untuk mengetahui jumlah angkatan kerja. Untuk mengetahui rincian lebih lanjut mengenai jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja dapat disimak melalui sajian data berikut:

Tabel 2. 15 Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja Dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2020-2024

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penduduk Usia Kerja	154.895	156.219	157.458	164.291	167,04
2.	Angkatan Kerja	108.511	111.954	107.143	124.281	121.46
	Bekerja	101.644	104.977	100.520	117.266	115,84
	Pengangguran	6.867	6.977	6.623	7.015	5.620
3.	Bukan Angkatan Kerja	46.384	44.265	50.315	40.010	45.580

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2025

Keberadaan jumlah pengangguran memang tidak dapat dipisahkan dari adanya permintaan dan penawaran faktor produksi (tenaga kerja). Perbandingan antara pertumbuhan pencari kerja dan ketersediaan kesempatan kerja di Kota Pasuruan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kondisi yang tidak seimbang, dimana pencari kerja memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kondisi tersebut sangat sulit untuk dilakukan intervensi oleh pemerintah. Pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk menekan penduduk yang telah memasuki usia kerja (15 tahun ke atas) di Kota Pasuruan yang memiliki rata-rata pertumbuhan dalam setiap tahunnya.

Permasalahan/ Ancaman/ Potensi:

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pasuruan selama 5 tahun terakhir berhasil menurun. Namun hal ini tetap perlu menjadi perhatian karena angka tingkat pengangguran terbuka Kota Pasuruan selalu berada di atas rata-rata angka provinsi.

Jumlah angkatan kerja yang menganggur di Kota Pasuruan masih sangat fluktuatif, sehingga Pemerintah Kota Pasuruan perlu meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan akses pekerjaan bagi masyarakat Kota Pasuruan.

F. Indeks Gini

Indeks Gini atau Gini rasio dapat dipahami sebagai suatu alat atau metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi dalam suatu populasi melalui distribusi pendapatan. Sebagai alat ukur, Gini rasio digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan atau ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan atau kekayaan pada suatu populasi. Indeks Gini dihitung dengan pengukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana, yaitu dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dengan kurva terhadap bidang yang terletak antara kurva dengan garis vertikal dan horizontal sebelah kanan.

Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Gini Rasio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Rasio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Gini Rasio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Gini Rasio diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Untuk mengetahui perkembangan gini rasio Kota Pasuruan pada tahun 2020-2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

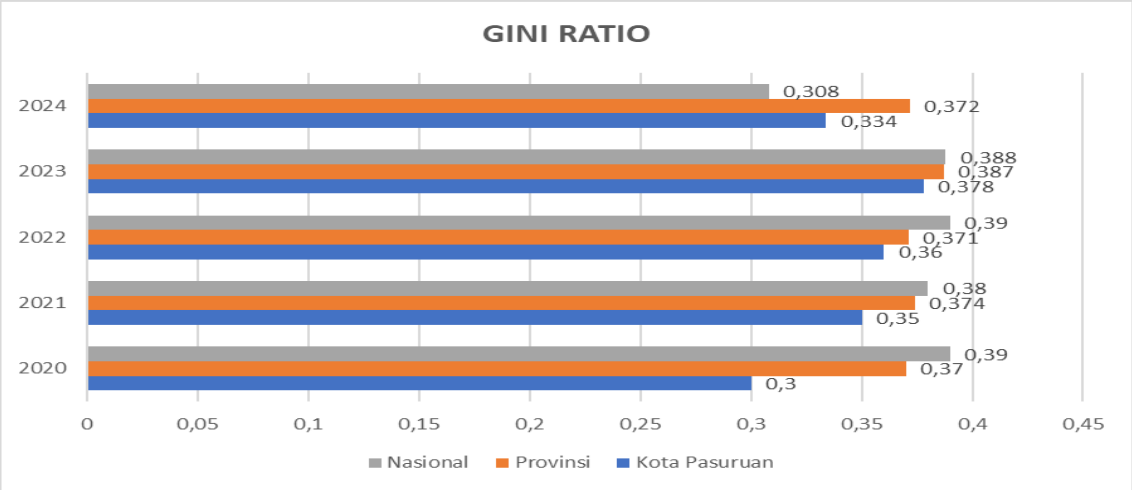

Gambar 2. 19 Gini Rasio Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Melihat skor Gini Rasio di atas maka perlu kita apresiasi bahwa gini rasio di Kota Pasuruan masih cenderung pada angka yang aman dan masih jauh dari angka 1. Pada tahun 2020 skor gini rasio Kota Pasuruan berada pada angka 0,3, skor ini berada cukup jauh dibanding rata-rata skor provinsi dan nasional. Namun sangat disayangkan bahwa skor gini rasio ini terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023. Pada tahun 2021 gini rasio Kota Pasuruan berada di angka 0,35. Kemudian pada tahun 2022 kembali naik menjadi 0,36. Puncak kenaikan terjadi pada tahun 2023 dengan skor 0,378. Pada tahun 2024 skor gini rasio Kota Pasuruan berhasil turun hingga menyentuh angka 0,334. Meski begitu skor tersebut berada di atas rata-rata skor nasional sehingga perlu diperhatikan.

Permasalahan/ Ancaman/ Potensi:

Skor gini rasio Kota Pasuruan masih berada di angka yang aman karena jauh dari angka 1. Meski begitu gini rasio tetap perlu diperhatikan karena tren yang ditunjukkan selama lima tahun terakhir cenderung terus mengalami kenaikan. Skor di tahun 2025 dan seterusnya perlu diperhatikan secara ketat melihat pola dan tren gini rasio yang terus mengalami kenaikan.

G. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah salah satu indeks yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia seperti perbaikan dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Adapun indeks pembangunan manusia Kota Pasuruan 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Berikut merupakan sajian data terkait perkembangan indeks pembangunan manusia Kota Pasuruan:

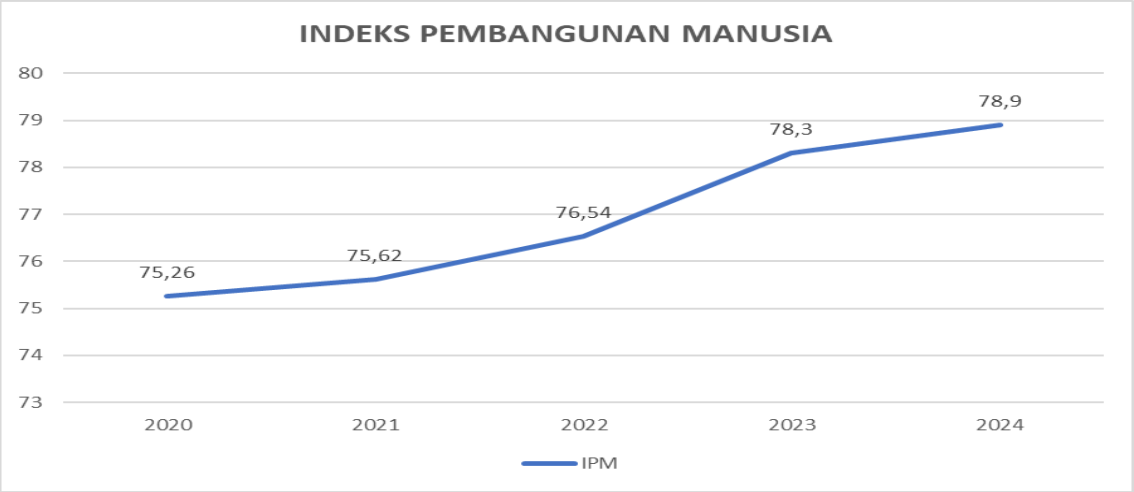

Gambar 2. 20 Indeks Pembangunan Manusia Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2025

Melihat data diatas perkembangan IPM Kota Pasuruan terus meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 skor IPM berada pada angka 75,26. Kemudian mengalami peningkatan di 2021 menjadi 75,62. Pada tahun 2022 kembali meningkat hingga menyentuh angka 76,54. Di tahun 2023 skor IPM Kota Pasuruan menjadi 78,3. Terakhir, pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 78,9. Skor IPM yang terus meningkat ini menandakan kualitas hidup masyarakat Kota Pasuruan yang terus meningkat dan sejahtera di setiap tahunnya.

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Usia harapan hidup adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun yang dapat diharapkan seseorang untuk hidup sejak lahir, berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat kematian, kesehatan, gaya hidup, dan kondisi lingkungan di suatu wilayah atau populasi tertentu. Melalui usia harapan hidup kita dapat melihat kesehatan masyarakat serta kualitas layanan kesehatan pada suatu daerah. Usia Harapan Hidup dapat meningkat dengan peningkatan kualitas hidup, perbaikan layanan kesehatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat.

Kota Pasuruan pada tahun 2024 menargetkan usia harapan hidup berada pada angka 72,1. Target tersebut berhasil direalisasikan 100% dengan capaian usia harapan hidup sebesar 74,86 di tahun 2024. Capaian tersebut membuktikan komitmen pemerintah Kota Pasuruan dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

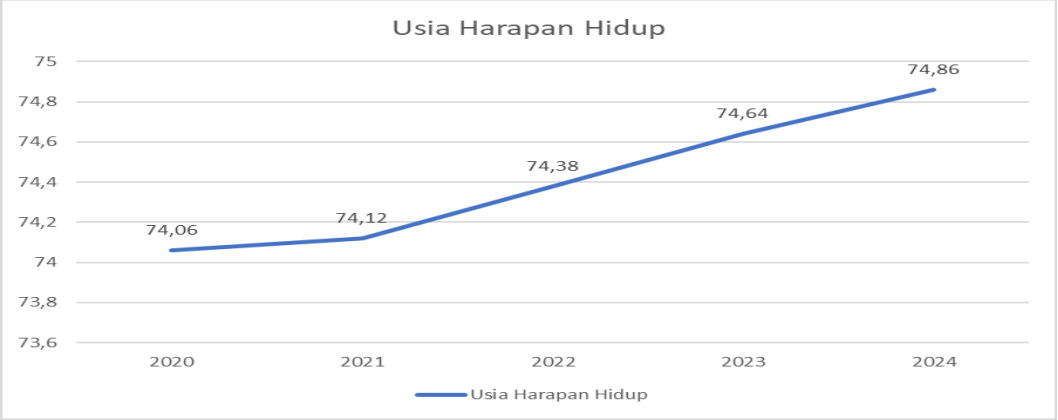

Gambar 2. 21 Usia Harapan Hidup Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2025

Usia Harapan Hidup Kota Pasuruan menggambarkan tren peningkatan yang positif mulai dari 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 usia harapan hidup berada pada angka 74,06 dan terus meningkat meskipun di tengah situasi Pandemi Covid-19. Hingga pada tahun 2024 usia harapan hidup Kota Pasuruan berada pada angka 74,86. Angka tersebut meningkat 0,8 sejak tahun 2020.

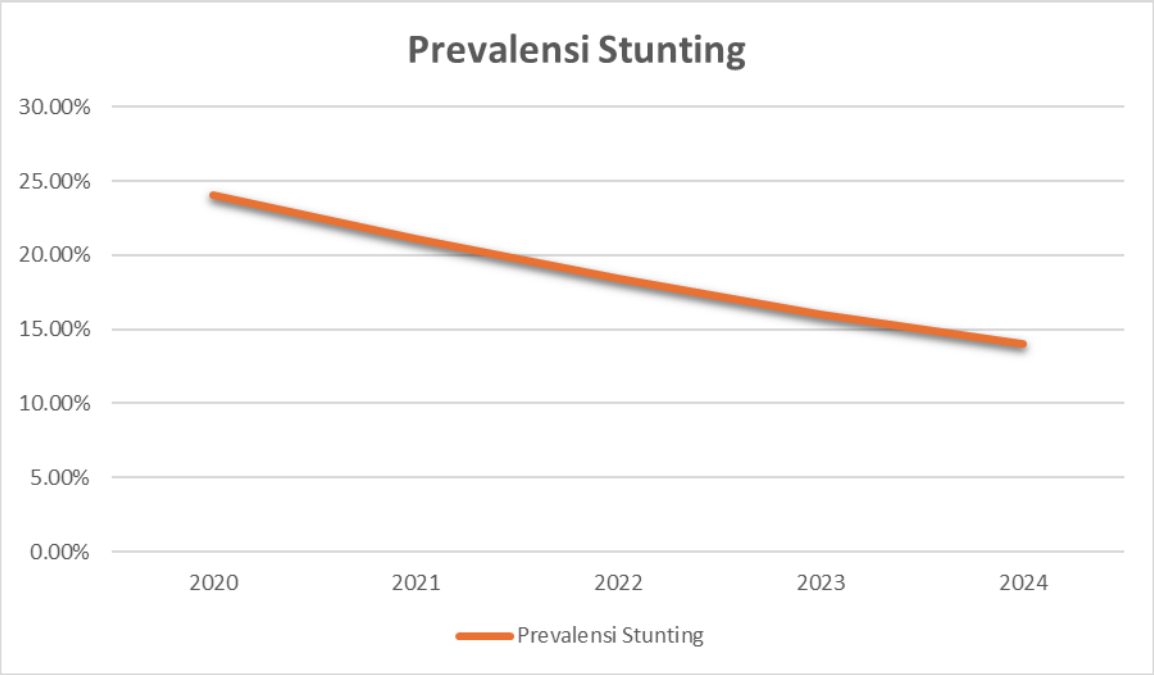

Gambar 2. 22 Prevalensi Stunting Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2025

Berdasarkan data grafik mengenai Prevalensi Stunting di Kota Pasuruan dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren penurunan yang sangat konsisten dan signifikan. Pada tahun 2020, prevalensi stunting berada di angka sekitar 24%. Angka ini menjadi titik awal bagi Pemerintah Kota Pasuruan untuk menanggulangi masalah gizi kronis pada anak. Upaya yang dilakukan tampaknya membuahkan hasil, karena dari tahun ke tahun, prevalensi stunting terus mengalami penurunan. Garis tren yang menurun secara gradual menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan, baik intervensi gizi spesifik maupun sensitif, berjalan efektif dan berkesinambungan.

Penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana prevalensi stunting berhasil ditekan hingga mencapai angka di bawah 15%, tepatnya sekitar 14%. Penurunan yang drastis ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan menjadi bukti nyata komitmen serta keberhasilan program-program penanganan stunting di Kota Pasuruan. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan anak-anak di masa sekarang, tetapi juga investasi penting untuk sumber daya manusia yang lebih unggul di masa depan. Meskipun demikian, upaya untuk terus menurunkan angka stunting harus tetap menjadi prioritas hingga mencapai target yang ditetapkan secara nasional maupun daerah.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas dan Merata

A. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Untuk mengukur kualitas pendidikan suatu daerah maka salah satu indikator yang dapat digunakan adalah angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah pada daerah tersebut. Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun rata-rata yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. RLS menunjukkan pencapaian pendidikan yang telah dijalani oleh suatu populasi. Sedangkan, Harapan Lama Sekolah adalah perkiraan jumlah tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia tertentu dalam menjalani pendidikan formal, berdasarkan pola partisipasi sekolah saat ini. HLS mencerminkan peluang anak-anak untuk mengakses pendidikan di masa depan. Berikut merupakan sajian data mengenai capaian angka RLS dan HLS Kota Pasuruan 2020-2024:

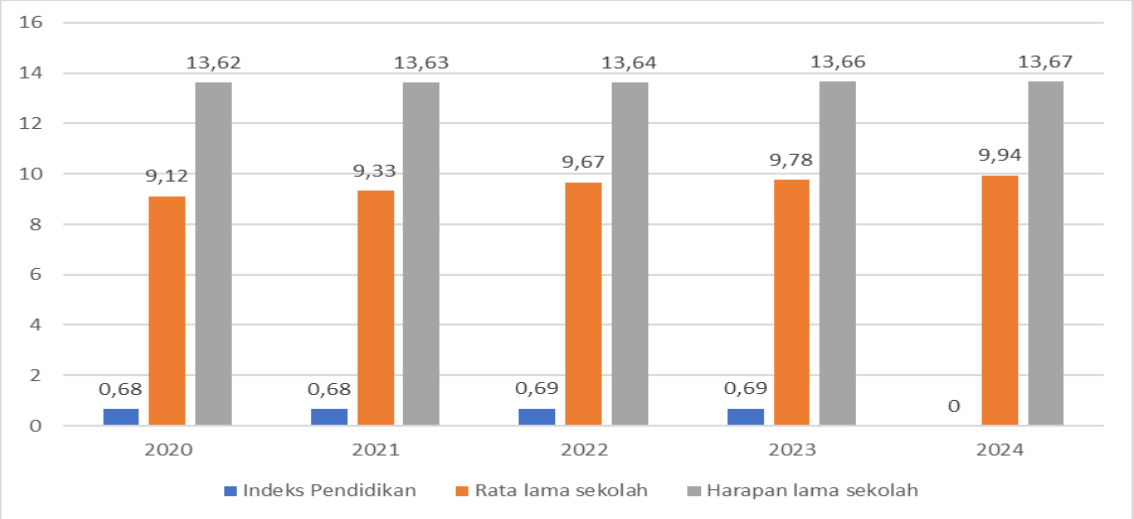

Gambar 2. 23 Indeks Pendidikan, Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah Kota Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2025

Jika kita melihat grafik Indeks Pendidikan Kota Pasuruan 2020-2024 maka dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan yang konsisten di setiap tahunnya. Di tahun 2020 indeks pendidikan berada di angka 0,68 dan naik secara konsisten hingga 0,69 di tahun 2023, sedangkan untuk tahun 2024 sudah tidak dilakukan pengukuran. Rata lama sekolah juga memiliki peningkatan yang cenderung stabil di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebesar 9,12 terus naik hingga 9,94 di tahun 2024. Begitu pula dengan harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah mengalami kenaikan yang sangat konsisten di

setiap tahunnya. Pada tahun 2020 harapan lama sekolah berada pada angka 13,62 dan terus naik secara stabil hingga 13,67 di tahun 2024.

B. Angka Literasi/Numerasi

Dalam membaca, menulis, memahami dan menggunakan informasi serta kemampuan untuk menggunakan angka dan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan literasi sendiri terdiri dari kemampuan membaca, menulis dan memahami informasi yang diberikan. Sedangkan kemampuan numerasi terdiri dari pemahaman angka dan penalaran matematika. Di bawah ini merupakan data Kemampuan Literasi dan Kemampuan Numerasi pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kota Pasuruan :

Tabel 2. 16 Kemampuan Literasi Dan Numerasi Pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP Tahun 2021 - 2024

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Kemampuan Literasi berdasarkan asesmen Nasional						
1	Jenjang Pendidikan SD/MI	%	58,29	61,49	68,27	88,61
2	Jenjang Pendidikan SMP/MTs	%	68,35	71,74	77,74	87,74
Rata-rata Kemampuan Numerasi berdasarkan asesmen Nasional						
3	Jenjang Pendidikan SD/MI	%	38,54	44,53	50,8	77,63
4	Jenjang Pendidikan SMP/MTs	%	56,13	58,91	67,18	85,02

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2025

Secara keseluruhan, capaian rata-rata kemampuan literasi maupun numerasi berdasarkan asesmen nasional di tingkat SD/MI maupun SMP/MTs dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami kenaikan yang positif. Rata-rata kemampuan literasi pada jenjang pendidikan SD/MI meningkat dari 58,29% pada tahun 2021 menjadi 88,61% di tahun 2024, sedangkan pada jenjang SMP/MTs meningkat dari 68,35% pada tahun 2021 menjadi 87,74 pada tahun 2024. Pada saat yang sama rata-rata kemampuan numerasi di tahun 2021 sebesar 38,54% meningkat menjadi 77,63% di tahun 2024, sedangkan di jenjang SMP/MTs di tahun 2021 sebesar 56,13 meningkat sebesar 85,02% di tahun 2024. Peningkatan yang serupa pada kedua indikator ini menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten dalam hasil pendidikan terkait literasi dan numerasi, yang mungkin merupakan hasil dari kebijakan atau intervensi pendidikan yang efektif selama periode tersebut. Peningkatan angka literasi dan numerasi secara signifikan meningkatkan daya saing SDM. Hal ini berimplikasi pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan inovasi di tempat kerja. SDM yang kompeten dengan keterampilan literasi dan numerasi yang kuat lebih mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ekonomi, serta lebih siap

untuk menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan yang meningkatkan literasi dan numerasi sangat penting untuk meningkatkan daya saing SDM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.2.4. Keluarga Berkualitas, indikator kinerja daerah Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perlindungan yang diberikan kepada anak-anak dalam suatu wilayah. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), perlindungan anak mencakup segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berikut merupakan sajian data mengenai Indeks Perlindungan Anak Kota Pasuruan 2021-2023 (data 2024 belum di rilis).

Tabel 2. 17 Indeks Perlindungan Anak Kota Pasuruan 2021-2023

Tahun	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus
2021	55,588	69,41	79,88	35,07	82,44
2022	50,31	90,80	80,75	45,66	79,96
2023	48,67	93,08	86,86	46,33	86,27

Sumber: KemenPPPA RI, 2025

Jika kita melihat perkembangan Indeks Perlindungan Anak Kota Pasuruan 2021-2023, masing-masing indeks memiliki perkembangan yang fluktuatif. Seperti indeks D1 yang menyangkut hak sipil dan kebebasan anak, setiap tahunnya indeks ini mengalami penurunan mulai dari tahun 2021 22,588 kemudian di tahun 2022 menjadi 50,31 dan di tahun 2023 menjadi 48,67. Sedangkan Indeks D2 yang menggambarkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2021 indeks D2 sebesar 69,41 sedangkan di tahun 2022 meningkat menjadi 90,80 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 93,08. Indeks D3 tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan juga memberi sinyal positif dengan adanya peningkatan skor di tiap tahunnya. Pada tahun 2021 indeks D3 berada di angka 79,88 terus meningkat di tahun

2022 menjadi 80,75 dan tahun 2023 dengan skor 86,86. Indeks D4 tentang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2021 indeks D4 berada pada angka 35,07 kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 45,66 dan terakhir di 2023 menjadi 46,33. Berbeda dengan indeks D4, Indeks D5 tentang perlindungan khusus justru memiliki dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2021 Indeks D5 berada pada angka 82,44 namun angka ini turun di 2022 menjadi 79,96 dan kembali naik di 2023 menjadi 86,27.

Permasalahan/ Ancaman/ Potensi:

Indeks Perlindungan Anak di Kota Pasuruan dalam beberapa aspek menunjukkan hal yang positif dengan adanya stabilitas dalam peningkatan terhadap Indeks D2,D3,D4.

Indeks D1 masih menjadi PR karena angkanya yang cukup fluktuatif. Hal ini perlu diperhatikan mengingat indeks D1 tentang Hak Sipil dan Kebebasan adalah hak dasar bagi setiap anak

Indeks D5 tentang Perlindungan Khusus juga masih menjadi tugas yang perlu diperhatikan mengingat angkanya yang fluktuatif. Hal ini menjadi penting mengingat semua anak memiliki hak untuk dilindungi.

B. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan sebuah ukuran komposit yang mencerminkan perbedaan dalam prestasi pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Berikut merupakan capaian IPG Kota Pasuruan Tahun 2020-2024.

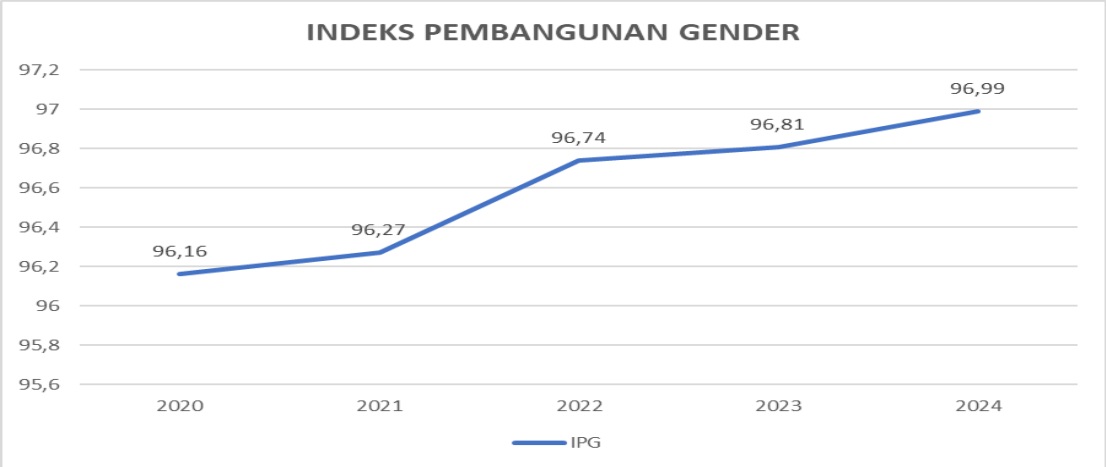

Gambar 2. 24 Indeks Pembangunan Gender Kota Pasuruan 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2025

IPG Kota Pasuruan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan, capaian pada tahun 2020 sebesar 96,16 dan perlahan meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 96,99. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan prestasi pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam 5 (lima) dimensi tersebut semakin baik.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Angka Ketergantungan merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Angka Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase angka ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Berikut sajian data angka ketergantungan di Kota Pasuruan:

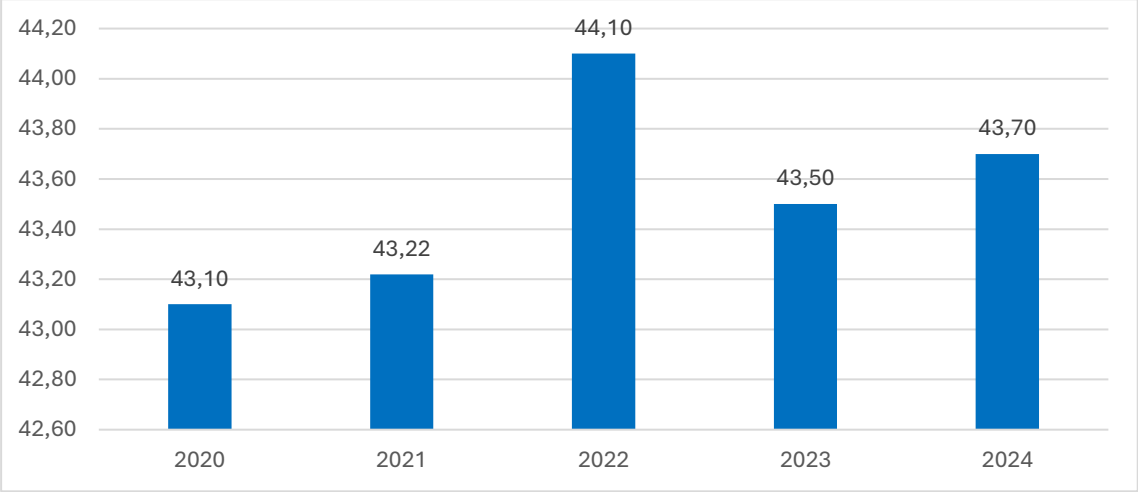

Gambar 2. 25 Angka Ketergantungan Kota Pasuruan 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2025

Angka Ketergantungan di Kota Pasuruan pada tahun 2023 sebesar 43,50% dan meningkat di tahun 2024 menjadi 43,70%. Peningkatan angka ketergantungan mengindikasikan bahwa lebih banyak orang berada dalam kelompok usia tidak produktif (tidak dapat bekerja) dan berkontribusi secara ekonomi, yang bisa memperkuat

perekonomian lokal. Angka ini tergolong relatif rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 44,10%. Dengan angka ketergantungan yang lebih rendah, Kota Pasuruan memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan partisipasi tenaga kerja. Selain itu, beban ekonomi pada penduduk usia produktif berkurang, yang bisa berdampak positif terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, untuk memanfaatkan potensi ini secara optimal, diperlukan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, pendidikan, dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

A. PDRB sektor Industri Pengolahan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan adalah nilai total dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam suatu wilayah tertentu, dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Industri pengolahan sendiri mencakup kegiatan ekonomi yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi melalui proses fisik, kimia, atau mekanik, seperti yang dilakukan di pabrik-pabrik. PDRB industri pengolahan menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah.

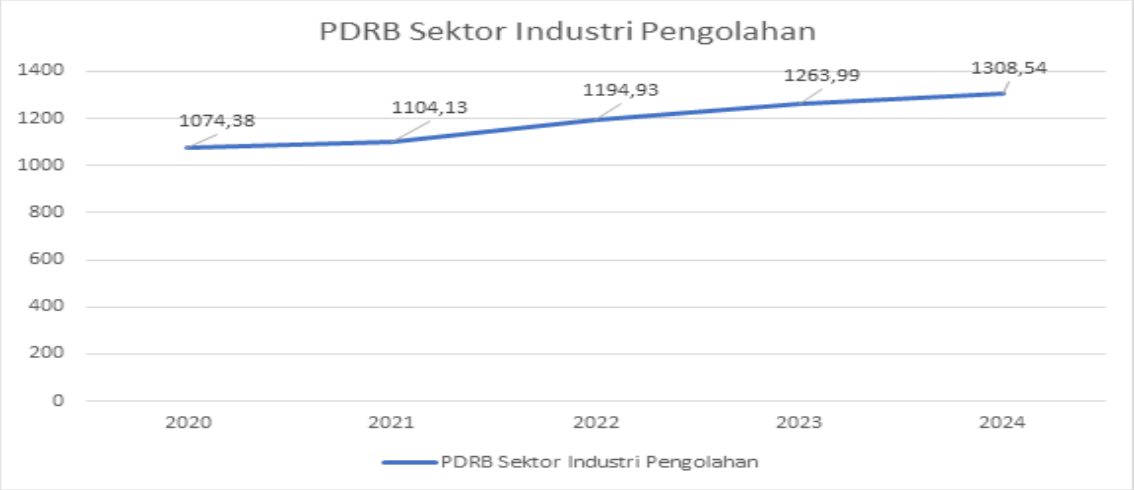

Gambar 2. 26 Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2025

Melalui grafik tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan Kota Pasuruan memiliki tren yang positif dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.074,38 Miliar mengalami peningkatan di

tahun 2021 menjadi Rp.1.104,13 Miliar, dan di tahun 2024 meningkat kembali menjadi sebesar Rp. 1.308,54 Miliar. Peningkatan PDRB sektor industri pengolahan berdampak positif pada perekonomian daerah secara keseluruhan, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja baru.

B. PDRB sektor Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki peran penting dalam perekonomian karena kegiatan di sektor ini menyumbang pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Di Kota Pasuruan sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB.

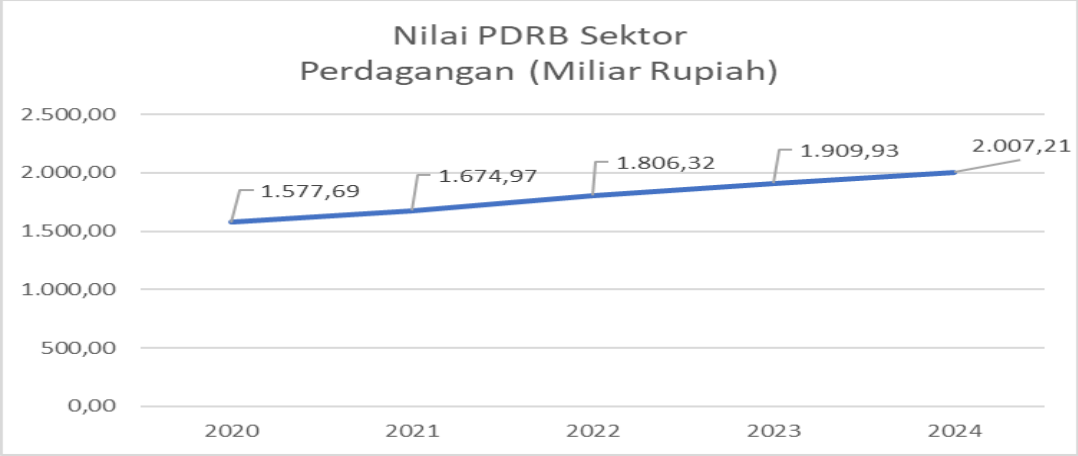

Gambar 2. 27 Nilai PDRB Sektor Perdagangan 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2025

Melalui grafik tersebut maka dapat disimpulkan bahwa PDRB sektor perdagangan Kota Pasuruan memiliki tren meningkat. Pada tahun 2020 sebesar Rp.1.577,69 Miliar. Angka tersebut kemudian meningkat di tahun 2021 sebesar Rp.1.674,97 Miliar hingga di tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.2.007,21 Miliar. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah dari kegiatan perdagangan di kota Pasuruan.

C. PDRB sektor Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor pariwisata memiliki peran yang potensial. Hal ini didukung dengan adanya promosi pariwisata, layanan pariwisata, dan sarana prasarana yang meningkat. Nilai PDRB Pariwisata Kota Pasuruan di tahun 2020 sebesar 278,69 Miliar rupiah dan di tahun 2024 nilai PDRB pariwisata 356,75 miliar

rupiah. Berikut adalah nilai PDRB Pariwisata Kota Pasuruan Tahun 2020-2024 yang menunjukkan peningkatan.

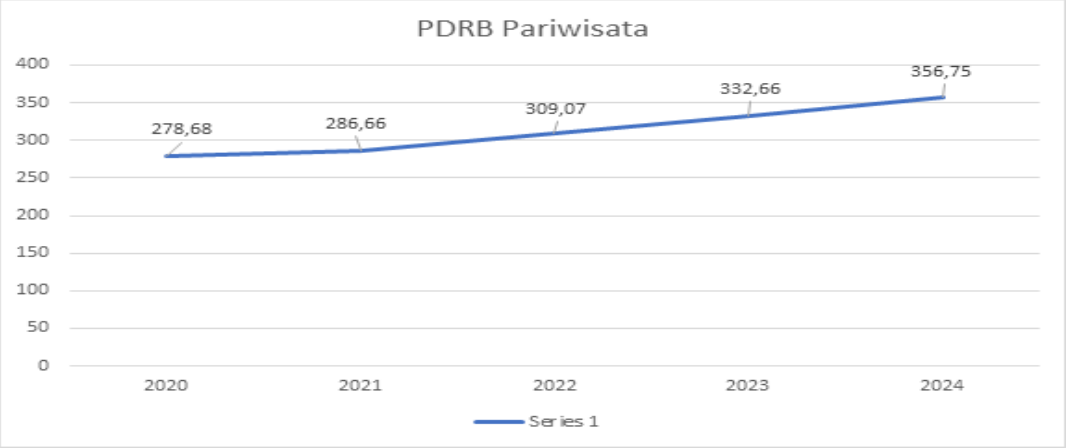

Gambar 2. 28 Nilai PDRB Sektor Pariwisata 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2025

D. Indeks Inovasi Daerah

Penelitian dan Pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru, atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian sejatinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan. Bisa dikatakan hulu dari perencanaan pembangunan adalah hasil penelitian. Artinya, perencanaan yang berkualitas hanya dapat terwujud bila dilandasi oleh hasil penelitian yang berkualitas pula. Sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, disebutkan bahwa peran dari ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya adalah menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan.

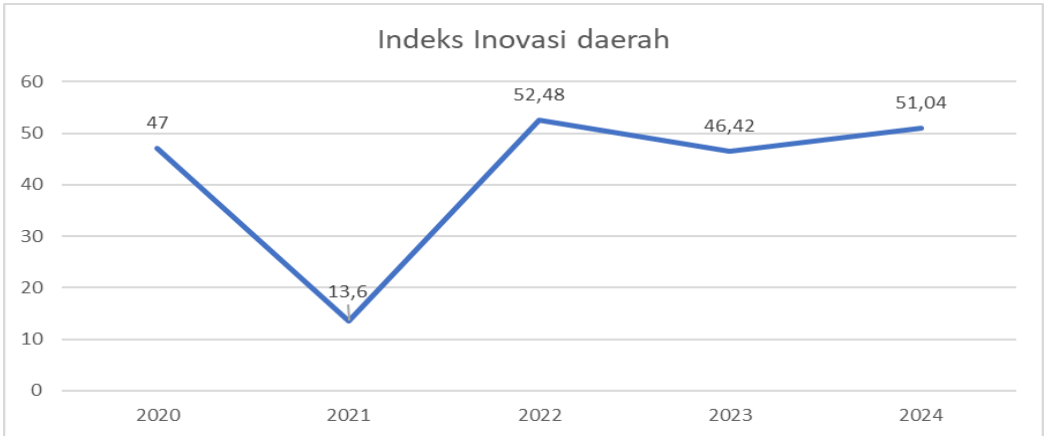

Gambar 2. 29 Indikator Indeks Inovasi Daerah Di Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan pada gambar di atas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2020-2021 indeks inovasi daerah Kota Pasuruan masih dalam kategori kurang inovatif meskipun nilai pada tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2021. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan mekanisme di tahun 2021 baik dalam penilaian maupun penggunaan batas/rentang skor. Pada tahun 2022 ke tahun 2023 terjadi penurunan karena pada tahun 2023 inovasi yang dikirim tingkat kematangan nya masih beragam, kelemahan inovasi di Kota Pasuruan diantaranya masih belum memiliki sistem online (aplikasi) dan belum direplikasi sehingga tingkat kematangannya rendah. Pada tahun 2024 Indeks Inovasi Daerah Kota Pasuruan kembali mengalami peningkatan mencapai angka 51,04 (kategori inovatif).

Dalam Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Kota Pasuruan diarahkan salah satunya dengan cara pengembangan dan implementasi peta potensi produk unggulan daerah antara lain jenis makanan, industri dan kerajinan. Sementara itu, pengembangan produk unggulan dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu belum terdapat peta produk unggulan dan belum terselenggaranya kegiatan riset dan inovasi berdasarkan produk unggulan daerah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan produk unggulan daerah ini adalah dengan menyusun kajian pengembangan produk unggulan daerah, klasterisasi produk unggulan daerah, penyusunan road map ekonomi kreatif, dan rencana hilirisasi produk unggulan daerah.

Kota Pasuruan memiliki potensi besar dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah yang berorientasi pada peningkatan daya saing, baik di tingkat regional maupun nasional. Ekosistem ini ditopang oleh kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga litbang, serta komunitas masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya inovasi sebagai penggerak ekonomi. Salah satu produk unggulan daerah yang menjadi fokus pengembangan adalah sektor olahan hasil perikanan, khususnya pengolahan ikan dan udang yang telah menjadi identitas ekonomi pesisir Kota Pasuruan. Melalui riset terapan dan inovasi teknologi pengolahan, kualitas produk perikanan dapat ditingkatkan, daya simpan diperpanjang, dan nilai tambah ekonomi bagi pelaku UMKM semakin optimal.

Di sisi lain, pemerintah kota juga menempatkan penanganan banjir perkotaan sebagai salah satu program super prioritas. Permasalahan banjir tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, tetapi juga menghambat distribusi barang, menurunkan produktivitas sektor perdagangan, dan mengancam keberlanjutan industri. Untuk itu, riset dan inovasi di bidang infrastruktur hijau, sistem drainase terpadu, serta teknologi deteksi dini banjir menjadi kunci untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Sinergi antara pengembangan produk unggulan perikanan dengan penanganan banjir memberikan efek ganda bagi daya saing Kota Pasuruan. Di satu sisi, inovasi teknologi mampu memperkuat sektor unggulan daerah, sementara di sisi lain, infrastruktur yang andal memastikan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Dengan penguatan ekosistem riset yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata, Kota Pasuruan dapat membangun keunggulan kompetitif yang tidak hanya berbasis potensi lokal, tetapi juga mampu menjawab tantangan global secara berkelanjutan.

E. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Pembangunan Kota Pasuruan tidak hanya berfokus pada aspek kesejahteraan ekonomi dan sosial, tetapi juga sangat memperhatikan pilar-pilar fundamental negara, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan, penguatan keamanan nasional yang tangguh, serta perwujudan demokrasi yang substansial. Ketiga pilar ini saling berkaitan erat dan menjadi landasan utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan setiap warga negara mendapatkan hak dan perlindungan yang sama. Hukum yang adil menjadi jembatan untuk menjaga ketertiban sosial, sementara keamanan nasional yang tangguh memberikan rasa aman dari berbagai ancaman, dan demokrasi yang substansial menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar merefleksikan aspirasi rakyat.

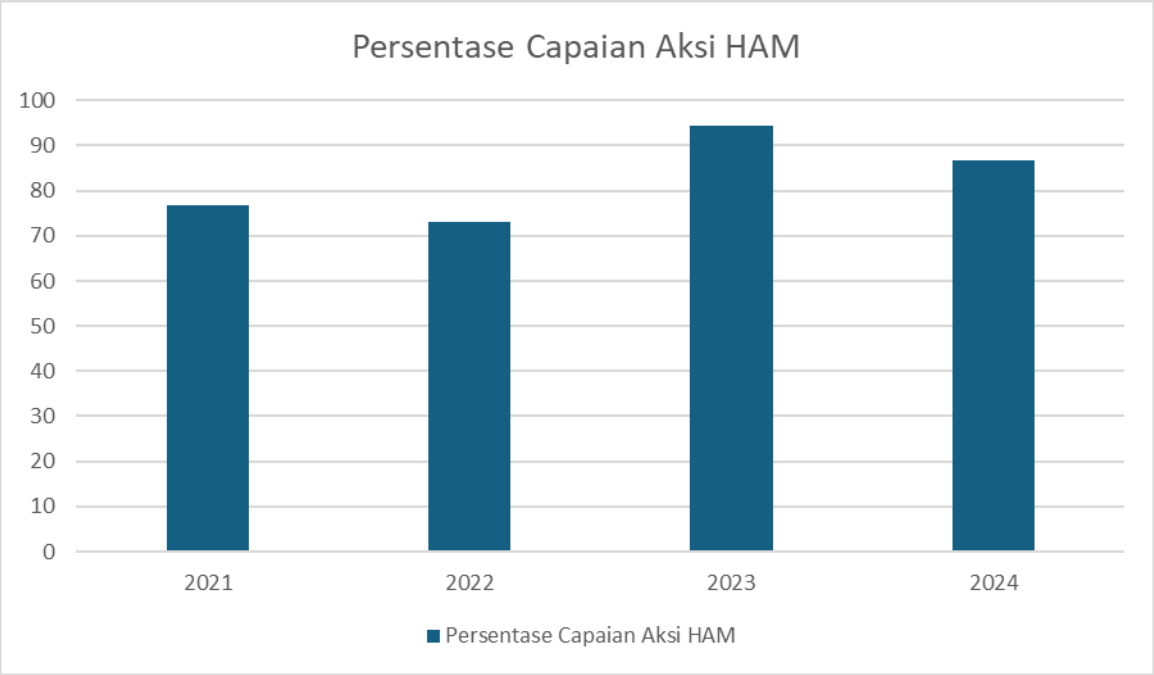

Gambar 2. 30 Persentase Capaian Aksi HAM Tahun 2021-2024
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan, 2025

Berdasarkan data grafik diatas, Kota Pasuruan dari tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya dinamika yang menarik dalam upaya pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada awal periode, yaitu tahun 2021, capaian aksi HAM tercatat di angka sekitar 75%. Angka ini menunjukkan komitmen awal yang cukup baik dalam melaksanakan program-program terkait HAM. Namun, pada tahun berikutnya, 2022, terjadi penurunan kecil dalam persentase capaian, turun ke angka sekitar 72%. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan atau hambatan dalam implementasi program-program HAM pada tahun tersebut, yang mungkin memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Titik balik yang signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana Kota Pasuruan menunjukkan lompatan besar dalam capaian aksi HAM. Persentase capaian melonjak drastis hingga mencapai angka sekitar 95%, sebuah pencapaian yang sangat tinggi dan patut diapresiasi. Kenaikan yang tajam ini bisa jadi merupakan hasil dari komitmen politik yang kuat, implementasi kebijakan yang lebih efektif, atau sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Meskipun pada tahun 2024 angka capaian mengalami sedikit penurunan menjadi sekitar 86%, angka ini tetap berada di level yang sangat tinggi dan jauh di atas capaian tahun 2021 dan 2022.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren positif dalam upaya Kota Pasuruan untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan HAM. Kenaikan drastis pada tahun 2023 menjadi bukti nyata dari keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi isu-isu HAM. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024, capaian yang stabil di atas 80% menunjukkan bahwa program-program terkait HAM telah berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Penurunan kecil di tahun 2024 dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan, sehingga Kota Pasuruan dapat kembali mencapai atau bahkan melampaui capaian tertinggi di tahun 2023 di masa mendatang.

2.1.3.3. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

A. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengukuran IKLI memberikan informasi baik dalam perspektif masyarakat secara objektif, komprehensif, dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Indikator IKLI di Kota Pasuruan dihitung mulai tahun 2022-2024 dengan capaian sebagai berikut:

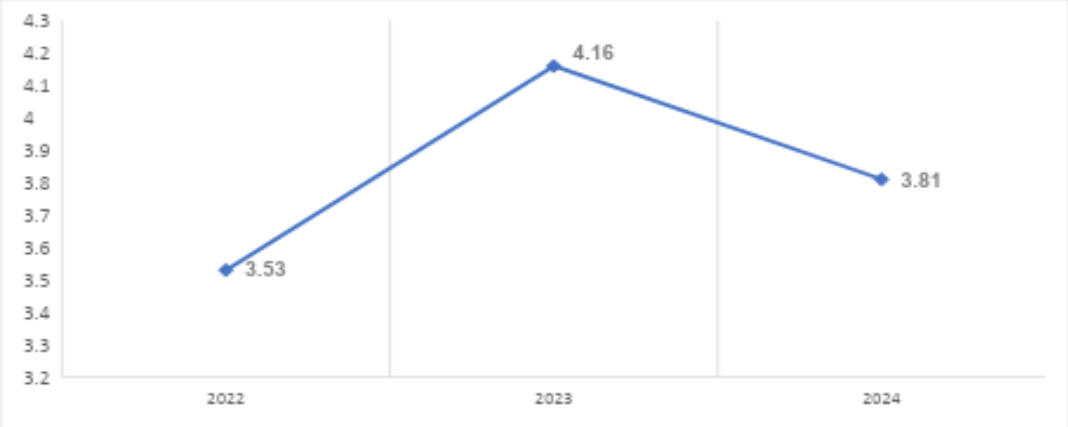

Gambar 2. 31 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Di Kota Pasuruan Tahun 2022-2024
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan, 2025

Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa IKLI Kota Pasuruan memiliki angka yang fluktuatif. Pada tahun 2022 IKLI berada pada angka 3,53. Angka tersebut meningkat pada tahun 2023 menjadi 4,16. Usai peningkatan tersebut terjadi penurunan, pada tahun 2024 Indeks Infrastruktur berada pada angka 3,81. Penurunan tersebut terjadi disebabkan oleh perubahan waktu pelaksanaan survei kepuasan yang

dilakukan di bulan November, saat curah hujan tinggi, beberapa infrastruktur dinilai menurun, terutama infrastruktur drainase.

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Pasuruan menjadi indikator penting untuk menilai kemajuan pembangunan serta kepuasan warga terhadap fasilitas infrastruktur dasar. Berbagai sektor infrastruktur yang dihitung dalam indeks ini mencakup area penting seperti permukiman, di antaranya sanitasi terpadu (IPAL/IPLT), pengelolaan sampah, serta sistem penyediaan air minum (SPAM). Selain itu, IKLI juga mencakup infrastruktur air seperti jaringan drainase dan irigasi, serta infrastruktur transportasi yang mencakup kualitas dan kestabilan jalan. Dengan menggabungkan berbagai sektor ini, IKLI menunjukkan gambaran umum tentang sejauh mana layanan infrastruktur dasar yang diberikan oleh pemerintah setempat.

Hasil IKLI Kota Pasuruan terlihat mengalami perubahan yang fluktuatif, namun secara keseluruhan menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022, nilai IKLI sebesar 3,53, yang masuk dalam kategori cukup baik. Nilai ini kemudian naik tajam menjadi 4,16 di tahun 2023, menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam kualitas layanan infrastruktur. Peningkatan ini kemungkinan besar didorong oleh selesainya beberapa proyek besar maupun peningkatan efisiensi layanan yang membuat warga lebih puas. Namun, di tahun 2024, nilai IKLI kembali turun menjadi 3,81. Meskipun masih dalam kategori baik, penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kualitas infrastruktur atau munculnya masalah baru di lapangan.

Cara menghitung IKLI menggunakan hasil survei persepsi warga. Indeks ini dibuat dengan mengambil rata-rata berbobot dari penilaian masyarakat terhadap berbagai aspek infrastruktur, seperti kemudahan akses, keandalan, dan kualitas pelayanan. Skala penilaian umumnya berada antara 1 (sangat buruk) hingga 5 (sangat baik). Dengan demikian, nilai 3,53, 4,16, dan 3,81 menunjukkan bahwa secara umum warga menganggap layanan infrastruktur Kota Pasuruan berada di tingkat yang cukup bagus. Kenaikan nilai di tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan nyata dan signifikan, sementara penurunan di 2024 bisa mencerminkan adanya keluhan atau masalah baru terkait pemeliharaan dan operasional.

Sebagai indikator yang digunakan sebagai target, interpretasi dari IKLI sangat penting bagi perencanaan pembangunan. Peningkatan yang tajam di tahun 2023 bisa dianggap sebagai bukti keberhasilan berbagai proyek infrastruktur yang dilaksanakan. Namun, penurunan di tahun 2024 bisa menjadi peringatan yang menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi yang lebih mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa

keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya terlihat dari selesainya proyek fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mengelola dan mempertahankan infrastruktur agar kualitas layanan tetap terjaga bahkan terus meningkat. Oleh karena itu, data IKLI menjadi alat yang efektif untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut demi mencapai kualitas pelayanan infrastruktur yang berkelanjutan.

B. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:

1. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
2. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi).

Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat
2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2
3. Memiliki akses air minum layak
4. Memiliki akses sanitasi layak

Metode Perhitungan pada kondisi pertama : Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan bekelanjutan

$$PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT} x100\%$$

Metode Perhitungan pada kondisi kedua : Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator

proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).

$$PHLTB\ proksi = \frac{JRTHLTB\ proksi}{JRT} x100\%$$

Keterangan :
PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;
JRTHLTB (proksi) = jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;
JRT = Jumlah rumah tangga
Catatan : Perhitungan exercise Provinsi menggunakan data presentase rumah tangga dengan akses hunian layak yang dirilis oleh BPS

2.1.3.4. Stabilitas Ekonomi Makro

Inflasi merupakan suatu kecenderungan harga-harga mengalami peningkatan secara umum dan terus menerus. Selain itu inflasi juga dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10-30% setahun; berat antara 30-100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Kondisi dan perkembangan inflasi di Kota Pasuruan dapat diketahui dengan melihat pada inflasi yang dialami oleh Kota Probolinggo, mengingat Kota Pasuruan sebagai salah satu wilayah yang saat ini tidak terpilih sebagai sampel SBH (Survei Biaya Hidup), besaran inflasi di Kota Pasuruan diketahui berdasarkan pendekatan metode *sister city* terhadap inflasi di Kota Probolinggo, mengingat Kota Pasuruan secara geografis berdekatan dengan Kota Probolinggo, selain itu beberapa fenomena di Kota Pasuruan memiliki kesamaan pola dengan Kota Probolinggo. Misalnya pola konsumsi, pendidikan, pengeluaran per kapita, hingga sumber penghasilan masyarakatnya.

Laju inflasi di Kota Pasuruan 2020 hingga 2023 cenderung dinamis. Pada tahun 2020 laju inflasi Kota Pasuruan berada di angka 1,88% yang mana menjadikannya lebih tinggi daripada laju inflasi nasional. Kemudian pada tahun 2021 laju inflasi mengalami penurunan yang baik hingga menyentuh angka 1,76%. Namun pada tahun 2022 laju

inflasi Kota Pasuruan kembali mengalami kenaikan drastis hingga menyentuh angka 5,45%. Meskipun kenaikan laju inflasi ini cukup tinggi, Kota Pasuruan masih berada di zona aman di bawah laju inflasi nasional. Pada tahun 2023 Kota Pasuruan berhasil menurunkan inflasinya hingga menyentuh angka 3,24% meskipun angka ini lebih tinggi daripada laju inflasi nasional yang berada di angka 2,56%. Terakhir di tahun 2024, angka inflasi Kota Pasuruan mengalami penurunan kembali hingga 1,90%, sedangkan angka inflasi nasional berada di angka 1,57%. Berikut merupakan sajian data mengenai laju inflasi Kota Pasuruan:

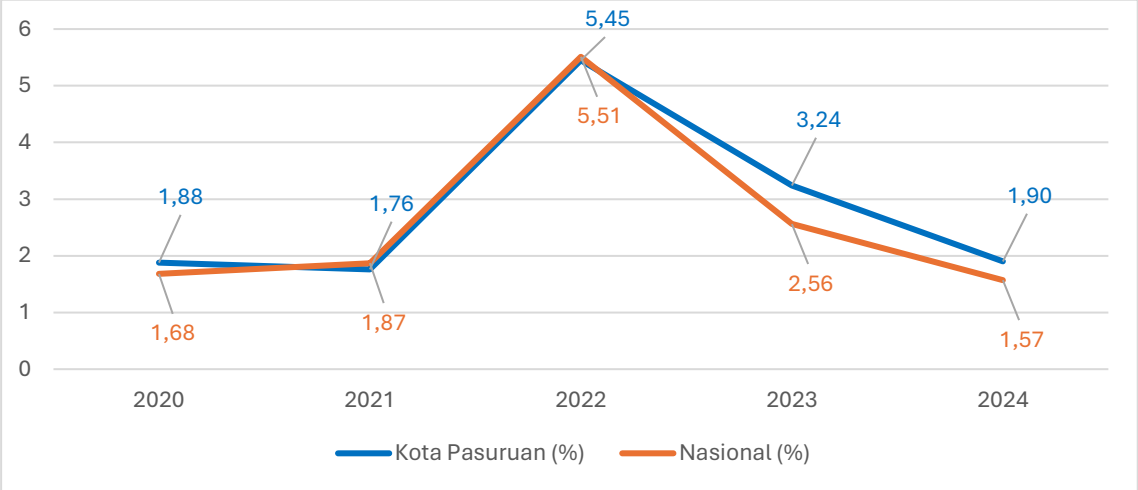

Gambar 2. 32 Laju Inflasi Kota Pasuruan Dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2025

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

A. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E Government*. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

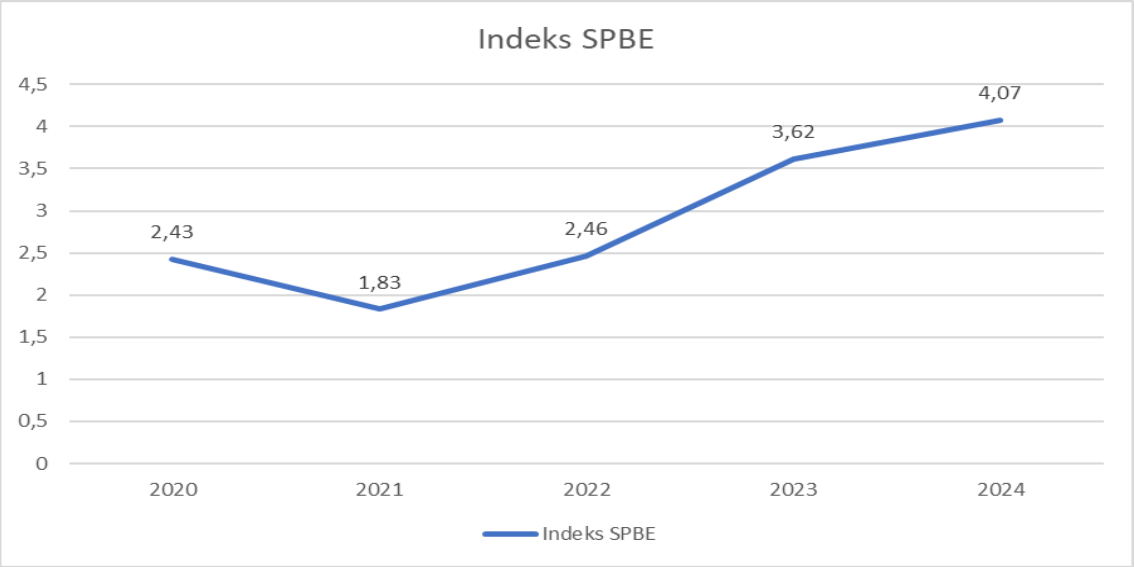

Gambar 2. 33 Indeks Spbe Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, 2025

Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan data di grafik diatas maka capaian Indeks SPBE di Kota Pasuruan menunjukkan rata- rata capaian yang meningkat, hanya di tahun 2021 yang mengalami penurunan. Dengan melihat capaian di atas maka capaian yang baik tersebut harus terus ditingkatkan mengingat SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

2.1.4.2. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

A. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah adalah sebuah indikator yang mengukur kemampuan suatu daerah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan atraktif bagi investasi, serta memperkuat daya saing ekonomi regional. Indeks ini dapat mencakup berbagai faktor seperti infrastruktur, regulasi, ketersediaan tenaga kerja, akses pasar,

dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu wilayah. Menurut perhitungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, capaian nilai Indeks Daya Saing Daerah Kota Pasuruan sebagai berikut:

Tabel 2. 18 IDSD Kota Pasuruan Tahun 2022-2024

Tahun	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekosistem Inovasi		Skor
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
2022	4,41	2,30	3,57	2,31	4,00	3,53	4,71	3,23	1,61	0,39	5,00	2,30	3,11
2023	4,64	2,78	4,79	3,20	3,99	4,10	4,88	2,76	-	3,90	2,61	2,64	-
2024	4,30	3,12	4,77	3,58	3,95	4,24	5,00	3,28	2,88	3,92	4,06	2,67	3,82

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Berdasarkan tabel di atas, nilai IDSD Kota Pasuruan pada tahun 2022 sebesar 3,11, sedangkan pada tahun 2023 skor IDSD tidak teridentifikasi disebabkan ada capaian pilar yang belum lengkap. Sedangkan pada tahun 2024 skor IDSD Kota Pasuruan berada di angka 3,82. Secara keseluruhan, pilar yang paling berkontribusi dalam daya saing Kota Pasuruan adalah Pilar 1 (Institusi), Pilar 6 (Keterampilan), dan Pilar 7 (Pasar Produk).

Dalam hal Pengembangan Daya Saing Daerah, Kota Pasuruan memiliki potensi wisata religi yang menarik, terutama dengan adanya beberapa tempat bersejarah dan ikon wisata religi baru. Beberapa destinasi yang bisa dikunjungi antara lain Taman Makkah, Payung Madinah, dan Makam Mbah Slagah. Wisata religi Kota Pasuruan telah memberikan dampak pisitif dalam aktivitas ekonomi Masyarakat yang masih dapat di optimalkan. Namun disamping potensi ini, terdapat permasalahan dalam pengembangan wisata religi yang harus segera teratasi, yaitu terkait dengan infrastruktur penunjang. Meskipun Kota Pasuruan dapat menarik ratusan ribu peziarah tiap tahun, pendapatan yang diperoleh masih sangat terbatas, terutama Retribusi parkir sementara penerimaan dari sumber lain hampir tidak dapat dimaksimalkan. Walaupun langkah-langkah penataan seperti RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan penataan trotoar serta parkir telah dilakukan, masih banyak ruang publik yang belum nyaman dan kurangnya fasilitas dasar seperti area parkir, toilet, resting area, maupun signage informatif. Kondisi Ini berdampak langsung pada pengalaman peziarah dan pengembangan destinasi religi yang berkelanjutan.

2.1.4.3. Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.4.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan saluran perubahan masyarakat, yang menjadi salah satu prioritas pembangunan. Pemerintah sebagai pilar demokrasi harus menjadikan pendidikan sebagai orientasi perubahan. Tentunya prioritas ini perlu dilaksanakan pemerintah dengan sebaik-baiknya guna mendukung pelaksanaan pendidikan berdasarkan hakikat pendidikan dan amanah Undang-Undang Dasar. Peran pemerintah dalam melaksanakan layanan wajib bidang pendidikan, dicerminkan melalui beberapa indikator, antara lain: pendidikan usia dini, tingkat dasar dan menengah, baik itu terkait kualitas manajemen maupun fasilitas infrastruktur penunjangnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pendidikan di Kota Pasuruan. Sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyelenggaraan urusan pendidikan di Kota Pasuruan meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Sekolah Menengah (SMP), dan Pendidikan Masyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022, Pemerintah Kota Pasuruan juga menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan yang realisasi capaiannya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. 19 Capaian Indikator SPM Urusan Pendidikan Kota Pasuruan

No.	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	77,42%	80,94%	87,73%	88,57%	98,73%
2.	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	101,93%	98,01%	99,48%	99,47%	97,56%
3.	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	0,73%	5,59%	11,39%	37,72%	91,89%
4.	Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	-	-	80.94	87.73	88.57
5.	Anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS}	-	-	98.01	99.48	99.46
6.	Anak Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS}	-	-	5.59	11.39	37.71
7.	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	-	-	58.43	61.69	68.26
8.	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-	-	38.68	44.57	50.79
9.	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	-	-	68.85	72.77	77.73

No.	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
10.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	-	-	56.18	59.45	67.18
11.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	-	-	82.56	66.50	66.67
12.	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	-	-	85.24	85.44	87.62
13.	Iklim keamanan SD	-	-	68.63	71.04	71.31
14.	Iklim keamanan SMP	-	-	75.44	72.65	71.79
15.	Iklim kebinekaan SD	-	-	60.69	71.07	73.31
16.	Iklim kebinekaan SMP	-	-	60.9	70.06	74.81
17.	Iklim inklusivitas SD	-	-	54.17	56.59	54.42
18.	Iklim inklusivitas SMP	-	-	54.26	57.59	57.92

Ket : '-' = belum perhitungan SPM
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2025

Capaian indikator SPM Kota Pasuruan selama 2020-2024 memiliki perkembangan yang fluktuatif. Beberapa indikator juga mengalami pertumbuhan yang stabil di setiap tahunnya. Salah satu indikator yang terus tumbuh di setiap tahunnya adalah persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD. Capaian partisipasi PAUD di tahun 2020 berada di angka 77,42% kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 80,94%, dan terus meningkat di tahun 2022 menjadi 87,73%, di tahun 2023 menjadi 88,57% dan terakhir di 2024 menjadi 98,73%. Berbeda dengan capaian partisipasi PAUD, persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar memiliki dinamika yang fluktuatif. Tahun 2020 menjadi capaian tertinggi persentase partisipasi pendidikan dasar dengan angka 101,93%. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan angka partisipasi hingga menjadi 98,01%, kemudian di tahun 2022 naik menjadi 99,48% dan di tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat sedikit hingga menjadi 99,47%, terakhir di 2024 angka kembali turun hingga menjadi 97,56%. Sedangkan indikator partisipasi dalam pendidikan kesetaraan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 capaian partisipasi pendidikan kesetaraan hanya berada di angka 0,73%, kemudian naik di tahun 2021 menjadi 5,59% dan kembali naik di 2022 menjadi 11,39%, tahun 2023 menjadi 37,72%, dan tertinggi di 2024 mencapai 91,89%. Selain indikator capaian SPM terdapat indikator kinerja yang tidak kalah penting. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan pendidikan Kota Pasuruan 2020-2024:

Tabel 2. 20 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kota Pasuruan

NO.	INDIKATOR	RASIO	2020	2021	2022	2023	2024
1.	APS SD/MI Penduduk usia 7-12 tahun	%	120,33	117,88	120,15	102,63	103,62
2.	APS SMP/MTs Penduduk usia 13-15 thn	%	137,31	123,33	132,24	89,31	89,44
3.	Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI	Rasio	49	49,486	49,46	42,43	42,76
4.	Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs	Rasio	57	55,55	55,8	37,53	37,53
5.	Rasio Ketersediaan Sekolah (SD/MI-SMP/MTs)	Rasio	41	52	51,26	40,8	41,03
6.	Rasio Guru dan Murid SD/MI	Rasio	55,14	62,55	63,95	61,33	59,7
7.	Rasio Guru dan Murid SMP	Rasio	66,63	85,55	81,55	77,12	73,85
8.	Angka Putus Sekolah SD	%	0,03	0,04	0,07	0,0005	0,005
9.	Angka Putus Sekolah SMP	%	0,19	0,05	0,08	0,065	0,11
10.	Angka Kelulusan SD	%	100	100	100	100	100
11.	Angka Kelulusan SMP	%	99	100	100	100	100
12.	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	99,35	99,06	97,48	100
13.	Angka Melanjutkan dari SMP	%	100	100	100	100	N/A
14.	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (SD/MI-SMP/MTs)	%	99,77	97,33	94,1	93,47	93,86
15.	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (PAUD)	%	N/A	61,48	85,44	60,52	59,43
16.	Indeks Pembangunan Manusia	%	75,26	75,62	76,54	78,3	78,9
17.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,12	9,33	9,67	9,78	9,94
18.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,62	13,63	13,64	13,66	13,67
19.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	12,98	11,48	11,57	11,18	14,72
20.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
	Literasi Membaca	%	-	-	76,90	83,66	88,16
	Numerasi	%	-	-	46,79	66,22	81,31

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2025

Capaian indikator kinerja urusan pendidikan di Kota Pasuruan selama 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Indikator APS SD/MI memiliki dinamika yang dinamis turun dan naik, pada tahun 2020 angka APS SD/MI berada pada 120,33% namun di akhir tahun 2024 turun menjadi 103,62%. Begitu juga dengan APS SMP/MTs yang memiliki penurunan drastis di tahun 2020 sebesar 137,31% namun di 2024 turun hingga menjadi 89,44%. Fakta tersebut didukung dengan rasio ketersediaan sekolah jenjang SD/MI SMP/MTs yang terus menurun. Meskipun ketersediaan sekolah terus menurun rasio guru dan murid terus meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2024 rasio guru dan murid SD/MI sebesar 59,7 dan rasio guru dan murid SMP/MTs menjadi 73,85, keduanya memiliki perkembangan yang signifikan dari 2020. Angka kelulusan sekolah dan melanjutkan sekolah jenjang SD/MI maupun SMP/MTs juga terus meningkat di setiap tahunnya. Namun, persentase guru yang memenuhi kualifikasi baik di tingkat SD/MI-SMP/MTs maupun PAUD perlu diperhatikan karena menunjukkan angka yang cenderung menurun.

Permasalahan/ Ancaman/ Potensi:

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam capaian indikator SPM Pendidikan diantaranya adalah angka partisipasi pendidikan dasar yang menurun cukup jauh di 2024. Begitu pula dengan APS SD/MI – SMP/MTs yang cenderung menurun dan selaras dengan penurunan rasio ketersediaan sekolah, sehingga pemerintah Kota Pasuruan perlu lebih memperhatikan ketersediaan fasilitas sekolah. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.

B. Kesehatan

Kesehatan merupakan pelayanan dasar yang tidak dapat diabaikan dan menjadi kewajiban utama bagi pemerintah daerah. Sebagai fondasi dari kesejahteraan sosial, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang merata dan terjangkau terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kebutuhan akan pelayanan kesehatan bukan hanya merupakan hak asasi manusia, tetapi juga penting dalam menjaga produktivitas masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta mencegah penyebaran penyakit. Dengan memprioritaskan sektor kesehatan, pemerintah daerah dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas hidup, mencerminkan komitmen mereka terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan umum.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam urusan kesehatan merupakan serangkaian pedoman atau parameter yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada masyarakat mencapai tingkat yang diterima secara universal. Tujuan dari SPM adalah untuk menjamin bahwa setiap individu terlepas dari status sosial, ekonomi atau geografis memiliki akses yang setara dan layanan kesehatan yang berkualitas. Adapun capaian indikator SPM urusan kesehatan secara rinci dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. 21 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2020 -2024

NO.	INDIKATOR	SAT	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	82	86,55	90,59	94,46	95,99
2.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	91	93,36	92,04	96,06	85,28
3.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	93	94,95	96,5	100	90,58

NO.	INDIKATOR	SAT	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	63	71,34	81,47	88,23	90,95
5.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99	58,28	25,36	99,39	100
6.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	83	72,8	97,89	96,17	100
7.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	41	97,6	97,89	100,27	98,43
8.	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	54	87,98	97,47	100,14	100
9.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	86	100,31	97,62	101,35	100
10.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	102	103,63	100	109,97	100
11.	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	56	118,24	99,27	189,04	100
12.	Persentase orang denaan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	76	74,23	100	128,87	100
13.	Persentase balita gizi buruk	%	0,19	0,58	0,17	0,17	0,14
14.	Persentase balita gizi kurang	%	9,79	8,59	10,29	10,01	11,13
15.	Cakupan desa siaga aktif	%	81,5	82	81,7	94,1	100
16.	Usia Harapan Hidup	%	74,06	74,12	74,38	74,64	74,86
17.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	288,09	351,89	159,44	63,17	57,32
18.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	-	22,10	21,10	11,70	18,30
19.	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	90,49	88,91	91,48	89,40	83,48
20.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	82,7	97,4	117	80,17	77,2
21.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	96,30	98,78	99,76	101,13	100,15
22.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka	2966	3018	3,088.00	3290	3764
23.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Angka	3134	3018	3,047.00	3193	3755
24.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Angka	3055	3010	2,979.00	3166	3480
25.	Pelayanan Kesehatan Balita	Angka	8181	9268	10494	11458	14140
26.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Angka	32628	19507	30105	31938	31298
27.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Angka	110492	131669	136792	135964	141404
28.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Angka	7780	15320	20285	21947	24807
29.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Angka	27068	45551	52402	52671	12485
30.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Angka	4829	5788	5839	5941	6359
31.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka	389	400	409	430	458
32.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka	-	-	4559	7656	8482

'-' = belum menjadi indiakator sehingga data tidak tersedia
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2025

Kinerja urusan kesehatan Kota Pasuruan juga direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

1. Jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri

Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan yang bersumber dari masyarakat, dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Posyandu bertujuan untuk memberdayakan dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar guna mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Kota Pasuruan sendiri mampu menciptakan iklim sehat melalui komitmen untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah posyandu di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah posyandu utama dan mandiri berada pada angka 287 dan terus meningkat hingga 2024 berhasil mencapai angka 309 posyandu.

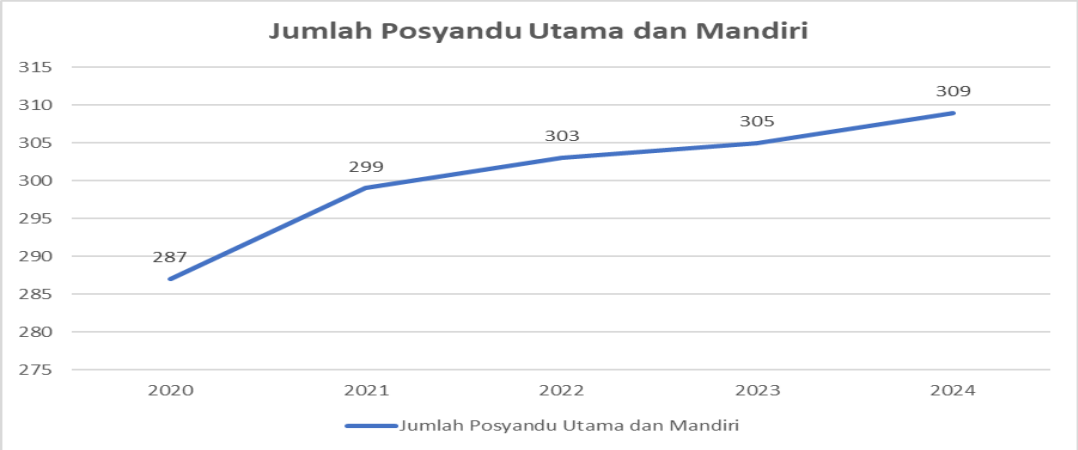

Gambar 2. 34 Jumlah Posyandu Utama Dan Mandiri Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2025

2. Rasio Posyandu Per Satuan Balita (Per 100 Balita)

Rasio posyandu per satuan balita diartikan sebagai perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita. Jika kita melihat rasio posyandu per satuan balita Kota Pasuruan maka dapat dilihat bahwa terjadi sedikit penurunan. Jika kita lihat sekilas memang jumlah posyandu di Kota Pasuruan meningkat di setiap tahunnya. Namun jika kita melihat data di 2024 rasio turun menjadi 1,7 dibanding tahun tahun sebelumnya yang konstan pada angka 2. Pada tahun 2024 juga dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan jumlah balita, namun jumlah posyandu yang bertambah juga dirasa masih kurang proporsional jika dibandingkan jumlah balita. Hal ini menjadi masalah yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Pasuruan.

Tabel 2. 22 Rasio Posyandu Per Balita Kota Pasuruan Tahun 2020 -2024

INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Posyandu	Jumlah	298	299	303	305	309
Jumlah Balita	Jumlah	16.324	16.432	13.115	12.986	16.051
Rasio Posyandu	Jumlah	2	2	2	2.3	1,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2025

3. Rasio Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik

Sarana dan prasarana kesehatan memainkan peran penting dalam meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Kemudahan akses ke lokasi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik sangat penting. Rasio fasilitas kesehatan per 100.000 penduduk di Kota Pasuruan menunjukkan tren meningkat di setiap tahunnya. Berikut merupakan capaian indikator rasio jumlah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik:

Tabel 2. 23 Rasio Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu Dan Poliklinik Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Sakit	Jumlah	2	2	2	2	2
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	100	100	100	100	100
Jumlah Puskesmas	Jumlah	8	8	8	8	8
Jumlah Puskesmas Pembantu	Jumlah	29	29	29	29	29
Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	Jumlah	55	59	60	67	71
Persentase Puskesmas tersedia obat esensial	%	100	100	100	100	100
Jumlah Penduduk	Jumlah	208.006	210.598	211.372	212.466	213.469
Rasio per 100.000 penduduk	%	26	28	28	32	33

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2025

4. Jumlah Tenaga Kesehatan dan Rasio Tenaga Medis

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat. Hal ini bertujuan untuk mencapai tingkat kesehatan tertinggi sebagai investasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi, serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Berikut merupakan data indikator jumlah tenaga kesehatan dan rasio tenaga medis di Kota Pasuruan:

Tabel 2. 24 Data Indikator Jumlah Tenaga Kesehatan Dan Rasio Tenaga Medis Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Medis (dokter dan dokter gigi)	Jumlah	179	212	130	238	190
Perawat dan bidan	Jumlah	700	755	591	790	840
Farmasi	Jumlah	99	111	43	109	120
Sanitasi	Jumlah	14	15	16	16	16
Gizi	Jumlah	24	27	28	30	36
Keterapian fisik	Jumlah	5	4	5	5	6
Teknisi Medis	Jumlah	48	54	43	67	74
Tenaga Kesehatan Masyarakat	Jumlah	7	13	19	37	48
Rasio Tenaga Medis (per 100.000 penduduk)	%	88,8	104,31	130	115,67	118,96
Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	0	0	87,5	87,5	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2025

Indikator jumlah tenaga kesehatan dan rasio tenaga medis di Kota Pasuruan cenderung menunjukkan tren meningkat di setiap tahunnya. Dapat kita lihat bahwa rasio tenaga medis per 100.000 penduduk mengalami peningkatan signifikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 rasio tenaga medis per 100.000 penduduk berada di angka 88,8% dan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada 2024 menjadi 118,96%. Data ini menunjukkan upaya yang baik dalam penyediaan tenaga kesehatan yang cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat.

5. Jumlah Kunjungan dan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Puskesmas

Indikator jumlah kunjungan dan indeks kepuasan masyarakat atas layanan puskesmas dapat dilihat secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 2. 25 Jumlah Kunjungan Dan Ikm Atas Layanan Puskesmas Di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kunjungan puskesmas	Jumlah	186.088	144.905	165.210	237.150	266.728
Indeks kepuasan masyarakat	%	88,1	86,59	87,48	88,27	93,53
Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan puskesmas	%	154,4	106,5	80,77	111,6	414,1
Jumlah penduduk yang memanfaatkan layanan puskesmas	Jumlah	186.088	144.905	165.210	237.150	219.392

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2025

Jika melihat data di atas maka dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk yang memanfaatkan layanan puskesmas serta indeks kepuasan masyarakat atas layanan puskesmas memiliki dinamika yang fluktuatif naik dan turun. Persentase penduduk yang

memanfaatkan layanan puskesmas pada tahun 2020 tercatat 154,4% terus mengalami naik dan turun hingga 2024 berada pada angka 414,1%. Kemudian untuk indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2020 tercatat 88,1% dan turun di tahun 2021 menjadi 86,59%. Namun pada tahun 2022-2024 indeks kepuasan masyarakat berangsur angsur naik hingga puncaknya pada 2024 tercatat kepuasan masyarakat sebesar 93,53%.

6. Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan dari satu individu ke individu lainnya melalui berbagai cara seperti kontak langsung, udara, atau melalui vektor seperti nyamuk. Sebaliknya, penyakit tidak menular adalah jenis penyakit yang tidak ditularkan antar individu, melainkan disebabkan oleh faktor faktor seperti gaya hidup yang tidak sehat, genetika, dan lingkungan. Penanganan penyakit menular dan tidak menular merupakan dua aspek yang berbeda dalam bidang kesehatan dan memerlukan pendekatan yang berbeda pula. Adapun capaian indikator penyakit menular dan tidak menular di Kota Pasuruan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. 26 Capaian Indikator Penanganan Penyakit Menular Dan Tidak Menular Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

INDIKATOR	SAT	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+)	orang	526	577	704	700	28
Persentase penderita TBC BTA yang diobati (+)	%	72	79	94	61	28
Jumah perkiraan penderita TBC BTA (+)	orang	729	729	748	1145	885
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	%	100	100	100	100	100
Jumlah penderita DBD yang ditangani	orang	34	105	251	65	210
Jumlah penderita DBD yang ditemukan	orang	34	105	251	65	210
Jumlah penderita penyakit HIV/AIDS	orang	56	34	42	69	62
Jumlah penderita HIV	orang	34	14	21	54	62
Jumlah penderita AIDS	orang	22	20	21	15	28

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2025

Jika kita melihat data di atas maka dapat diketahui bahwa capaian indikator penanganan penyakit menular dan tidak menular memiliki tren yang fluktuatif. Jumlah penderita DBD, HIV/AIDS cenderung meningkat di setiap tahunnya. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Pasuruan. Pada tahun 2020 jumlah penderita DBD 34 orang dan terus naik hingga 2024 menjadi 210 orang. Begitu juga dengan penderita HIV pada tahun 2020 sejumlah 34 orang dan terus naik hingga 2024 sebanyak 62 orang. Dan penderita AIDS pada tahun 2020 sebanyak 22 orang dan terus naik hingga 2024 sebanyak 28 orang. Masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius.

Untuk penanganan penyakit DBD setiap tahunnya memiliki angka yang konstan yakni 100% ditangani. Sedangkan untuk penanganan penyakit TBC BTA (+) justru terus turun di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 dan 2021 jumlah kasus TBC BTA (+) yang ditangani 72% dan 79%. Kemudian naik pada 2022 menjadi 94% namun berangsur turun penangananya, pada 2023 61% yang ditangani dan pada 2024 hanya 28% yang ditangani.

Permasalahan/ Ancaman/ Potensi:

Jumlah posyandu utama dan mandiri terus bertambah kuantitasnya setiap tahun. Hal tersebut merupakan prestasi yang baik, namun perlu diingat bahwa peningkatan jumlah posyandu perlu disesuaikan dengan jumlah balita yang ada. Karena rasio jumlah balita dan posyandu turun angkanya pada tahun 2024

Jumlah tenaga medis yang terus meningkat serta kepuasan layanan masyarakat terhadap puskesmas memiliki capaian yang sangat bagus dan cenderung meningkat.

Pemerintah Kota Pasuruan perlu memperhatikan masyarakat yang menderita penyakit menular dan tidak menular seperti DBD, HIV/AIDS karena angka penderitanya yang terus meningkat di setiap tahun

Penanganan penyakit TBC BTA (+) juga menjadi tugas penting bagi Pemerintah Kota Pasuruan mengingat persentase penanganannya yang cenderung turun tahun ke tahun.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Pasuruan diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan. Kinerja urusan PUPR Kota Pasuruan dalam direpresentasikan oleh capaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana berikut:

Tabel 2. 27 Capaian SPM PUPR Kota Pasuruan Tahun 2021-2023

INDIKATOR	2021	2022	2023	2024
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	87,49%	87,63%	90,32%	99,60%
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	88,74%	80,70%	85,99%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, 2025

SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Pasuruan tahun 2021-2024 secara umum memiliki capaian yang meningkat. Peningkatan pada indikator SPM Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sehari-hari yang mencapai 99,60% di tahun 2024 mengindikasikan bahwa sebagian besar warga Kota Pasuruan sekarang memiliki akses yang lebih baik untuk air minum bersih. Sedangkan untuk indikator SPM

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yang fluktuatif mengindikasikan bahwa pengolahan air limbah domestik di Kota Pasuruan sudah baik namun masih perlu peningkatan layanan dan di tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan sebesar 99,20%.

Pemerintah Kota Pasuruan mengelola 121 ruas jalan sepanjang 81,925 km atau seluas 474.549,50 m^2 dan 86,79% dari panjang tersebut pada tahun 2024 dalam kondisi baik. Selain itu Kota Pasuruan juga dilewati 12 ruas jalan nasional sepanjang 17,18 km atau seluas 164.510 m^2. Panjang jalan yang dikelola pemerintah Kota Pasuruan secara umum tetap sehingga fokus pembangunan lebih pada perawatan dan perbaikan agar jalan tetap dalam kondisi baik. Kinerja pembangunan dalam hal ini sudah baik melihat adanya peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik. Grafik berikut ini menggambarkan kinerja tersebut:

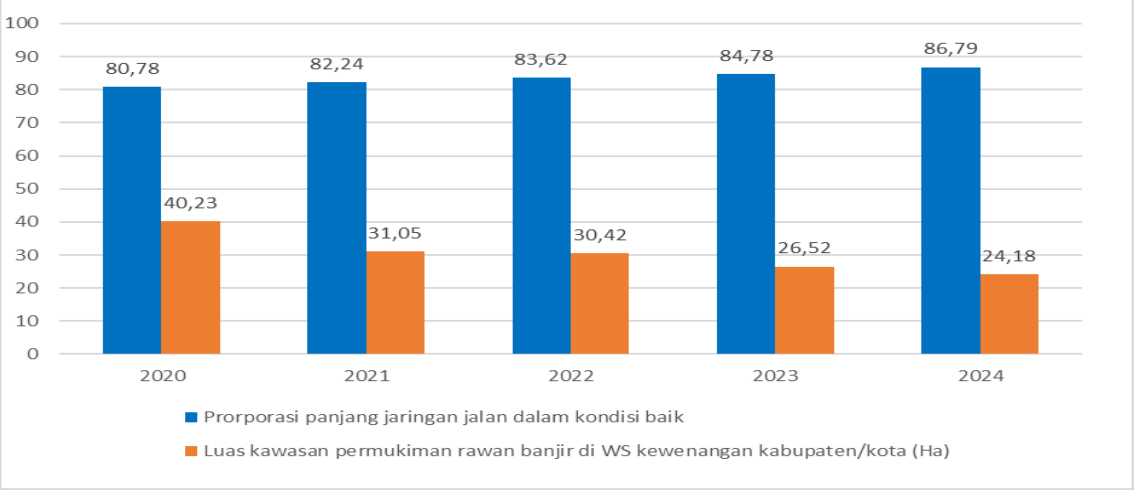

Gambar 2. 35 Capaian Indikator Urusan PUPR Kota Pasuruan 2020-2024
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, 2024

Tantangan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Pasuruan kedepannya terkait dengan rencana pembangunan jalan lingkar utara. Pembangunan jalan 20 puluh tahun ke depan perlu menyikapi rencana pemerintah kota terkait pembangunan tersebut. Kondisi yang sedikit berbeda terjadi pada pembangunan irigasi, grafik di bawah ini menggambarkan kondisi irigasi primer, irigasi sekunder, dan irigasi tersier. Perlu upaya bersama untuk penanggulangan banjir di Kota Pasuruan karena tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Pasuruan saja. Integrasi semua *stakeholder* perlu diprioritaskan untuk mengatasi permasalahan banjir agar risiko terus berkurang ke depannya.

Dalam urusan PUPR, Kota Pasuruan menggunakan beberapa indikator utama untuk menilai pencapaian urusan tersebut, termasuk dalamnya penataan ruang. Indikator-indikator ini penting untuk mengevaluasi efektivitas program pembangunan daerah dalam lima tahun terakhir. Dua indikator yang terlihat pada Gambar 2.32 adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan luas kawasan permukiman rawan banjir. Indikator-indikator ini memiliki definisi operasional dan cara perhitungan yang spesifik, yang menjadi dasar untuk menilai kinerja dan pencapaian.

Indikator "Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik" diartikan sebagai persentase panjang jalan di seluruh Kota Pasuruan yang memenuhi standar teknis dan aman untuk digunakan. Jalan dalam kondisi baik adalah jalan yang tidak mengalami kerusakan berat seperti lubang, retak, atau amblas. Cara menghitungnya adalah dengan membagi panjang jalan yang dalam kondisi baik dengan total panjang seluruh jaringan jalan di Kota Pasuruan, lalu dikalikan 100%. Data menunjukkan peningkatan konsisten indikator ini dari 80,78% pada tahun 2020 menjadi 86,79% pada tahun 2024, yang menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas jalan.

Indikator lainnya adalah "Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (Ha)," yang mengukur luas permukiman yang rentan terhadap banjir. Definisi operasionalnya adalah total luas area yang secara historis atau dari segi topografi berisiko tinggi terkena banjir. Perhitungannya dilakukan dengan mengidentifikasi dan memetakan area rawan banjir, lalu mengukur luasnya dalam satuan hektar. Data menunjukkan penurunan luasan kawasan ini dari 40,23 Ha pada tahun 2020 menjadi 24,18 Ha pada tahun 2024, yang menandakan efektivitas program mitigasi banjir seperti normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

Selain itu, indikator "Indeks Inovasi Daerah" juga digunakan sebagai indikator penting. Indeks ini mengukur seberapa inovatif suatu daerah dalam mengelola pemerintahan, termasuk inovasi kebijakan, tata kelola, dan pelayanan publik. Perhitungannya didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti inovasi yang diajukan oleh pemerintah daerah, dengan bobot yang berbeda untuk setiap aspeknya. Meskipun skor tahun 2020 tidak bisa dibandingkan langsung dengan tahun-tahun

berikutnya karena perubahan metode, tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan komitmen kuat terhadap inovasi.

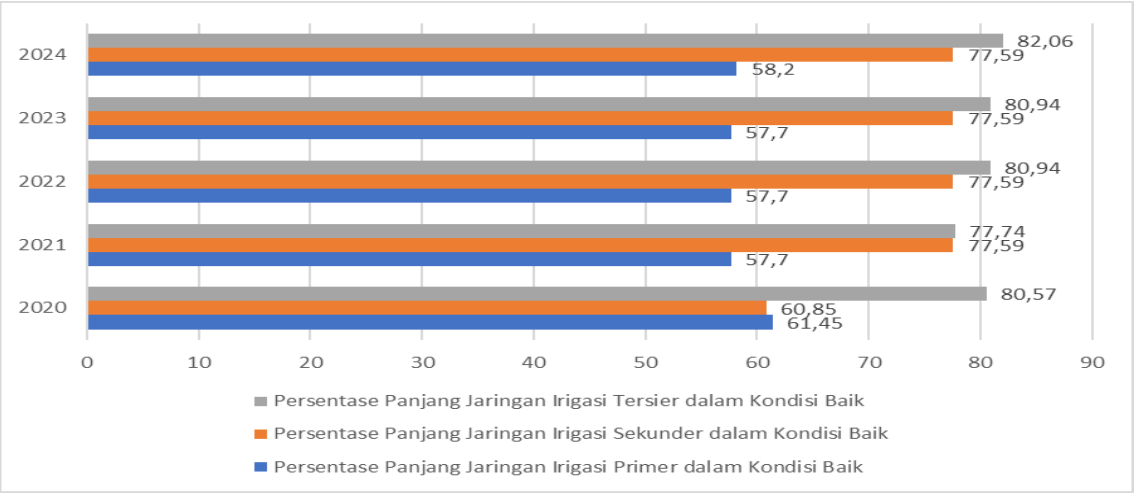

Gambar 2. 36 Persentase Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, 2024

Secara umum, panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kota Pasuruan masih cukup baik. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik memiliki angka yang fluktuatif namun masih cenderung naik. Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik di tahun 2020 berada pada angka 80,57 namun mengalami penurunan di 2021 menjadi 77,74, kemudian terus naik hingga di tahun 2024 berada pada angka 82,06. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik cenderung memiliki angka yang konstan. Pada tahun 2020 panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik berada pada angka 60,85. Kemudian pada tahun 2021-2024 memiliki nilai yang stabil pada angka 77,59. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik justru memiliki performa yang cenderung menurun. Pada tahun 2020 persentase berada pada angka 61,45. Kemudian pada tiga tahun selanjutnya yakni 2021,2022,2023 mengalami penurunan yang konstan di angka 57,7. Pada tahun 2024 persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik mengalami peningkatan menjadi 58,2.

Permasalahan/ Ancaman/ Potensi:

Terdapat beberapa capaian yang dapat diapresiasi seperti proporsi panjang jaringan jalan dengan kondisi baik yang terus meningkat di setiap tahunnya, hal ini diimbangi dengan menurunnya persentase permukiman rawan banjir yang ada di Kota Pasuruan.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik perlu menjadi perhatian karena angkanya yang cenderung menurun

Begitu pula dengan panjang jaringan irigasi primer yang memiliki tren cenderung turun dan konstan.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman kewenangannya meliputi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan.Ukuran keberhasilan perumahan dan kawasan permukiman dapat diidentifikasi dari rumah yang layak huni, akses air minum, sistem air limbah dan kawasan bebas kumuh perkotaan. Berikut merupakan capaian Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan:

Tabel 2. 28 Capaian Spm Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	10	25	24	14	65
Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, 2025

Melihat data tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Pasuruan telah mengupayakan semaksimal mungkin penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Adapun sejauh ini Pemerintah Kota Pasuruan juga berkomitmen untuk tidak melakukan relokasi rumah warga demi program pemerintah kota, sehingga dalam lima tahun terakhir tidak ada penanganan yang disebabkan kasus relokasi.

Kinerja urusan perkim Kota Pasuruan dalam lima tahun terakhir juga direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

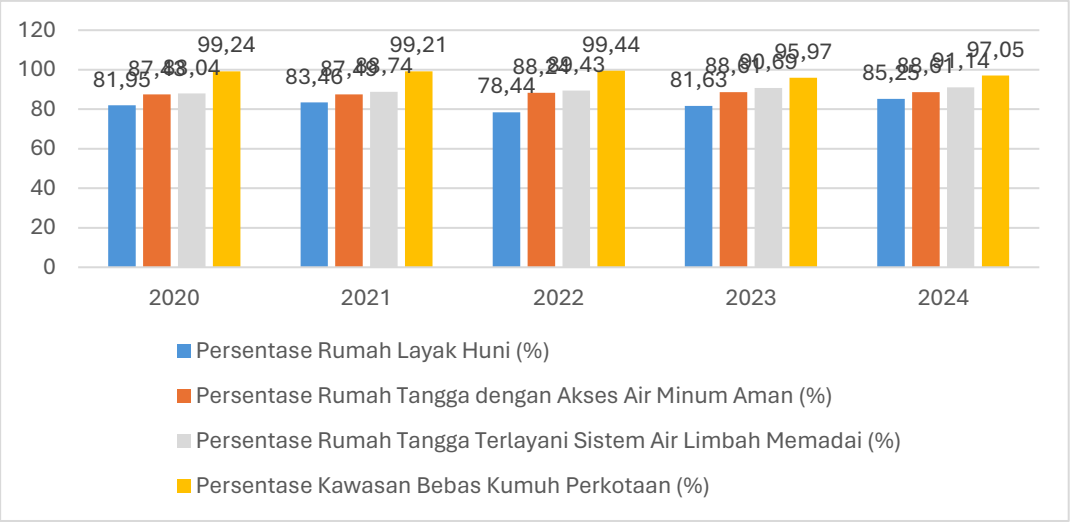

Gambar 2. 37 Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, 2025

Melalui data diatas dapat kita ketahui bahwa persentase rumah layak huni terus meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase rumah layak huni berada pada angka 96,69% dan terus meningkat hingga sampai pada angka 98,65% di tahun 2024. Hal ini beriringan dengan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman yang turut meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase rumah yang mendapatkan akses air minum aman berada pada angka 87,43% dan terus naik hingga 2024 berada pada angka 88,61%, termasuk didalamnya akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan sebesar 48,80%.

Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah memadai juga terus meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 berada di angka 88.04% dan terus naik hingga 2024 berada di angka 91,14%. Terakhir, persentase kawasan bebas kumuh perkotaan. Indikator ini memiliki angka yang sangat fluktuatif. Pada tahun 2020 berada pada angka 99,24% kemudian turun menjadi 99,21% di tahun 2021. Pada tahun 2022 kembali naik hingga sampai pada angka 99,44% namun pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni pada angka 95,67% dan terakhir pada 2024 persentase dapat kembali naik hingga berada pada angka 97,05%.

Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat
2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2
3. Memiliki akses air minum layak
4. Memiliki akses sanitasi layak

Metode Perhitungan pada kondisi kedua : Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).

$$PHLTB\ proksi = \frac{JRTHLTB\ proksi}{JRT} x100\%$$

Keterangan :
PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;
JRTHLTB (proksi) = jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;
JRT = Jumlah rumah tangga
Catatan : Perhitungan exercise Provinsi menggunakan data presentase rumah tangga dengan akses hunian layak yang dirilis oleh BPS

Permasalahan/ Ancaman/ Potensi:

Dalam urusan perumahan rakyat dan permukiman Kota Pasuruan patut diapresiasi. Terjadi peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya mengenai rumah layak huni, rumah tangga dengan akses air aman, rumah tangga dengan sistem air limbah memadai, serta tanggung jawab pemerintah dalam merehabilitasi rumah korban bencana.

Salah satu pekerjaan besar pemerintah adalah dalam indikator persentase kawasan bebas kumuh perkotaan karena tren yang cenderung menurun pada lima tahun terakhir. Hal ini perlu menjadi perhatian besar bagi pemerintah Kota Pasuruan

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib dasar di Kota Pasuruan. Kinerja urusan trantibumas salah satunya direpresentasikan oleh capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana berikut:

Tabel 2. 29 Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 - 2024

No.	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	100	100	92,74	93,33	100
2.	Pelayanan informasi rawan bencana (kebencanaan)	100	100	100	100	100
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (kebencanaan)	66,66	100	100	100	100
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (kebencanaan)	100	100	90	100	100
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (damkar)	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja & BPBD Kota Pasuruan, 2025

Berdasarkan data diatas maka dapat kita ketahui bahwa setiap tahunnya indikator capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat selalu mendapatkan skor yang tinggi. Meski begitu, pelayanan ketentraman dan ketertiban umum perlu diperhatikan karena angkanya sangat fluktuatif naik dan turun dalam lima tahun terakhir. Selain itu, kinerja urusan trantibum juga dapat direpresentasikan oleh capaian berikut:

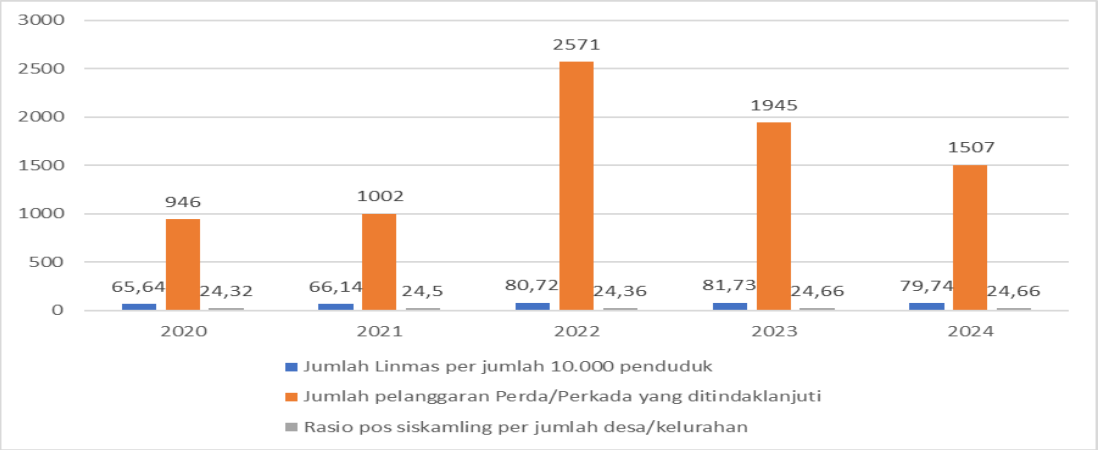

Gambar 2. 38 Indikator Urusan Trantibumlinmas Di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, 2025

Melihat data di atas dapat diketahui bahwa jumlah linmas per 10.000 penduduk cenderung memiliki tren naik, hanya satu kali turun pada tahun 2024. Kemudian untuk rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan hampir konstan di setiap tahunnya, hal ini tidak menjadi masalah karena sejatinya jumlah desa/kelurahan tidak bertambah setiap tahun. Yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah pelanggaran perda yang ditindaklanjuti. Angkanya sangat dinamis dalam lima tahun terakhir. Puncaknya berada pada tahun 2022 dengan jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti sejumlah 2571, dan terus menurun hingga 2024 berada pada angka 1507. Capaian ini menunjukkan tren positif kinerja Satpol PP dalam rangka menindaklanjuti kasus

pelanggaran perda/perkada yang ada, akan tetapi juga menunjukkan peningkatan kasus pelanggaran perda/perkada yang dilakukan oleh masyarakat Kota Pasuruan.

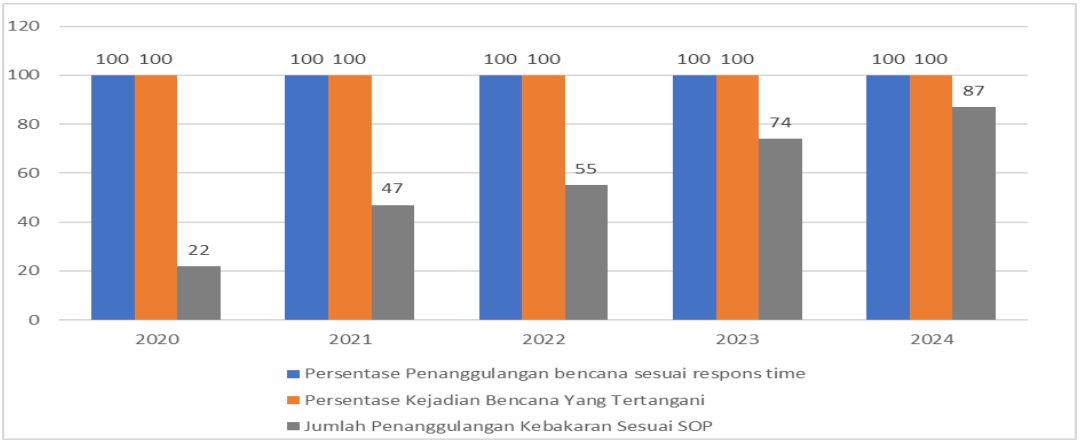

Gambar 2. 39 Indikator Sub Urusan Kebencanaan Dan Kebakaran Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: BPBD Kota Pasuruan, 2025

Kinerja sub urusan kebakaran dan kebencanaan direpresentasikan oleh capaian kinerja di atas. Dalam tiga tahun terakhir, seluruh kejadian bencana telah tertangani dan sesuai dengan respon *time* dengan persentase kinerja 100% atau sesuai target. Jumlah penanggulangan kebakaran sesuai SOP secara jumlah kejadian mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun berhasil ditangani 100%.

Permasalahan/ Ancaman/ Potensi:

Urusan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum memiliki capaian dengan angka yang tinggi di setiap tahunnya, namun perlu diperhatikan karena angkanya dalam lima tahun terakhir cukup fluktuatif.

Angka tindak lanjut pelanggaran sangat baik, banyak pelanggaran yang tertangani, namun ini menjadi indikasi bahwa di Kota Pasuruan banyak terjadi pelanggaran.

F. Sosial

Pelayanan sosial merupakan suatu kewajiban mendasar yang harus dijamin dan dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan capaian indikator dari urusan sosial adalah sebagai berikut: SPM dalam sosial merupakan kriteria atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan terkait kesejahteraan sosial kepada masyarakat terpenuhi. Adapun capaian indikator SPM Kota Pasuruan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. 30 Capaian SPM Urusan Sosial Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	0,35	5,22	100	100	100
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	30,35	5,22	100	100	100
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	30,35	5,22	100	100	100
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	30,35	5,22	100	100	100
Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	34,90	100	100	100	98,00

Sumber: Dinas Sosial Kota Pasuruan, 2025

Melalui data tersebut dapat kita ketahui bahwa kinerja Pemerinta Kota Pasuruan dalam aspek sosial mengalami peningkatan pelayanan di setiap tahunnya. Hal ini menandakan itikad baik Pemerintah Kota Pasuruan dalam mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat Kota Pasuruan.

Indikator kinerja urusan sosial Kota Pasuruan lainnya adalah terkait PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena hambatan, kesulitan, atau gangguan tertentu, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi secara memadai. Hambatan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, dan perubahan lingkungan yang tidak mendukung, seperti bencana.



Gambar 2. 40 Perkembangan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 - 2024
Sumber: Dinas Sosial Kota Pasuruan, 2025

Dari data tersebut kita dapat melihat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan bantuan dan yang seharusnya menerima bantuan. Pada tahun 2020 terlihat perbandingan yang sangat timpang antara jumlah PPKS yang diberi bantuan dan

yang seharusnya menerima bantuan. Pada tahun 2020 jumlah PPKS yang diberi bantuan sejumlah 63 penerima dan seharusnya jumlah PPKS yang menerima bantuan sebanyak 4105. Pada tahun-tahun berikutnya 2021-2024 jumlah PPKS yang diberikan bantuan dan yang seharusnya menerima bantuan sudah stabil dan sesuai. Namun perlu diperhatikan bahwa jumlah PPKS yang menerima bantuan sangat fluktuatif di setiap tahun, hal ini menandakan jumlah PPKS di Kota Pasuruan yang masih perlu diperhatikan. Berikut merupakan persentase jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial di Kota Pasuruan:

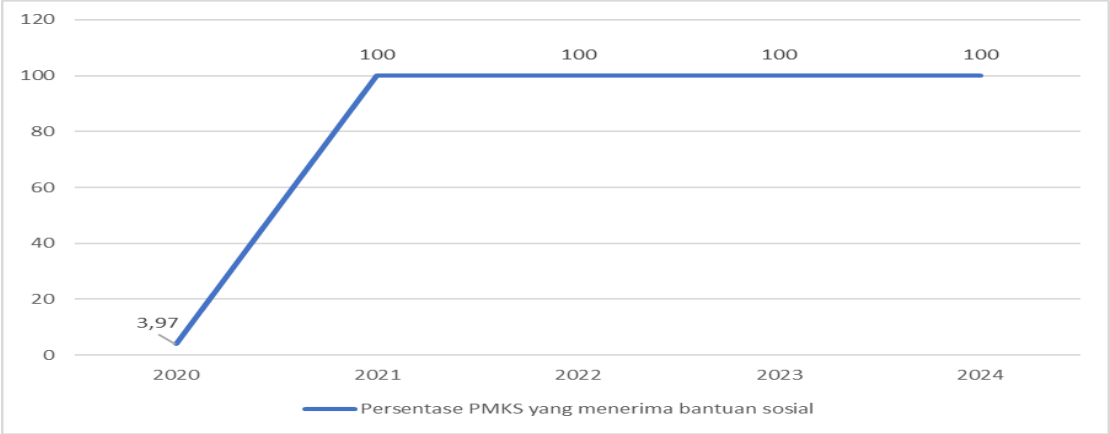

Gambar 2. 41 Indikator Sub Urusan Kebencanaan Dan Kebakaran Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Sosial Kota Pasuruan, 2025

Melalui grafik tersebut diketahui bahwa terjadi peningkatan yang konstan terhadap persentase PPKS yang menerima bantuan sosial setiap tahun. Pada tahun 2020 persentase PPKS yang menerima bantuan hanya sebesar 3,97%. Pada tahun berikutnya 2021-2024 jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 100%. Tentunya hal ini merupakan sinyal positif, wujud realisasi dan komitmen pemerintah dalam memperhatikan masyarakatnya yang menyandang masalah kesejahteraan sosial.

Permasalahan/ Ancaman/ Potensi:

Dari tahun ke tahun persentase realisasi PPKS yang memperoleh bantuan sosial terus meningkat bahkan hingga mencapai 100%. Hal ini patut diapresiasi, berkaitan dengan wujud komitmen pemerintah Kota Pasuruan dalam memperhatikan masyarakatnya yang menyandang masalah kesejahteraan sosial.

Namun, perlu diingat bahwa jumlah PPKS yang diberikan bantuan angkanya sangat fluktuatif setiap tahun, puncaknya berada pada 2020 dan 2022. Hal ini menandakan jumlah PPKS di Kota Pasuruan yang masih perlu diperhatikan

2.1.4.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan bertanggung jawab atas pengelolaan urusan ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2022. Secara umum, Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan bertanggung jawab untuk merencanakan ketenagakerjaan, menyediakan informasi dan menyalurkan lowongan pekerjaan, memberikan pelatihan kepada pencari kerja, melindungi hak-hak pekerja, serta melakukan pengawasan dan memastikan kepatuhan perusahaan. Berikut adalah data perkembangan indikator kinerja urusan ketenagakerjaan di Kota Pasuruan:

Tabel 2. 31 Jumlah Pencari Kerja Dan Penempatan Kerja Di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Pencari Kerja yang mendaftar	1271	1154	831	1398	1366
Penempatan tenaga kerja	460	630	691	766	582
Persentase pencari kerja yang ditempatkan	36,19	54,59	83,15	54,79	42,61

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, 2025

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah pencari kerja dan penempatan kerja sangat fluktuatif namun memiliki tren yang cenderung naik dalam aspek pencari kerja. Puncak angka tertinggi dalam aspek pencari kerja adalah pada tahun 2023 dengan total pencari kerja 1398 dan 766 pekerja yang diterima dan mendapatkan penempatan kerja. Kemudian pada tahun 2024 angka pencari kerja sedikit berkurang yakni 1366, hal ini juga diiringi dengan penurunan terhadap pekerja yang ditempatkan kerja. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain persentase pencari kerja yang ditempatkan, terdapat satu indikator lagi yang diperlukan untuk menggambarkan kondisi tenaga kerja di Kota Pasuruan yakni angka sengketa pengusaha dan pekerja di Kota Pasuruan. Berikut merupakan sajian datanya:



Gambar 2. 42 Angka Sengketa Pengusaha Dan Pekerja Di Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, 2025

Berdasarkan grafik tersebut ditemukan fakta bahwa angka sengketa antara pengusaha dan pekerja di Kota Pasuruan memiliki angka yang fluktuatif. Puncak tertinggi jumlah sengketa terjadi pada tahun 2021 dengan total 11 perkara. Pada tahun berikutnya 2022-2024 secara fluktuatif naik dan turun, namun tidak sampai lebih dari 12 perkara. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah sengketa cenderung memiliki angka turun.

Permasalahan/ Ancaman/ Potensi:

Persentase pencari kerja yang ditempatkan perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dalam lima tahun terakhir angkanya cenderung rendah. Pemerintah Kota Pasuruan perlu memastikan ketersediaan lapangan kerja sebanding dengan jumlah pencari kerja, serta memastikan kompetensi dan kualitas para pencari kerja di Kota Pasuruan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan.

Jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja cenderung rendah angkanya dalam lima tahun terakhir. Hal ini perlu diapresiasi dan dipertahankan untuk mewujudkan Kota Pasuruan yang ramah pekerja dan pebisnis.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah upaya memberdayakan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu

membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak akan terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Perlindungan anak adalah perlindungan anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan gangguan. Pasal 19 dari Konvensi PBB tentang Hak Anak menyediakan perlindungan anak di dalam dan di luar rumah. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tercantum bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pasuruan direpresentasikan oleh indikator berikut:

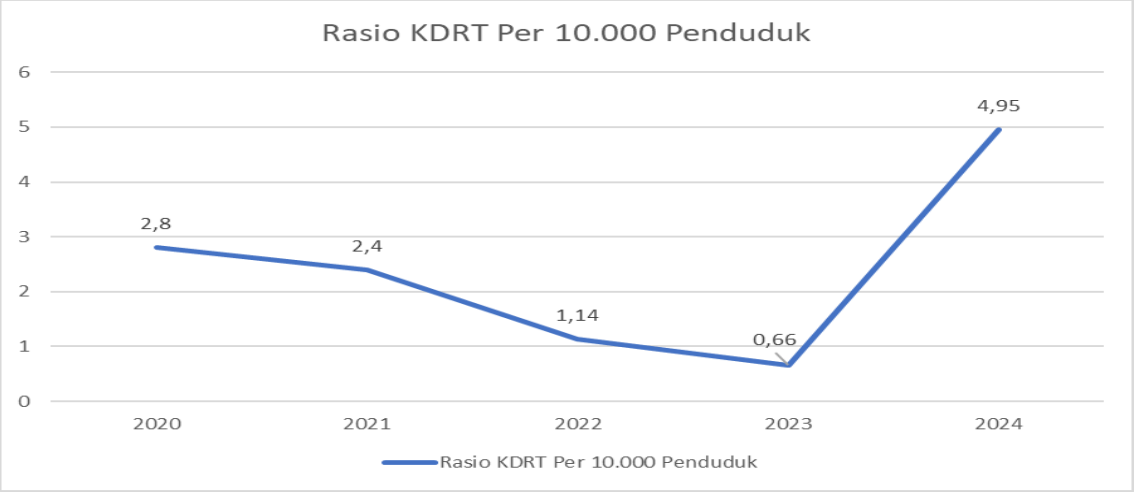

Gambar 2. 43 Rasio KDRT Per 10.000 Kota Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: DP3AKB Kota Pasuruan, 2025

Pada tahun 2020-2023 rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) per 10.000 penduduk cenderung menurun angkanya, bahkan pada tahun 2023 angka rasio KDRT berada pada angka 0,66. Namun pada tahun 2024 rasio KDRT melonjak tinggi hingga menyentuh angka 4.95. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Pasuruan.

Permasalahan/ Ancaman/ Potensi:

Dalam 4 tahun pemerintah Kota Pasuruan berhasil menurunkan angka KDRT, namun terjadi lonjakan angka KDRT pada tahun 2024. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Pasuruan untuk kembali menurunkan angka KDRT.

C. Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan merupakan dinas yang mengampu urusan pangan. Urusan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi Daerah sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Berikut ini merupakan gambaran capaian urusan pangan Kota Pasuruan melalui indikator skor pola pangan harapan (PPH):

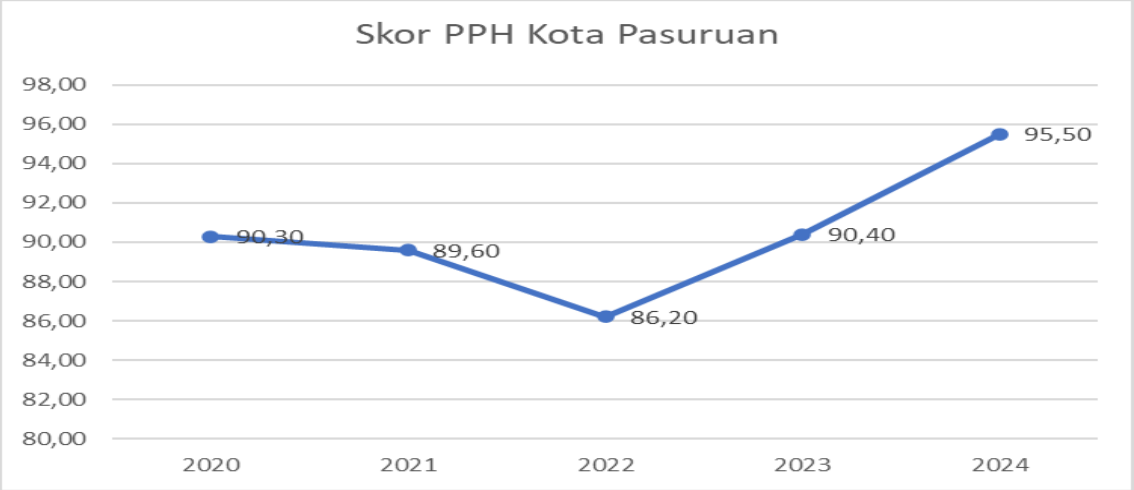

Gambar 2. 44 Skor Pola Pangan Harapan Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan, 2025

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Sejak tahun 2016 sampai dengan 2021 Skor PPH di Kota Pasuruan menunjukkan tren yang menurun, namun pada tahun 2023, skor PPH kembali naik menjadi 90,4 dan di tahun 2024 menjadi 95,5. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Pasuruan dalam menangani urusan pangan diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehat tinggi serat seperti sayuran dan buah buahan karena lebih senang membeli makanan cepat saji melalui aplikasi *online*. Selain itu keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga dan keterbatasan pengetahuan dari pangan dan gizi menyebabkan pada kualitas dan kuantitas produksi pangan masyarakat sebagian masih rendah, dilihat dari pola

konsumsi yg belum beragam, bergizi, seimbang dan aman. Selain itu hambatan yang masih terjadi adalah produksi pangan terutama produk pertanian belum memenuhi kebutuhan pangan daerah sehingga ketersediaan pangan tergantung dari pangan yang masuk dari luar Kota Pasuruan.

Jika melihat kondisi beberapa tahun ke depan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan juga akan menghadapi tantangan-tantangan seperti menurunnya tingkat kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus tanpa diimbangi oleh pupuk organik. Selain itu dengan tingginya pembangunan saat ini akan berdampak pada tingginya alih fungsi lahan pertanian. Serta adanya perubahan iklim global yang mempengaruhi perubahan waktu tanam, serta efek dari perubahan iklim tersebut dapat menyebabkan adanya bencana alam yang merusak lahan pertanian untuk menghasilkan persediaan pangan seperti banjir.

D. Pertanahan

Urusan Pertanahan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan harus diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berikut merupakan indikator yang mencerminkan capaian urusan pertanahan Kota pasuruan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 32 Indikator Urusan Pertanahan Kota Pasuruan Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang membutuhkan pembebasan lahan	0	0	0	0	0

Sumber: DPUPR Kota Pasuruan, 2025

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelola Lahan (HPL) terhadap luas wilayah daratan. Kepemilikan sertifikat telah diatur dalam Undang-Undang Agraria 1960 yang menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh setiap orang. Ada dua jaminan kepastian hak atas tanah, yang pertama adalah orang sebagai subyek atau pemilik tanah, sedangkan yang kedua adalah objek atau tanah. Bagi pemilik tanah mempunyai kewajiban untuk memasang tanda batas dan

memelihara tanah tersebut. Sampai dengan tahun 2016, data Kantor BPN Kota Pasuruan menunjukkan bahwa jumlah bidang tanah yang bersertifikat mencapai 55.305 bidang dari total 69.108 bidang atau 80,03 persen. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan yang membutuhkan pembebasan lahan hanya terjadi pada tahun 2019 sebanyak 1 kegiatan.

E. Lingkungan Hidup

Pembangunan dalam konteks urusan lingkungan hidup adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem bumi kita. Ini mencakup berbagai upaya, mulai dari perlindungan habitat alami hingga pengembangan teknologi ramah lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama, di mana pemerintah dan organisasi di seluruh dunia berupaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan kebijakan yang mendukung pelestarian sumber daya alam. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga berperan penting dalam pembangunan urusan lingkungan hidup, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan dan bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Kota Pasuruan.

Adapun indikator kualitas lingkungan hidup (IKLH) memiliki tren yang terus meningkat. Angka IKLH pada tahun 2020 sebesar 69,91 merupakan angka tertinggi, namun pada tahun berikutnya terdapat perubahan metode perhitungan sehingga terlihat menurun pada tahun 2021 menjadi 55,19 dan di tahun berikutnya berangsur angsur naik. Aspek yang dinilai pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pasuruan merupakan indeks komposit yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), maupun Indeks Kualitas Lahan (IKL), yang selanjutnya dijelaskan lebih lanjut pada sub pembahasan berikut ini.

a. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang umum dihadapi oleh wilayah perkotaan di Indonesia, tidak terkecuali Kota Pasuruan. Sektor industri yang banyak berkembang di Kota Pasuruan memberikan kontribusi terhadap peningkatan potensi pencemaran udara. Ditambah pula peningkatan jumlah

penduduk yang berdampak dengan peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi. Indeks kualitas udara dapat menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan menurunkan beban emisi pencemaran udara melalui pengendalian pencemaran udara dari sumbernya.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pemantauan data primer passive sampler yang dilakukan oleh Kota Pasuruan, DLH Provinsi Jawa Timur, dan KLHK didapatkan hasil analisis laboratorium terhadap parameter NO2 dan SO2 serta perhitungan indeks udara model EU (IEU) yang dikonversikan menjadi nilai IKU selanjutnya dapat ditinjau tabel berikut.

Tabel 2. 33 Rata-Rata Konsentrasi Bahan Pencemar Udara Parameter No2 dan So2 Tiap Area Di Kota Pasuruan Tahun 2024

Area	NO_2	Baku Mutu NO_2	SO_2	Baku Mutu SO_2
Industri	9,27	40	10,19	20
Transportasi	12,20	40	7,88	20
Perkantoran	10,01	40	8,98	20
Permukiman	5,69	40	7,49	20

Sumber: IKLH Kota Pasuruan Tahun 2024

Hasil perhitungan Nilai IKU Kota Pasuruan Tahun 2024 termasuk kategori baik. Meskipun kategori indeks kualitas udara sudah kategori BAIK, akan lebih baik dapat ditingkatkan atau dipertahankan. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dalam mempertahankan dan meningkatkan nilai IKU tersebut antara lain:

1. Perbaikan kualitas udara diprioritaskan pada area dengan nilai terendah atau area transportasi
2. Pemantauan kualitas udara ambien secara berkelanjutan atau manual
3. Penambahan titik pemantauan kualitas udara Passive Sampler
4. Evaluasi kinerja pengendalian pencemaran udara dari sektor industri melalui pengawasan lingkungan secara langsung dan tidak langsung. 131
5. Penyusunan rencana pengendalian pencemaran udara melalui penyusunan inventaris emisi untuk mengetahui pemetaan dan roadmap sumber emisi dan beban emisi;
6. Pengendalian sumber-sumber emisi yang berasal dari a) Sumber bergerak: manajemen transportasi dan peningkatan transportasi massal. Kegiatan uji emisi secara berkala, peningkatan biaya parkir, perda terkait kendaraan bermotor,

pembatasan usia dan jenis kendaraan di area tertentu, hari bebas kendaraan bermotor. b) Sumber tidak bergerak: penataan baku mutu industri pengawasan implementasi persetujuan lingkungan dan pembinaan perizinan lingkungan.

7. Upaya lainnya: penanganan kebakaran hutan dan lahan, penyediaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan menggunakan tanaman yang efektif menyerap polutan di udara, penyediaan dan pengembangan jalur pejalan kaki serta jalur sepeda yang aman dan nyaman, pembentukan kebijakan/peraturan terkait Kawasan Tanpa Rokok dan penggunaan energi ramah lingkungan, pengembangan monitoring kualitas udara ambien dengan membangun Air Quality Monitoring System (AQMS) untuk mengembangkan jaringan pemantauan kualitas udara ambien dengan menggunakan peralatan pemantauan otomatis.
8. Pelaksanaan program sesuai peraturan yang berlaku dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah. “Program Langit Biru” merupakan salah satu program dari pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas udara, yaitu program yang bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah pencemaran udara dan mewujudkan perilaku sadar lingkungan baik dari sumber tidak bergerak (industri) maupun sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor.

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kualitas air sungai di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Peningkatan nilai IKA menunjukkan peningkatan kualitas air sungai dan sebaliknya. Potensi pencemaran air sungai di Kota Pasuruan cukup tinggi mengingat banyaknya jumlah industri baik industri skala kecil, menengah dan besar yang menambah beban pencemaran yang masuk ke air sungai. Selain itu, pertambahan jumlah penduduk juga berimplikasi pada peningkatan timbulan air limbah domestik dari kegiatan perumahan/permukiman. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2015 bahwa Wilayah Kota Pasuruan dilalui oleh 5 DAS (Daerah Aliran Sungai), yaitu DAS Gembong, DAS Welang, DAS Petung, DAS Tamba’an dan 132 DAS Sodo.

Tabel 2. 34 Nilai Indeks Pencemaran Air Sungai Di Kota Pasuruan Tahun 2022 - 2024

Tahun	Target Ipj	Hasil Ipj
2022	2,5	2,61
2023	2,4	2,43
2024	2,3	2,38

Sumber: IKLHD Kota Pasuruan Tahun 2022-2024

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Indeks Pencemar Air Sungai (Ipj) pada Dokumen IKLH Kota Pasuruan Tahun 2023, diketahui Nilai Indeks Pencemar rata-rata pada tahun 2024 sebesar 2,38 sedangkan pada tahun 2023 sebesar 2,43. Target IPj tahun 2024 sebesar 2,3. Hal ini berarti indeks pencemar pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,05 dari tahun lalu tetapi nilai indeks pencemar 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Semakin rendah nilai IPj maka pencemar yang ada semakin sedikit, begitupun sebaliknya jika IPj semakin tinggi maka pencemar yang ada semakin banyak. Jika dalam hal ini nilai IPj tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023 berarti tingkat pencemar yang ada juga semakin menurun.

Dengan menggunakan proyeksi optimis, upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dalam meningkatkan nilai IKA tersebut antara lain:

a. Menurunkan beban pencemar pada sumber pencemar
b. Memulihkan kualitas air di badan air (pemurnian kualitas air di badan air (pemurnian kualitas air dan perbaikan hidromorfologi)
c. Melakukan pemantauan kualitas air yang masuk ke badan air sungai atau di aliran sungai
d. Mengoptimalkan pemantauan kepada para pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan air limbah sebelum dibuang di badan air.
e. Penetapan target peningkatan IKA sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
f. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya peningkatan IKA;
g. Peningkatan peran dunia usaha untuk pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan yang ditetapkan;
h. Meningkatan peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan air limbah industri, domestik, dan usaha skala kecil;

i. Perlu adanya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan usaha kecil untuk masyarakat
j. Menurunkan beban pencemar pada sumber pencemar;
k. Memulihkan kualitas air di badan air (pemurnian kualitas air dan perbaikan hidromorfologi);
l. Melakukan pemantauan kualitas air yang masuk ke badan air sungai atau di aliran sungai;
m. Mengoptimalkan pemantauan kepada para pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan air limbah sebelum dibuang di badan air. Pemantauan dilakukan pada aliran sungai secara periodik yang disampaikan secara terbuka berbasis daring (online) dan sebagai instrument peringatan dini (early warning).

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Kualitas tutupan lahan (land cover) mendeskripsikan kondisi kenampakan permukaan lahan secara fisik, baik kenampakan alami berupa vegetasi maupun kenampakan buatan manusia. IKTL merupakan salah satu indikator dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang memberikan informasi kondisi tutupan lahan untuk mendukung penyediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan fungsi dari IKTL dan IKEG. Kualitas Ekosistem Gambut sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kanal dan kejadian kebakaran. Memperhatikan hal tersebut, maka variabel data dalam IKEG merupakan faktor koreksi dalam menghitung nilai IKL. Kota Pasuruan merupakan wilayah tanpa adanya perhitungan faktor koreksi tersebut dikarenakan wilayah Kota Pasuruan bukan wilayah gambut, perhitungan IKL di Kota Pasuruan dihitung melalui komponen, RTH, RHL, dan tutupan vegetasi relevan lainnya. RHL atau Rehabilitasi Hutan dan Lahan telah dipetakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, karena wilayah RHL merupakan kewenangan milik provinsi, hasil pemetaan yang dilakukan melalui google earth oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2. 35 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Pasuruan Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai IKL	Kategori
2020	45,06	Buruk
2021	24,78	Buruk
2022	23,20	Buruk

Tahun	Nilai IKL	Kategori
2023	26,18	Buruk
2024	27,71	Buruk

Sumber: Dokumen IKLH Kota Pasuruan Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas, capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Pasuruan Tahun 2021-2024 cenderung mengalami tren kenaikan, dari semula sebesar 24,78 dengan kategori buruk di tahun 2021 terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 menjadi 27,71 dengan kategori buruk. Dalam rangka mencapai rencana tujuan jangka panjang pembangunan daerah dan beberapa kegiatan yang berkontribusi pada peningkatan pencemaran lahan, maka diperlukan proyeksi capaian data IKL Kota Pasuruan agar mencapai target yang ditetapkan.

Dengan menggunakan proyeksi optimis, upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dalam meningkatkan nilai IKL tersebut antara lain: 1. Pemanfaatan lahan yang tepat melalui penggunaan lahan sesuai dengan potensi dan fungsinya, misalnya untuk pertanian, perkebunan, atau kehutanan. 2. Penambahan dan pengimplementasian proporsi lahan ruang terbuka hijau dan vegetasi mangrove 3. Reboisasi dan penghijauan untuk merehabilitasi lahan yang rusak, termasuk di daerah yang kurang hijau 4. Penggunaan pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah 5. Pemantauan rutin terhadap kualitas tanah di perkotaan termasuk kandungan zat berbahaya untuk menghindari munculnya lahan kritis di perkotaan 6. Penggunaan air yang efisien seperti penggunaan penggunaan air irigasi secara efisien untuk mencegah pengeringan lahan dan pencemaran 7. Kolaborasi antar pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lahan.

Permasalahan/ Ancaman/ Potensi:

Persentase sampah yang diolah di TPA dari tahun ke tahun selalu meningkat. Hal ini perlu diiringi dengan upaya pemerintah Kota Pasuruan dalam menyediakan teknologi dan kebijakan yang efektif dalam mengelola sampah di TPA

IKLH dalam empat tahun terakhir cenderung memiliki skor yang rendah walaupun memiliki tren yang meningkat.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Data mengenai kependudukan tersebut sangat penting dan dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan lainnya seperti data kemiskinan, data migrasi penduduk, data social, data ekonomi, dan lain sebagainya. Berikut merupakan persentase penduduk ber-KTP di Kota Pasuruan:

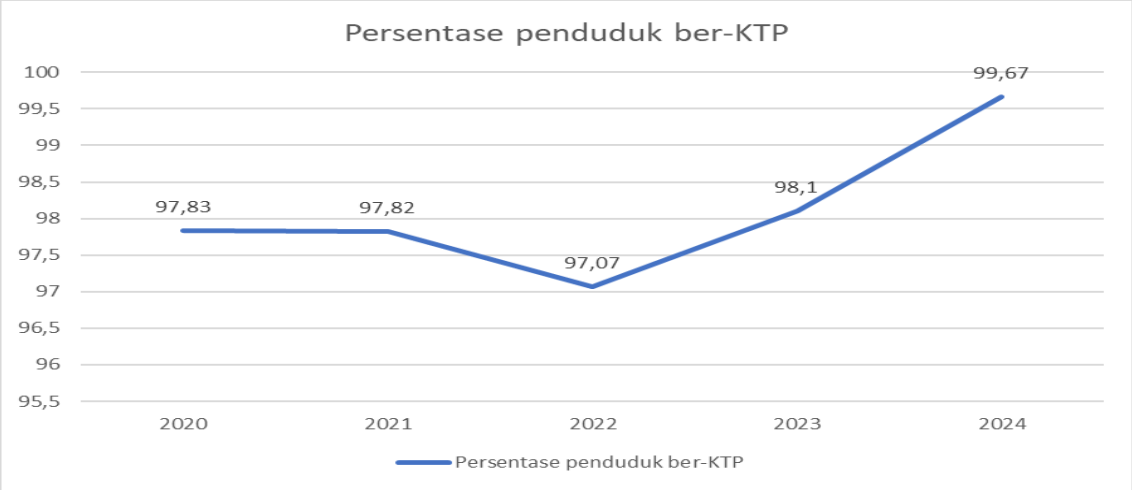

Gambar 2. 45 Capaian Indikator Persentase Penduduk Ber KTP Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, 2025

Perkembangan rasio penduduk ber KTP menunjukkan angka yang semakin baik. Dalam lima tahun terakhir persentase mendekati angka 100% penduduk yang wajib memiliki KTP. Pertumbuhan ini juga linear dengan perekaman E-KTP yang juga mengalami peningkatan setiap tahun.

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Upaya pengendalian penduduk tidak hanya terfokus pada pengurangan atau perlambatan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian kelahiran, tetapi juga mencakup penambahan jumlah penduduk ketika diperlukan, dengan tujuan mencapai keseimbangan jumlah penduduk. Keseimbangan ini penting untuk menjaga stabilitas pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan tingkat kemiskinan,

dan lainnya. Capaian kinerja pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Pasuruan dapat dilihat dari data berikut.

Tabel 2. 36 Capaian Indikator Urusan PPKB Kota Pasuruan Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah keluarga	66.509	67.611	68.637	69.586	69.953
Jumlah anak usia 4-6 tahun	61.829	85.860	85.860	85.860	N/A
Rata-rata anak per keluarga	0,91	1,27	1	1	N/A
Angka kelahiran	3.124	3.126	3.048	3.190	3.090
Angka TFR (*Total Fertility Rate*)	2,13	2,13	2,13	2,09	
Jumlah pasangan usia subur	32.743	30.462	29.214	30.102	31.332
Jumlah akseptor KB	4.698	6.226	2.075	4.956	5.998
Jumlah akseptor KB aktif	26.243	21.639	20.307	21.542	20.447
Persentase akseptor KB baru	14	20	7	16	19
Persentase akseptor KB aktif (mCPR)	80	71	70	72	65,26
Jumlah keluarga pra sejahtera	9.020	2.122	-	-	-
Jumlah keluarga sejahtera I	25.607	27.161	-	-	-
Jumlah keluarga sejahtera II	19.335	17.891	-	-	-
Jumlah keluarga sejahtera III	-	-	-	-	-
Jumlah keluarga sejahtera III plus	-	-	-	-	-
Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	34.617	36.465	-	-	-

Sumber: DP3AKB Kota Pasuruan, 2025

Melalui data tersebut dapat kita ketahui bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir jumlah keluarga di Kota Pasuruan terus meningkat setiap tahunnya. Terdapat fakta menarik rata-rata anak per keluarga adalah 1 anak. Adapun angka kelahiran pada tahun 2024 menurun dibanding angka kelahiran pada tahun 2023, meskipun jumlah angka kelahiran terendah masih berada pada tahun 2022. Begitu pula dengan jumlah keluarga sejahtera 1 pada 2021 yang mencapai 27.161 sedangkan angka keluarga pra sejahtera di tahun tersebut adalah 2.122. Hal ini menunjukkan sinyal positif. Melalui program keluarga berencana dan upaya pengendalian penduduk, Kota Pasuruan berusaha mencapai keseimbangan jumlah penduduk yang berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesejahteraan keluarga dan kualitas sumber daya manusia.

H. Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan adalah organisasi perangkat daerah yang bertugas mengelola dan mengembangkan sistem transportasi di Kota Pasuruan. Tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2022. Dinas

ini juga bertanggung jawab untuk menjamin kelancaran dan keamanan transportasi di wilayah kota. Berikut ini adalah indikator kinerja urusan perhubungan di Kota Pasuruan:

Tabel 2. 37 Kinerja Urusan Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Terminal penumpang tipe c	2	2	2	2	2
Angkutan Kota Dalam Prov:					
Perusahaan	1	1	1	1	1
Kendara/Armada	126	126	126	126	126
Angkutan pariwisata:					
Perusahaan	1	1	1	1	1
Kendaraan/Armada	170	170	170	170	170
Kendaraan Mobil Penumpang Umum (MPU)/ Mikrolet/ Microbus	116	116	116	116	116
Rambu-rambu lalu lintas	439	752	800	804	804
Lampu lalu lintas	18	16	16	16	16
Flashing light	33	53	51	51	46
Halte bus	14	13	13	13	13
Jumlah kendaraan Uji KIR	3.677	4.227	3.922	3.364	3.022
Jumlah Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang	-	12.450	12.985	12.865	12.890
Jumlah Kendaraan Bermotor - Bus	-	475	525	474	473
Jumlah Kendaraan Bermotor - Truk	-	3.234	3.123	2.926	2.932
Jumlah Kendaraan Bermotor - Sepeda Motor	-	85.832	82.184	78.577	77.311
Jumlah Kendaraan Bermotor - Jumlah	-	101.991	98.817	94.842	93.606
Angka kejadian kecelakaan di Kota Pasuruan	-	299	380	382	237

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, 2025

Capaian kinerja perhubungan dapat ditinjau dari jumlah angkutan kota dalam provinsi yang berjumlah 126 armada dalam 5 tahun terakhir. Selain itu jumlah angkutan pariwisata di Kota Pasuruan mencapai 170 armada dalam 5 (lima) tahun terakhir. Untuk mewujudkan jaringan perhubungan yang efektif dan efisien, tentunya juga harus didukung penyediaan sarana dan prasarana perhubungan seperti rambu lalu lintas, halte, uji kendaraan, dan lain sebagainya. Jumlah rambu lalu lintas terus meningkat di setiap tahunnya, puncaknya pada 2024 dengan 804 rambu. Jumlah kendaraan terus menurun di setiap tahunnya menjadi penanda bagi pemerintah Kota Pasuruan untuk semakin meningkatkan kinerja trasnportasi umumnya. Selain itu faktor kesadaran masyarakat akan transportasi umum juga menjadi faktor pendorong bagi *suply and demand* terhadap transportasi umum. Angka kejadian kecelakaan Kota Pasuruan juga terus menurun hingga pada tahun 2024 ada pada 237 kejadian.

Permasalahan/ Ancaman/ Potensi:

Sejauh ini urusan perhubungan Kota Pasuruan menunjukkan prestasi dan pencapaian yang baik. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka kecelakaan, bertambahnya rambu lalu lintas, jumlah armada yang konstan di setiap tahunnya.

Melihat jumlah kendaraan yang terus menurun hal ini menjadi sebuah pengingat bagi Pemerintah Kota Pasuruan untuk turut meningkatkan kualitas transportasi umum yang terintegrasi, sehingga masyarakat semakin peduli akan

I. Komunikasi dan Informatika

Pada era digitalisasi saat ini, dimana informasi sangat mudah dijangkau dan disebarkan, Kota Pasuruan juga tetap berupaya untuk menyampaikan informasi publik melalui sarana dan prasarana yang dimiliki. Beberapa indikator berikut merupakan cerminan dari kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan dalam kurun waktu 2019- 2023 adalah sebagai berikut:

1. Indeks SPBE

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E Government. SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

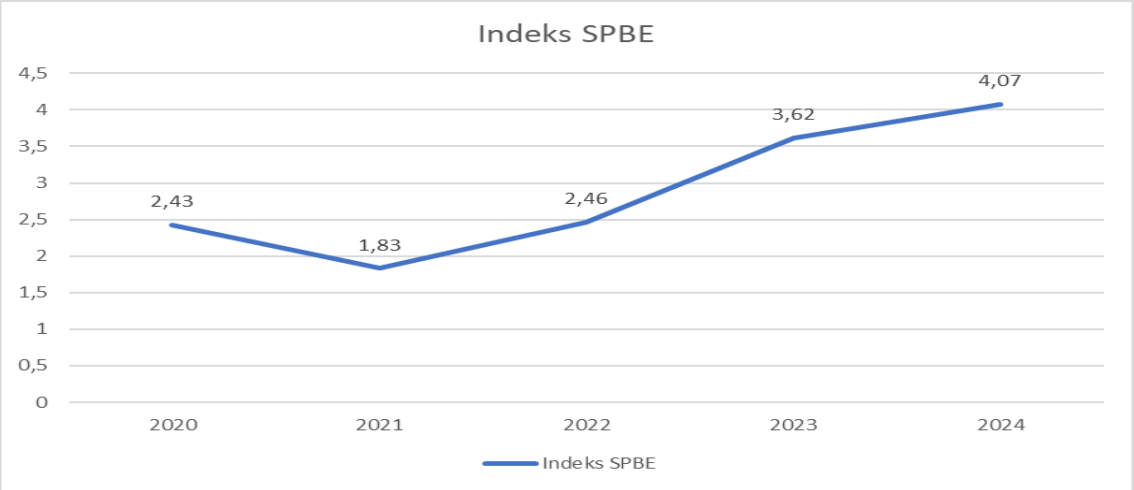

Gambar 2. 46 Indeks SPBE Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, 2025

Grafik di atas menunjukkan rata- rata capaian Indeks SPBE di Kota Pasuruan meningkat, hanya di tahun 2021 yang mengalami penurunan. Dengan melihat capaian diatas maka capaian yang baik tersebut harus terus ditingkatkan mengingat SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

2. Jumlah jaringan komunikasi (titik)

Jaringan atau network didefinisikan sebagai "*social structures created by communication* among *individuals and groups*" (struktur sosial yang diciptakan melalui komunikasi di antara sejumlah individu dan kelompok). Jaringan telekomunikasi atau jejaring telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam melakukan kegiatan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang telah diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999.

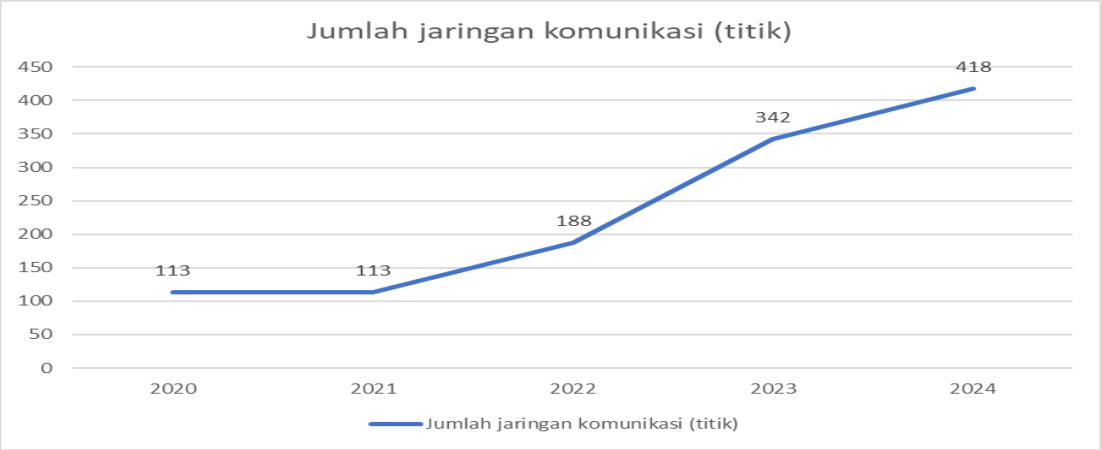

Gambar 2. 47 Jumlah Jaringan Komunikasi Di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, 2025

Jaringan telekomunikasi terdiri atas dari tiga bagian utama. Bagian-bagian tersebut diantaranya adalah: Perangkat transmisi, Perangkat penyambung, dan Terminal. Jumlah jaringan komunikasi di Kota Pasuruan terus meningkat di setiap tahunnya. Di tahun 2020 terdapat 113 titik dan terus meningkat hingga tahun 2024 sebanyak 418 titik. Namun, mengingat pentingnya jaringan telekomunikasi dalam mendukung aktivitas pelayanan kepada Masyarakat dan juga demi mendukung terlaksanakannya aktivitas Masyarakat, maka bukan hanya jumlah yang ditambah namun juga diperlukan perawatan agar kualitas jaringan terjaga dengan baik.

J. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada tahun 2024 Kota Pasuruan tercatat memiliki 338 unit koperasi. Di antaranya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), koperasi wanita, koperasi pegawai, dan lainnya. Berikut merupakan data capaian indikator urusan koperasi di Kota Pasuruan:



Gambar 2. 48 Jumlah Koperasi Aktif Di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber: DinasKoperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, 2025

Melalui data di atas maka dapat kita ketahui bahwa jumlah koperasi aktif memiliki angka yang fluktuatif. Angka koperasi aktif ini cenderung naik, namun capaian pada tahun 2022 sebesar 113 koperasi aktif yang menurun dibandingkan capaian tahun 2021 yaitu 117 koperasi aktif. Angka koperasi aktif tertinggi ada pada tahun 2023 dan 2024 dengan 121 koperasi. Faktor pendorong naiknya angka koperasi adalah dukungan pemerintah melalui regulasi dan pembinaan, serta peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM.

Permasalahan/ Ancaman/ Potensi:

Perlu diapresiasi bahwa jumlah koperasi aktif di Kota Pasuruan memiliki tren yang cenderung meningkat. Namun perlu digaris bawahi bahwa jumlah koperasi aktif masih jauh jika dibandingkan dengan total jumlah koperasi. Pemerintah Kota Pasuruan perlu membangkitkan geliat aktivitas koperasi mengingat koperasi merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

K. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal memiliki peran yang cukup besar terhadap peningkatan kondisi perekonomian daerah, dengan besarnya nilai investasi yang ditanamkan pada suatu daerah akan berdampak terhadap perluasan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan daerah, oleh sebab itu berbagai kebijakan strategis serta promosi perlu dilakukan dalam meningkatkan daya tarik investor, dalam mengevaluasi serta menemukan permasalahan dan isu pembangunan kedepannya maka kinerja penyelenggaraan penanaman modal di Kota Pasuruan perlu dianalisa, adapun kinerja urusan penanaman modal di Kota Pasuruan dapat diukur melalui besaran jumlah nilai investasi penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, berikut merupakan sajian data terkait:

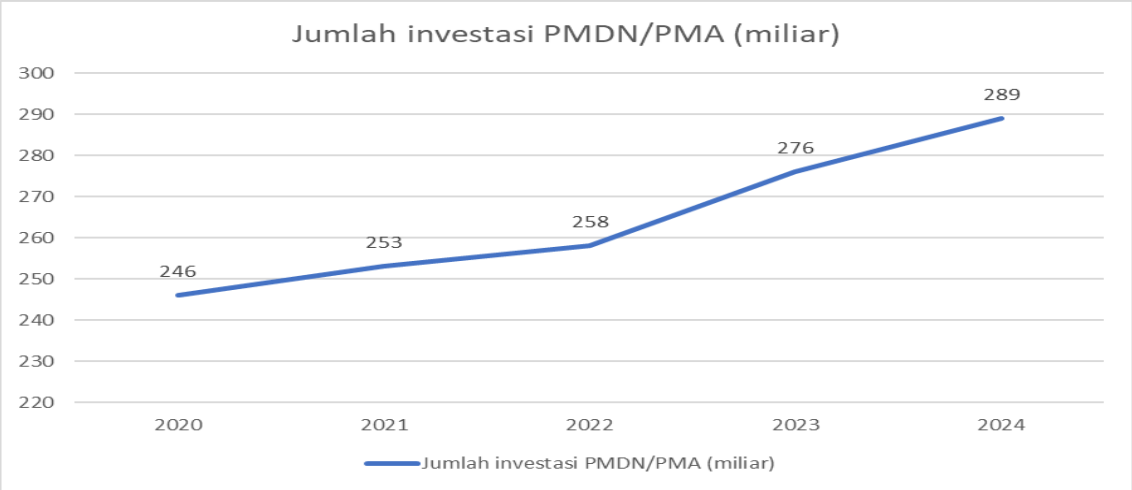

Gambar 2. 49 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber: DPMPTSP Kota Pasuruan, 2025

Jika melihat grafik diatas maka geliat investasi mengalami tren positif. Setiap tahunnya terjadi peningkatan terhadap jumlah investasi. Pada tahun 2020 nilai investasi berada pada 246 M dan terus meningkat hingga pada tahun 2024 senilai 289 M.

Permasalahan/ Ancaman/ Potensi:

Perkembangan investasi di Kota Pasuruan patut diapresiasi mengingat nilainya yang terus meningkat di setiap tahun. Namun perlu diingat bahwa nilai investasi dalam lima tahun terakhir masih lebih rendah dibanding nilai investasi pada tahun 2019 yang mencapai 467M. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Pasuruan untuk meningkatkan nilai investasi.

L. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan pemuda dan olahraga di Kota Pasuruan mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan setiap tahunnya. Berikut merupakan sajian data terkait jumlah organisasi pemuda dan olahraga di Kota Pasuruan:

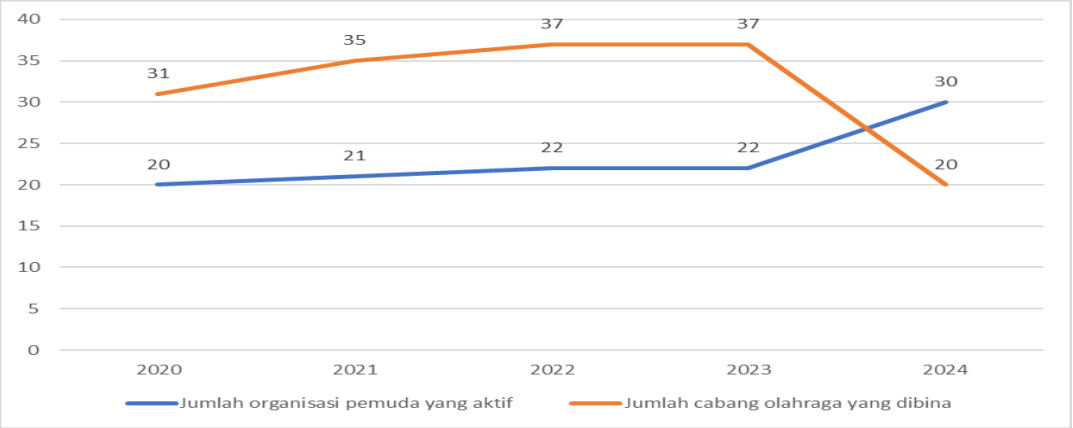

Gambar 2. 50 Indikator Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan, 2025

Berdasarkan data di atas maka diperoleh informasi bahwa jumlah organisasi pemuda yang aktif menunjukkan tren positif, terjadi peningkatan di setiap tahunnya. Pada 2020 jumlah organisasi pemuda yang aktif 20 dan terus meningkat hingga tahun 2024 sejumlah 30 organisasi pemuda aktif. Berbeda dengan organisasi pemuda, cabang olahraga yang dibina di Kota Pasuruan memiliki angka yang fluktuatif. Pada tahun 2020 jumlah cabang olahraga yang dibina 31 kemudian pada tahun 2024 turun menjadi 20 cabang olahraga saja yang dibina.

Permasalahan/ Ancaman/ Potensi:

Pembinaan terhadap cabang olahraga perlu diperhatikan mengingat angkanya yang cukup turun drastis pada tahun 2024. Hal ini perlu diperhatikan guna mengoptimalkan sumber daya pemuda di bidang olahraga agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap Kota Pasuruan.

M. Statistik

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia, dibantu oleh para mitra pembangunan, giat mendorong produsen ilmu pengetahuan seperti lembaga riset dan universitas untuk menggunakan kebijakan berbasis bukti sebagai satu ukuran emas dalam proses perumusan kebijakan publik. Banyak pihak sepakat bahwa perumusan kebijakan publik memang mestinya berlandaskan pada data dan informasi yang diperoleh secara empiris, ketimbang hanya mengandalkan intuisi dan prasangka. Selain dianggap lebih ilmiah, bukti yang tersaji melalui statistik dan angka juga cenderung lebih

mudah diterima, karena dianggap memiliki akurasi yang lebih terukur. Watak semacam itu memang menjadi karakter utama para perencana dan pengambil kebijakan publik di Indonesia. Pemerintah Kota pasuruan juga telah banyak menyusun statistik tidak hanya menerima dari BPS, tetapi juga telah menyelenggarakan secara mandiri. Dari capaiannya pada tahun 2024 bahwa pemerintah kota Pasuruan telah berhasil 100%, ditandai dengan cakupan ketersediaan data statistik sektoral mencapai 100%.

N. Persandian

Urusan Persandian merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Pemerintah Kota Pasuruan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik). Misi utama penyelenggaraan urusan persandian yaitu keamanan informasi pemerintah daerah. Berikut merupakan indikator yang merepresentasikan kinerja penyelenggaraan urusan persandian di Kota Pasuruan:



Gambar 2. 51 Capaian Indikator Urusan Persandian Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, 2025

Indikator pertama terkait prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang merupakan sebuah rencana manajemen yang menspesifikasikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk implementasi kontrol keamanan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. SMKI didesain untuk melindungi aset informasi dari seluruh gangguan keamanan yang berisi panduan keamanan informasi yang menjelaskan syarat-syarat untuk membuat, menerapkan, melaksanakan, memonitor, menganalisa, dan memelihara serta mendokumentasikan informasi agar

tetap aman yang mencakup kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan atas informasi. Pada dasarnya SMKI ini menerapkan proses manajemen risiko pada keamanan informasi termasuk kepada orang, proses, dan sistem teknologi informasi. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) di Kota Pasuruan dalam rentang tahun 2020-2024 konsisten di angka 100%, artinya seluruh sistem elektronik yang digunakan di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan secara keseluruhan telah menerapkan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO/IEC 27001:2013.

O. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hal yang tak terpisahkan dari masyarakat. Setiap daerah tentu memiliki ragam budaya dan ragam cara untuk melestarikan budaya tersebut. Beberapa daerah menjadikan festival seni dan budaya sebagai ajang untuk melestarikan budaya serta hiburan bagi masyarakat, salah satunya Kota Pasuruan. Berikut merupakan sajian data terkait jumlah festival seni dan budaya di Kota Pasuruan:



Gambar 2. 52 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2025

Melalui grafik diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah festival seni dan budaya Kota Pasuruan memiliki tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020-2021 jumlah festival seni dan budaya memiliki angka pelaksanaan paling rendah. Pada tahun berikutnya 2022-2023 menjadi tahun dengan jumlah festival seni dan budaya paling banyak selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah festival seni dan budaya di Kota Pasuruan menjadi 13 festival, hal ini dikarenakan beberapa festival yang memiliki

tema serupa diintegrasikan menjadi satu festival. Integrasi ini guna meningkatkan jumlah pengunjung menjadi lebih banyak dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan data peningkatan angka kunjungan wisatawan yang melonjak tinggi di tahun 2024.

P. Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pasuruan adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan, kegiatan literasi, dan pengarsipan informasi di Kota Pasuruan. Tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2022. Dalam bidang perpustakaan, dinas ini bertugas mengelola perpustakaan, mempromosikan literasi, serta mendidik masyarakat mengenai penggunaan perpustakaan dan peningkatan keterampilan membaca dan menulis. Berikut adalah indikator kinerja urusan perpustakaan:

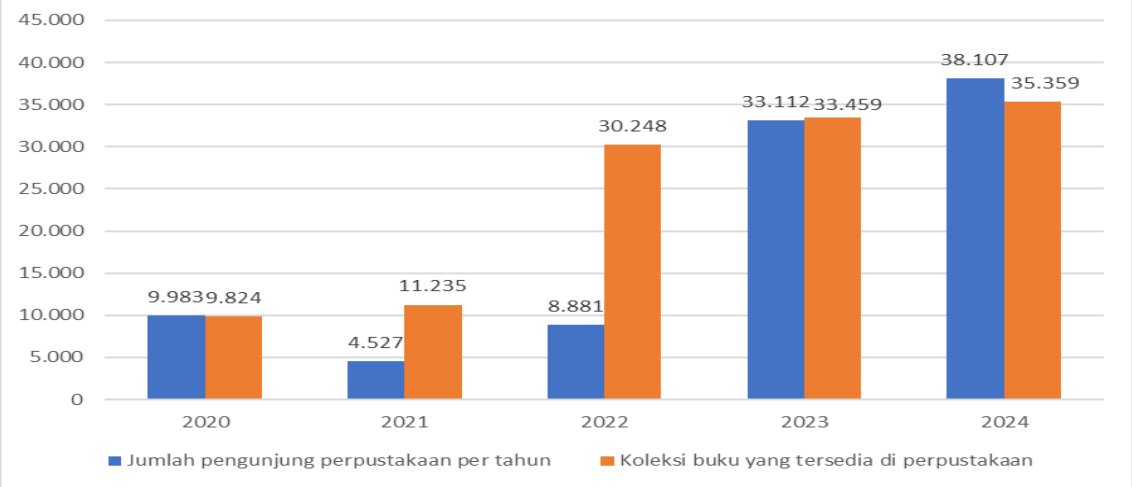

Gambar 2. 53 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan, 2025

Jumlah pengunjung perpustakaan menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung naik. Puncak pengunjung perpustakaan terbanyak berada pada tahun 2024 dengan jumlah pengunjung 38.107, angka ini jauh meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya berada pada 9.983 pengunjung. Peningkatan jumlah pengunjung ini juga diiringi dengan peningkatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan. Pada tahun 2020 jumlah koleksi buku berada pada angka 9.824, angka ini terus meningkat sepanjang tahun hingga pada tahun 2024 berada pada angka 35.359. Peningkatan koleksi buku ini

sebagai upaya Pemerintah Kota Pasuruan dalam menunjang fasilitas serta komitmen dalam meningkatkan minat literasi masyarakat Kota Pasuruan.

Q. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Penanganan arsip menjadi kebutuhan penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif, diperlukan ada upaya bersama untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting. Tujuan kearsipan adalah menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintahan.

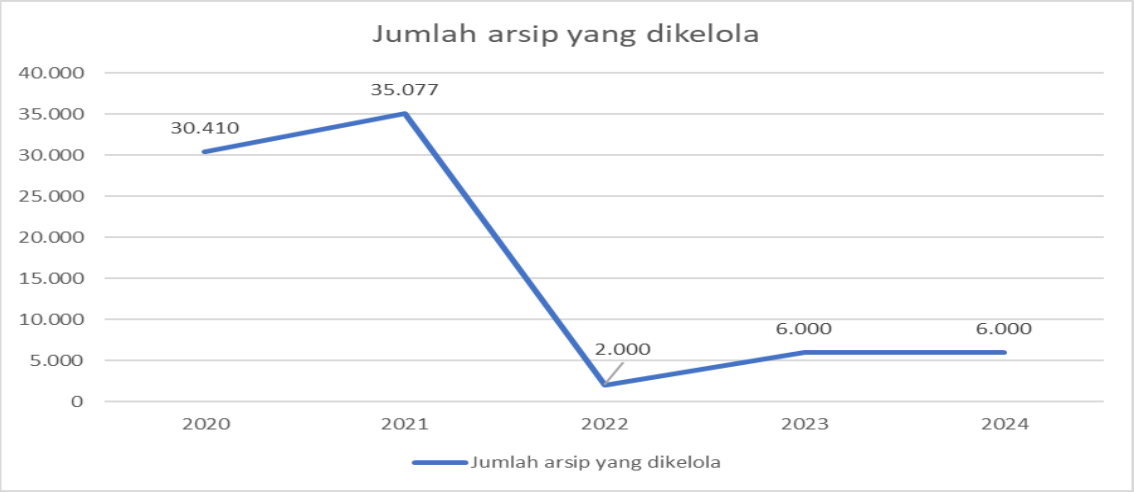

Gambar 2. 54 Capaian Indikator Jumlah Arsip Yang Dikelola Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan, 2025

Jika kita melihat grafik diatas maka diperoleh informasi bahwa jumlah arsip yang dikelola di Kota Pasuruan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022 yaitu menjadi 2.000 arsip. Meskipun pada tahun 2023-2024 terjadi peningkatan sebanyak 6000 arsip yang dikelola, angka tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2.1.4.3.3. Urusan Pemerintah Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap terdiri dari perikanan tangkap di laut dan perikanan tangkap di perairan umum, sedangkan perikanan budidaya terdiri dari budidaya tambak dan kolam. Sebagaimana wilayah pesisir lainnya, nelayan juga menjadi mata pencaharian sebagian warga Kota Pasuruan. Populasi nelayan yang kian bertambah, menjadi salah satu faktor pemicu geliat ekonomi sektor kelautan dan perikanan, salah satu dampak yang dapat diamati adalah naiknya nilai produksi perikanan laut. Berikut merupakan capaian kinerja urusan perikanan:

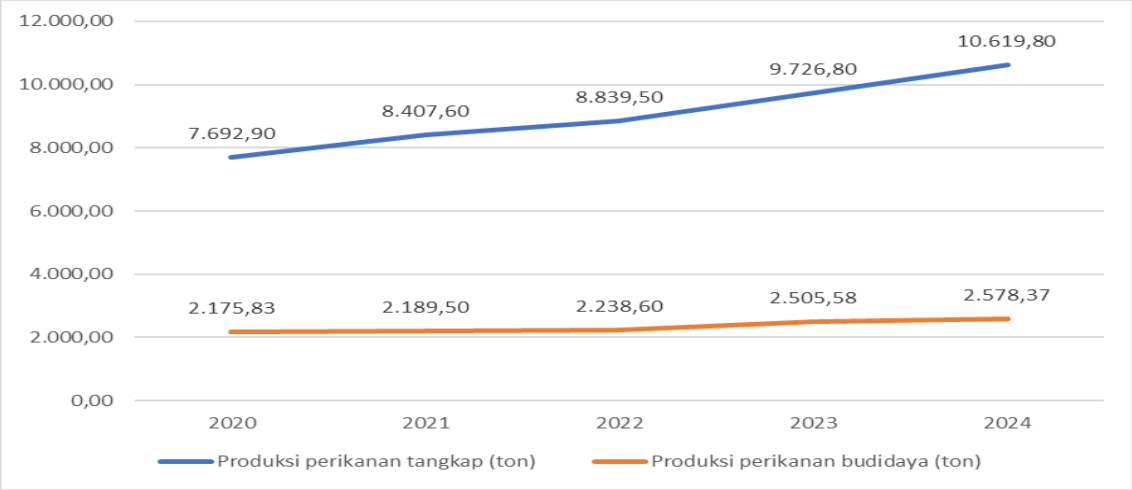

Gambar 2. 55 Produksi Perikanan Tangkap Dan Budidaya di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber: Dinas Perikanan Kota Pasuruan, 2025

Melalui data diatas maka kita dapat memperoleh informasi bahwa produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan signifikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 produksi perikanan tangkap berada pada angka 7.692,90 ton dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 angka produksi perikanan tangkap mencapai 10.619,80 ton. Berbeda dengan perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya memiliki tren yang meningkat namun angkanya cenderung konstan. Pada tahun 2020 angka produksi perikanan budidaya 2.175,83 ton, setiap tahun mengalami peningkatan dan pada tahun 2024 angka produksi perikanan budidaya 2.578,37 ton. Dapat kita simpulkan bahwa sepanjang 2020-2024 peningkatan terhadap produksi perikanan budidaya hanya sebanyak 402,54 ton. Selain dikategorikan berdasarkan perikanan tangkap dan budidaya, terdapat klasifikasi produksi ikan air payau dan air tawar.

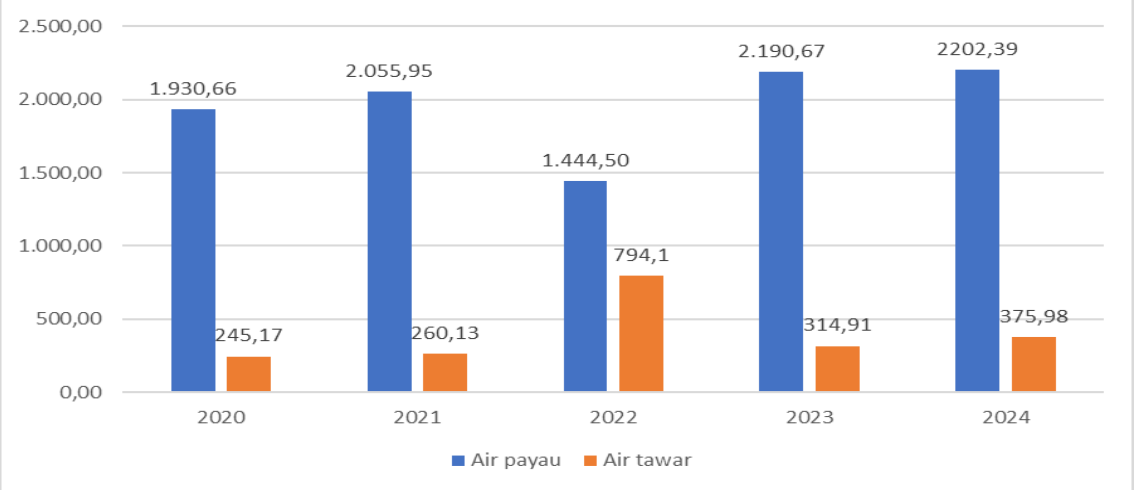

Gambar 2. 56 Produksi Perikanan Budidaya di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber: Dinas Perikanan Kota Pasuruan, 2025

Melalui data tersebut dapat kita ketahui bahwa perikanan air payau dan tawar memiliki angka yang fluktuatif. Pada tahun 2022 menjadi angka terendah produksi perikanan air payau yakni 1.444,50 ton, namun di tahun yang sama justru perikanan produksi air tawar mengalami kenaikan tertinggi dalam lima tahun terakhir yakni 794,1 ton.

B. Pariwisata

Daerah administratif kota dengan luasan geografis yang lebih kecil dari kabupaten menyebabkan potensi alam yang dapat dioptimalkan tidak terlalu banyak sehingga kawasan perkotaan lebih didominasi daya tarik terhadap obyek wisata belanja, kuliner, tata kota serta event pariwisata. Dalam hal ini Kota Pasuruan juga memiliki potensi wisata religi yang cukup menarik wisatawan domestik untuk berkunjung dan berwisata di Kota Pasuruan, disisi lain dengan potensi wisata yang dimiliki oleh daerah sekitar Kota Pasuruan yakni Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo secara tidak langsung juga dapat mempromosikan Wisata di Kota Pasuruan dimana para wisatawan seringkali mencari destinasi pendukung dalam perjalanannya. Kinerja penyelenggaraan wisata di Kota Pasuruan dapat diketahui melalui indikator angka kunjungan wisatawan, berikut capaian indikator angka kunjungan wisatawan di Kota Pasuruan:

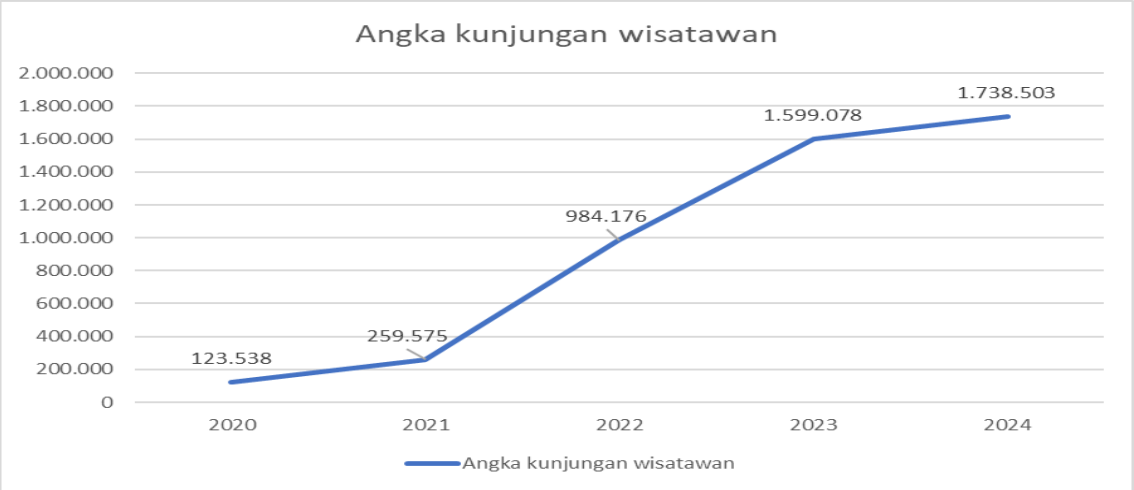

Gambar 2. 54 Angka Kunjungan Wisatawan di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan, 2025

Berdasarkan grafik tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pasuruan. Pada tahun 2020 dan 2021 angka kunjungan wisata rendah sebab adanya pandemi covid, namun pada tahun 2022-2024 angka melonjak drastis. Pada tahun 2024 angka kunjungan wisatawan menyentuh angka 1.738.503. Peningkatan jumlah wisatawan sejak 2022 hingga pada puncaknya di tahun 2024 ini disebabkan oleh popularitas destinasi wisata dan festival seni budaya yang ada di Kota Pasuruan, salah satu contohnya adalah wisata religi yang ikonik yaitu payung madinah. Hal ini juga didukung dengan upaya dari pemerintah melalui peningkatan kualitas fasilitas infrastruktur di bidang pariwisata.

C. Pertanian

Urusan Pertanian di Kota Pasuruan memiliki peran yang sangat penting mengingat sektor pertanian yang luas dan beragam. Pertanian telah lama menjadi tulang punggung ekonomi, memberikan mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk dan berkontribusi pada ketahanan pangan. Padi adalah makanan pokok di Kota Pasuruan, dan menjaga swasembada beras menjadi prioritas utama. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk memastikan pasokan beras dan bahan makanan lainnya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Berikut merupakan sajian data mengenai perkembangan produksi padi di Kota Pasuruan:

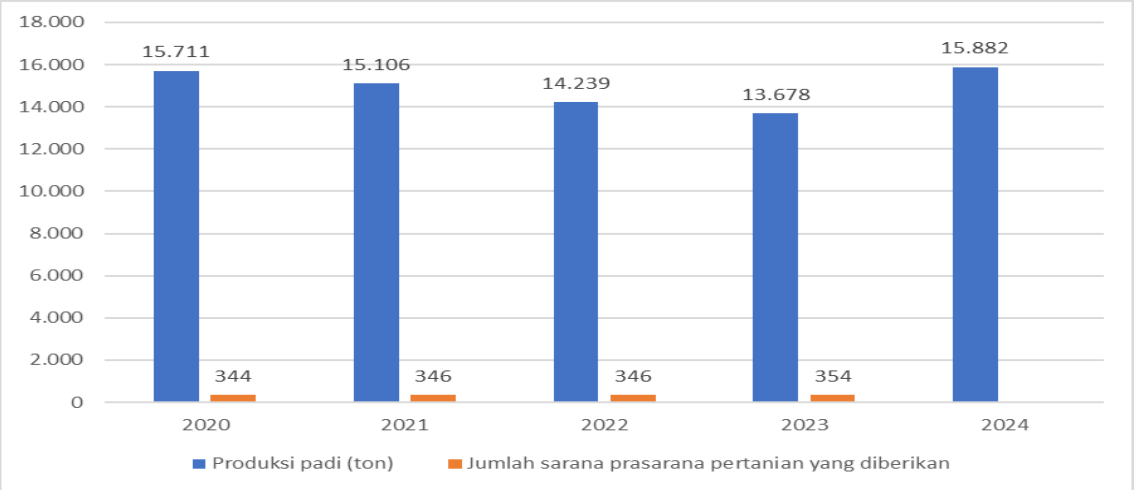

Gambar 2. 57 Indikator Urusan Pertanian di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan, 2025

Melihat data di atas maka dapat kita ketahui bahwa produksi padi memiliki angka yang fluktuatif. Pada tahun 2021-2023 terjadi penurunan dalam produksi padi, namun pada tahun 2024 produksi padi dapat kembali meningkat menjadi 15.882 ton. Angka produksi padi pada tahun 2024 menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Jumlah sarana prasarana pertanian yang diberikan meningkat namun cenderung konstan. Pada tahun 2020 jumlah sarana prasarana berada pada angka 344 dan pada tahun 2023 menjadi 354.

D. Peternakan

Urusan peternakan merupakan salah satu urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah termasuk Kota Pasuruan. Penyelenggaraan urusan peternakan menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan untuk meningkatkan sektor peternakan, meningkatkan kesejahteraan peternak, dan memastikan bahwa peternakan berkontribusi positif terhadap ekonomi. Peternakan termasuk salah satu aspek yang berkontribusi pada PDRB Sub Sektor Pertanian di Kota Pasuruan. Untuk selanjutnya, kinerja penyelenggaraan urusan peternakan di Kota Pasuruan dapat dilihat dari capaian hasil produksi peternakan yang terdiri atas produk daging, susu dan telur.

Tabel 2. 38 Produksi Komoditi Peternakan Di Kota Pasuruan Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi Potong	457	454	226	151	199
Sapi Perah	20	18	7	2	3
Kerbau	-	-	-	-	-
Kuda	36	30	30	4	3
Kambing	3.191	3.232	1.854	788	2.299
Domba	736	753	653	599	401
Ayam Kampung	50.185	51.400	52.125	5.208	10.997
Ayam Petelur	2.000	805	750	854	0
Ayam Pedaging	16.000	16.000	16.000	160	5.086
Itik	16.300	15.000	15.250	4.403	15.400
Entok	1.000	1.300	1.350	875	1.220
Kelinci	75	20	20	19	0
Telur (kg)	150.359	157.559	156.000	181.048	358.206
Susu (liter)	24.333	33.246	18.337	8.640	42.972
Daging Sapi (kg)	603.386	781.018	728.000	522.125	649.310

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan, 2025

Capaian hasil produksi peternakan di Kota Pasuruan dalam rentang tahun 2020-2024 menunjukkan data yang fluktuatif. Penurunan produksi terlihat di tahun 2023, sedangkan tahun 2024 cenderung naik kecuali domba, ayam petelur dan kelinci. Pertumbuhan yang lambat pada hasil produksi peternakan dilatarbelakangi oleh serangan penyakit bagi hewan ternak. Pada tahun 2022, serangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menyebabkan ternak kehilangan nafsu makan sehingga pertumbuhannya terganggu, bobot badannya turun, produksi susunya berkurang sehingga merugikan peternak dan menurunkan produktivitas hasil produksi baik susu maupun daging. Pada tahun 2023 PMK sudah berhasil dikendalikan.

Tantangan kedepan bagi penyelenggara urusan peternakan di Kota Pasuruan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas peternak kota untuk mampu memenuhi ketersediaan pangan dari sisi protein hewani. Peningkatan produktivitas ini harus diikuti jaminan kualitas dan sesuai dengan standar keamanan yang ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal). Pengembangan sektor peternakan akan terbatas pada sumber daya baik itu pelaku peternak dan permodalan. Di Indonesia secara umum, permodalan masih menjadi kendala, terutama bagi pelaku usaha ternak di bidang pembibitan. Lembaga bantuan modal termasuk perbankan belum signifikan mendukung pelaksanaan usaha di dalam *breeding* tersebut.

E. Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Perdagangan di Indonesia diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Dalam UU ini menyebutkan bahwa peranan pengertian perdagangan adalah sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan mengampuh beberapa indikator yang berkaitan dengan urusan perdagangan yaitu sebagai berikut:

1) Jumlah UTTP yang bertanda sah

Perizinan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) merupakan suatu persetujuan terhadap prototipe UTTP asal impor atau produksi dalam negeri yang menyatakan UTTP tersebut telah memenuhi Syarat Teknis yang ditetapkan, sehingga dapat diimpor atau dibuat/dirakit di wilayah Republik Indonesia. Izin Tipe UTTP diperuntukan bagi UTTP asal impor sedangkan Izin Tanda Pabrik diperuntukan bagi UTTP produksi dalam negeri.

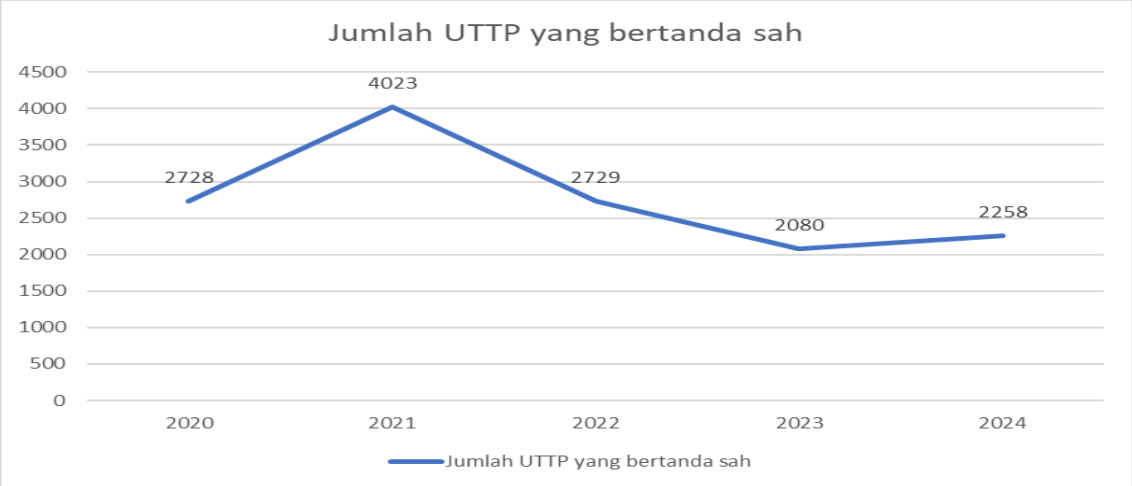

Gambar 2. 58 Jumlah UTTP Yang Bertanda Sah Di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, 2025

Ketersedian UTTP sangat mendukung dalam berjalannya proses perdagangan tak terkecuali di Kota Pasuruan. Mengingat bahwa pentingnya kehadiran UTTP, bahwa harus adanya izin dalam pengaplikasiannya. Melihat data diatas dapat diketahui bahwa jumlah UTTP yang bertanda sah memiliki angka yang fluktuatif. Puncak jumlah UTTP yang bertanda sah terbanyak berada pada tahun 2021 dengan angka 4023. Namun pada tahun

2022 dan 2023 terjadi penurunan jumlah UTTP Kota Pasuruan, kemudian pada 2024 terjadi peningkatan kembali menjadi 2258 meskipun angka tersebut masih tergolong rendah dalam capaian jumlah UTTP yang sah lima tahun terakhir.

2) Nilai PDRB sektor perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. Nilai tambah sektor perdagangan merupakan penyumbang terbesar kedua dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, tak terkecuali di daerah- daerah.

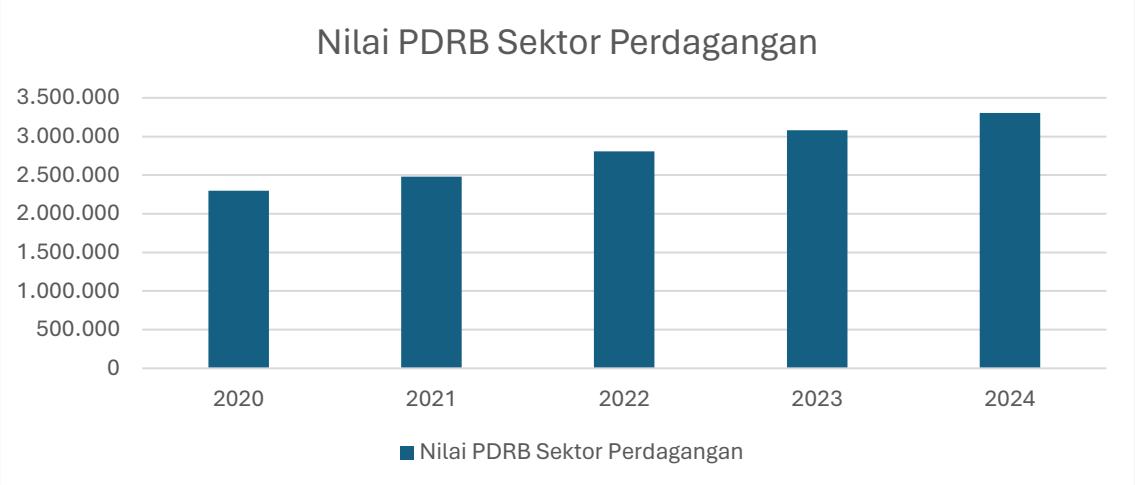

Gambar 2. 59 Nilai PDRB Sektor Perdagangan di Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, 2025

Dalam konteks perekonomian suatu daerah, maka salah satu wacana yang menonjol ialah tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam konteks perekonomian suatu daerah karena dapat menjadi salah satu ukuran pertumbuhan atau pencapaian perekonomian daerah tersebut. Salah satu hal yang dapat dijadikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi suatu

daerah adalah perdagangan. Data diatas menunjukkan bahwa jumlah capaian dari PDRB sektor perdagangan di Kota Pasuruan, yang menunjukkan capaian tren yang positif. Hal tersebut dikarenakan bahwa dari tahun 2020 sampai 2024 capaian memiliki rata- rata peningkatan pada setiap tahunnya. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya. Dengan adanya pandemi covid- 19 yang melanda Indonesia tak terkecuali di Kota Pasuruan maka juga mempengaruhi di sektor perdagangan. Terhambatnya proses ekspor dan impor sehingga perdagangan sepi dan mengalami penurunan.

3) Pertumbuhan sektor perdagangan

Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan adalah pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu perbandingan antara selisih nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun tersebut kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (tahun t terhadap tahun t-1) dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun tersebut yang termasuk dalam kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun t-1, dinyatakan dalam satuan persen. Berikut merupakan capaian Kota Pasuruan dalam indikator Pertumbuhan Sektor Perdagangan:

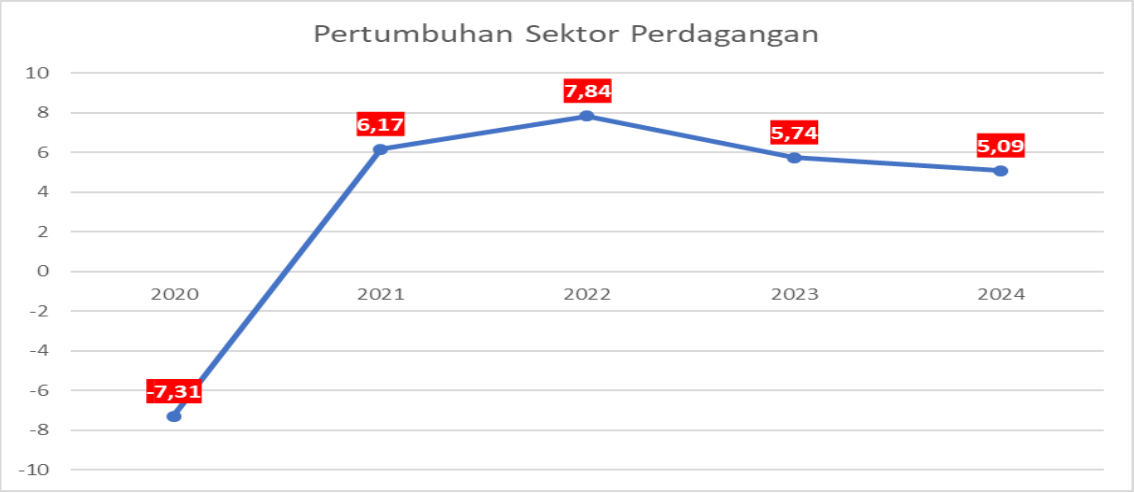

Gambar 2. 60 Pertumbuhan Sektor Perdagangan di Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2025

Pertumbuhan sektor perdagangan Kota Pasuruan di tahun 2020 hingga tahun 2024 bersifat fluktuatif, dimana tercatat di tahun 2020 sebesar -7,31% dan kembali mengalami kenaikan positif pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 6.17%. Pada

tahun 2023, pertumbuhan sektor perdagangan kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 5,74%. Demikian pula di tahun 2024, pertumbuhan sektor perdagangan turun ke angka 5,09%. Capaian pada tahun 2020 terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh wilayah di seluruh dunia sehingga juga berakibat bahwa pertumbuhan sektor ekonomi menurun.

4) Kontribusi sektor perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB. Sektor perdagangan terdiri dari 3 subsektor yaitu perdagangan besar dan eceran, rumah makan/restoran dan perhotelan. Dengan asumsi tersebut maka berikut merupakan gambaran mengenai data kontribusi sektor perdagangan Kota Pasuruan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

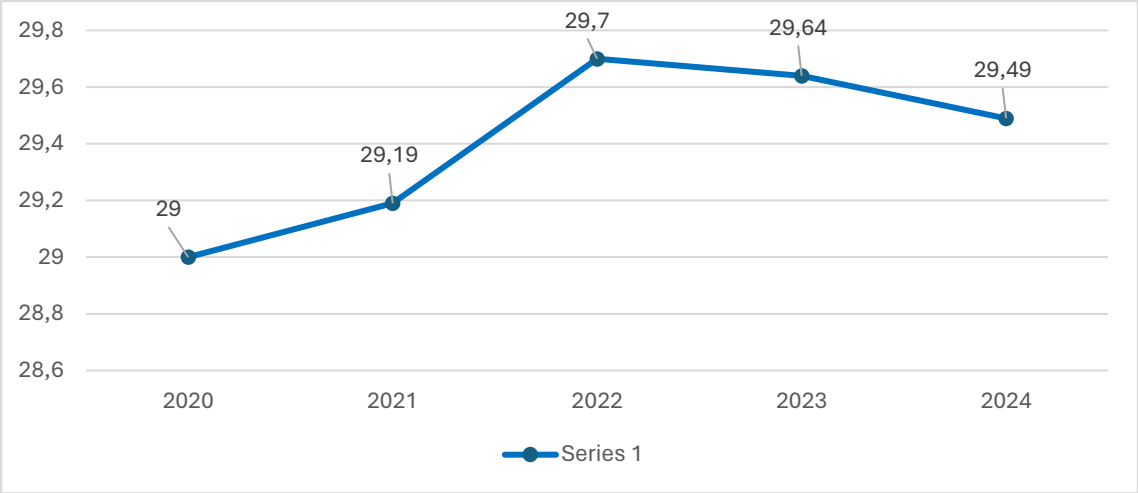

Gambar 2. 61 Kontribusi Sektor Perdagangan Di Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2025

Sedangkan kontribusi sektor perdagangan cenderung mengalami kenaikan yang sedikit, di mana pada tahun 2020 berada pada angka 29% kemudian meningkat di 2021 menjadi 29.19%. Hal ini dapat dipahami, mengingat pandemi covid-19 di tahun 2021 menyebabkan banyak perusahaan tidak beroperasi karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga perdagangan menjadi sektor yang turut terkontraksi. Pada tahun 2022 menjadi kenaikan tertinggi dengan angka 29,7% namun kembali menurun di tahun berikutnya menurun dengan nilai kontribusi sebesar 29,49% pada tahun 2024

F. Perindustrian

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dijabarkan sebagai perbandingan PDRB sektor Industri terhadap PDRB. Sektor industri pengolahan merupakan sektor strategis, hal tersebut dikarenakan, selain diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sangat besar juga memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkaged*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) yang relatif banyak. Pertumbuhan sektor industri di 2020 mengalami penurunan signifikan menjadi -7,68%. Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, pertumbuhan pada sektor industri pada tahun 2021 dapat mulai pulih dengan pertumbuhan sebesar 2,77%. Pada Tahun 2020 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kota Pasuruan berada pada 19.47% dan naik menjadi 19.68% pada tahun 2021 dan 20,15% di tahun 2023. Pada tahun 2024, pertumbuhan sektor industri hanya mencapai 3,52%, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sedangkan kontribusinya turun menjadi 19,81%. Hal tersebut merupakan imbas dari banyaknya perusahaan yang tidak beroperasi ini mengakibatkan tenaga kerja produktif memilih bekerja di perusahaan yang ada di luar Kota Pasuruan. Selain itu, pandemi covid-19 di tahun 2020 juga menyebabkan banyak perusahaan tidak beroperasi karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sektor Industri unggulan di Kota Pasuruan terdiri dari komoditas mebel, logam, makanan olahan, konveksi, kerajinan, alas kaki, batik, anyaman dan gerabah. Penguatan tipis tersebut bisa diakibatkan oleh menurunnya kontribusi sektor-sektor lain pada PDRB Kota Pasuruan, sehingga pada sektor industri seakan-akan menguat. Tabel berikut menyajikan gambaran kinerja sektor perindustrian pada PDRB Kota Pasuruan tahun 2020-2024.

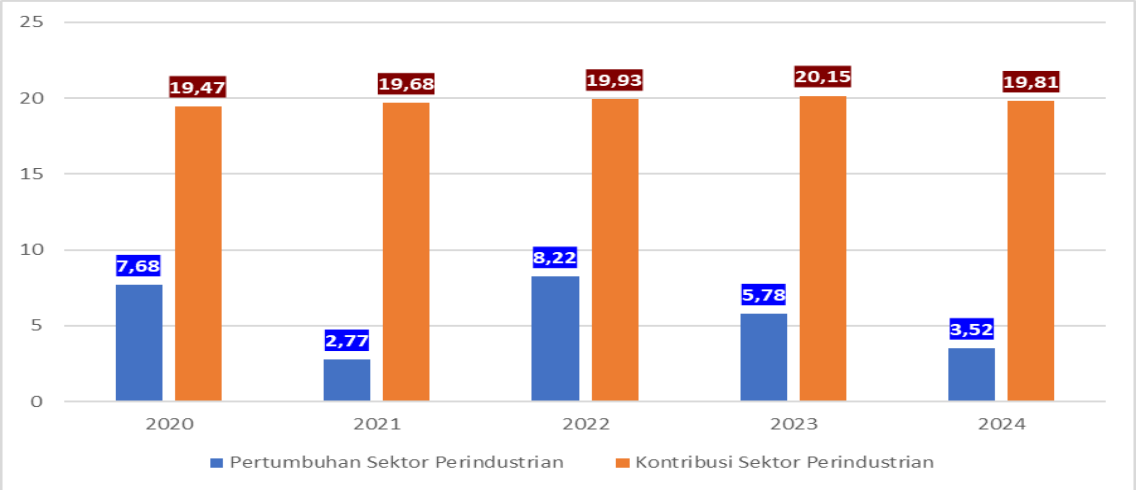

Gambar 2. 62 Capaian Indikator Urusan Perindustrian di Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2025

2.1.4.3.4. Urusan Penunjang Pemerintah

A. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas pokok dari Sekretariat Daerah adalah membantu Walikota Pasuruan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Fungsi dari Sekretariat Daerah Kota Pasuruan adalah pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif kepada Perangkat Daerah, dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah. Berikut merupakan grafik yang menampilkan capaian urusan Sekretariat daerah Kota Pasuruan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

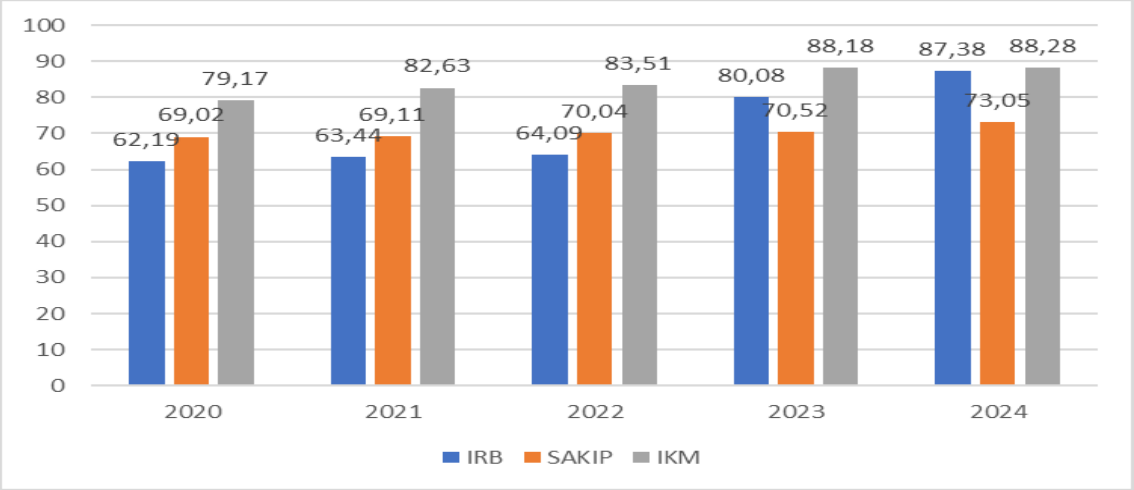

Gambar 2. 63 Capaian Indikator Urusan Penunjang Sekretariat Daerah di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, 2025

Berdasarkan grafik diatas capaian indikator indeks reformasi birokrasi, nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Pasuruan memiliki trend naik, dimana angka yang didapatkan dalam setiap tahunnya meningkat secara konsisten. Angka indeks reformasi birokrasi (IRB) pada tahun 2020 sebesar 62,19 dan terus meningkat hingga pada tahun 2024 berada pada angka 87,38. Kemudian untuk nilai SAKIP juga terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020 nilai SAKIP 69,02 dan terus naik hingga tahun 2024 berada pada 73,05. Terakhir, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 IKM Kota Pasuruan sebesar 79,17 dan terus meningkat hingga pada tahun 2024 menjadi 88,28.

B. Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD (Setwan) memainkan peran penting dalam mendukung Anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka untuk masyarakat. Setwan membantu dalam aspek administrasi dan teknis, mulai dari perencanaan hingga pengesahan peraturan daerah. Oleh karena itu, tingkat kepuasan anggota DPRD menjadi indikator utama untuk menilai kinerja Setwan. Grafik berikut menunjukkan kepuasan anggota DPRD Kota Pasuruan terhadap Setwan:

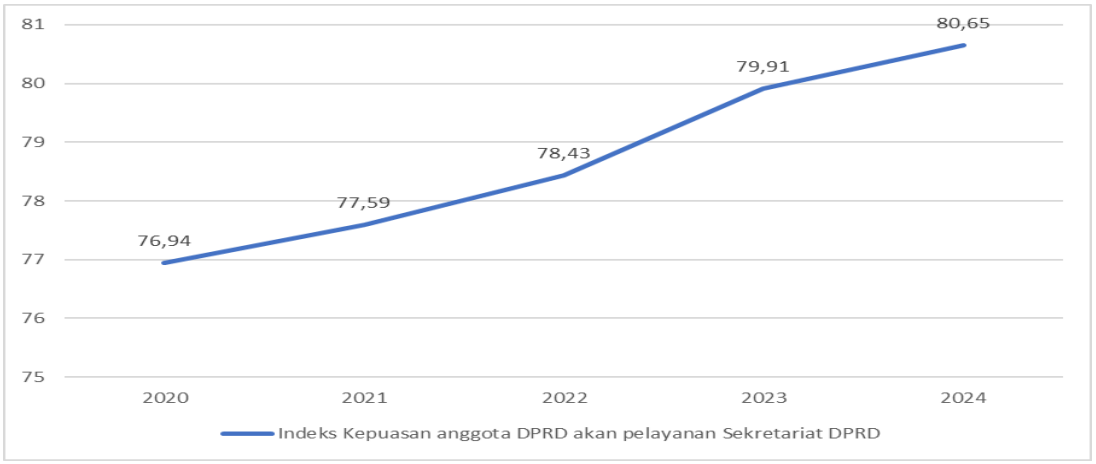

Gambar 2. 64 Capaian Indikator Urusan Sekretariat Dewan di Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber: Sekretariat Dewan Kota Pasuruan, 2025

Grafik di atas telah menggambarkan adanya peningkatan kepuasan anggota DPRD Kota Pasuruan sejak tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 indeks kepuasan berada pada angka 76,94. Angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2024 mencapai angka 80,65 .Kepuasan tertinggi terdapat pada tahun 2024 sebesar 80,65.

C. Perencanaan

Dalam perspektif pembangunan daerah, tahapan dalam proses kebijakan publik diwujudkan dalam tahapan perencanaan program/kegiatan, implementasi program/kegiatan, dan evaluasi program/kegiatan. Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai sebuah kebijakan publik tidak terlepas dari permasalahan proses kebijakan publik. Setidaknya terdapat dua tahapan dalam proses yang kadang ditemui kendala dan permasalahan yakni: pertama, bagaimana tujuan pembangunan yang dicantumkan dalam visi dan misi kepala daerah dijabarkan dalam program kegiatan. Kedua, kendala dan permasalahan implementasi program kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan, yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi antara perencanaan

dengan implementasinya. Kendala dan permasalahan tersebut tidak terlepas dari bagaimana proses kebijakan publik dirumuskan dengan keterlibatan banyak pihak sesuai dengan kapasitas dan kepentingan masing-masing pihak.

Nilai komponen perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi indikator untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah menyusun perencanaan kinerja yang logis, terukur, selaras dengan tujuan strategis, serta berbasis pada hasil (outcome). Komponen ini mencerminkan kualitas dokumen perencanaan seperti Renstra, RKT, dan PK, yang harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan mampu memberikan dasar kuat dalam pengukuran serta pelaporan kinerja. Berikut adalah capaian nilai komponen SAKIP tahun 2020-2024.

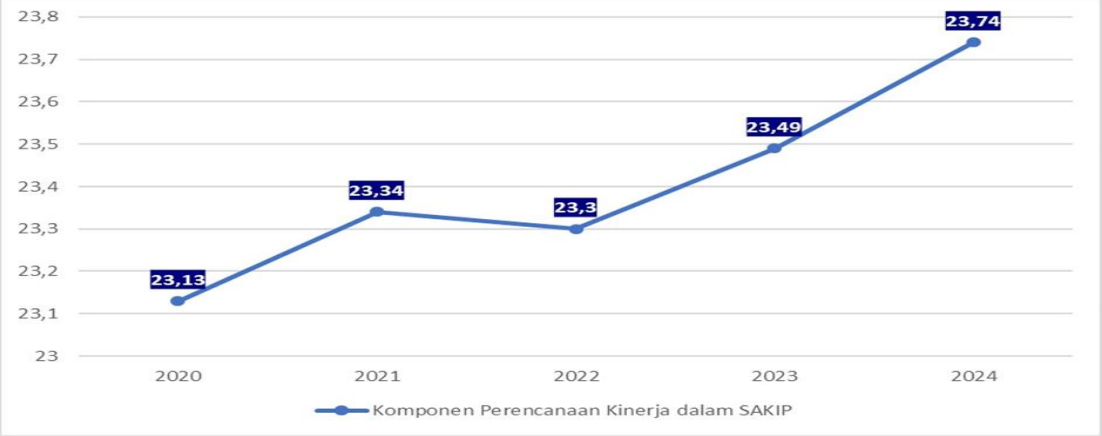

Gambar 2. 65 Capaian Indikator Komponen Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan data tersebut realisasi nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa instansi pemerintah semakin mampu menyusun dokumen perencanaan yang selaras, terukur, dan berorientasi hasil, sehingga mendukung pencapaian target kinerja yang lebih akuntabel dan efektif

D. Keuangan

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan keuangan di Kota Pasuruan direpresentasikan oleh capaian beberapa indikator berikut, pertama terkait pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

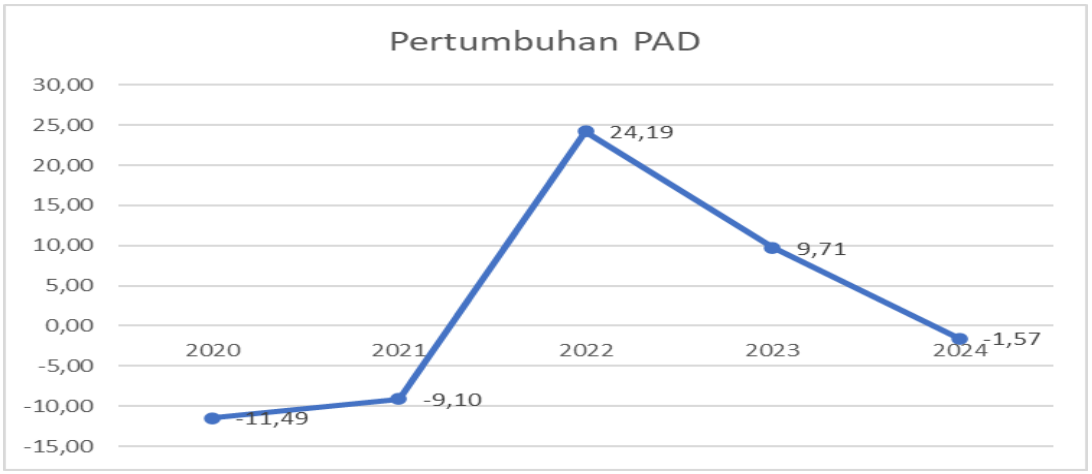

Gambar 2. 66 Pertumbuhan PAD Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber: BPKA Kota Pasuruan, 2025

Melihat data diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan PAD memiliki angka yang sangat dinamis. Pada tahun 2020 pertumbuhan PAD berada pada angka -11,49 akibat adanya Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan pertumbuhan PAD namun masih di angka -9,10, pertumbuhan PAD pada tahun 2022 berada pada angka 24,19, angka tersebut menjadi perolehan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2023 pertumbuhan PAD kembali turun menjadi 9,71. Angka tersebut kembali turun secara drastis pada tahun 2024 berada pada angka -1,57.

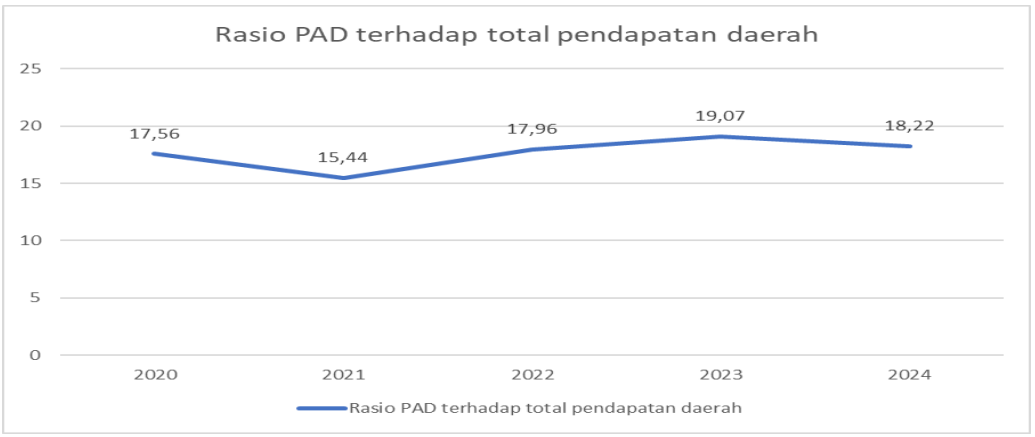

Gambar 2. 67 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber: BPKA Kota Pasuruan, 2025

Indikator kedua yaitu Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Semakin besar rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah. Sebaliknya, semakin kecil rasio PAD maka semakin rendah kemandirian daerah. Jika melihat grafik diatas, rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memiliki tren fluktuatif. Rasio PAD tahun 2020

sebesar 17,56% namun menurun pada 2021 menjadi 15,44%. Pada tahun 2022-2023 rasio PAD meningkat, namun kembali menurun pada 2024 menjadi 18,22%. Dalam lima tahun terakhir rasio PAD tertinggi terjadi pada 2023 dengan angka sebesar 19,07%.

Permasalahan/ Ancaman/ Potensi:

1. Pertumbuhan PAD perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Pasuruan. Dalam periode lima tahun terdapat tiga tahun pertumbuhan PAD mencapai minus yakni pada 2020, 2021 dan 2024.
2. Begitu pula dengan pertumbuhan PAD yang angkanya cenderung rendah dan naik turun. Hal ini perlu diperhatikan mengingat rasio PAD merupakan gambaran tingkat kemandirian suatu daerah.
3. Pemerintah perlu memperhatikan sumber pemasukan seperti pajak dan lain lain untuk dapat meningkatkan pertumbuhan serta rasio PAD.

E. Kepegawaian

Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang responsif dan adaptif, salah satu kunci utamanya adalah memiliki SDM ASN yang juga responsif dan adaptif. Ini tercermin dalam aparatur yang profesional, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, disiplin atau patuh terhadap peraturan yang berlaku, serta berdedikasi tinggi. Dengan demikian, setiap Pegawai Negeri Sipil di Kota Pasuruan dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik. Tabel berikut menyajikan kinerja kepegawaian pemerintah Kota Pasuruan.

Tabel 2. 39 Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Kota Pasuruan Kota Pasuruan 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah peserta Wawasan Kepemimpinan yang lulus	0	0	0	58	0
Jumlah peserta yang lulus ujian dinas/penyesuaian	0	35	40	19	100
Jumlah PNS yang mendapat fasilitasi tugas belajar S1, S2, S3	0	1	2	2	3
Jumlah PNS yang mendapat fasilitasi izin belajar S1, S2, S3	37	36	89	64	60
Jumlah PNS yang diusulkan dan lulus Diklat Pim II	0	3	0	7	7
Jumlah PNS yang diusulkan dan lulus Diklat Pim III	0	0	42	10	5
Jumlah PNS yang diusulkan dan lulus Diklat Pim IV	0	30	59	41	40
Jumlah penetapan pelanggaran hukuman disiplin pegawai	6	0	5	4	8
Jumlah penetapan pelanggaran pidana	1	3	2	0	0
Jumlah penetapan pemberian ijin perceraian	7	7	18	4	22
Jumlah surat penolakan perceraian	0	7	0	0	0
Jumlah Calon Praja IPDN yang difasilitasi	0	0	0	0	0
Seleksi CPNS:					
Pendaftar yang mengirim berkas lamaran	0	2.772	0	0	170
Pendaftar yang memenuhi syarat	0	2.296	0	0	121
Lulus	0	103	0	0	11
Formasi yang ditetapkan	0	506	0	0	15

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, 2025

Salah satu wujud dari manajemen sumber daya manusia yang baik adalah dengan adanya rencana pengembangan SDM dari segi kualitas dan kuantitas demi menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kebutuhan PNS Kota Pasuruan tahun 2020- 2024 memiliki jumlah yang fluktuatif namun memiliki kecenderungan meningkat.Tabel berikut menyajikan data kebutuhan pegawai di Kota Pasuruan.

Tabel 2. 40 Jumlah Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Kebutuhan PNS	3.883	5.162	6.225	6.580	6.313
Jumlah PNS	3.908	3.054	2.922	3.366	2.606
Kekurangan PNS	804	1.941	3.303	3.214	3.707

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, 2025

Melihat data diatas maka dapat kita ketahui bahwa jumlah, kebutuhan, dan kekurangan PNS memiliki angka yang fluktuatif di setiap tahunnya. Terbaru pada 2024 kebutuhan PNS berada pada 6.313 personil, Angka kekurangan PNS pada 2024 menjadi angka kekurangan terbanyak selama lima tahun terakhir yakni 3.707.

Untuk membentuk pegawai yang berintegritas, salah satu langkah yang diambil adalah melalui pembinaan kepegawaian, termasuk pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar aturan. Tabel berikut menyajikan data penanganan pelanggaran pegawai.

Tabel 2. 41 Data Penanganan Pelanggaran Pegawai Tahun 2020 - 2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Pelanggaran Disiplin PNS:					
Ringan	0	1	2	0	3
Sedang	0	1	3	1	1
Berat	9	4	3	4	0
Pelanggaran Pidana:					
Kriminal	1	1	0	0	0
Penyalahgunaan jabatan/wewenang	0	0	6	0	0
Korupsi	0	0	2	2	0
Narkoba	1	0	1	0	0
Perceraian:					
Pemberian izin perceraian	9	7	6	18	4
Penolakan izin perceraian	0	0	7	0	0
Konseling PNS	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, 2025

F. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) merupakan salah satu elemen penting dalam mendorong inovasi di tingkat daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, Litbang berfungsi sebagai alat strategis untuk menghasilkan solusi atas permasalahan

lokal, memperbaiki kualitas layanan publik, serta mendorong efisiensi dan efektivitas kerja Perangkat Daerah.

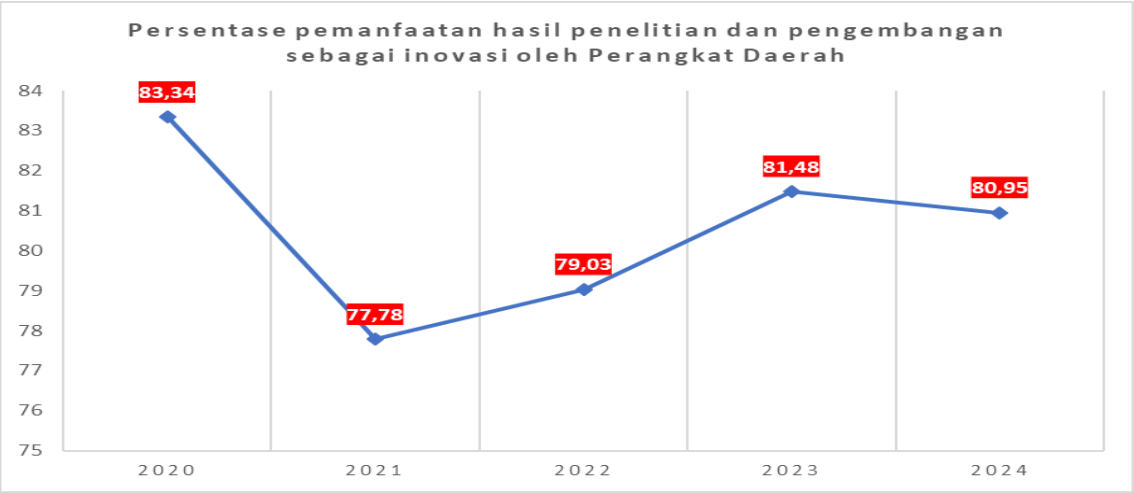

Gambar 2. 68 Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengembangan Sebagai Inovasi Oleh Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2024

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas, persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai inovasi oleh perangkat daerah mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 persentase pemanfaatan berada pada angka 81,48% sedangkan pada tahun 2024, persentase pemanfaatan berada pada angka 80,95%.

G. Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (disingkat APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan untuk memperkuat fungsi pengawasan APIP. APIP berkewajiban untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil audit untuk menjamin keefektifan pelaksanaan audit. Hal ini dinyatakan dalam standar audit kinerja yang menyatakan bahwa auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas temuan beserta rekomendasi.

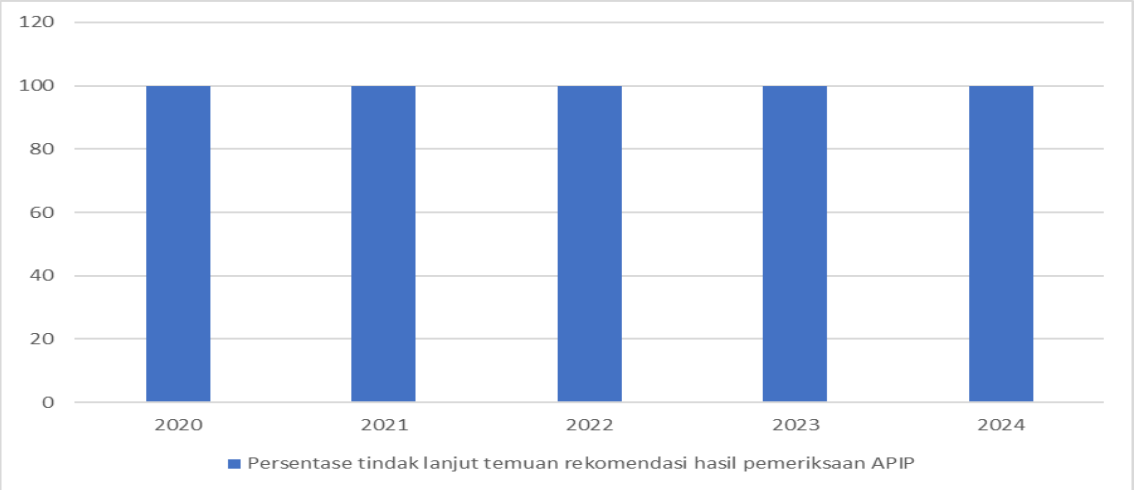

Gambar 2. 69 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

Sumber: Inspektorat Kota Pasuruan, 2025

Berdasarkan pada gambar grafik diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh temuan yang ada di Kota Pasuruan telah dilakukan tindak lanjut secara keseluruhan. Hal tersebut membuktikan bahwa komitmen dari Inspektorat selaku leading sektor dalam indikator ini telah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan harapan. Inspektorat telah melakukan tugasnya dengan cara memberikan solusi untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi meliputi penyelesaian tindak lanjut jangka panjang, penerapan sanksi yang tegas, penguatan peran pihak-pihak yang terlibat, dan menyusun SOP tindak lanjut.

2. Opini BPK

Pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah untuk memeriksa kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan bentuk pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Tabel 2. 42 Capaian Opini BPK Atas LKD Kota Pasuruan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Inspektorat Kota Pasuruan, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Kota Pasuruan telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama lima tahun berturut-turut mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, hal ini mencerminkan komitmen tinggi Pemerintah Kota Pasuruan dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

H. Kewilayahan

Kecamatan sebagai tingkatan administratif dalam sistem pemerintahan memiliki fungsi kewilayahan yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Terdapat empat kecamatan di Kota Pasuruan yakni Kecamatan Panggungrejo, Gadingrejo, Purworejo dan Bugul Kidul.

Pelayanan Publik (*Public Service*) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara telah ditetapkan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan publik.

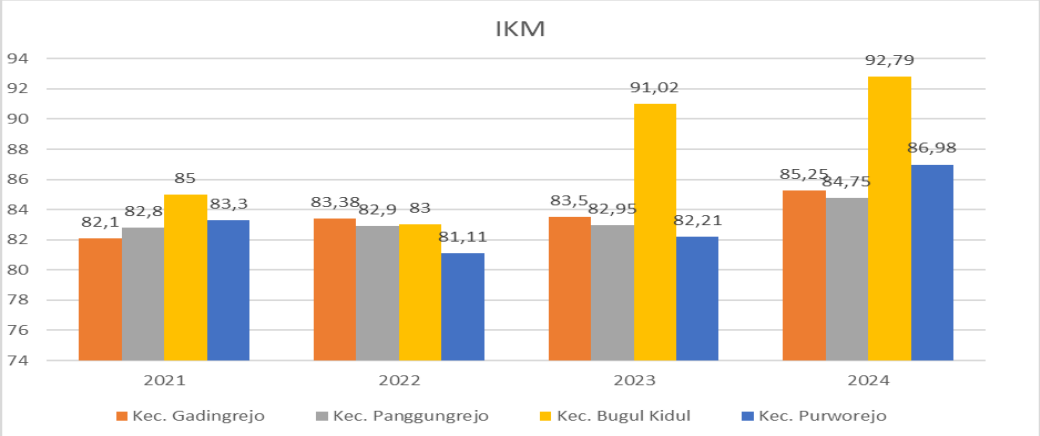

Gambar 2. 70 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan di Kota Pasuruan Tahun 2021 - 2024
Sumber: Kecamatan-kecamatan di Kota Pasuruan, 2025

Capaian indikator IKM Kecamatan di Kota Pasuruan rata-rata memiliki rentang angka 81,11 sampai dengan 92,79. Kecamatan Gadingrejo memiliki skor IKM yang cenderung meningkat dari 2021-2024 meskipun peningkatan tersebut tergolong rendah. Kecamatan Panggungrejo juga memiliki tren IKM yang meningkat 2021 dengan skor 82,8 hingga 2024 dengan skor 84,75. Sedangkan kecamatan Bugul Kidul menjadi kecamatan dengan capaian IKM paling tinggi di tahun 2024 dengan skor 92,79. Terakhir kecamatan purworejo yang memiliki capaian fluktuatif sejak 2021-2024 dengan capaian paling tinggi di 2024 yakni 86,98.

I. Pemerintahan Umum

Unsur pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden dalam pelaksanaan unsur pemerintahan umum tersebut dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan mempunyai fungsi penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik; perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik; pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan pembinaan politik; pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik; pelaksanaan kegiatan penatausahaan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Tabel 2. 43 Capaian Urusan Pemerintahan Umum Kota Pasuruan Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks toleransi/ Inklusi sosial	N/A	N/A	85,27	86,77	89,2
Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA	0	0	0	0	0
Persentase penanganan konflik sosial	5	2,7	27,27	3,12	3,57
Persentase fasilitasi pendidikan politik	14,7	19	28,7	39,13	39,13
Prosentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang aktif	1,89	2,64	0,99	4,18	8,2

Sumber: Bakesbangpol Kota Pasuruan, 2025

Melalui data di atas maka dapat kita ketahui bahwa indeks toleransi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Persentase pendidikan politik juga mengalami peningkatan di setiap tahun, begitu pula persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang aktif.

2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah mencakup hak dan tanggung jawab entitas wilayah dalam menjalankan pemerintahan daerah. Hak dan tanggung jawab ini diukur dalam bentuk uang dan mencakup seluruh aset yang terkait dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Seluruh kegiatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas tidak dapat diremehkan. Pengelolaan yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Manajemen keuangan daerah harus berfokus pada kepentingan masyarakat, dan untuk itu perlu disajikan secara jelas, efektif, dan efisien. Pendekatan ini akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakatnya. Di bab ini, kita akan mengeksplorasi sejarah kinerja pengelolaan keuangan daerah sebelumnya, perilaku data dan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan daerah, serta proyeksi ketersediaan dana pembangunan di Kota Pasuruan untuk dua tahun mendatang.

Landasan yuridis pengelolaan keuangan daerah di Kota Pasuruan berpegang pada batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Pengelolaan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam mengenai peraturan yang berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 memberikan panduan komprehensif yang menjadi acuan utama dalam mengelola keuangan daerah. Dengan berpegang pada landasan yuridis ini, Pemerintah Kota Pasuruan diharapkan mampu mengelola keuangannya dengan lebih transparan dan bertanggung jawab, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883)

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Penilaian kinerja keuangan masa lalu dilakukan melalui peninjauan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pasuruan disertai kondisi Neraca Daerah Kota Pasuruan. Tinjauan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pasuruan dilakukan untuk mendapatkan gambaran terhadap perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sedangkan tinjaun terhadap Neraca Daerah Kota Pasuruan difokuskan pada perkembangan aset daerah, kewajiban serta ekuitas dana yang didalamnya terdapat analisis Neraca Daerah yang meliputi perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas.

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merujuk pada dokumen perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah daerah yang mencakup semua rencana penerimaan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu, biasanya satu

tahun. APBD mencerminkan rencana keuangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan berbagai program, proyek, dan kegiatan yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut :

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
   a. Pendapatan Daerah;
   b. Belanja Daerah; dan
   c. Pembiayaan Daerah.
2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
6. Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan meliputi perkembangan pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, didefinisikan sebagai seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu. Pendapatan ini meliputi semua penerimaan uang yang masuk melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran, serta tidak perlu dikembalikan. Pendapatan Daerah Kota Pasuruan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang mencakup transfer dari pemerintah pusat serta transfer dari provinsi dan daerah lain, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Komponen-komponen Pendapatan Daerah Kota Pasuruan menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan, mencerminkan upaya yang berhasil dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal. Pendapatan Transfer juga menunjukkan kontribusi yang stabil dan substansial dari pemerintah pusat serta provinsi. Selain itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga memberikan kontribusi penting dalam keseluruhan pendapatan daerah. Berikut ini adalah perkembangan nilai masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kota Pasuruan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, dinyatakan dalam milyar rupiah, yang menunjukkan tren positif dalam peningkatan penerimaan daerah. Berikut merupakan perkembangan nilai masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2020 hingga 2024 (Dalam Milyar Rupiah):

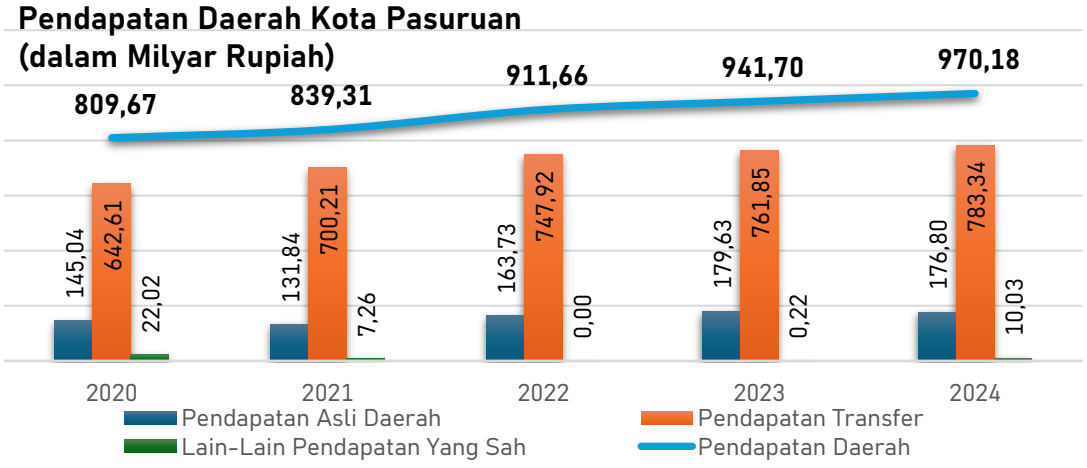

Gambar 2. 71 Pendapatan Daerah Kota Pasuruan (Dalam Milyar) Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan, 2025

Pendapatan Daerah Kota Pasuruan meningkat signifikan selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4.65%, yakni dari nilai Rp. 809,671,940,302.92 di tahun 2020 kemudian mampu mencapai nilai Rp. 970,175,327,046.91 di tahun 2024. Pertumbuhan Pendapatan Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2022 dimana Pendapatan Daerah mampu tumbuh 8.62% dari tahun 2021 yang disumbang paling besar oleh adanya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat progresif yakni mencapai 24.19%. Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah pada dua tahun berikutnya (2023 dan 2024), pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan melambat menjadi 3.29% di tahun 2023 serta kembali menurun di tahun 2024 menjadi 3.02%. Diperlukan dorongan peningkatan Pendapatan Daerah sehingga pertumbuhannya dapat semakin optimal serta tidak sampai mengalami penurunan.

Apabila dicermati lebih dalam, melemahnya pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2024 disebabkan oleh adanya tren menurun pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1.57%. Pada tahun 2024 tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pasuruan menurun dari sebelumnya sebesar Rp. 179,625,631,641.70 di tahun 2023 menjadi Rp. 176,803,143,153.91 di tahun 2024. Penurunan perolehan PAD yang cukup besar dipengaruhi oleh adanya penurunan nilai Lain-lain PAD yang Sah hingga mencapai -93.11%. Kondisi ini merupakan dampak adanya pergeseran dana kapitasi yang sebelumnya menjadi komposit pembentuk Lain-Lain PAD yang Sah kepada Retribusi Kesehatan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). Sedangkan untuk komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan tetap menunjukkan tren yang meningkat di tahun 2024. Secara keseluruhan PAD Kota Pasuruan tetap mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5.81%.

Adapun jika melihat kondisi pada tahun 2021, Pendapatan Daerah Kota Pasuruan menunjukkan adanya peningkatan 3.66% menjadi Rp. 839.305.466.624,42 dari sebelumnya sebesar Rp. 809,671,940,302.92 di tahun 2020. Jika dilihat lebih lanjut, peningkatan pada total Pendapatan Daerah tersebut dipengaruhi oleh SSmeningkatnya Pendapatan Transfer yang tumbuh sebesar 8.96% dibanding tahun 2020 dengan pertumbuhan tertinggi pada komponen Dana Bagi Hasil yang tumbuh sebesar 30.19%

serta komponen Pendapatan Bagi Hasil yang tumbuh sebesar 31.15%. Selain itu Pajak Daerah juga dapat menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan 16.83%, Retribusi Daerah dapat kembali meningkat dengan pertumbuhan 5.51%, dan Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dapat kembali meningkat dengan pertumbuhan 6.76%. Akan tetapi Lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan hingga -20.08%. Sehingga jika dilihat pada nilai PAD total pada tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan sebesar -9.10%.

Adapun pada tahun 2022, perekonomian Kota Pasuruan terlihat mulai pulih dari adanya Pandemi Covid-19 yang sebelumnya terjadi pada akhir tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2021. Pada tahun 2022 Pendapatan Daerah Kota Pasuruan terlihat mengalami peningkatan yang lebih progresif hingga menunjukkan pertumbuhan yang sangat progresif yakni mencapai 8.62%. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2022 ini memiliki nilai pertumbuhan yang paling tinggi pada lima tahun terakhir. Yakni dari angka Rp. 839.305.466.624,42 di tahun 2021 kemudian menjadi Rp. 911.656.871.775,11 di tahun 2022. Jika dilihat pada komponennya, maka terlihat PAD mengalami peningkatan yang paling tinggi mencapai 24.19%. Kemudian disusul dengan adanya pertumbuhan Pendapatan Transfer sebesar 6.81%. Sedangkan pada komponen Lain-lain Pendapatan yang sah tidak terlihat adanya realisasi pada tahun 2022 ini.

Pada tahun 2023 Pendapatan Kota Pasuruan terlihat kembali mengalami peningkatan. Yakni dengan adanya pertumbuhan sebesar 3.29% dari angka Rp. 911.656.871.775,11 di tahun 2022 menjadi Rp. 941.695.238.574,70 di tahun 2023. Pada tahun ini pertumbuhan tertinggi juga terdapat pada Pendapatan Asli Daerah yakni sebesar 9.71%. Adapun komponen PAD seluruhnya juga mengalami pertumbuhan yang baik. Yakni Pajak Daerah tumbuh sebesar 12.48%, Retribusi Daerah tumbuh paling banyak mencapai 41.66%, Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan tumbuh 2.76%, serta Lain-lain PAD yang sah tumbuh sebesar 6.34%. Sedangkan pada Pendapatan Transfer di tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang paling kecil dibandingkan pendapatan transfer dalam tiga tahun terakhir, yakni sebesar 1.86%.

Pendapatan Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2024 kembali meningkat dari Rp. 941,695,238,574.70 di tahun 2023 menjadi Rp. 970,175,327,046.91 di tahun 2024 atau tumbuh sebesar 3.02%. Peningkatan paling tinggi terjadi pada komponen Lain-lain

Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat realisasi sebesar Rp. 10,032,524,620.00 setelah pada tahun sebelumnya tidak terdapat realisasi. Selain itu peningkatan yang cukup tinggi juga terpotret pada adanya pertumbuhan Bantuan Keuangan sebesar 618.91%. Sehingga pertumbuhan tersebut juga berdampak pada peningkatan nilai Pendapatan Transfer yang tumbuh 2.82% di tahun 2024 ini. Adapun pada PAD, justru menunjukkan adanya penurunan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) mengamanatkan adanya pergeseran pada beberapa komponen PAD. Akan tetapi diluar kondisi tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menujukan pertumbuhan yang sangat progresif dalam lima tahun terakhir (dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5.81%). Maka hal ini dapat mengindikasikan adanya pengelolaan keuangan yang baik pada Pemerintah Daerah Kota Pasuruan. Hal ini dapat menjadi potensi positif untuk dapat terus meningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan PAD khususnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Lain-lain PAD yang Sah. Sehingga kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat terhadap Pendapatan Daerah diharapkan juga dapat meningkatkan desentralisasi fiskal pada Kota Pasuruan untuk kedepannya.

Pemerintah Daerah Kota Pasuruan juga memiliki sumber pendanaan diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber pendanaan utama. Salah satu sumber pendanaan di luar APBD dan APBN yakni dengan memanfaatkan dana dari Corporate Social Responsibility (CSR). Dana CSR berasal dari kontribusi perusahaan swasta dan BUMN yang beroperasi di wilayah Kota Pasuruan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Pemanfaatan dana CSR dapat mendukung berbagai program pembangunan daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan, sehingga memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat tanpa membebani keuangan daerah. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta melalui CSR, pembangunan Kota Pasuruan dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2022 terdapat tujuh program CSR yang dilaksanakan oleh berbagai perusahaan di Kota Pasuruan seperti PT Indosat, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa

Timur Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Program-program tersebut mencakup beragam bidang, antara lain pengelolaan aplikasi informatika, bantuan alat kesehatan di RSUD dr. R. Soedarsono, penataan trotoar, dan peningkatan infrastruktur seperti lampu hiss dan median jalan. Total anggaran yang disalurkan oleh CSR tersebut pada tahun 2022 ini mencapai Rp 1.226.252.690, dengan manfaat yang dirasakan oleh perangkat daerah, masyarakat umum, dan fasilitas publik.

Adapun pada tahun 2023, tercatat empat program CSR yang melibatkan perusahaan di Kota Pasuruan seperti PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT Bank Jatim Syariah. Kegiatan yang dilakukan antara lain pemasangan neon box di kecamatan, penguatan daya tarik wisata melalui pengecatan, serta sponsorship event keagamaan. Total dana yang disalurkan pada tahun 2023 ini sebesar Rp. 560.850.000, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur daerah dan dukungan kegiatan masyarakat.

Lebih lanjut pada tahun 2024, terlaksana tiga program CSR dari PT Jusannaga Gempol Pasuruan dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Kegiatan utamanya meliputi pembangunan septic tank untuk masyarakat serta penataan alun-alun kota. Total anggaran yang telah disalurkan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp513.000.000, dengan tujuan meningkatkan sanitasi lingkungan dan keindahan ruang publik.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan berbagai Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah. Urusan Pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mencakup urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, serta urusan penunjang pemerintahan. Dalam alokasi belanja daerah, prioritas utama adalah mendukung urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Hal ini harus memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan, serta mengikuti standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pendanaan belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan didasarkan pada

analisis standar belanja dan harga satuan regional. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, belanja daerah tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada pengembangan aspek-aspek lain yang mendukung kemajuan daerah secara keseluruhan.

Realisasi belanja daerah Kota Pasuruan selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024) mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6.35%, yakni dari Rp. 824,822,274,271.65 di tahun 2020 hingga menjadi Rp. 1,054,171,463,379.27 di tahun 2024. Realisasi Belanja Daerah Kota Pasuruan dalam lima tahun terakhir juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Adapun sepanjang periode 2020-2024 peningkatan Belanja Daerah yang paling tinggi terjadi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 9.40%. Sedangkan pertumbuhan belanja paling rendah terjadi pada tahun 2021 dimana angka pertumbuhannya sebesar 4.09%. Diasumsikan kondisi ini disebabkan bahwa tahun 2021 masih terdapat banyak *refocusing* dan kebijakan lainya guna penanganan pandemi Covid-19. Secara lebih jelas, perkembangan nilai Belanja Daerah beserta komponenya pada tahun 2020 hingga 2024 adalah sebagai berikut:

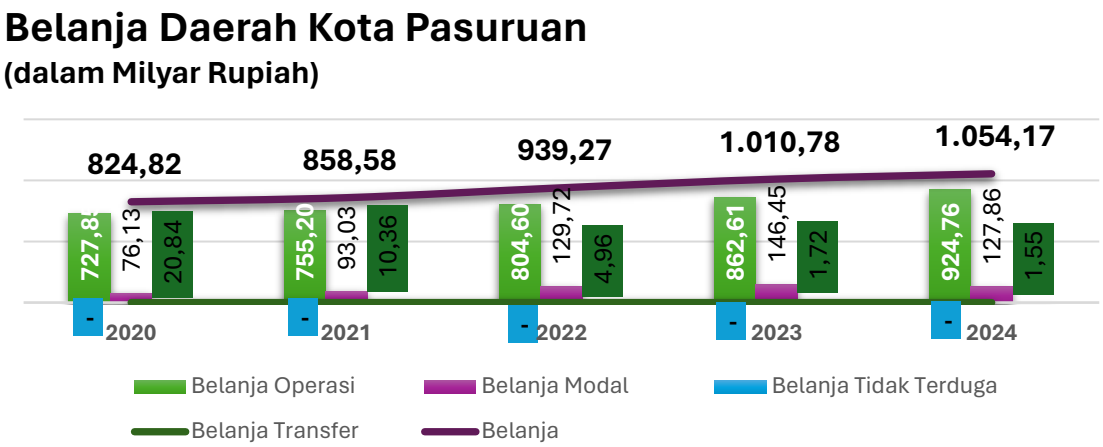

Gambar 2. 72 Perkembangan Nilai Belanja Daerah Beserta Komponenya Tahun 2020 - 2024
Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

Kota Pasuruan tercatat memiliki nilai Belanja Daerah sebesar Rp. 824.822.274.271,65 di tahun 2020 yang kemudian pada tahun 2021 Belanja Daerah Kota Pasuruan mengalami peningkatan sebesar 4.09%. Sehingga nilai Belanja Daerah Kota

Pasuruan tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 858.584.017.159,52. Pada tahun 2022, Belanja Daerah Kota Pasuruan kembali mengalami peningkatan sebesar 9.40% dengan nilai belanja Rp. 939.274.546.104,50. Dan peningkatan Belanja Daerah Kota Pasuruan kembali terjadi pada tahun 2023 hingga menjadi Rp. 1.010.778.967.728,92 atau tumbuh sebesar 7.61%. serta terus tumbuh sebesar 4.29% di tahun 2024 menjadi Rp. 1,054,171,463,379.27. Secara umum Belanja Daerah Kota Pasuruan terdiri atas 4 jenis belanja, yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Dari keempat jenis belanja tersebut, Belanja Operasi dan Belanja Modal merupakan komponen belanja Kota Pasuruan tahun 2020-2024 yang menunjukkan adanya perkembangan paling progresif.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah melibatkan transaksi keuangan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang menghasilkan Pembiayaan Netto. Jika terdapat surplus, pembiayaan mencerminkan penggunaan surplus, sedangkan dalam kondisi defisit anggaran, pembiayaan menunjukkan transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah muncul ketika pengeluaran melebihi penerimaan, sehingga terjadi defisit. Penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari berbagai sumber., yaitu:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
b. Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah timbul karena ada surplus/ kelebihan anggaran, lebih lanjut APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi :

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembentukan dana cadangan;

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis yang dilakukan terhadap komponen pembiayaan daerah akan memberikan gambaran mengenai selisih antara pendapatan yang diterima daerah secara agregat atau jumlah keseluruhan suatu objek dalam perekonomian, dengan belanja yang merepresentasikan upaya perencanaan di daerah. Asumsi yang digunakan dalam analisis pembiayaan adalah bahwa pembiayaan tidak memiliki kepastian untuk naik atau turun dengan maksud pembiayaan dapat mencapai angka equilibrium yakni Rp. 0,-.

Penerimaan Pembiayaan Kota Pasuruan dalam lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar -4.26%. Hal ini disebabkan penerimaan pembiayaan cenderung mengalami penurunan nilai pada setiap tahunnya, terkecuali pada tahun 2023 dimana terdapat Pencairan Dana Cadangan yang cukup besar Rp. 86,000,133,684.16 sehingga nilai penerimaan pembiayaan pada tahun 2023 tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2022.

Penerimaan pembiayaan Kota Pasuruan sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang mencapai proporsi 94%. Sehingga nilai SiLPA yang dihasilkan oleh Kota Pasuruan pada tahun 2020-2024 tidak jauh dari nilai penerimaan pembiayaannya, yakni juga cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -5.77%. Penurunan tertinggi SiLPA Kota Pasuruan terjadi pada tahun 2023 yakni menurun sebesar -14.83% dibanding tahun 2022. Semakin berkurangnya SiLPA pada setiap tahunnya menunjukkan kondisi yang semakin baik, dimana keakuratan dalam melakukan perencanaan cenderung berangsur lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, semakin kecil SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin sedikitnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain, sehingga pelaksanaan belanja daerah berjalan secara optimal.

Adapun selain SiLPA, penerimaan pembiayaan Kota Pasuruan dalam 5 tahun terakhir terdiri atas komponen pencairan dana cadangan sebesar Rp. 86,000,133,684.16

di tahun 2023 dan komponen Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada tahun 2020-2022 yakni tahun 2020 sebesar Rp. 14.781.904,00, tahun 2021 sebesar Rp. 21.893.075,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 3,000,000.00 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -34.55%. Sedangkan untuk hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya yang memiliki rata-rata pertumbuhan 0% karena tidak ada realisasi setiap tahunnya serta untuk pencairan dana cadangan juga memiliki rata-rata pertumbuhan 0% karena hanya terealisasi dalam 1 tahun 2023.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Kota Pasuruan dalam 5 tahun terakhir 2020-2024 memiliki rata-rata pertumbuhan -41.25%. Pengeluaran Pembiayaan Kota Pasuruan terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 serta adanya pengeluaran pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan selama empat tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -35.73%. Yakni pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.560.056.269,25 ; tahun 2021 sebesar Rp. 2.651.096.415,76; tahun 2022 sebesar Rp.2,189,802,066.08 dan tahun 2023 sebesar Rp. 37,055,609,161.93. Adapun pada komponen Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan lainnya tidak terdapat realisasi dalam 5 tahun terakhir. Serta pada tahun 2023 tidak terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan dalam keuangan Kota Pasuruan.

Secara garis besar, laporan keuangan dalam hal ini adalah LKPD Kota Pasuruan juga telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada setiap tahunnya. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan bentuk pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan opini BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pasuruan pada tahun 2020-2024, Kota Pasuruan dapat meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini mencerminkan komitmen tinggi Pemerintah Kota Pasuruan dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adapun secara lebih rinci realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Pasuruan selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 44 Realisasi Dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**	**809,671,940,302.92**	**839,305,466,624.42**	**911,656,871,775.11**	**941,695,238,574.70**	**970,175,327,046.91**	**4.65%**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**145,036,603,027.92**	**131,837,446,162.42**	**163,732,730,981.11**	**179,625,631,641.70**	**176,803,143,153.91**	**5.81%**
1.1.1.	Pajak daerah	34,172,474,456.00	39,922,015,220.00	46,650,290,289.00	52,473,038,186.78	62,228,499,154.90	16.19%
1.1.2.	Retribusi daerah	7,194,776,862.00	7,591,157,397.00	8,117,254,501.00	11,503,008,644.00	100,741,535,270.00	207.48%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	5,479,307,832.40	5,849,860,799.95	6,115,362,978.37	6,283,921,167.03	6,298,287,299.13	3.57%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	98,190,043,877.52	78,474,412,745.47	102,849,823,212.74	109,365,663,643.89	7,534,821,429.88	-18.95%
1.2	**Pendapatan Transfer**	**642,610,737,275.00**	**700,206,060,982.00**	**747,924,051,772.00**	**761,847,606,933.00**	**783,339,659,273.00**	**5.12%**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**567,460,654,840.00**	**602,690,607,348.00**	**644,106,485,201.00**	**651,390,724,212.00**	**660,074,008,052.00**	**3.89%**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	559,188,950,840.00	602,690,607,348.00	626,097,743,201.00	635,710,664,212.00	648,726,164,052.00	3.81%
1.2.1.1.1	*Dana Bagi Hasil*	85,195,622,304.00	110,915,047,318.00	129,913,165,916.00	90,211,795,065.00	89,124,930,000.00	3.89%
1.2.1.1.2	*Dana Alokasi Umum (DAU)*	403,909,797,000.00	403,383,780,000.00	400,677,921,887.00	427,076,974,462.00	449,563,102,233.00	2.76%
1.2.1.1.3	*Dana Alokasi Khusus (DAK)*	70,083,531,536.00	88,391,780,030.00	95,506,655,398.00	118,421,894,685.00	110,038,131,819.00	12.77%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	8,271,704,000.00	0.00	18,008,742,000.00	15,680,060,000.00	11,347,844,000.00	-35.14%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.1.5	Dana Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.2	**Transfer Antar-Daerah**	**75,150,082,435.00**	**97,515,453,634.00**	**103,817,566,571.00**	**110,456,882,721.00**	**123,265,651,221.00**	13.55%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	72,384,353,435.00	94,930,558,934.00	91,417,533,571.00	108,053,799,100.00	105,989,567,600.00	10.93%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	2,765,729,000.00	2,584,894,700.00	12,400,033,000.00	2,403,083,621.00	17,276,083,621.00	227.87%
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**22,024,600,000.00**	**7,261,959,480.00**	**89,022.00**	**222,000,000.00**	**10,032,524,620.00**	**63382.17%**
1.3.1	Hibah	22,024,600,000.00	0.00	0.00	222,000,000.00	0.00	-50.00%
1.3.2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0.00	7,261,959,480.00	89,022.00	0.00	10,032,524,620.00	-50.00%
2	**BELANJA**	**824,822,274,271.65**	**858,584,017,159.52**	**939,274,546,104.50**	**1,010,778,967,728.92**	**1,054,171,463,379.27**	**6.35%**
2.1	**Belanja Operasi**	**727,851,135,410.65**	**755,199,783,115.45**	**804,595,474,677.65**	**862,605,302,488.92**	**924,765,500,010.27**	**6.18%**
2.1.1	Belanja Pegawai	411,897,154,369.00	342,856,599,418.00	378,770,674,303.00	369,520,132,167.00	422,602,151,750.00	1.41%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	230,827,496,281.65	344,170,148,051.45	363,508,133,547.65	423,932,933,202.92	412,303,497,768.27	17.15%
2.1.3	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.5	Belanja Hibah	60,815,840,537.00	43,671,306,937.00	35,526,573,727.00	53,328,245,546.00	78,731,777,498.00	12.73%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	24,310,644,223.00	24,501,728,709.00	26,790,093,100.00	15,823,991,573.00	11,128,072,994.00	-15.12%

No.	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.2	**Belanja Modal**	**76,128,829,774.00**	**93,025,829,540.07**	**129,718,487,434.85**	**146,450,795,740.00**	**127,858,320,269.00**	**15.46%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	71,820,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34,917,038,454.00	38,521,859,899.00	36,486,480,985.00	54,641,329,574.00	47,464,463,246.00	10.42%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20,282,931,925.00	30,946,782,050.00	54,606,509,061.00	58,482,341,064.00	35,623,694,620.00	24.26%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18,389,400,166.00	22,565,395,591.07	38,003,139,388.85	32,938,790,102.00	44,265,821,053.00	28.05%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,467,639,041.00	991,792,000.00	619,120,000.00	388,335,000.00	170,342,350.00	-47.70%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	0.00	3,238,000.00	0.00	333,999,000.00	-25.00%
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**20,842,309,087.00**	**10,358,404,504.00**	**4,960,583,992.00**	**1,722,869,500.00**	**1,547,643,100.00**	**-31.89%**
2.4	**Belanja Transfer**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**243,094,211,358.62**	**222,905,714,195.64**	**200,979,067,244.78**	**257,171,724,533.47**	**188,087,995,379.25**	**-4.26%**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	243,079,429,454.62	222,883,821,120.64	200,976,067,244.78	171,171,590,849.31	188,087,995,379.25	-5.77%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	86,000,133,684.16	0.00	-25.00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	14,781,904.00	21,893,075.00	3,000,000.00	0.00	0.00	-34.55%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**5,060,056,269.25**	**2,651,096,415.76**	**2,189,802,066.08**	**0.00**	**37,055,609,161.93**	**-41.25%**
3.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00%
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	3,560,056,269.25	2,651,096,415.76	2,189,802,066.08	0.00	37,055,609,161.93	-35.73%
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan, 2025

2.2.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menjadi sebuah laporan keuangan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini memiliki signifikansi besar bagi manajemen pemerintah daerah, bukan hanya untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam upaya mengelola sumber daya ekonomi daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah, sebagai gambaran posisi keuangan entitas (pemerintah daerah) pada suatu titik waktu tertentu, mencakup elemen-elemen utama seperti Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset dapat didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu, di mana manfaat ekonomi atau sosial di masa mendatang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Aset juga dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum serta sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban dalam Neraca Daerah adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Komponen terakhir yang tercakup dalam Neraca Daerah adalah ekuitas, yang dapat didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah, merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Untuk mengetahui posisi keuangan daerah Kota Pasuruan berikut disajikan data perkembangan dan rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah Kota Pasuruan dalam 5 tahun terakhir 2020-2024.

Tabel 2. 45 Neraca Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**ASET**						
1.1.	**ASET LANCAR**	**Rp 269,405,539,189.73**	**Rp 322,197,744,393.94**	**Rp 249,617,775,676.37**	**Rp 256,271,330,230.75**	**Rp 128,857,005,362.36**	**-12.50%**
1.1.1.	Kas	Rp 222,883,821,120.64	Rp 200,974,523,392.78	Rp 171,172,144,599.31	Rp 188,087,995,379.25	Rp 67,037,040,784.96	-19.78%
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	25.00%
1.1.3.	Piutang Pendapatan	Rp 35,504,027,203.00	Rp 100,472,991,677.50	Rp 62,122,458,286.45	Rp 54,287,025,815.05	Rp 51,659,774,147.75	31.84%
1.1.4.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	25.00%
1.1.5.	Piutang Lainnya	Rp 881,658,620.35	Rp 879,222,303.35	Rp 4,295,869,590.35	Rp 4,426,141,745.36	Rp 4,295,869,590.35	97.10%
1.1.6.	Penyisihan Piutang	-Rp 10,926,430,608.12	-Rp 12,002,346,907.00	-Rp 13,267,328,414.70	-Rp 16,747,584,054.40	-Rp 25,301,885,989.05	24.42%
1.1.7.	Beban Dibayar Dimuka	Rp 188,345,674.58	Rp 64,102,650.20	Rp 78,775,506.85	Rp 85,661,300.14	Rp 87,287,904.65	-8.11%
1.1.8.	Persediaan	Rp 20,874,117,179.28	Rp 31,809,251,277.11	Rp 25,215,856,108.11	Rp 26,132,090,045.35	Rp 31,078,918,923.70	13.56%
1.2.	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**Rp 74,074,975,482.80**	**Rp 74,019,668,071.03**	**Rp 76,786,048,812.72**	**Rp 74,152,809,846.22**	**Rp 73,259,886,017.46**	**-0.24%**
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	Rp 74,074,975,482.80	Rp 74,019,668,071.03	Rp 76,786,048,812.72	Rp 74,152,809,846.22	Rp 73,259,886,017.46	-0.24%
1.3.	**ASET TETAP**	**Rp2.639.840.924.682,40**	**Rp2.701.869.689.417,03**	**Rp2.762.964.129.719,76**	**Rp2.803.384.359.733,44**	**Rp2,564,336,769,125.25**	**-0.61%**
1.3.1.	Tanah	Rp1.471.621.020.275,24	Rp1.539.800.988.559,07	Rp1.557.588.312.890,07	Rp1.555.888.954.441,07	Rp1,296,166,382,441.07	-2.75%
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	Rp426.230.645.497,28	Rp483.587.617.010,28	Rp482.016.609.202,09	Rp527.675.930.767,46	Rp576,914,130,635.46	7.98%
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	Rp752.994.587.439,97	Rp768.874.536.726,97	Rp810.514.650.125,97	Rp879.454.341.681,17	Rp909,870,325,324.67	4.87%

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp833.314.701.119,59	Rp857.057.753.213,66	Rp904.204.121.678,51	Rp945.198.471.284,63	Rp986,570,570,426.63	4.32%
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	Rp12.346.631.790,80	Rp12.567.917.790,80	Rp13.022.407.290,80	Rp13.580.646.030,80	Rp13,726,781,880.80	2.69%
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp8.318.109.310,00	Rp8.200.370.822,00	Rp25.600.898.966,00	Rp8.641.552.648,99	Rp11,457,843,779.99	44.28%
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	-Rp864.984.770.750,48	-Rp968.219.494.705,75	-Rp1.029.982.870.433,68	-Rp1.127.055.537.120,68	-Rp1,230,369,265,363.37	9.23%
1.4.	**DANA CADANGAN**	**Rp81.159.235.202,32**	**Rp83.810.331.618,08**	**Rp86.000.133.684,16**	**Rp-**	**Rp. 37.055.609.161.93**	**-23.53%**
1.4.1.	Dana Cadangan	Rp81.159.235.202,32	Rp83.810.331.618,08	Rp86.000.133.684,16	Rp-	Rp. 37.055.609.161.93	-23.53%
1.5.	**ASET LAINNYA**	**Rp 25,007,530,732.25**	**Rp 23,178,695,682.00**	**Rp 34,297,575,133.00**	**Rp 46,802,204,565.33**	**Rp 32,273,082,330.77**	**11.52%**
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0.00%
1.5.2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp18.581.691.000,00	Rp18.581.691.000,00	Rp18.581.691.000,00	Rp20.277.671.836,00	Rp 20,217,633,737.03	0.00%
1.5.3.	Aset Tak Berwujud	Rp10.949.477.031,00	Rp11.345.802.031,00	Rp1.621.049.096,00	Rp1.007.050.016,33	Rp766,064,845.03	-35.97%
1.5.4.	Amortisasi	-Rp6.164.340.597,00	-Rp7.972.277.344,00	Rp-	Rp-	Rp-	7.33%
1.5.5.	Aset Lain-lain	Rp1.640.703.298,25	Rp1.211.894.995,00	Rp14.072.725.037,00	Rp25.478.427.713,00	Rp9,927,554,830.71	263.77%
1.5.6	Kas yang dibatasi penggunaannya	Rp-	Rp11,585,000.00	Rp22.110.000,00	Rp39.055.000,00	Rp42,243,918.00	43.91%
1.5.7	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp 1,319,585,000.00	0.00%
1.6.	**PROPERTI INVESTASI**	**Rp-**	**Rp-**	**Rp-**	**Rp-**	**Rp276,085,831,890.85**	**0.00%**
1.6.1	Properti Investasi tanah	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp275,627,719,000.00	0.00%
1.6.2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp820,500,700.00	0.00%

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.6.3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	-Rp362,387,809.15	0.00%
	JUMLAH ASET	**Rp 3,089,488,205,289.50**	**Rp 3,205,076,129,182.08**	**Rp 3,209,665,663,026.01**	**Rp 3,180,610,704,375.74**	**Rp 3.111.868.183.888,62**	**0.20%**
2	**KEWAJIBAN**						
2.1.	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**Rp8.255.921.279,21**	**Rp17.690.596.572,69**	**Rp9.679.639.008,43**	**Rp12.951.392.734,66**	**Rp16,820,644,937.27**	**33.17%**
2.1.1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp-	Rp-	Rp553.750,00	Rp-	Rp44,400.00	-25.00%
2.1.2.	Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0.00%
2.1.3.	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp637.218.484,61	Rp688.593.952,09	Rp460.151.609,83	Rp710.469.536,66	Rp1,674,142,343.27	41.23%
2.1.4.	Utang Belanja	Rp-	Rp-	Rp9.207.824.863,00	Rp11.860.098.180,00	Rp15,132,208,581.00	14.10%
2.1.5.	Utang Transfer	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0.00%
2.1.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp7.618.702.794,60	Rp17.002.002.620,60	Rp11.108.785,60	Rp380.825.018,00	Rp14,249,613.00	813.78%
2.2.	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**Rp-**	**Rp-**	**Rp-**	**Rp-**	**Rp-**	**0,00%**
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0,00%
2.2.2.	Utang Luar Negeri	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0,00%
	JUMLAH KEWAJIBAN	**Rp8.255.921.279,21**	**Rp17.690.596.572,69**	**Rp9.679.639.008,43**	**Rp12.951.392.734,66**	**Rp16.820.644.937,27**	**33.17%**
3	**EKUITAS**						
3.1.	**EKUITAS**	**Rp 3,081,232,284,010.29**	**Rp 3,187,385,532,609.39**	**Rp 3,199,986,024,017.58**	**Rp 3,167,659,311,641.08**	**Rp 3.095.047.538.951,35**	**0,13%**
3.1.1.	Ekuitas	Rp 3,081,232,284,010.29	Rp 3,187,385,532,609.39	Rp 3,199,986,024,017.58	Rp 3,167,659,311,641.08	Rp 3.095.047.538.951,35	0,13%

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	JUMLAH EKUITAS	Rp 3,081,232,284,010.29	Rp 3,187,385,532,609.39	Rp 3,199,986,024,017.58	Rp 3,167,659,311,641.08	Rp 3.095.047.538.951,35	0,13%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	Rp 3,089,488,205,289.50	Rp 3,205,076,129,182.08	Rp 3,209,665,663,026.01	Rp 3,180,610,704,375.74	Rp 3.111.868.183.888,62	0,20%

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan, 2025

Berdasarkan pada tabel di atas, maka kondisi keuangan Pemerintah Kota Pasuruan yang telah disajikan dalam Neraca Daerah selama tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Aset

Aset dalam neraca daerah adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memiliki nilai ekonomi dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Aset-aset ini dicatat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan mencerminkan kondisi keuangan daerah tersebut. Pengelolaan aset daerah yang baik penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah. Aset harus dicatat dan dilaporkan dengan akurat untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan daerah kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, masyarakat, dan investor.

Berdasarkan tabel di atas, aset yang dimiliki Kota Pasuruan dalam rentang tahun 2020-2024 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0.20% dan mengalami tren yang cukup fluktuatif dengan adanya penurunan peningkatan yang positif terkecuali pada tahun 2023 yang sempat menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2022 serta pada tahun 2024 dimana terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2023. Akan tetapi secara garis besar aset Kota Pasuruan dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, yakni dari jumlah aset di tahun 2020 sebesar Rp. 3,089,488,205,289.50 kemudian tumbuh menjadi Rp. 3,111,686,183,888.62 di tahun 2024. Aset pemerintah Kota Pasuruan dalam neraca keuangan daerah terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya, serta Properti Investasi. Komponen aset yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Aset Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11.52%. Adapun jenis aset lainnya menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang minus yang mengindikasikan adanya penurunan nilai dalam 5 tahun terakhir.

Pertama, pada komponen aset lancar Kota Pasuruan memiliki rata-rata pertumbuhan -12.50% dengan pertumbuhan yang fluktuatif dengan kecendurungan menurun. Nilai aset lancar pada tahun 2020 sebesar Rp269.405.539.189,73 dan mengalami kenaikan sebesar 19,60% di tahun 2021 menjadi Rp322.197.744.393,94. Nilai ini merupakan nominal aset lancar tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Di tahun 2022 terjadi penurunan aset lancar dengan persentase penurunan sebesar -

22,53% menjadi Rp249.617.775.676,37. Sedangkan pada tahun 2023 kembali terjadi peningkatan aset lancar sebesar 2,67% menjadi Rp. 256.271.330.230,75. Pada tahun 2024, Aset Lancar Kota Pasuruan menurun cukup signifikan (-49.72%) menjadi Rp. 128.857.005.362,36. Pada komponen Aset Lancar tidak terdapat realisasi Investasi Jangka Pendek, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, melainkan diperoleh dari 6 komponen lainnya.

Kedua, pada komponen Investasi Jangka Panjang tahun 2020-2024 menunjukkan rata-rata pertumbuhan -0.24%. Terdapat dua komposit Investasi Jangka Panjang yaitu Investasi Jangka Panjang Permanen dan Non Permanen. Tidak terdapat capaian selama tahun 2020-2024 untuk Investasi Jangka Panjang Non Permanen. Sedangkan untuk Investasi Jangka Panjang Permanen pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 74,074,975,482.80 yang kemudian sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi Rp. 74,019,668,071.03. Pada tahun 2022 Investasi Jangka Panjang Permanen Kota Pasuruan mampu meningkat menjadi Rp. 76.786.048.812,72 dan kembali menurun menjadi Rp. 74.152.809.846,22 di tahun 2023 dan terus menurun pada tahun 2024 menjadi Rp. 72.259.886.017,46.

Komponen aset selanjutnya yakni Aset Tetap yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Rata-rata pertumbuhan Aset Tetap Kota Pasuruan sebesar -0.61% dan mengalami tren yang terus meningkat terkecuali pada tahun 2024. Tahun 2020 nilai Aset Tetap Kota Pasuruan sebesar Rp. 2.639.840.924.682,40 dan terus tumbuh hingga angka Rp. 2.803.384.359.733,44 pada tahun 2023. Akan tetapi pada tahun 2024 Aset Tetap Kota Pasuruan sedikit menurun menjadi Rp. 2.564.336.769.124,25. Komposit Aset Tetap yang paling berkontribusi adalah Tanah, sedangkan untuk komposit yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah Konstruksi dalam Pengerjaan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 44.28%.

Selain ketiga jenis aset di atas, komposisi Aset Pemerintah Kota Pasuruan terdiri dari Aset Lainnya. Rata-rata pertumbuhan Aset Lainnya sebesar 11.52% dengan pertumbuhan fluktuatif yang cenderung meningkat. Nilai Aset Lainnya tahun 2020 sebesar Rp. 25.007.530.732,25 dan turun sebesar -7,31% menjadi Rp. 23,178,695,682.00. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 47,97% menjadi Rp. 34,297,575,133.00 dan terus meningkat hingga tahun 2023 sebesar 36,46% menjadi Rp.

46,802,204,565.33. Akan tetapi pada tahun 2024 Aset Lainnya Kota Pasuruan menurun (31.04%) menjadi Rp. 32.273.082.330,77.

Selain itu pada tahun 2024 komponen aset Kota Pasuruan juga terdiri dari Dana Cadangan sebesar Rp. 37.055.609.161,93 serta Properti Investasi sebesar Rp. 276.085.831.890,85. Sehingga secara keseluruhan, tren pertumbuhan aset daerah sebesar 0.20% selama 5 tahun mencerminkan manajemen yang cukup stabil dan efisien, serta kebijakan dan investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal, meskipun tetap ada tantangan yang harus dihadapi dan peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan di masa mendatang.

B. Kewajiban

Berdasarkan tabel neraca daerah juga dapat dilihat adanya Kewajiban. Kewajiban daerah terdiri dari 2 komponen yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Melihat pada tabel di atas terlihat bahwa pada Kota Pasuruan memiliki Kewajiban Jangka Pendek dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 33.17% dengan tren perkembangan yang fluktuatif. Hal ini mengartikan bahwa terdapat kewajiban atau utang yang harus dibayar dalam waktu satu tahun atau kurang, yang nilainya berubah-ubah secara signifikan selama periode 5 tahun. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, suku bunga, nilai tukar, atau kondisi keuangan perusahaan.

Selama kurun waktu 5 tahun 2020-2024 nilai kewajiban Kota Pasuruan menunjukkan tren fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 nilai kewajiban menunjukkan angka Rp. 8.255.921.279,21 dan meningkat 114,28% di tahun 2021 menjadi Rp. 17.690.596.572,69. Capaian ini kemudian mengalami penurunan menjadi 9.679.639.008,43 di tahun 2022 dan kembali meningkat di tahun 2023 sebesar Rp. 12.951.392.734,66 yang didorong adanya peningkatan pada komponen Utang Jangka Pendek Lainnya, Utang Belanja, dan Pendapatan Diterima Dimuka. Adapun pada tahun 2024 nilai kewajiban Kota Pasuruan meningkat 29.88% menjadi Rp. 16.820.644.937,27

yang disebabkan oleh adanya peningkatan pada Pendapatan diterima dimuka serta Utang Belanja.

C. Ekuitas

Selain aset dan kewajiban, salah satu komponen dari neraca selanjutnya adalah ekuitas. Nilai ekuitas Pemerintah Kota Pasuruan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,13% selama kurun waktu 5 tahun 2020-2024 dengan tren pertumbuhan fluktuatif. Adapun nilai ekuitas tertinggi terdapat pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.199.986.024.017,58 sedangkan nilai ekuitas terkecil terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.081.232.284.010,29. Bila dilihat berdasarkan keseimbangan neraca daerah, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas dana tercatat sebesar 0.13%.

Melihat pada data nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan yang tersaji dalam neraca di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan dan analisis mengenai rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas keuangan Pemerintah Kota Pasuruan yang secara keseluruhan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 46 Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas Neraca Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020-2024

No.	Rasio Keuangan	2020	2021	2022	2023	2024
A.	RASIO LIKUIDITAS					
1.	Rasio Lancar	32,6318	18,2129	25,7879	19,7872	7.6606
2.	Rasio Quick	30,1034	16,4149	23,1829	17,7695	5.8310
B.	RASIO SOLVABILITAS					
1.	Rasio Total Hutang thd Total Aset	0,0027	0,0055	0,0030	0,0041	0.0054
2.	Rasio Hutang terhadap Modal	0,0027	0,0056	0,0030	0,0041	0.0054
C.	RASIO AKTIVITAS					
1.	Rata-rata Umur Piutang	23,1884	29,9500	33,5851	20,5960	21,5704
2.	Rata-rata Umur Persediaan	69,250	97,122	-	77,71	83,16

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan, 2025 (diolah)

Secara rinci hasil penghitungan rasio neraca daerah yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan sebagai alat untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam konteks neraca keuangan daerah, terdapat dua jenis rasio likuiditas yang relevan, yaitu rasio lancar dan

rasio *quick*. Rasio lancar menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk melunasi hutang atau kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Di sisi lain, rasio *quick* menunjukkan sejauh mana Pemerintah Daerah mampu membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang lebih likuid, yaitu aset lancar dikurangi nilai persediaan.

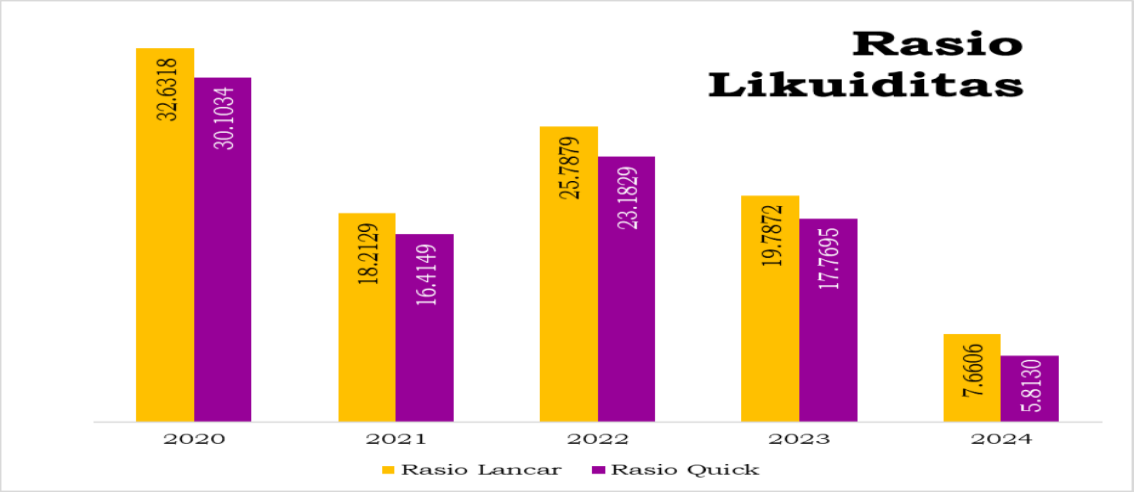

Gambar 2. 73 Rasio Lancar Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

Sebagaimana grafik di atas, Rasio lancar Pemerintah Kota Pasuruan dalam setiap tahunnya mengalami perkembangan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2020 sebesar 32,6318 dan menurun hingga -44,19% menjadi 18,219 di tahun 2021. Rasio Lancar Kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 25,7879 kemudian nilai rasio lancar kembali menurun di tahun 2023 menjadi 19,7872 serta pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga menjadi 7.6606. Penurunan terjadi dikarenakan adanya peningkatan nilai kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh Kota Pasuruan pada tahun tersebut, sedangkan perkembangan aset lancarnya cenderung mengalami penurunan, sehingga kemampuan untuk membayar hutang/ kewajiban jangka pendek juga semakin menurun signifikan. Pada tahun 2020 kemampuan Kota Pasuruan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan mengunakan aset lancar tercatat sebesar 32,6 kali, sedangkan pada tahun 2021 turun menjadi 18,2 kali. Di tahun 2022 kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar meningkat menjadi 25,8 kali dan kembali menurun di tahun 2023 menjadi 19,8 kali. Pada tahun 2024 pembayran kewajipan jangka pendeknya menurun cukup signifikan hingga menjadi 7.6 kali, sehingga semakin kecil nilai rasio lancar menunjukkan bahwa

kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Pasuruan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya mengalami tren fluktuatif yang cenderung menurun.

Seperti halnya dengan rasio lancar, rasio quick Pemerintah Kota Pasuruan dalam setiap tahunnya juga mengalami perkembangan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -9.20%. Nilai rasio quick pada tahun 2020 sebesar 30,1034, kemudian menurun di tahun 2021 hingga -45,47% menjadi 16,4149. Nilai rasio quick kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 23,1829, dan kembali menurun di tahun 2023 menjadi 17,7695. Tahun 2024 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 5.8130 Penurunan di tahun 2021 dan 2024 terjadi dikarenakan adanya peningkatan nilai kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh Kota Pasuruan pada tahun tersebut. Nilai rasio quick pada dasarnya sedikit berada dibawah rasio lancarnya, karena aset lancar yang diperhitungkan sebagai kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya tidak memperhitungkan komponen persediaan. Perbedaan perhitungan rasio lancar dan rasio quick terletak pada adanya persediaan sebagai unsur penghitung besaran nilai rasio. Jika pada rasio lancar melihat pada kemampuan membayar hutang menggunakan aset lancar, maka pada rasio quick melihat kemampuan membayar dengan aset lancar selain persediaan. Sehingga pergerakan besar kecilnya rasio quick selain dipengaruhi oleh perubahan aset lancar dan kewajiban juga dipengarui oleh besarnya persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Pada tahun 2020 kemampuan Pemerintah Kota Pasuruan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan mengunakan aset lancar (setelah dikurangi dengan nilai persediaan) tercatat sebesar 30 kali, kemudian di tahun 2021 menurun sebanyak 16,4 kali dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi sebanyak 23.18 kali. Penurunan kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan asset lancar Kembali terjadi di tahun 2023 tercatat sebesar 17,76 kali dan pada tahun 2024 menurun cukup signifikan menjadi 5.8 kali. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah Kota Pasuruan untuk membayar/ melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang telah dikurangi dengan persediaan belum konsisten setiap tahunnya.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dalam konteks neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas dihitung dengan dua matriks utama. Pertama, Rasio total hutang terhadap total aset menggambarkan sejauh mana hutang berpengaruh terhadap nilai total aset, memberikan gambaran tentang tingkat ketergantungan pada hutang. Kedua, Rasio hutang terhadap modal mengindikasikan sejauh mana penggunaan hutang dibandingkan dengan modal yang dimiliki, memberikan perspektif terhadap tingkat kebutuhan hutang dalam kaitannya dengan modal yang tersedia.

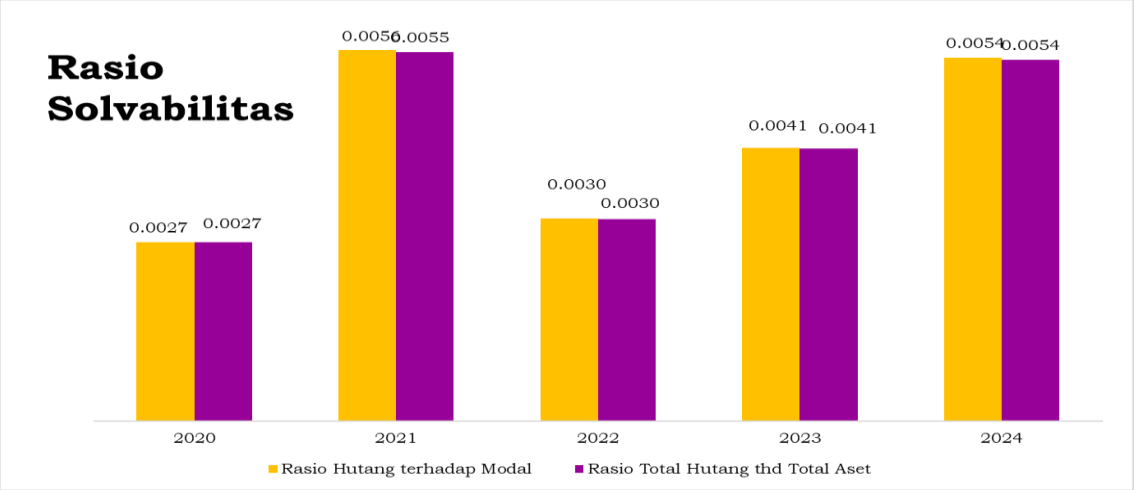

Gambar 2. 74 Rasio Solvabilitas Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: BPKAD Kota Pasuruan, 2025 (Diolah)

Rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Pasuruan dalam rentang tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Nilai di tahun 2020 sebesar 0,0027 kemudian meningkat drastis di tahun 2021 sebesar 0,0055 kemudian menurun menjadi 0,0030 di tahun 2022 dan kembali meningkat sebesar 0,0041 di tahun 2023 serta tahun 2024 menunjukkan peningkatan hingga menjadi sebesar 0.0054. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan nilai kewajiban/ hutang Pemerintah Kota Pasuruan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan total asetnya.

Seiring adanya kenaikan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2021, sedangkan peningkatan nilai total aset yang dimiliki tidak sebanding, maka nilai Rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2021

mengalami kenaikan sebesar 106,36% dan merupakan capaian tertinggi selama rentang 5 tahun terakhir. Adapun pada tahun 2024 kembali pada kondisi pada tahun 2021 tersebut dimana peningkatan nilai hutangnya lebih signifikan sedangkan nilai asetnya menurun. Semakin tinggi angka Rasio Total Hutang terhadap Total Aset maka hal ini dapat diartikan semakin tinggi pula pengaruh hutang terhadap pembiayaanya. Nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat menunjukkan bahwa solvabilitas keuangan Pemerintah Kota Pasuruan dalam keadaan yang Sehat.

Tren serupa juga terjadi pada capaian Rasio Hutang terhadap Modal Pemerintah Kota Pasuruan, yang dalam 5 tahun terakhir juga mengalami tren yang fluktuatif. Nilai di tahun 2020 sebesar 0,0027 dan meningkat signifikan menjadi 0,0056 di tahun 2021 meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 0,0030 dan kembali meningkat sebesar 0,0041 di tahun 2023 serta tahun 2024 menunjukkan peningkatan hingga menjadi sebesar 0.0054. Tren kenaikan yang pesat di tahun 2021 dan tahun 2024 terjadi karena adanya kenaikan nilai total hutang di tahun 2021dan tahun 2024.Meskipun kondisi ini masih berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki (Tidak Bergantung pada Hutang). Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah adanya tren kecenderungan meningkat khususnya pada tahun 2021 dan tahun 2024.

Secara umum, rasio total hutang terhadap modal di Kota Pasuruan masih cukup rendah, yaitu di bawah 5%. Rendahnya rasio ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan tidak bergantung pada hutang dalam pengelolaan keuangannya. Total hutang Pemerintah Kota Pasuruan saat ini berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki, dengan kisaran antara 0,75% hingga 5%. Namun, perlu diperhatikan adanya tren peningkatan rasio hutang terhadap modal dari tahun ke tahun.

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai tingkat aktivitas tertentu dalam kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Dua jenis rasio aktivitas yang sering digunakan adalah Rata-Rata Umur Piutang dan Rata-Rata Umur Persediaan. Rata-rata umur piutang mengindikasikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan piutang, menunjukkan seberapa cepat piutang dapat dikonversi menjadi uang tunai. Sementara itu, rata-rata umur persediaan memberikan informasi tentang

berapa lama dana diinvestasikan dalam bentuk persediaan, menunjukkan seberapa efisien persediaan tersebut digunakan dalam penyediaan pelayanan publik.

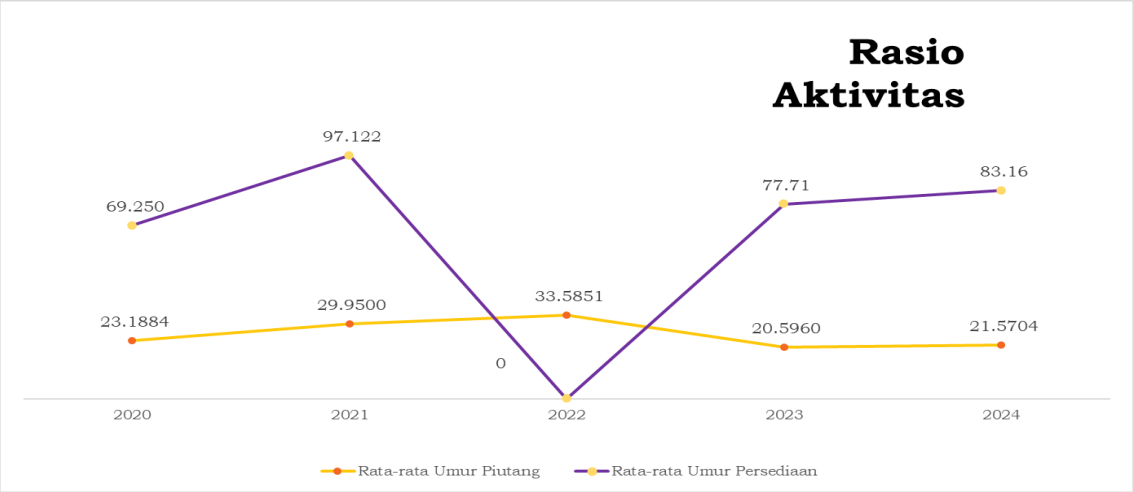

Gambar 2. 75 Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber: BPKAD Kota Pasuruan, 2025 (Diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio aktivitas Kota Pasuruan pada tabel di atas menunjukkan adanya fluktuasi pada nilai Rata-rata Umur Piutang, yakni sebanyak 23,18 hari pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan sebesar 29,16% di tahun 2021 menjadi 29,95 hari. Capaian ini Kembali meningkat ditahun 2022 menjadi 33,58 hari dimana capaian ini merupakan capaian rata-rata umur piutang Kota Pasuruan tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Di tahun 2023 terjadi penurunan rata-rata umur piutang yaitu sebesar 20,59 hari dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 21.57 hari. Nilai Rata-rata Umur Piutang secara keseluruhan menunjukkan angka yang masih baik, dimana umur piutangnya tidak melebihi 2 bulan. Dimana artinya, tertagihnya piutang Kota Pasuruan dapat dilakukan kurang dari waktu 2 bulan, dengan kata lain, dengan semakin pendek jangka waktu pelunasannya, maka semakin kecil pula resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

Adapun jika melihat hasil perhitungan Rata-rata Umur Persediaan Kota Pasuruan pada tahun 2020 hingga 2024 juga menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 Rata-rata Umur Persediaan Kota Pasuruan tercatat selama 69.25 hari atau 2 bulan 9 hari, kemudian meningkat menjadi 97.12 hari atau 3 bulan 7 hari di tahun 2021. Di tahun 2022 tidak ada data terkait nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun sehingga tidak dapat diketahui berapa nilai perputaran persediaan dan

rata-rata umur persediaan di tahun 2022. Rata-rata umur persediaan di tahun 2023 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 namun jika dibandingkan dengan tahun 2020 rata-rata umur persediaan meningkat, dengan nilai sebesar 77,71 hari atau 2 bulan 18 hari. Pada tahun 2024 rata-rata umur persediaan Kota Pasuruan kembali meningkat pada angka 83.16 hari atau hampir menjadi 3 bulan. Peningkatan nilai pada tahun 2024 mencerminkan adanya perlambatan efektivitas dan manajemen pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Kondisi ini hampir seperti tahun 2021 dimana terjadi peningkatan nilai Rata-rata Umur Persediaan, hal ini perlu diwaspadai dikarenakan semakin tinggi rasio ini, semakin tidak efisien pengelolaan persedian, karena dana diinvestasikan dalam persediaan dapat lebih lambat dikembalikan atau diubah menjadi layanan atau produk yang dibutuhkan.

2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

2.2.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

A. Pendapatan Daerah

Penyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Pendapatan Daerah Kota Pasuruan selama kurun waktu 2020-2024 paling banyak disumbang oleh Pendapatan Transfer dengan rata-rata proporsi mencapai 81.02 %. Dengan kata lain bahwa lebih dari tiga seperempat Pendapatan Daerah Kota Pasuruan berasal dari Pendapatan Transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan sisanya sebesar 17.82% berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebesar 1.16% Pendapatan Daerah Kota Pasuruan bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perbandingan rata-rata proporsi dari masing-masing komponen Pendapatan Daerah secara lebih jelas dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

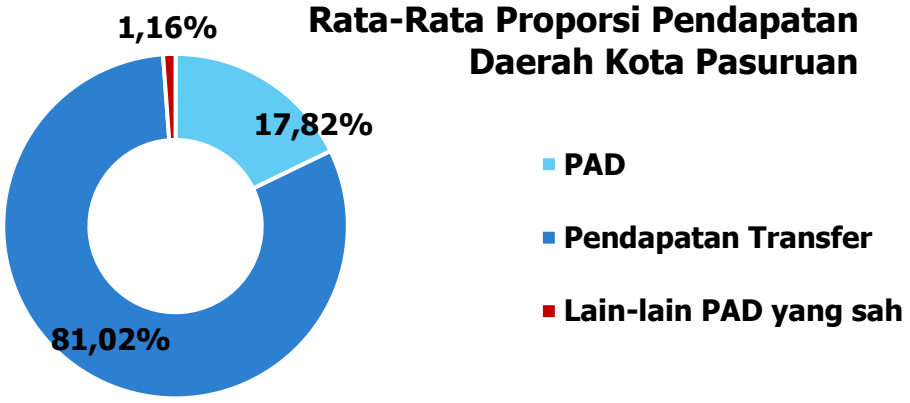

Gambar 2. 76 Perbandingan Rata-Rata Proporsi dari Komponen Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan, 2025 (Diolah)

Secara lebih rinci proporsi masing-masing komponen pembentuk PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2020- 2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 47 Proporsi Komponen Pembentuk PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020- 2024 Kota Pasuruan

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata Proporsi
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100.00%**	**100.00%**
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	17,91%	15,71%	17,96%	19,07%	18.22%	17.82%
1.1.1.	Pajak daerah	4,22%	4,76%	5,12%	5,57%	6.41%	5.08%
1.1.2.	Retribusi daerah	0,89%	0,90%	0,89%	1,22%	10.38%	2.53%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,68%	0,70%	0,67%	0,67%	0.65%	0.65%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	12,13%	9,35%	11,28%	11,61%	0.78%	9.55%
1.2	Pendapatan Transfer	79,37%	83,43%	82,04%	80,90%	80.74%	81.02%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	70,09%	71,81%	70,65%	69,17%	68.04%	69.90%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	69,06%	71,81%	68,68%	67,51%	66.87%	68.65%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	10,52%	13,22%	14,25%	9,58%	9.19%	11.11%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,89%	48,06%	43,95%	45,35%	46.34%	47.13%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	8,66%	10,53%	10,48%	12,58%	11.34%	10.41%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	1,02%	0,00%	1,98%	1,67%	1.17%	1.25%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
1.2.1.5	Dana Desa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	9,28%	11,62%	11,39%	11,73%	12.71%	11.12%

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata Proporsi
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	8,94%	11,31%	10,03%	11,47%	10.92%	10.39%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,34%	0,31%	1,36%	0,26%	1.78%	0.73%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2,72%	0,87%	0,00%	0,02%	1.03%	1.16%
1.3.1	Hibah	2,72%	0,00%	0,00%	0,02%	0.00%	0.85%
1.3.2	Dana Darurat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00%	0,87%	0,00%	0,00%	1.03%	0.32%

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025, diolah

Melihat secara lebih rinci pada proporsi komponen Pendapatan Daerah Kota Pasuruan maka dapat diketahui bahwa Dana Perimbangan merupakan komponen dengan proporsi paling tinggi baik terhadap Pendapatan Transfer maupun terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) Dana Perimbangan memiliki kontribusi terhadap Pendapatan sebesar 68.65%. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa Kota Pasuruan masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat dengan proporsi lebih dari 50% sebagai pendapatan terbesar untuk membiayai pembangunan daerah dan penyediaan fasilitas publik di daerah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer. Namun, jika melihat pada perkembangan nilai proporsinya, dari tahun 2021 hingga tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan proporsi Dana Perimbangan dari yang awalnya mencapai 71.81% di tahun 2021 kemudian perlahan menurun hingga menjadi 66.87% di tahun 2024. Hal ini menjadi indikasi yang baik yang dapat mencerminkan upaya Pemerintah Kota Pasuruan dalam mengurangi ketergantungan pendapatan dari bantuan Pemerintah Pusat.

Selain itu, proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pendapatan yang dihasilkan langsung oleh Pemerintah Kota Pasuruan menunjukkan proporsi yang cenderung meningkat pada tahun 2020 hingga tahun 2023 serta sedikit mengalami penurunan di tahun 2024. Sehingga hal ini juga menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan telah berusaha meningkatkan penghasilan daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah sehingga pada tahun 2023 merupakan capaian tertinggi hingga

pada angka proporsi 19,07%. Tren peningkatan yang terjadi pada proporsi PAD berjalan berbanding terbalik dengan munculnya tren penurunan pada Pendapatan Transfer. Sehingga diasumsikan perolehan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan perlahan mengalami pergeseran dari Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara lebih jelas perkembangan proporsi masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2020 – 2024 tersaji dalam grafik berikut:

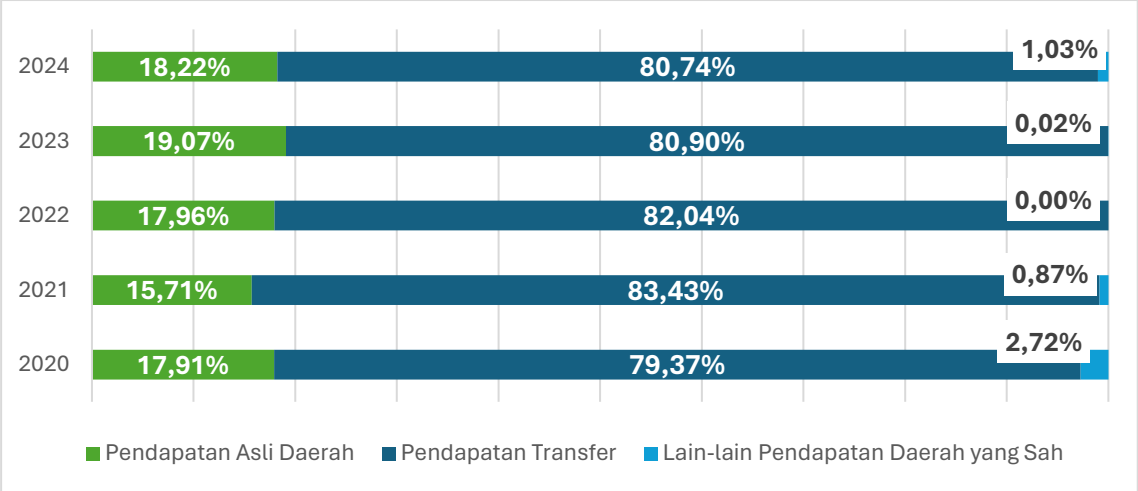

Gambar 2. 77 Perkembangan Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Pada Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025, diolah

Pada sisi pendapatan daerah, analisis kemandirian keuangan Pemerintah Kota Pasuruan dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Adapun Analisis Pendapatan Daerah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian

Seperti yang diketahui bahwa Otonomi daerah dilaksanakan untuk menjalankan pemerintahan di daerah dan pada hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah otonom tersebut. Maka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan salah satu aspek yang penting dalam menggambarkan kemandirian keuangan pada suatu daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan derajat mampu tidaknya suatu daerah melakukan

pembiayaan kegiatan yang berhubungan dengan daerah tersebut, seperti pembangunan, pelayanan, hingga pembayaran pajak dan bea, sehingga kegiatan tersebut dapat dibiayai dari sumber pendapataan daerah tersebut. Rasio ini dapat dihitung dari jumlah Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain, yaitu transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi, dan pinjaman. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sehingga kondisi tersebut juga menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Untuk dapat mengetahui perkembangan nilai rasio kemandirian keuangan daerah Kota Pasuruan tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut :

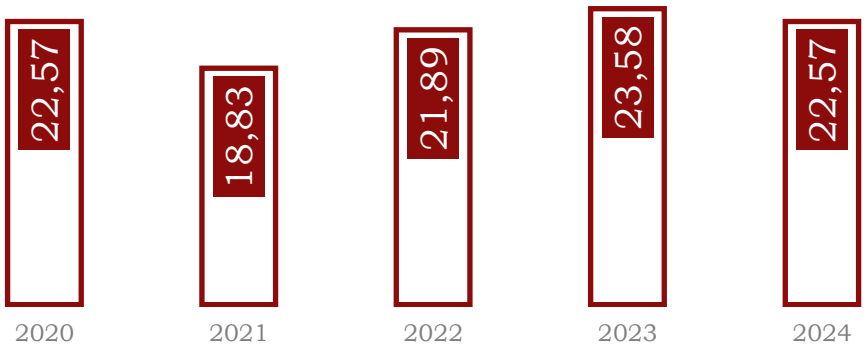

Gambar 2. 78 Perkembangan Nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah tersebut perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Dari data diatas dapat diketahui bahwa , secara umum Kota Pasuruan masih memiliki rasio PAD terhadap total pendapatan di bawah 50% yang artinya masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap Pusat atau memiliki rasio kemandirian daerah yang rendah.

Tabel 2. 48 Rasio Kemandirian Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

2020	2021	2022	2023	2024
22,57	18,83	21,89	23,58	22,57
INSTRUKTIF	INSTRUKTIF	INSTRUKTIF	INSTRUKTIF	INSTRUKTIF

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025, diolah

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 berada pada range angka 18.83% - 23,58%. Jika angka tersebut disandingkan dengan tabel pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah maka menunjukkan kemampuan keuangan Kota Pasuruan dalam membiayai rumah tangganya selama 5 tahun (2020 - 2024) masih rendah serta memiliki pola hubungan yang Instruktif pada setiap tahunnya karena berada pada range persentase kemandirian 0%- 25%, dimana campur tangan pemerintah pusat masih terbilang besar. Meski masih tergolong dalam kemampuan keuangan yang rendah, akan tetapi nilai yang muncul telah menunjukkan dalam perkembangannya yang progresif dan hampir mendekati kategori kemampuan sedang dengan hubungan Konsultatif.

Melihat tren nilai Kemandirian Daerah Kota Pasuruan yang menunjukkan adanya peningkatan pada setiap tahunnya, khususnya pada tahun 2023 memiliki rasio kemandirian yang paling tinggi yakni 23,58%. Maka dari itu, hal ini mengindikasikan terus berkurangnya ketergantungan Pemerintah Kota Pasuruan pada Pendapatan Transfer terutama Pendapatan Transfer pemerintah Pusat dalam hal pengelolaan keuangan daerah, serta mengindikasikan adanya upaya peningkatan PAD di daerah. Namun pada tahun 2024, Rasio Kemandirian Kota Pasurun sedikit mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh berkurangnya proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah dimana pada tahun 2023 sebesar 19.07% kemudian di tahun 2024 menurun menjadi 18.22%. Lebih lanjut, penurunan proporsi PAD tersebut disebabkan oleh adanya penurunan proporsi Lain-lain PAD yang sah serta adanya peningkatan proporsi Dana Alokasi Umum (DAU).

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah dengan tujuan untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan tujuan untuk membiayai pembangunan daerah. Derajat Desentralisasi Fiskal ini dapat diukur menggunakan skala interval. Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

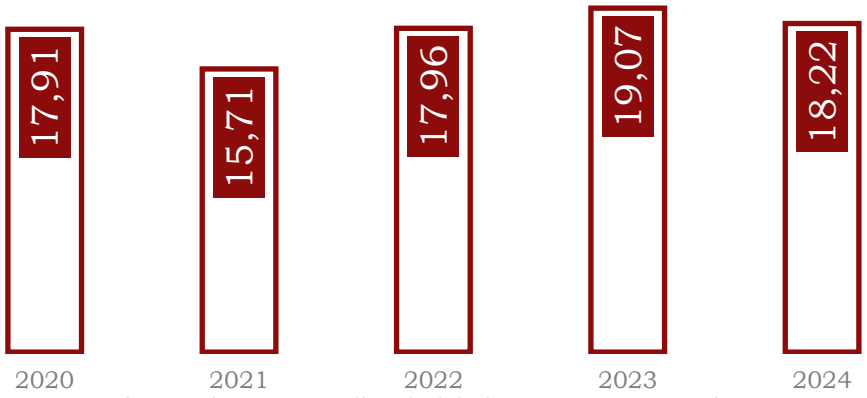

Gambar 2. 79 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Pasuruan Tahun 2020 – 2024
Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

Berdasarkan perbandingan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Derah diperoleh nilai desentralisasi fiskal yang nilainya mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya, dimana nilai terendah dalam 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2021 sedangkan nilai tertinggi terjadi pada tahun periode terakhir yaitu 2023. Pada tahun 2020 nilai rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Pasruruan adalah sebesar 17,91% dengan kriteria derajat desentralisasi fiskal “Kurang”. Pada tahun 2021 nilai rasio tersebut mengalami penurunan sehingga merupakan capaian terendah selama kurun waktu satu periode terakhir yaitu 15,71% dengan masih termasuk pada kriteria “Kurang”.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat terhadap Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkatkan desentralisasi fiskal pada Kota Pasuruan pada tahun-tahun mendatang. Seperti yang diketahui bahwa peran PAD dalam keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Oleh karenanya, dengan meningkatnya PAD di tahun

2022 maka hal ini juga berdampak pada meningkatnya capaian rasio derajat desentralisasi fiskal hingga berada pada angka 17,96%. Begitu pula di tahun 2023 dan 2024 dimana rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga sampai pada angka 19,07% di tahun 2023 dan 18.22% di tahun 2024. Namun peningkatan rasio derajat desentralisasi fiskal tersebut belum sampai pada peningkatan kriteria derajat desentralisasi fiskal "Cukup", melainkan selama kurun waktu 2020 hingga 2024 keseluruhan nilai termasuk dalam kriteria yang sama yaitu derajat desentralisasi fiskal yang "Kurang". Kedepannya diperlukan konsistensi usaha peningkatan PAD secara lebih optimal sehingga dapat meningkatkan kontribusinya dalam menjalankan fungsi desentralisasi yang lebih baik dalam sisi keuangan daerah.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Semakin tinggi keberasilan otonomi daerah menandakan bahwa tingkat ketergantungan yang rendah, jadi bisa dikatakan terbalik. Tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio Ketergantungan Keuangan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio dana transfer terhadap total pendapatan. Untuk dapat mengetahui lebih detail mengenai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Pasuruan yakni sebagai berikut:

Tabel 2. 49 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

2020	2021	2022	2023	2024
17,91	15,71	17,96	19,07	18,22
KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

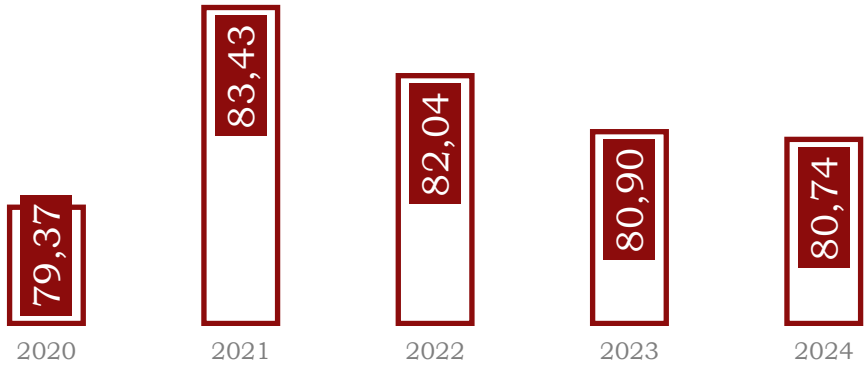

Gambar 2. 80 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 – 2024
Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

Berdasarkan pada gambar diatas maka dapat diketahui bawha Rasio Ketergantuan Keuangan Daerah Kota Pasuruan terendah berada pada tahun 2020 yakni dengan nilai 79,37% dengan keterangan "Sangat Tinggi". Dengan asumsi bahwa semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi. Seperti yang diketahui bahwa tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan). Seperti pada tabel capaian dibawah ini yang berisikan nilai rasio beserta dengan kriterianya:

Tabel 2. 50 Rasio Antara Pad Dengan Total Penerimaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tanpa Subsidi (Dana Perimbangan). Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

2020	2021	2022	2023	2024
79,37	83,43	82,04	80,90	80,74
SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

Secara garis besar nilai Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Pasuruan menunjukkan tren yang fluktuatif pada setiap tahunnya dengan adanya peningkatan dan penurunan yang terjadi. Kondisi tersebut terlihat pada tahun pertama sebesar 79,37% di tahun 2020 dan merupakan capaian dengan tren posistif karena mencapai rasio ketergantungan paling rendah. Namun pada tahun 2021 nilai rasio ketergantungan terlihat mengalami peningkatan hingga mencapai rasio ketergantungan tertinggi mecapai 83,43%. Hal ini disebabkan adanya pertumbuhan pendapatan transfer yang

meningkat lebih tinggi (8.96%) dibanding sumber pendapatan lainnya termasuk PAD (3.66%), sehingga berdampak pada meningkatnya kontribusi pendapatan transfer pada Pendapatan Daerah serta mencerminkan peningkatan ketergantungan keuangan.

Dengan meningkatnya nilai pertumbuhan PAD dan melemahnya pertumbuhan Pendapatan Transfer Kota Pasuruan dalam tahun-tahun berikutnya maka hal ini menghasilkan nilai ketergantungan daerah yang menurun pada tahun 2022 menjadi 82,04% dan terus menurun hingga menjadi 80.90% di tahun 2023 serta 80.74% di tahun 2024. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan telah berusaha mengurangi ketergantungannya pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi dibuktikan dengan capaian rasio ketergantungan keuangan daerah yang perlahan menurun.

Namun hal yang perlu menjadi perhatian adalah nilai Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Pasuruan tahun 2020-2024 masih berada pada range nilai antara 79,37% - 83,43% sehingga masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang "Sangat Tinggi" karena berada pada persentase lebih dari 50% (> 50%). Sehingga diperlukan konsistensi optimalisasi PAD serta usaha untuk mengurangi ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun provinsi agar kedepannya rasio ketergantungan Pemerintah Kota Pasuruan dapat perlahan berubah menjadi "Tinggi" ataupun "Cukup" sehingga bisa dikatakan daerah Otonom yang mandiri.

4. Rasio Efektivitas

Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitasnya tinggi dan menerapkan value for money yang benar. *Value for money* merupakan diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan evektivitas. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Berikut tersaji data Rasio Efektivitas Kota Pasuruan dalam kurun waktu 5 tahun beserta kriterianya:

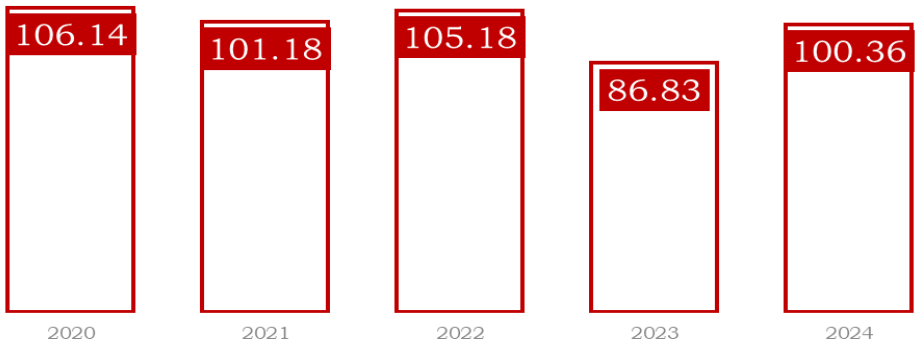

Gambar 2. 81 Rasio Efektivitas Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

Berdasarkan pada grafik diatas, rata- rata capaian rasio efektivitas sudah berpredikat “Sangat Efektif” dari kurun waktu 2020- 2024. Namun yang perlu menjadi perhatian yakni pada tahun 2024 rasio efektivitas menurun dan berada pada capaian terendah selama dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan kriteria “Kurang efektif”. Rasio efektivitas menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Tabel 2. 51 Rasio Efektivitas Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

2020	2021	2022	2023	2024
106,14	101,18	105,18	86,83	100.36
SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	KURANG EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

Rasio efektivitas PAD Kota Pasuruan dalam 3 tahun pertama (2020 hingga 2022) memiliki nilai yang cenderung menurun namun masih termasuk dalam kategori “Sangat Efektif”, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah terakomodir ke dalam target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2022 Kota Pasuruan dalam hal Rasio Efektivitas termasuk menurun cukup siginifikan sehingga masuk dalam kategori “Kurang Efektif”. Pengelolaan PAD Kota Pasuruan pada tahun 2023 perlu menjadi catatan dikarenakan merupakan capaian terendah dengan kategori “Kurang Efektif” sehingga kedepannya akan meningkatkan rasio efektivitasnya. Sehingga pada kedua tahun tersebut rasio efektivitas Kota Pasuruan termasuk dalam kriteria “Sangat Efektif” karena telah menunjukkan nilai yang memiliki

kinerja berada pada range >100%. Penurunan yang cukup signifikan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan PAD pada Pemerintah Kota Pasuruan untuk kedepannya harus lebih ditingkatkan. Akan tetapi pada tahun 2024, PAD Kota Pasuruan dapat melampaui target yang ditetapkan sehingga nilai rasio efektivitasnya dapat kembali meningkat menjadi 100.36% dengan kriteria “Sangat Efektif”.

5. Indeks Kapasitas Fiskal

Pembagian wilayah dan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tersebut kemudian menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Pola hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat saat memasuki orde reformasi mengalami perubahan. Penghitungan kapasitas fiskal merupakan salah satu faktor dalam reformulasi pengalokasian DAU. Kapasitas fiskal dihitung sesuai dengan potensi pendapatan Daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Sehingga Indeks Kapasitas fiskal daerah yaitu kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116 Tahun 2021. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan/atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut tersaji data Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kota Pasuruan dan daerah sekitarnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

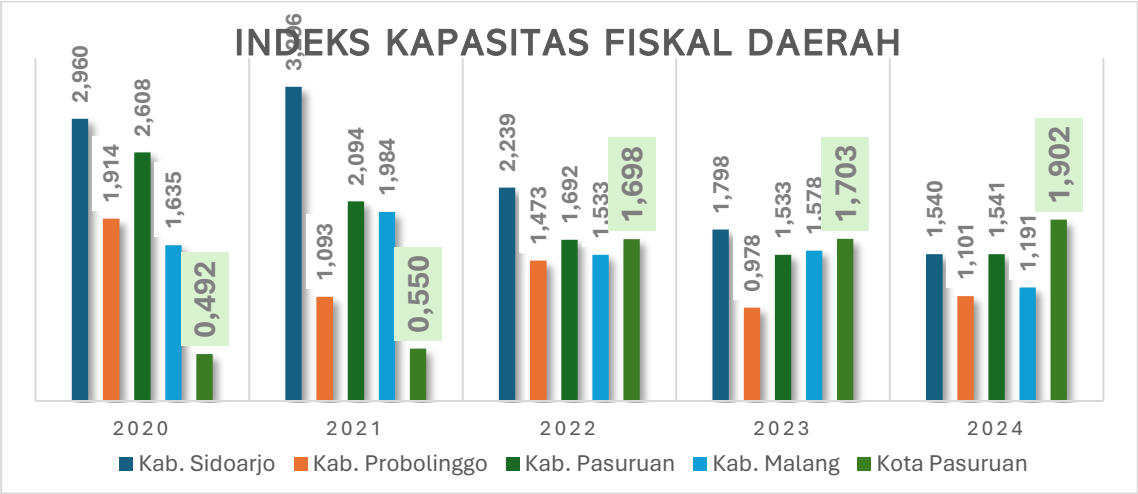

Gambar 2. 82 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

Berdasarkan data Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kota Pasuruan serta 5 daerah sekitarnya yang tertera dalam grafik di atas yakni Kab. Sidoarjo, Kab. Probolinggo, Kab. Pasuruan, serta Kab. Malang menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2024 Kota Pasuruan memiliki nilai IKFD yang cenderung meningkat serta dapat mencapai nilai IKFD yang lebih tinggi dari daerah sekitar dalam dua tahun terakhir (2023-2024).

Hal ini merupakan progres yang sangat positif karena ketika melihat kondisi awal yang menunjukkan bahwa IKFD Kota Pasuruan tahun 2020-2021 yang menempati nilai paling rendah dari daerah sekitar, yakni pada nilai 0.492 dengan kategori "Sangat Rendah" serta 0.550 dengan kategori "Rendah". Akan tetapi kemudian dapat meningkat progresif setiap tahunnya hingga pada tahun 2024 memiliki nilai IKFD paling tinggi dari keempat daerah sekitar lainnya, yakni sebesar 1.902 dengan kategori "Sangat Tinggi".

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan pemerintahan wajib maupun pilihan. Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintahan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah, di samping pos pendapatan pemerintahan daerah. Semakin besar belanja daerah maka akan berpotensi meningkatkan kegiatan perekonomian daerah.

Belanja Daerah terdiri atas beberapa komponen yakni Belanja operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kemudian belanja modal yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau

dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Analisis proporsi Belanja Daerah dalam pembahasan ini ditinjau berdasarkan besaran proporsi realisasi masing-masing jenis/ komponen belanja daerah terhadap total belanja daerah Kota Pasuruan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 52 Analisis Proporsi Komponen Belanja Daerah Kota Pasuruan terhadap Belanja Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata Proporsi
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	BELANJA						
2.1	Belanja Operasi	88,24 %	84,77 %	85,66 %	85,34 %	87.72 %	86.99%
2.1.1	Belanja Pegawai	49,94 %	39,93 %	40,33 %	36,56 %	40.09 %	41.37%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27,99	40,09 %	38,70 %	41,94 %	39.11 %	37.56%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
2.1.5	Belanja Hibah	7,37%	5,09%	3,78%	5,28%	7.47%	5.80%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2,95%	2,85%	2,85%	1,57%	1.06%	2.25%
2.2	Belanja Modal	9,23%	10,83 %	13,81 %	14,49 %	12.13 %	12.10%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,23%	4,49%	3,88%	5,41%	4.50%	4.50%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,46%	3,60%	5,81%	5,79%	3.38%	4.21%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2,23%	2,63%	4,05%	3,26%	4.20%	3.27%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,30%	0,12%	0,07%	0,04%	0.02%	0.11%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0.03%	0.01%
2.3	Belanja Tidak Terduga	2,53%	1,21%	0,53%	0,17%	0.15%	0.92%
2.4	Belanja Transfer	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	0,00%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	0,00%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	0,00%

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan proporsi dari realisasi masig-masing komponen belanja Kota Pasuruan tahun 2020 hingga 2024 cenderung fluktuatif. Hal ini dikarenakan Belanja Daerah dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan dan prioritas daerah pada setiap tahunya, sehingga besaran masing-masing jenis belanja mengalami peningkatan dan penurunan sesuai dengan

kebutuhan belanja pada tahun berkenaan. Akan tetapi yang perlu di potret adalah perbandingan dari masing-masing proporsi pada jenis belanja daerah, dominasi peruntukan belanja daerah pada tahun berkenaan apakah pada belanja infrastruktur (belanja modal), belanja trasfer, belanja tak terduga atau belanja lainya.

Adapun proporsi realisasi Belanja Operasi Kota Pasuruan tahun 2020 hingga 2024 tercatat memiliki rata-rata 86.99%. Sehingga sebagian besar belanja Kota Pasuruan dalam lima tahun terakhir didominasi oleh Belanja Operasi. Jika dilihat lebih rinci, komponen realisasi belanja dengan rata-rata proporsi terbesar berada pada Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa (Belanja Operasi) yaitu sebesar 41,37% dan 37,56% dari total belanja daerah, artinya realisasi belanja pegawai yang notabene bersifat rutin dan kurang berkaitan langsung dengan pembangunan masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal (secara umum) yang memiliki keterkaitan lebih dekat dengan Pembangunan daerah. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa pada tahun 2027 proporsi Belanja Pegawai tidak boleh melebihi angka 30% dari total Belanja Daerah.

Sedangkan pada proporsi realisasi Belanja Modal memiliki nilai rata-rata proporsi sebesar 12,10%. Nilai proporsinya cenderung mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, meskipun dalam perkembangannya masih menunjukkan fluktuasi. Lebih lanjut pada komponen belanja daerah berupa belanja tak terduga dan belanja transfer memiliki rata-rata proporsi paling kecil dikarenakan belanja tak terduga merupakan komponen belanja yang mendesak serta bersifat tidak terencana serta dikarenakan tidak terdapat realisasi belanja transfer pada Belanja Daerah Kota Pasuruan 5 tahun terakhir. Secara spesifik, pengelolaan belanja daerah Kota Pasuruan masa lalu dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio dan ukuran sebagai berikut:

1. Tingkat Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Tingkat realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah merupakan gambaran secara rill mengenai ketercapaian realisasi belanja daerah berdasarkan/ terhadap anggaran yang telah ditetapkan dalam setiap tahunnya. Semakin besar nilai tingkat realisasi menunjukkan bahwa besar realisasi belanja dibandingkan dengan jumlah belanja yang dianggarkan semakin tinggi, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah

daerah telah berjalan dengan baik. Untuk mengetahui hasil perhitungan tingkat realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah Kota Pasuruan dalam waktu 5 tahun terakhir yakni di tahun 2020 - 2024 secara lebih jelas adalah sebagai berikut:

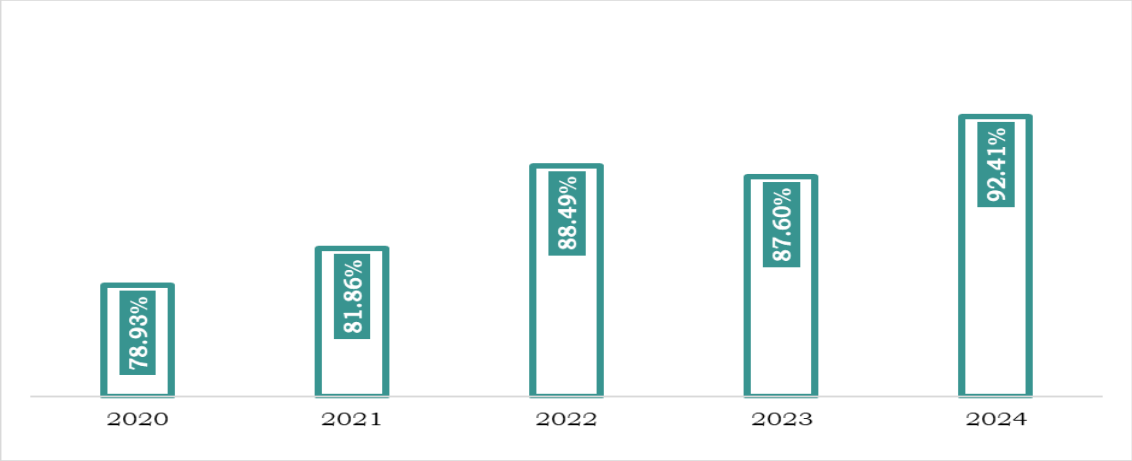

Gambar 2. 83 Tingkat Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 hingga 2024 tingkat realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah di Kota Pasuruan rata-rata berada dibawah 100%. Dengan nilai capaian tertinggi yaitu sebesar 88,49% yang terjadi pada tahun 2022. Pada tahun 2020 tingkat realisasi belanja daerah terhadap anggaran memiliki capaian 78,93% yang merupakan nilai terendah selama kurun waktu satu periode. Selaras dengan keadaan sebelumnya yakni pada tahun 2021 mengalami meningkat realisasi belanjanya hingga mencapai 81,86%. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali walaupun tidak terlalu signifikan yaitu menjadi 88,49% hal tersebut seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi maka tingkat realisasi belanja daerah kembali mengalami peningkatan. Namun yang terjadi pada tahun 2023 penurunan hingga menunjukkan angka 87,60%. Pada tahun 2024, realisasi belanja Kota Pasuruan dapat meningkat progresif menjadi 92.14% terhadap anggaran belanja. Angka tersebut membuktikan gambaran realisasi belanja daerah yang telah dilaksanakan di Kota Pasuruan selama kurun waktu 5 tahun tearkhir (2020 – 2024) terutama dalam 3 tahun terakhir, semakin baik dalam pemenuhan target/ anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat realisasi anggaran perlu ditingkatkan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Pasuruan.

2. Proporsi Belanja Terhadap Dana Transfer Umum

Proporsi Belanja Modal merupakan gambaran seberapa besar anggaran suatu daerah digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan seperti percepatan pembangunan infrastruktur. Pengeluaran belanja modal akan memberikan manfaat yang besar dalam jangka menengah dan panjang, mengingat belanja modal yang secara mum diperuntukkan bagi pembangunan fisik terutama infrastruktur akan menjadi pengungkit (leverage) di berbagai sektor pembangunan lain. Infrastruktur memegang peranan penting dalam percepatan pembangunan daerah termasuk di Kota Pasuruan.

Adapun Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) digunakan untuk melihat kesesuaian belanja modal terhadap aturan yang berlaku. Dalam UU APBN Tahun Anggaran 2017, Dana Transfer Umum diarahkan ≥ 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, hal tersebut lebih jelas diatur dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023. Adapun proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum Kota Pasuruan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

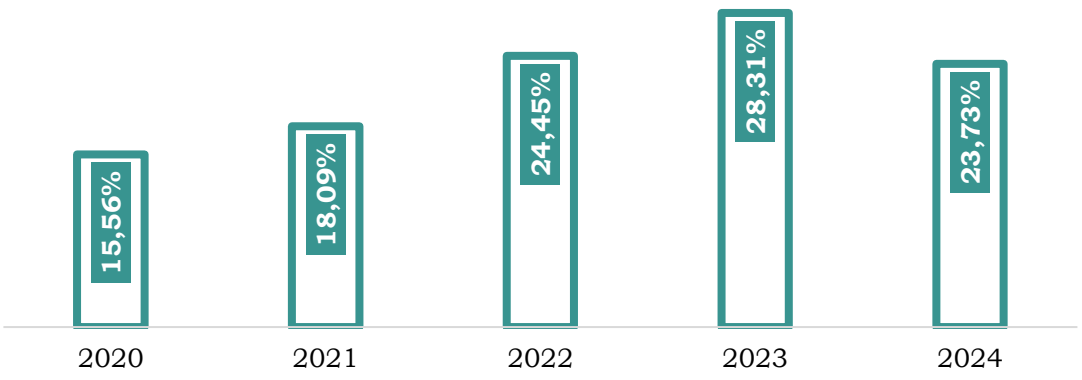

Gambar 2. 84 Proporsi Belanja Modal Terhadap Dana Transfer Umum Kota Pasuruan Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

Proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kota Pasuruan pada tahun 2020 hingga 2024 secara umum memiliki tren capaian yang cenderung meningkat. Pada tahun 2020, proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kota Pasuruan berada pada angka 15,56%. Sedangkan pada tahun 2021 selaras

dengan membaiknya keadaan ekonomi pasca Pendemi Covid- 19 sehingga capaian belanja modal membaik dan berangsur meningkat hingga pada angka 18,09% yang menandakan peningkatan secara signifikan dan nilai tersebut sudah berada di atas ambang batas rasio Belanja Modal terhadap DTU dalam aturan UU APBN yaitu sebesar ≥ 25%.

Sedangkan pada tahun 2022 proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kota Pasuruan mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai angka 24,45% dan pada tahun 2023 proporsi belanja modal terhadap DTU dapat mencapai >25% serta merupakan capain tertinggi selama satu periode yaitu dengan capaian 28,31%. Hal tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara bertahap, sehingga pembangunan infrastruktur di Kota Pasuruan akan semakin berkembang dalam menunjang pembangunan dan perekonomian daerah. Namun pada tahun 2024, proporsi belanja modal terhadap DTU kembali mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya penurunan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

3. Proporsi SiLPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan nomor 77 tahun 2020, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.SiLPA pada dasarnya merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya. Proporsi SiLPA terhadap belanja menunjukkan penggunaan dana yang tertunda atau tidak terserap. Artinya, semakin kecil angka proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah, maka semakin efektif penyerapan anggarannya. Proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kota Pasuruan pada tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

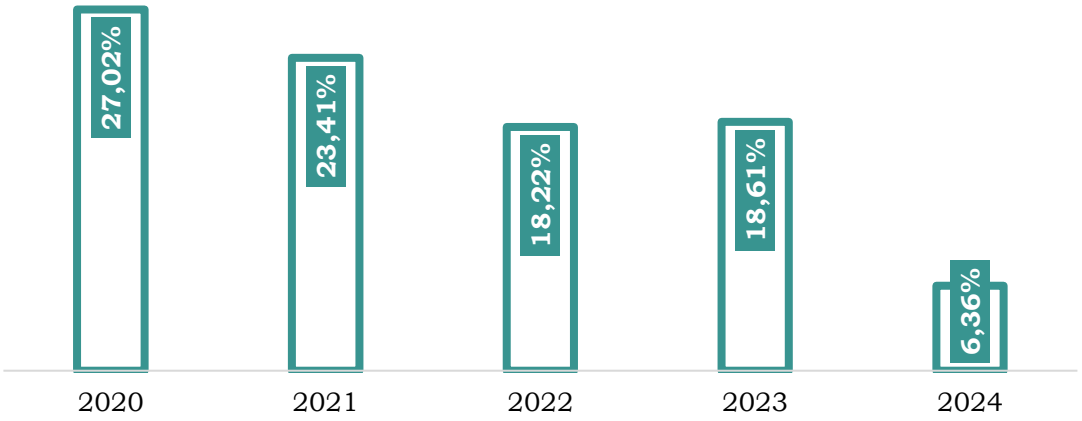

Gambar 2. 85 Proporsi SILPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

Berdasarkan pada grafik di atas, tren proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kota Pasuruan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan tren capaian yang menurun. Pada tahun 2020 proporsinya berada pada angka 27,02% yang kemudian mengalami penurunan pada tahun setelahnya yakni di tahun 2021 hingga berada pada angka 23,41% serta kembali menurun menjadi 18.22% di tahun 2022.

Pada tahun selanjutnya yakni di tahun 2023 proporsi SiLPA menunjukkan adanya peningkatan pada angka 18,61% dan dapat menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2024 hingga mencapai nilai proporsi sebesar 6.36%. Penurunan tren proporsi SILPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tersebut menggambarkan kemampuan Kota Pasuruan dalam penyerapan SILPA tahun sebelumnya. Meskipun capaian rasio masih terbilang sedang, namun pada tahun- tahun selama satu periode telah menunjukkan upaya penyerapan SILPA yang lebih baik terbukti dari capaian yang menurun setiap tahunnya. Diketahui bahwa semakin besar SILPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana idle begitu pula sebaliknya jika nilai proporsi SILPA rendah maka menunjukkan bahwa Kota Pasuruan sudah menyerap dana publik untuk digunakan dalam pembangunan dan pelayanan. Pada tahun-tahun mendatang diperlukan kosistensi manajemen belanja, sehingga capaian belanja yang telah direncakan dapat terlaksana secara efektif di Kota Pasuruan.

4. Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja

Proporsi ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Sebaliknya, semakin kecil angka proporsi belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kota Pasuruan pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada grafik di bawah ini:

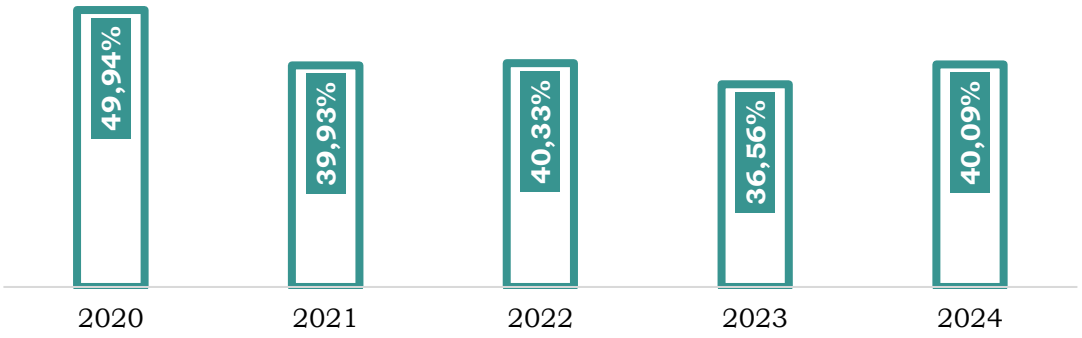

Gambar 2. 86 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, proporsi belanja pegawai terhadap total realisasi belanja Kota Pasuruan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung fluktuatif dengan trend menurun. Proporsi belanja pegawai Kota Pasuruan pada tahun 2020 mencapai 49,94%. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan hingga mencapai 39,93%. Sedangkan pada tahun 2022 sedikit kembali mengalami peningkatan hingga pada angka 40,33%. Pada tahun setelahnya yakni tahun 2023 proporsi belanja pegawai dalam ruang lingkup Pemerintah Kota Pasuruan telah berada pada capaian positif yakni nilai terendah 36,56%. Namun pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan pada angka 40.09%.

Rata-rata proporsi belanja pegawai terhadap total belanja tahun 2020 hingga 2024 telah berada dibawah 50% dan namun masih diatas 30%, artinya kondisi tersebut berada pada nilai ambang batas di mana porsi anggaran tidak didominasi oleh belanja pegawai atau belanja yang bersifat pengeluaran rutin dan tidak berpengaruh terhadap kinerja program pembangunan secara langsung. Namun berdasarkan peraturan yang

terbaru, Pada Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal sebesar 30% dari total belanja.

5. Proporsi Pemenuhan Belanja Aparatur

Analisis ini memberikan gambaran mengenai rasio belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan belanja kebutuhan aparatur. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio belanja tersebut, maka semakin kecil pula proporsi anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan aparatur.

Berdasarkan data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kota Pasuruan pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana telah disampaikan pada sub-bab kinerja keuangan masa lalu, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2020 hingga 2024 dapat disajikan pada tabel seperti dibawah ini:

Tabel 2. 53 Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Tahun 2024

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) (a)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) (b)	Persentase (a)/ (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2020	411,897,154,369.00	829,882,330,540.90	49.63%
2	Tahun Anggaran 2021	342,856,599,418.00	861,235,113,575.28	39.81%
3	Tahun Anggaran 2022	378,770,674,303.00	941,464,348,170.58	40.23%
4	Tahun Anggaran 2023	369,520,132,167.00	1,010,778,967,728.92	36.56%
5	Tahun Anggaran 2024	422,602,151,750.00	1,091,227,072,541.20	38.73%

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

Melihat data yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pasuruan pada periode tahun 2020 hingga 2024 memiliki persentase menurun dengan berasumsikan bahwa memiliki tren capaian positif. Seperti yang bisa dilihat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung mengalami penurunan persentase pada setiap tahunnya meskipun masih sedikit terjadi fluktuasi. Pada tahun 2020 capaian persentase berada pada angka 49.63% kemudian pada tahun berikutnya yakni di tahun 2021 menurun hingga di angka 39.81%. Pada tahun 2022 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pasuruan sedikit meningkat

pada angka 40.23% yang kemudian dapat kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 36.56%. Proporsi pada tahun 2023 tersebut merupakan capaian paling baik dalam lima tahun terakhir. Sedangkan pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan menjadi 38.73%.

Akan tetapi jika dilihat secara keseluruhan maka Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pasuruan terhadap total pengeluarannya selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) dapat mengalami penurunan dari 49.63% menjadi 38.73%. Dengan adanya capaian yang cenderung penurunan tersebut membuktikan bahwa secara umum membuktikan bahwa Kota Pasuruan telah berkomitmen dengan baik dalam pemenuhan kebutuhan aparatur. Hal tersebut dikarenakan untuk menekan angka proporsi belanja pemenuhan aparatur dan lebih memfokuskan pada belanja barang dan jasa dan belanja modal untuk mendukung kegiatan pembangunan di Kota Pasuruan.

Diperlukan konsistensi Pemerintah Kota Pasuruan dalam menyusun penganggaran belanja pegawai ke depan. Sebab, dalam lima tahun ke depan, hal ini dikarenakan alokasi belanja pegawai maksimal yang diperkenankan hanya 30 persen dari APBD. Hal tersebut sesuai dengan amanat UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Proporsi tertinggi di tahun 2020 yakni di angka 61.89% dan berangsur mengalami penurunan yang menandakan bahwa proporsi belanja pegawai semakin kecil dan mendekati target dari pemerintah pusat.

a. Alokasi Anggaran Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Dari penjelasan tersebut maka yang termasuk di dalam Mandatory Spending diantaranya adalah :

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, meski Undang-undang tersebut dan pengaturan *mandatory spending*nya telah dihapus dengan UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).

1) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Belanja Infrastruktur yang dimaksud merupakan belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Yang kemudian dimaksud infrastruktur ialah fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Untuk dapat mengetahui perbandingan atau proporsi anggaran belanja insfrastruktur pelayanan publik terhadap total anggaran belanja:

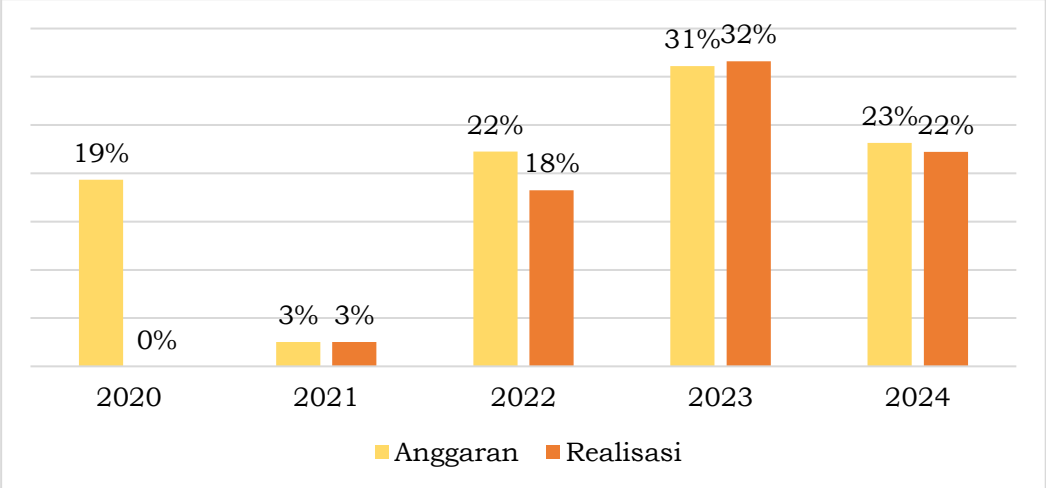

Gambar 2. 87 Proporsi Anggaran Belanja Insfrastruktur Pelayanan Publik Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2020 - 2024

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

Berdasarkan pada grafik diatas maka dapat diketahui bahwa proporsi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik terhadap total anggaran mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 & 2024 dengan proporsi mencapai 32% dan 23%. Untuk dapat melihat besaran anggaran dan realisasi Belanja Infrastruktur Kota Pasuruan pada tahun 2020-2024 angkanya tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 54 Besaran Nilai Anggaran Belanja Insfrastruktur Tahun 2020 - 2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Anggaran	201.901.366.150,00	26.561.483.700,00	236.098.731.200,00	359.056.418.335,00	264.108.849.576,00
Realisasi	0,00	21.551.810.137,38	171.350.557.338,19	319.539.345.563,00	234.271.772.401,00

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

2) Belanja Pendidikan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyatakan bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bicara mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Pemerintah Daerah menganut dan mengharuskan untuk melaksanakan pemenuhan mandatory anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan dalam sektor pendidikan akan terselesaikan. Pemenuhan akses dan layanan pendidikan diharapkan semakin meningkat pada masa mendatang. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan Mandatory Spending dalam bidang pendidikan di Kota Pasuruan selama tahun 2020- 2024 adalah sebagai berikut:

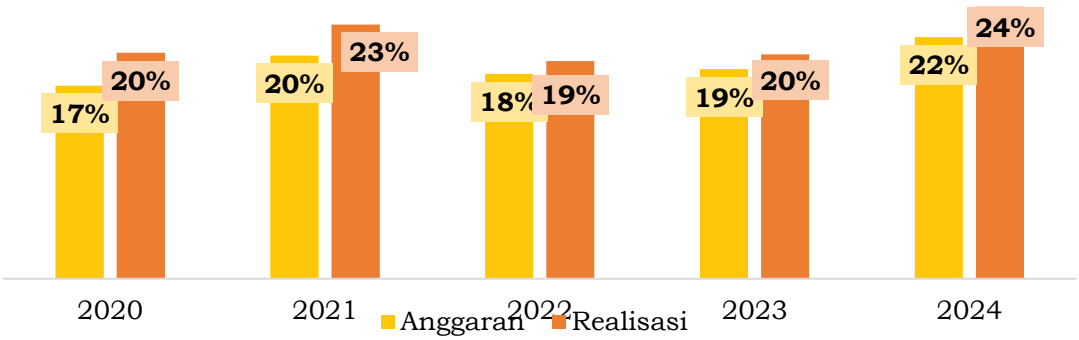

Gambar 2. 88 Mandatory Spending bidang pendidikan Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

Sesuai dengan amanat dari pemerintah pusat yang menyebutkan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20% terhadap total anggaran keuangan daerah maka jika dilihat dari grafik diatas Pemerintah Kota Pasuruan telah melaksanakan amanat tersebut. Secara keseluruhan data diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan mengalokasikan anggaran dalam bidang pendidikan sudah berada diatas angka 20% kecuali pada tahun 2022 dimana realisasi belanja pendidikan berada pada

proporsi 19.50% terhadap seluruh belanja. Berikut disajikan tabel mengenai nilai anggaran dan realisasi pendidikan serta data total realisasi dan total anggaran daerah:

Tabel 2. 55 Besaran Nilai Anggaran Belanja Pendidikan Tahun 2020 - 2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Anggaran	205.289.594.044,00	212.927.308.152,00	243.238.245.568,00	248.061.220.266,00	247,060,877,720.00
Realisasi	179.002.017.334,25	190.876.780.840,96	218.756.257.754,17	237.276.253.071,00	256,841,586,553.00

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

3) Belanja Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan yang sedang gencar- gencarnya dilakukan oleh pemerintah pusat dengan salah satu diantaranya menetapkan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pentingnya kesehatan bagi seluruh masyarakat untuk menunjang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia menuju Indonesia Emas 2045.

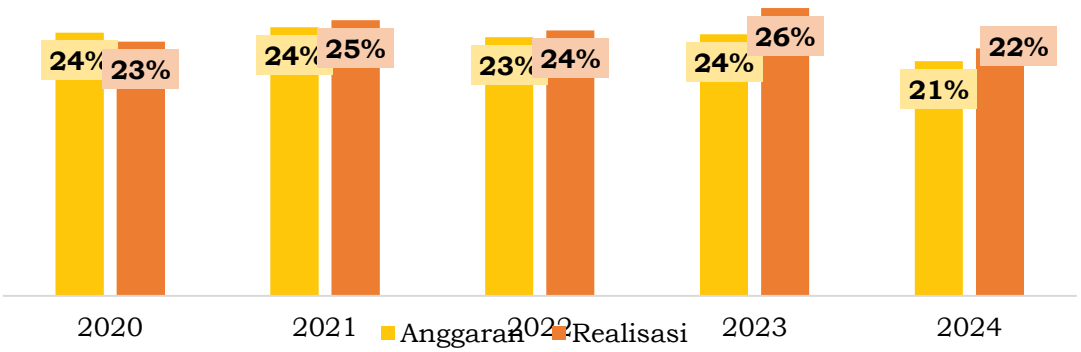

Gambar 2. 89 Mandatory Spending Bidang Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

Berdasarkan pada grafik di atas maka dapat diketahui bahwa proporsi anggaran belanja kesehatan Kota Pasuruan 2020-2024 telah berada pada posisi diatas 10%. Sesuai dengan peraturan yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat bahwa anggaran belanja kesehatan harus berada pada posisi diatas 10% terhadap total anggaran keuangan daerah. Hal tersebut sudah dilaksanakan oleh Kota Pasuruan, dengan rata-rata proporsi anggaran belanja di angka 23%. Dengan demikian maka Kota Pasuruan

telah melaksanakan amanat dari Pemerintah Pusat dengan mengalokasikan anggaran Pendidikan lebih dari 10% total anggaran keuangan daerah. Untuk dapat mengetahui secara detail mengenai realisasi dan anggaran belanja kesehatan Kota Pasuruan yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah anggaran serta realisasi belanja Kesehatan di Kota Pasuruan dari kurun waktu 2020 sampai dengan 2024. Dari data tahun 2020- 2024 diketahui bahwa jumlah anggaran terbesar berada di tahun 2023 yakni sebesar Rp. 331.511.034.168,00. Namun jumlah realisasi yang paling mendekati target anggaran belanja kesehatan ialah di tahun 2024 yakni dengan total realisasi 97% meskipun memiliki nilai lebih kecil yakni sebesar Rp. 235,944,399,636.97.

Tabel 2. 56 Besaran Nilai Anggaran Belanja Insfrastruktur Tahun 2020 - 2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Anggaran	233.349.628.150,00	241.965.471.940,00	284.432.126.806,00	331.511.034.168,00	242,256,877,948.97
Realisasi	198.048.574.298,11	281.863.183.432,08	264.152.946.285,77	301.687.569.478,00	235,944,399,636.97

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan 2025 (diolah)

6. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Pasuruan dalam rentang 5 tahun terakhir (2020-2024) cenderung mengalami perkembangan yang meningkat. Nilai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2020 sebesar Rp. 205,385,500,326.25 nilai ini merupakan akumulasi dari komponen Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Pasuruan tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (2020) yaitu sebesar Rp 200.185.377.22,76 karena adanya penurunan pada komponen Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan. Di tahun 2022 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Pasuruan kembali mengalami peningkatan capaian sebesar Rp 202.653.918.199,08 karena adanya peningkatan pada komponen Belanja Tidak Langsung. Penurunan ini terjadi kembali di tahun 2023 menjadi Rp. 202.172.123.601,00 karena tidak tersedianya data pada komponen Pengeluaran Pembiayaan. Dan pada tahun 2024 nilai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Pasuruan

meningkat hingga menjadi Rp. 240.687.561.125,00. Pengeluaran terbesar dalam struktur pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama terdapat pada Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH.

Tabel 2. 57 Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pasuruan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
A	**Belanja Tidak Langsung**	Rp201.825.444.057,00	Rp197.534.280.807,00	Rp200.464.116.133,00	Rp202.172.123.601,00	Rp240.687.561.125,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp197.752.944.057,00	Rp196.828.680.807,00	Rp199.722.516.133,00	Rp201.430.523.601,00	Rp226.218.669.421,00
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	Rp4.072.500.000,00	Rp705.600.000,00	Rp741.600.000,00	Rp741.600.000,00	Rp. 14.468.891.704
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	0
4	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	0
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	Rp3.560.056.269,25	Rp2.651.096.415,76	Rp2.189.802.066,08	-	0
1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp3.560.056.269,25	Rp2.651.096.415,76	Rp2.189.802.066,08	-	0
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	0
	TOTAL (A+B)	Rp205,385,500,326.25	Rp200.185.377.222,76	Rp202.653.918.199,08	Rp202.172.123.601,00	Rp240.687.561.125,00

Sumber: BPKAD Kota Pasuruan, 2024 (Diolah)

Berdasarkan pada data historis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Pasuruan seperti yang telah dibahas dan disajikan pada tabel di atas, maka untuk mengetahui perkiraan pengeluaran pada tahun-tahun yang akan datang, perlu dilakukan proyeksi terhadap masing-masing komponen belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama tersebut.

2.2.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Adapun beberapa pembahasan dalam analisis pembiayaan meliputi : Analisis Sumber Penutup Defisit Riil, Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, serta Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.

A. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis Sumber Penutup Defisit Riil memberikan gambaran mengenai kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah Kota Pasuruan pada masa lalu. Defisit riil diketahui dengan menghitung Realisasi Pendapatan Daerah dikurangi dengan realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Setelah diketahui selanjutnya dilakukan penutupan oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan yang dimana keseluruhan datanya dituangkan dalam tabel Defisit Riil Anggaran. Berdasarkan tabel analisis tersebut, kemudian disusun tabel Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil perhitungan dan komposisi penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 58 Defisit Riil Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	Rp809,671,940,302.92	Rp839,305,466,624.42	Rp911,656,871,775.11	Rp941,695,238,574.70	970,175,327,046.91
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	Rp824,822,274,271.65	Rp858,584,017,159.52	Rp939,274,546,104.50	Rp1,010,778,967,728.92	1,054,171,463,379.27
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp5,060,056,269.25	Rp2,651,096,415.76	Rp2,189,802,066.08	0.00	37,055,609,161.93
A	**Defisit riil**	**-Rp20,210,390,237.98**	**-Rp21,929,646,950.86**	**-Rp29,807,476,395.47**	**-Rp69,083,729,154.22**	**- 121,051,745,494.29**
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	Rp243,079,429,454.62	Rp222,883,821,120.64	Rp200,976,067,244.78	Rp171,171,590,849.31	188,087,995,379.25
5	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	Rp86,000,133,684.16	0.00
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	Rp14,781,904.00	Rp21,893,075.00	Rp3,000,000.00	0.00	0.00
9	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**243,094,211,358.62**	**222,905,714,195.64**	**200,979,067,244.78**	**257,171,724,533.47**	**188,087,995,379.25**
A-B	**Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan**	**222,883,821,120.64**	**200,976,067,244.78**	**171,171,590,849.31**	**188,087,995,379.25**	**67,036,249,884.96**

Sumber : BPKAD Kota Pasuruan, 2025 (diolah)

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 hingga 2024 Pemerintah Kota Pasuruan mengalami defisit riil serta tidak menunjukkan adanya surplus rill. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Pasuruan mengalami defisit sebesar Rp.20.210.390.237,98 dan meningkat menjadi sebesar Rp 21.929.646.950,86 di tahun 2021. Pada tahun 2022 besar defisit riil anggaran Kota Pasuruan sebesar Rp. 29.807.476.395,47 dan defisit riil ini meningkat drastis di tahun 2023 dan 2024 hingga pada tahun 2023 menjadi Rp 69.083.729.154,22 dan di tahun 2024 tercatat defisit riil sebesar - 121,051,745,494.29 .

Dari defisit tersebut selanjutnya ditutup salah satunya dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, dimana proporsi Defisit Riil terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya pada tahun 2020 mencapai -1202.74% dan pada tahun 2024 mencapai -155.38%. secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 59 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	-1202,74%	-1016,36%	-674,25%	-247,77%	-155.38%
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00%	0,00%	0,00%	-124,49%	0,00%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-0,07%	-0,10%	-0,01%	0,00%	0,00%
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber : BPKAD Kota Pasuruan, 2025 (diolah)

B. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran memberikan gambaran mengenai dari mana SiLPA diperoleh atau sumber perolehan SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sumber terhadap SiLPA yang dimiliki. Komposisi SiLPA Pemerintah Kota Pasuruan diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Pelampauan penerimaan PAD, Pelampauan penerimaan dana perimbangan, Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Sedangkan untuk kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan tidak terdapat realisasi.

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Pasuruan pada tahun 2020 hingga 2024 diperoleh dari 5 sumber sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dimana pada tahun 2020 sebagian besar SiLPA dihasilkan dari adanya Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya sebesar 86.65%. Pada tahun 2021 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Pasuruan mayoritas juga diperoleh dari Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya sebesar 68.28% serta dari Pelampauan penerimaan dana perimbangan sebesar 30.96%. Begitupun pada tahun 2022 dimana Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Pasuruan sebagian besar diperoleh dari Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya serta dari Pelampauan penerimaan dana perimbangan yang masing-masing sebesar 70.13% dan 25.16%. Sedangkan pada tahun 2023 100% Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Pasuruan diperoleh dari Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya serta pada tahun 2024 juga 99.05% Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Pasuruan diperoleh dari Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya.

Berikut disajikan data terkait dengan perkembangan SiLPA dan sumber perolehan SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan selama tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2. 60 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA		% dari SILPA
	Jumlah SiLPA	**222.883.821.120,64**	**100,00%**	**200.976.067.244,78**	**100,00%**	**171,171,590,849.31**	**100,00%**	**188.087.995.379,25**	**100,00%**	**67,036,249,884.96**	**100%**
1	Pelampauan penerimaan PAD	8.396.155.913,27	3,77%	1.535.786.728,42	0,76%	8,067,845,084.1100	4,71%	-	0,00%	634,238,763.16	0.95%
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	23.582.582.793,00	12,35%	62.221.949.362,00	45,35%	43,058,348,074.00	25.16%	-	0,00%	-	0.00%
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	0,00%	-	0,00%	89,022.00	0,00%	-	0,00%	-	0.00%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	190.905.082.414,37	85,65%	137.218.331.154,36	68,28%	120,045,308,669.20	70,13%	188.087.995.379,25	100%	66,402,011,121.80	99.05%
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		
6	Kegiatan lanjutan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

Sumber : BPKAD Kota Pasuruan, 2025 (diolah)

C. Analisis Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan memberikan gambaran mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran secara riil yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kota Pasuruan mencapai Rp. 222.883.821.120,64, lalu mengalami penurunan pada tahun 2021 sehingga menjadi Rp. 200.974.523.392,78. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran terus menurun di tahun 2022 hingga menjadi Rp. 171.172.144.599,31 namun pada tahun 2023 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran sedikit mengalami peningkatan sehingga mencapai Rp. 188.087.995.379,25 dan kembali menurun cukup signifikan pada tahun 2024 hingga menjadi Rp. 67.037.040.784,96. Adapun rata-rata pertumbuhan pada tahun 2020 hingga 2024 sebesar -19.78%. Untuk mengetahui hasil perhitungan dan perkembangan Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 61 Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Pasuruan Tahun 2020– 2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	222.883.821.120,64	200.974.523.392,78	171.172.144.599,31	188.087.995.379,25	Rp67.037.040.784,96
	Dikurangi:					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	-
3	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	222.883.821.120,64	200.974.523.392,78	171.172.144.599,31	188.087.995.379,25	Rp67.037.040.784,96

Sumber : BPKAD Kota Pasuruan, 2025 (diolah)

Dengan masih besarnya SILPA, maka Pemerintah Kota Pasuruan perlu memperbaiki tata kelola keuangan daerah dengan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dari sisi penerimaan serta pengeluaran yaitu memperhatikan kondisi makro perekonomian, memperbaiki kinerja penyerapan anggaran dan mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan. SiLPA yang diperoleh dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal, sehingga implementasi kebijakan yang berpihak pada rakyat dapat berjalan dengan lebih baik.

Pengelolaan keuangan yang semakin baik tercermin dalam hasil Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran, dimana Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran menggambarkan perkiraan kondisi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Pasuruan dalam beberapa tahun mendatang. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Pasuruan pada pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sebesar Rp. 87,487,133,028.11 yang kemudian mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat hingga pada tahun 2030 menjadi Rp. 90,410,805,063.29. Terjadinya fluktuasi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran pada tahun 2025-2030 lebih banyak disebabkan oleh adanya fluktuasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA). Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Pasuruan pada tahun 2025 hingga 2030 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 62 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2025 – 2030

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi 2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)
1	Saldo Kas Neraca Daerah	Rp67.037.040.784,96	-19.78%	87,487,133,028.11	104,710,711,214.39	103,508,838,538.33	103,222,146,941.31	93,733,559,036.19	90,410,805,063.29
	Dikurangi :								
1	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	**Rp67.037.040.784,96**	**-19.78%**	**87,487,133,028.11**	**104,710,711,214.39**	**103,508,838,538.33**	**103,222,146,941.31**	**93,733,559,036.19**	**90,410,805,063.29**

Sumber : BPKAD Kota Pasuruan, 2025 (diolah)

2.2.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan merupakan bagian integral dari kerangka keuangan yang berkaitan erat dengan kapasitas pembiayaan belanja Pemerintah Kota Pasuruan. Penyusunan kerangka ini memiliki tujuan utama untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dalam proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2030. Melalui kerangka pendanaan ini, diharapkan tercipta sinkronisasi dan keselarasan antara rencana pembangunan daerah dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana tersebut.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan guna mendanai program-program pembangunan di Kota Pasuruan pada beberapa tahun mendatang. Dalam sub bab ini, beberapa aspek penting yang akan dibahas meliputi proyeksi pendapatan dan belanja daerah serta metode penghitungan kerangka pendanaan. Proyeksi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap rencana pembangunan dapat diimplementasikan sesuai dengan kemampuan finansial pemerintah daerah, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

2.2.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kerangka pendanaan pemerintah daerah untuk beberapa tahun ke depan tidak dapat dipisahkan dari data historis, yaitu perkembangan realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menganalisis proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah di masa mendatang, diperlukan analisis terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama lima tahun terakhir. Analisis ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode tersebut serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan, termasuk dukungan terhadap pencapaian target prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Salah satu metode sederhana yang digunakan untuk memperkirakan kemampuan anggaran (proyeksi) adalah fungsi peramalan (forecast), yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan nilai berdasarkan data historis selama lima tahun terakhir, ditambah dengan asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi, kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta kondisi ekonomi makro.

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah memberikan informasi mengenai pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kota Pasuruan pada masa Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pasuruan, serta tingkat belanja dan pengeluaran pembiayaan yang akan dikelola oleh Pemerintah Kota Pasuruan dalam beberapa tahun mendatang. Secara umum, pendapatan daerah terbagi menjadi tiga jenis: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Daerah yang Sah lainnya. Sedangkan belanja daerah terbagi menjadi empat jenis: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah memberikan gambaran mengenai perkiraan pendapatan daerah yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Pasuruan selama tahun 2025 hingga 2029 dengan memperhatikan pada kondisi ekonomi dan kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, serta belanja yang akan dikeluarkan dengan memperhatikan pada perkiraan pendapatan yang akan diterima serta kebijakan-kebijakan terkait dengan belanja daerah, maupun pembiayaan daerah yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja daerah dan kondisi peningkatan pendapatan daerah, serta pertimbangan/ kebijakan lainnya.

Berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa pendapatan daerah Kota Pasuruan pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2.56%, untuk belanja daerah Kota Pasuruan secara keseluruhan pada rentang waktu tersebut diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 2.93%. Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan Kota Pasuruan diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 12%, dan sebesar 0.00% untuk pengeluaran pembiayaan.

Melihat pada hasil proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan rata-rata pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan mencapai sebesar 5.07%, dimana pada tahun 2025 telah ditetapkan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 222,484,383,482.19. Pada tahun 2026 PAD diperkirakan tumbuh mencapai 6.91% menjadi Rp. 237,851,084,684.85. Capaian PAD yang cukup baik tersebut terus konsisten meningkat hingga tahun 2030 sehingga pada akhir periode RPJMD (2030) PAD diperkirakan mencapai Rp. 284,565,964,473.58. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi pada tahun 2025 antara lain

disebabkan oleh adanya kenaikan dari pemberlakuan Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Semakin meningkatnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 mengandung harapan tingkat kemandirian keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan semakin baik, hal ini tentunya menjadi konsekuensi seiring dengan meningkatnya belanja daerah dalam setiap tahun, serta sebagai antisipasi adanya kebijakan pemerintah pusat yang berdampak terhadap dana transfer dari pusat ke daerah.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan akan cukup progresif ditengah kecenderungan tren penurunan dana transfer pemerintah pusat yang saat ini menjadi proporsi terbesar pendapatan daerah Kota Pasuruan yang rata-rata mencapai 81.02% proporsinya terhadap seluruh total pendapatan 2020-2024, maka kedepannya PAD didorong untuk memiliki kontribusi yang semakin besar terhadap pendapatan Kota Pasuruan. Eksisting saat ini tahun 2024, PAD mencapai 18.22% terhadap total seluruh pendapatan di Kota Pasuruan. Tahun 2025-2030 akan diperkirakan proporsi PAD terhadap total pendapatan mencapai 23.55% pada tahun 2025 dan diproyeksikan secara konsisten meningkat hingga tahun 2030 yang mencapai 26.85%. Angka tersebut tentunya relatif kecil mengingat Kota Pasuruan sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai kontributor utama pembangunan, maka kedepannya potensi PAD untuk dapat dioptimalisasi akan sangat besar.

Adapun untuk pendapatan transfer pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 1.75%, dimana pada Transfer Pemerintah Pusat, banyak dipengaruhi oleh sumber dana perimbangan diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar 0.48%. Rendahnya tingkat pertumbuhan antara lain disebabkan oleh adanya kerentanan terhadap pengaruh perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan negara.

Melihat pada hasil proyeksi belanja daerah dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan mencapai 2.93%, dimana untuk belanja operasi rata-rata memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 0.77%, untuk belanja modal rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 21.92%. Untuk belanja tidak terduga dalam kurung waktu tahun 2025-2030 diproyeksikan stagnan pada angka 2.5 Milyar setiap tahunnya.

Pada jenis belanja operasi, untuk belanja pegawai di Kota Pasuruan tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar -1.18%. Kecilnya pertumbuhan belanja tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan pemenuhan proporsi gaji pegawai pada tahun 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang tidak boleh melebihi 30% dari APBD (total anggaran belanja), disisi lain peningkatan belanja pegawai dibanding realisasi 2024 diperlukan dalam rangka antisipasi terhadap penerimaan pegawai baru. Kondisi eksisting belanja pegawai mencapai 40.09% terhadap total seluruh belanja tahun 2024, artinya proporsi belanja Kota Pasuruan tahun 2024 masih menyisakan PR untuk menjawab amanat UU 1 Tahun 2022. Berdasarkan proyeksi tahun 2025-2030 proporsi belanja pegawai Kota Pasuruan akan terus ditekan mendekati 30% sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana ditargetkan tahun 2030 belanja pegawai ditekan di angka 35.76%.

Untuk belanja modal di Kota Pasuruan pada tahun 2025 hingga 2030 rata-rata diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar 21.92% yang disebabkan oleh adanya pemenuhan kebutuhan peningkatan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Pasuruan melalui belanja infrastruktur, seperti pada tahun 2026 yang dialokasikan besaran Belanja Tanah dalam rangka Pembangunan JLU. Sehingga secara garis besar belanja modal selama tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan memiliki pertumbuhan positif serta memiliki proporsi yang semakin meningkat dengan rata-rata proporsi sebesar 14.56% dari total belanja daerah.

Secara umum, proyeksi belanja daerah juga dilakukan diantaranya dengan memperhatikan asumsi-asumsi seperti : Pertumbuhan realisasi belanja daerah Kota Pasuruan tahun 2020 hingga 2024 dan analisis logis terhadap kebutuhan peningkatan kegiatan pembangunan di Kota Pasuruan; serta adanya penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja. Sedangkan pada proyeksi Pembiayaan Daerah, penerimaan pembiayaan pada tahun 2025 hingga 2030 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang diperkirakan pada tahun 2025 hingga 2030 mengalami penurunan mencapai rata-rata 8.05%, dimana SiLPA dioptimalkan untuk membiayai belanja, serta adanya Pencairan Dana Cadangan pada tahun 2026 sebesar Rp. 37,055,609,161.93 dalam rangka pembangunan JLU.

Hasil proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kota Pasuruan tahun 2025 hingga 2030 secara lebih jelas dan terperinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 63 Proyeksi Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2030

No.	Uraian	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**	**Rp 944,888,435,203.15**	**Rp 974,853,471,382.65**	**Rp 997,051,014,444.14**	**Rp 1,023,131,694,730.39**	**Rp 1,051,097,658,998.71**	**Rp 1,072,291,172,872.08**	**2.56%**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**Rp 222,484,383,482.19**	**Rp 237,851,084,684.85**	**Rp 245,341,639,276.48**	**Rp 264,504,717,553.22**	**Rp 277,539,445,711.35**	**Rp 284,565,964,473.58**	**5.07%**
1.1.1.	Pajak daerah	Rp 87,488,808,677.00	Rp 97,289,489,252.27	Rp 101,103,745,010.54	Rp 108,009,399,775.41	Rp 114,517,506,882.02	Rp 117,953,032,088.48	6.20%
1.1.2.	Retribusi daerah	Rp 103,776,456,566.00	Rp 110,898,041,502.70	Rp 113,830,298,421.77	Rp 124,810,953,003.99	Rp 129,966,460,910.61	Rp 132,565,790,128.82	5.06%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	Rp 6,414,019,664.00	Rp 6,829,629,341.44	Rp 7,146,676,865.93	Rp 7,988,466,610.70	Rp 8,916,466,459.93	Rp 9,183,960,453.73	7.50%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	Rp 24,805,098,575.19	Rp 22,833,924,588.44	Rp 23,260,918,978.24	Rp 23,695,898,163.13	Rp 24,139,011,458.78	Rp 24,863,181,802.55	0.13%
1.2	**Pendapatan Transfer**	**Rp 722,404,051,720.96**	**Rp 737,002,386,697.80**	**Rp 751,709,375,167.66**	**Rp 758,626,977,177.17**	**Rp 773,558,213,287.36**	**Rp 787,725,208,398.50**	**1.75%**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**Rp 642,119,398,000.00**	**Rp 651,043,255,560.20**	**Rp 654,433,378,753.89**	**Rp 657,763,695,081.67**	**Rp 665,103,523,902.48**	**Rp 668,845,492,396.07**	**0.82%**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	Rp 642,119,398,000.00	Rp 639,695,411,560.20	Rp 643,085,534,753.89	Rp 646,415,851,081.67	Rp 653,755,679,902.48	Rp 657,497,648,396.07	0.48%
1.2.1.1.1	*Dana Bagi Hasil*	Rp 86,887,361,000.00	Rp 87,682,753,376.20	Rp 88,847,595,284.55	Rp 90,112,918,208.57	Rp 91,881,912,334.33	Rp 92,800,731,457.67	1.33%
1.2.1.1.2	*Dana Alokasi Umum (DAU)*	Rp 464,415,182,000.00	Rp 460,456,602,000.00	Rp 461,495,069,913.00	Rp 462,553,287,867.43	Rp 465,931,384,238.57	Rp 467,795,109,775.53	0.15%
1.2.1.1.3	*Dana Alokasi Khusus (DAK)*	Rp 90,816,855,000.00	Rp 91,556,056,184.00	Rp 92,742,869,556.34	Rp 93,749,645,005.66	Rp 95,942,383,329.58	Rp 96,901,807,162.87	1.31%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	Rp -	Rp 11,347,844,000.00	Rp 11,347,844,000.00	Rp 11,347,844,000.00	Rp 11,347,844,000.00	Rp 11,347,844,000.00	0.00%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-					0.00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-					0.00%
1.2.1.5	Dana Desa							0.00%

No.	Uraian	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.2.2	**Transfer Antar-Daerah**	**Rp 80,284,653,720.96**	**Rp 85,959,131,137.60**	**Rp 97,275,996,413.77**	**Rp 100,863,282,095.50**	**Rp 108,454,689,384.89**	**Rp 118,879,716,002.43**	**8.21%**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	Rp 62,965,170,499.96	Rp 78,473,166,349.20	Rp 89,645,673,504.12	Rp 92,976,263,423.77	Rp 99,770,785,170.45	Rp 109,761,616,577.27	11.98%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	Rp 17,319,483,221.00	Rp 7,485,964,788.40	Rp 7,630,322,909.65	Rp 7,887,018,671.72	Rp 8,683,904,214.43	Rp 9,118,099,425.16	-7.28%
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**0.00%**
1.3.1	Hibah	-	-					0.00%
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	0.00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	0.00%
2	**BELANJA**	**Rp 1,011,924,685,088.15**	**Rp 1,099,835,847,407.00**	**Rp 1,102,287,910,137.00**	**Rp 1,127,160,678,186.00**	**Rp 1,154,838,510,196.00**	**Rp 1,166,495,754,818.00**	**2.93%**
2.1	**Belanja Operasi**	**Rp 902,386,338,181.00**	**Rp 916,257,830,824.45**	**Rp 928,564,534,222.89**	**Rp 935,404,183,134.82**	**Rp 939,326,933,481.28**	**Rp 937,742,690,963.62**	**0.77%**
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp 442,689,638,285.00	Rp 430,248,475,980.20	Rp 426,787,146,402.55	Rp 424,219,817,050.71	Rp 421,220,094,154.26	Rp 417,161,339,075.08	-1.18%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 392,362,236,716.00	Rp 412,572,491,950.21	Rp 422,224,695,662.18	Rp 426,314,475,147.94	Rp 430,514,302,983.76	Rp 431,601,874,498.68	1.94%
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.5	Belanja Hibah	Rp 52,884,971,580.00	Rp 58,520,437,605.24	Rp 64,043,660,183.67	Rp 68,955,112,823.58	Rp 71,083,504,368.77	Rp 72,305,174,456.14	6.51%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	Rp 14,449,491,600.00	Rp 14,916,425,288.80	Rp 15,509,031,974.49	Rp 15,914,778,112.59	Rp 16,509,031,974.49	Rp 16,674,302,933.72	2.91%
2.2	**Belanja Modal**	**Rp 97,494,762,969.00**	**Rp 181,078,016,582.55**	**Rp 171,223,375,914.11**	**Rp 189,256,495,051.18**	**Rp 213,011,576,714.72**	**Rp 226,253,063,854.38**	**21.92%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	4,432,000,000.00	44,500,000,000.00	Rp 4,000,000,000.00	Rp 600,000,000.00	Rp 1,100,000,000.00	Rp 800,000,000.00	-17.00%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27,425,846,539.00	38,473,700,282.40	Rp 44,264,882,702.46	Rp 52,204,581,559.40	Rp 58,027,822,693.51	Rp 62,748,935,601.25	18.51%

No.	Uraian	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49,343,049,650.00	56,379,428,910.40	Rp 62,771,474,383.04	Rp 71,263,107,774.68	Rp 75,465,447,049.11	Rp 79,513,287,457.61	10.08%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16,188,974,780.00	41,624,552,389.75	Rp 60,076,913,280.85	Rp 65,079,923,081.97	Rp 78,305,589,465.99	Rp 83,875,868,939.29	47.44%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	104,892,000.00	100,335,000.00	Rp 110,105,547.76	Rp 108,882,635.13	Rp 112,717,506.11	Rp 114,971,856.23	1.96%
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**Rp 12,043,583,938.15**	**Rp 2,500,000,000.00**	**Rp 2,500,000,000.00**	**Rp 2,500,000,000.00**	**Rp 2,500,000,000.00**	**Rp 2,500,000,000.00**	-15.85%
2.4	**Belanja Transfer**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	0.00%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3	**PEMBIAYAAN**							
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**Rp 67,036,249,885.00**	**Rp 124,982,376,024.35**	**Rp 105,236,895,692.86**	**Rp 104,028,983,455.61**	**Rp 103,740,851,197.29**	**Rp 94,204,581,945.92**	**12.00%**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	Rp 67,036,249,885.00	Rp 87,926,766,862.42	Rp 105,236,895,692.86	Rp 104,028,983,455.61	Rp 103,740,851,197.29	Rp 94,204,581,945.92	8.05%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	Rp -	Rp 37,055,609,161.93	Rp -	Rp -			0.00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%

No.	Uraian	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**0.00%**
3.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%

Sumber : BPKAD Kota Pasuruan, 2025 (diolah)

Melihat pada hasil proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagaimana yang telah terdapat pada tabel di atas, maka selanjutnya dapat dikemukakan beberapa kebijakan keuangan daerah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Adapun kebijakan keuangan daerah dikelompokkan berdasarkan 3 komponen yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

1. Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kota Pasuruan dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pasuruan tahun 2025-2029 berupa kerangka pikir yang bersifat umum yang akan diterjemahkan dalam kebijakan periodik tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalian pendapatan dalam beberapa tahun kedepan. Adapun kebijakan terkait dengan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan penerimaan PAD melalui intensifikasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (melakukan pendataan terhadap obyek dan wajib pajak yang belum terdata, validasi data potensi dan mengoptimalkan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah);
b. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggunaan Teknologi Informasi/ implementasi Sistem Informasi Online, serta penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan
c. Meningkatkan kepatuhan/ ketaatan wajib pajak dan retribusi melalui :
    - Pelaksanaan mekanisme *reward* dan *punishment;*
    - Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
    - Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
    - *Law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
d. Melakukan review dan penyesuaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Tanah dan Bangunan mendekati Harga Pasar secara berkala khususnya di wilayah-wilayah yang secara signifikan mengalami pertumbuhan ekonomi;

e. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
f. Melakukan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta obyek pendapatan asli daerah lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kondisi masyarakat;
g. Memperkuat sistem pelayanan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi/ Teknologi Informasi (IT);
h. Optimalisasi tata kelola aset daerah dan pemanfaatan Aset Daerah sebagai sumber penerimaan dalam PAD;
i. Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ kinerja BUMD termasuk upaya pengembangan BUMD dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif;
j. Penguatan sistem manajemen dan koordinasi sinergis antar Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah;
k. Optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak melalui peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal, daerah (provinsi) dan daerah lain dalam menyerap basis pajak, termasuk PKB dan BBNKB (Respon terhadap kebijakan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang opsen dengan tarif 66%).

2. Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah didasarkan pada pendekatan *Money Follow Program* yang memberikan prioritas pada bobot program/kegiatan sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Kebijakan Belanja Daerah dalam RPD Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

a. Belanja daerah Kota Pasuruan diprioritaskan untuk membiayai program-program yang menjadi prioritas dan kebutuhan Daerah;
b. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan berbasis pada peningkatan kinerja;

c. Optimalisasi penyerapan belanja daerah melalui peningkatan sinergi antara perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah;
d. Belanja Daerah disusun berdasarkan standar harga dan Analisis Standar Belanja;
e. Belanja pegawai dialokasikan dengan proporsi yang semakin menurun hingga paling tinggi 30% dari total belanja APBD pada tahun 2027 (di luar tunjangan guru) sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022;
f. Untuk menunjang pemerataan pembangunan infrastruktur di Kota Pasuruan, maka minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) dialokasikan/ digunakan untuk belanja infrastruktur, dimana Dana Transfer Umum (DTU) meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH);
g. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku;
h. Penggunaan dana tidak terduga dilakukan untuk menangani hal-hal bersifat darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
i. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai salah satu wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang dilaksanakan melalui pelayanan dasar di Puskesmas, rujukan di RSUD Dr. R. Soerdarsono, serta rujukan lanjutan pada RSUD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
j. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan pendidikan paling sedikit sebesar 20% sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat;
k. Pengalokasian anggaran mandatory lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

l. Tambahan penghasilan bagi pegawai diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen keuangan yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pengelolaan keuangan dapat terlaksana secara optimal. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam RPD Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

a. SiLPA yang terpasang pada tahun 2025 - 2029 diperhitungkan lebih rendah dibandingkan SiLPA dalam 4 tahun terakhir. Rendahnya SiLPA yang diproyeksikan memerlukan upaya optimalisasi penyerapan anggaran setiap tahunnya, sehingga diperlukan perbaikan sistem sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran;
b. Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dimana jumlahnya semakin menurun yang dialokasikan untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di daerah;
c. Bila memungkinkan Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/ atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah, menunjang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d. Mendorong peningkatan kerjasama pembiayaan daerah dengan pihak swasta/ masyarakat/ Non-Governmental Organization melalui Publik Private Partnership, seperti : KPBU atau optimalisasi CSR. Skema KPBU memungkinkan pelibatan swasta dalam penentuan proyek yang layak untuk dikembangkan. KPBU juga memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien. Selain itu, skema KPBU memungkinkan untuk memilih

dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama.

2.2.1.1. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Pasuruan selama beberapa tahun ke depan sampai dengan tahun 2030. Untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menghitung seluruh penerimaan daerah, yang meliputi: Pendapatan, Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda), dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran. Selanjutnya dari jumlah penerimaan tersebut dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan data hasil proyeksi yang diperoleh dapat diketahui bahwa proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Pasuruan pada tahun 2025 hingga 2030 memiliki pertumbuhan sebesar 2.93%, dimana pada tahun 2025 kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp. 1,011,924,685,088.15 yang kemudian dapat terus meningkat hingga pada tahun 2030 menjadi Rp. 1,166,495,754,818.00. Hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tahun 2025 dan 2030 selanjutnya dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan daerah pada masing-masing tahun.

Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Pasuruan pada tahun 2025 hingga 2030 secara lebih jelas disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 64 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 – 2029

No	Uraian	Proyeksi					
		2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)
1	Pendapatan	944,888,435,203.15	974,853,471,382.65	997,051,014,444.14	1,023,131,694,730.39	1,051,097,658,998.71	1,072,291,172,872.08
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	37.055.609.161,93		-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	67,036,249,885.00	87,926,766,862.42	105,236,895,692.86	104,028,983,455.61	103,740,851,197.29	94,204,581,945.92
	Total Penerimaan	1,011,924,685,088.15	1,099,835,847,407.00	1,102,287,910,137.00	1,127,160,678,186.00	1,154,838,510,196.00	1,166,495,754,818.00
	Dikurangi:						
1	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**1,011,924,685,088.15**	**1,099,835,847,407.00**	**1,102,287,910,137.00**	**1,127,160,678,186.00**	**1,154,838,510,196.00**	**1,166,495,754,818.00**

Sumber : BPKAD Kota Pasuruan, 2025 (diolah)

Melihat pada proyeksi Kapasitas Rill yang dimiliki oleh Kota Pasuruan pada tahun 2026-2030, maka selanjutnya dapat dipetakan rencana penggunaan Kapasitas Rill Kota Pasuruan lima tahun kedepan. Adapun pertimbangan yang digunakan dalam pemetaan rencana penggunaan Kapasitas Rill utamanya mendahulukan pendanaan urusan wajib pelayanan dasar serta belanja wajib mengikat yang kemudian akan dimasukan dalam prioritas I. Adapun pada prioritas II merupakan belanja yang akan digunakan untuk pemenuhan visi misi (mengacu cascading/ belanja prioritas) diluar urusan wajib pelayanan dasar. Sisa dana diluar prioritas I dan prioritas II selanjutnya akan masuk pada prioritas III. Secara lebih jelas, rencana penggunaan Kapasitas Rill Kota Pasuruan yang dipetakan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III tersaji dalam tabel berikut:

No	Uraian	Proyeksi 2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)
	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan	**1,099,835,847,407.00**	**1,102,287,910,137.00**	**1,127,160,678,186.00**	**1,154,838,510,196.00**	**1,166,495,754,818.00**
1	PRIORITAS 1	841,777,578,972.00	858,646,210,750.00	884,279,882,018.00	883,447,702,788.00	905,121,074,159.00
2	PRIORITAS 2	166,229,986,501.00	194,150,686,475.00	188,640,150,141.00	191,026,763,498.00	201,317,963,369.00
3	PRIORITAS 3	91,828,281,934.00	49,491,012,912.00	54,240,646,027.00	80,364,043,910.00	60,056,717,290.00

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1. Identifikasi Permasalahan dan Potensi

Permasalahan dan potensi pembangunan merupakan pondasi dalam melakukan telaah pembangunan di daerah, sehingga sangat penting adanya pemetaan Permasalahan dan potensi pembangunan. Permasalahan dan potensi pembangunan dalam hal ini ditelusuri melalui evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya dan memperhatikan kondisi di masyarakat atas Permasalahan dan potensi yang berkembang. Permasalahan dan potensi yang telah ditelusuri yang berpengaruh terhadap kondisi pembangunan kedepan. Berikut ini merupakan rekapitulasi Permasalahan dan potensi pembangunan di Kota Pasuruan hasil evaluasi kinerja dan telah memperhatikan Isu yang berkembang.

Tabel 2. 65 Identifikasi Permasalahan Dan Potensi Daerah

Aspek / Urusan	Permasalahan / potensi
Lingkungan Hidup Berkualitas	• Persentase sampah yang diolah di TPA dari tahun 2022 terus menurun, hal tersebut menunjukkan kinerja pengolahan sampah skala lingkungan telah berjalan baik. Kinerja tersebut perlu diiringi dengan upaya pemerintah Kota Pasuruan dalam menyediakan teknologi dan kebijakan yang efektif dalam mengelola sampah di TPA • IKLH dalam empat tahun terakhir cenderung memiliki skor yang rendah walaupun memiliki tren yang meningkat.

Aspek / Urusan	Permasalahan / potensi
Pertumbuhan Ekonomi	Kota Pasuruan memiliki prestasi yang baik dalam pertumbuhan ekonomi, persentase pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan hampir selalu mengungguli persentase pertumbuhan ekonomi di tingkat Provinsi dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 hingga seterusnya perlu dikawal, mengingat di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi di Provinsi dan Nasional mengalami penurunan.
Tingkat Kemiskinan	● Secara umum Kota Pasuruan memiliki capaian yang baik dalam hal persentase kemiskinan. Meskipun persentase kemiskinan Kota Pasuruan cenderung dinamis dan fluktuatif namun angkanya selalu berada di bawah rata-rata skor provinsi dan nasional ● Meskipun memiliki persentase kemiskinan yang cenderung aman yakni dibawah rata-rata skor provinsi dan nasional namun jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan provinsi perlu menjadi perhatian karena angkanya yang sangat fluktuatif. ● Pada tahun 2025 dan seterusnya jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan dikhawatirkan akan mengalami kenaikan jika melihat pola selama lima tahun terakhir. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus. ● Pada tahun 2025 dan seterusnya indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan dikhawatirkan akan mengalami kenaikan jika melihat pola selama lima tahun terakhir. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus.
Tingkat Pengangguran Terbuka	● Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pasuruan selama 5 tahun terakhir berhasil menurun. Namun hal ini tetap perlu menjadi perhatian karena angka tingkat pengangguran terbuka Kota Pasuruan selalu berada di atas rata-rata angka provinsi. ● Jumlah angkatan kerja yang menganggur di Kota Pasuruan masih sangat fluktuatif, sehingga Pemerintah Kota Pasuruan perlu meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan akses pekerjaan bagi masyarakat Kota Pasuruan
Indeks Gini	Skor gini rasio Kota Pasuruan masih berada di angka yang aman karena jauh dari angka 1. Meski begitu gini rasio tetap perlu diperhatikan karena tren yang ditunjukkan selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Skor di tahun 2025 dan seterusnya perlu diperhatikan secara ketat melihat pola dan tren gini rasio yang terus mengalami kenaikan.
Indeks Perlindungan Anak	● Indeks Perlindungan Anak di Kota Pasuruan dalam beberapa aspek menunjukkan hal yang positif dengan adanya stabilitas dalam peningkatan terhadap Indeks D2, D3, D4. ● Indeks D1 masih menjadi PR karena angkanya yang cukup fluktuatif. Hal ini perlu diperhatikan mengingat indeks D1 tentang Hak Sipil dan Kebebasan adalah hak dasar bagi setiap anak ● Indeks D5 tentang Perlindungan Khusus juga masih menjadi tugas yang perlu diperhatikan mengingat angkanya yang fluktuatif. Hal ini menjadi penting mengingat semua anak memiliki hak untuk dilindungi.
Pendidikan	● Indeks Pendidikan, rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kota Pasuruan berhasil meningkat di setiap tahunnya, capaian ini tentu perlu diapresiasi. ● Beberapa hal perlu diperhatikan seperti angka partisipasi pendidikan dasar yang menurun cukup jauh di 2024. ● Begitu pula dengan APS SD/MI – SMP/MTs yang cenderung menurun dan selaras dengan penurunan rasio ketersediaan sekolah, sehingga pemerintah Kota Pasuruan perlu lebih memperhatikan ketersediaan fasilitas sekolah ● Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Kesehatan	● Jumlah posyandu utama dan mandiri terus bertambah kuantitasnya setiap tahun. Hal tersebut merupakan prestasi yang baik, namun perlu diingat bahwa peningkatan jumlah posyandu perlu disesuaikan dengan jumlah balita yang ada. Karena rasio jumlah balita dan posyandu turun angkanya pada tahun 2024 ● Jumlah tenaga medis yang terus meningkat serta kepuasan layanan masyarakat terhadap puskesmas memiliki capaian yang sangat bagus dan cenderung meningkat. ● Pemerintah Kota Pasuruan perlu memperhatikan masyarakat yang menderita penyakit menular dan tidak menular seperti DBD, HIV/AIDS karena angka penderitanya yang terus meningkat di setiap tahun ● Penanganan penyakit TBC BTA (+) juga menjadi tugas penting bagi Pemerintah Kota Pasuruan mengingat persentase penanganannya yang cenderung turun tahun ke tahun. ● Penerapan pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP) yang masih belum optimal, terutama dalam pemenuhan sarpras.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	● Terdapat beberapa capaian yang dapat diapresiasi seperti proporsi panjang jaringan jalan dengan kondisi baik yang terus meningkat di setiap tahunnya, hal ini diimbangi dengan

Aspek / Urusan	Permasalahan / potensi
	menurunnya persentase permukiman rawan banjir yang ada di Kota Pasuruan. ● Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik perlu menjadi perhatian karena angkanya yang cenderung menurun. ● Begitu pula dengan panjang jaringan irigasi primer yang memiliki tren cenderung turun dan konstan. ● Perkembangan Jaringan Jalan dalam kondisi baik menurun dalam 5 (lima) tahun terakhir.
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	● Dalam urusan perumahan rakyat dan permukiman Kota Pasuruan patut diapresiasi. Terjadi peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya mengenai rumah layak huni, rumah tangga dengan akses air aman, rumah tangga dengan sistem air limbah memadai, serta tanggung jawab pemerintah dalam merehabilitasi rumah korban bencana. ● Salah satu pekerjaan besar pemerintah adalah dalam indikator persentase kawasan bebas kumuh perkotaan karena tren yang cenderung menurun pada lima tahun terakhir. Hal ini perlu menjadi perhatian besar bagi pemerintah Kota Pasuruan
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	● Urusan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum memiliki capaian dengan angka yang tinggi di setiap tahunnya, namun perlu diperhatikan karena angkanya dalam lima tahun terakhir cukup fluktuatif. ● Angka tindak lanjut pelanggaran sangat baik, banyak pelanggaran yang tertangani, namun ini menjadi indikasi bahwa di Kota Pasuruan banyak terjadi pelanggaran.
Sosial	● Dari tahun ke tahun persentase realisasi PPKS yang memperoleh bantuan sosial terus meningkat bahkan hingga mencapai 100%. Hal ini patut diapresiasi, berkaitan dengan wujud komitmen pemerintah Kota Pasuruan dalam memperhatikan masyarakatnya yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. ● Namun, perlu diingat bahwa jumlah PPKS yang diberikan bantuan angkanya sangat fluktuatif setiap tahun, puncaknya berada pada 2020 dan 2022. Hal ini menandakan jumlah PPKS di Kota Pasuruan yang masih perlu diperhatikan
Tenaga Kerja	● Persentase pencari kerja yang ditempatkan perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dalam lima tahun terakhir angkanya cenderung rendah. Pemerintah Kota Pasuruan perlu memastikan ketersediaan lapangan kerja sebanding dengan jumlah pencari kerja, serta memastikan kompetensi dan kualitas para pencari kerja di Kota Pasuruan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan. ● Jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja cenderung rendah angkanya dalam lima tahun terakhir. Hal ini perlu diapresiasi dan dipertahankan untuk mewujudkan Kota Pasuruan yang ramah pekerja dan pebisnis.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dalam 4 tahun Pemerintah Kota Pasuruan berhasil menurunkan angka KDRT, namun terjadi lonjakan angka KDRT pada tahun 2024. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Pasuruan untuk kembali menurunkan angka KDRT.
Lingkungan Hidup	● Persentase sampah yang diolah di TPA dari tahun ke tahun selalu meningkat. Hal ini perlu diiringi dengan upaya Pemerintah Kota Pasuruan dalam menyediakan teknologi dan kebijakan yang efektif dalam mengelola sampah di TPA ● Potensi pencemaran air sungai di Kota Pasuruan cukup tinggi mengingat banyaknya jumlah industri baik industri skala kecil, menengah dan besar yang menambah beban pencemaran yang masuk ke air sungai. ● Kualitas Lahan Mengalami penurunan
Perhubungan	● Sejauh ini urusan perhubungan Kota Pasuruan menunjukkan prestasi dan pencapaian yang baik. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka kecelakaan, bertambahnya rambu lalu lintas, jumlah armada yang konstan di setiap tahunnya. ● Melihat jumlah kendaraan yang terus menurun hal ini menjadi sebuah pengingat bagi Pemerintah Kota Pasuruan untuk turut meningkatkan kualitas transportasi umum yang terintegrasi, sehingga masyarakat semakin peduli akan pentingnya penggunaan transportasi umum dibanding pribadi.
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Perlu diapresiasi bahwa jumlah koperasi aktif di Kota Pasuruan memiliki tren yang cenderung meningkat. Namun perlu digaris bawahi bahwa jumlah koperasi aktif masih jauh jika dibandingkan dengan total jumlah koperasi. Pemerintah Kota Pasuruan perlu membangkitkan geliat aktivitas koperasi mengingat koperasi merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Penanaman Modal	Perkembangan investasi di Kota Pasuruan patut diapresiasi mengingat nilainya yang terus meningkat di setiap tahun. Namun perlu diingat bahwa nilai investasi dalam lima tahun terakhir masih lebih rendah dibanding nilai investasi pada tahun 2019 yang mencapai 467M. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Pasuruan untuk meningkatkan nilai investasi.

Aspek / Urusan	Permasalahan / potensi
Kepemudaan dan Olahraga	● Organisasi kepemudaan yang menunjukkan pertumbuhan positif perlu diarahkan untuk penyelesaian permasalahan pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, kesenjangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. ● Pembinaan terhadap cabang olahraga perlu diperhatikan mengingat angkanya yang cukup turun drastis pada tahun 2024. Hal ini perlu diperhatikan guna mengoptimalkan sumber daya pemuda di bidang olahraga agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap Kota Pasuruan.
Keuangan	● Pertumbuhan PAD perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Pasuruan. Dalam periode lima tahun terdapat tiga tahun pertumbuhan PAD mencapai minus yakni pada 2020, 2021 dan 2024. ● Begitu pula dengan pertumbuhan PAD yang angkanya cenderung rendah dan naik turun. Hal ini perlu diperhatikan mengingat rasio PAD merupakan gambaran tingkat kemandirian suatu daerah. ● Pemerintah perlu memperhatikan sumber pemasukan seperti pajak dan lain lain untuk dapat meningkatkan pertumbuhan serta rasio PAD.

2.3.2. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029

A. Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menetapkan delapan misi pembangunan yang dikenal sebagai **Asta Cita**. Misi ini mencakup berbagai aspek strategis untuk mendorong kemajuan Indonesia dalam lima tahun ke depan, mulai dari memperkokoh ideologi pancasila, ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi digital dan industri kreatif. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada pertahanan dan keamanan nasional, peningkatan kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Asta Cita menjadi landasan utama dalam mewujudkan visi besar menuju *Indonesia Emas 2045*. Sejalan dengan tantangan global, misi ini menitikberatkan pada hilirisasi industri yang berkelanjutan, sinkronisasi kebijakan sektoral, serta penerapan standar keberlanjutan internasional. Transisi energi juga menjadi prioritas guna memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, sementara kebijakan yang responsif terhadap perubahan demografi, termasuk populasi menua (*aging population*), akan menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan nasional.



Gambar 2. 90 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden

Sumber: Dokumen RPJMN 2025-2029

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)

Konstelasi di tengah era global yang sarat dengan berbagai tantangan, pengukuhan Pancasila sebagai fondasi bangsa Indonesia menjadi hal yang krusial. Pancasila tidak sekadar mencerminkan jati diri bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etika dalam menentukan setiap kebijakan dan langkah negara. Prinsip demokrasi memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mempengaruhi arah perkembangan negara.

Sejalan dengan itu, konstitusi juga mengamanatkan pengarusutamaan dan pemajuan hak asasi manusia pada setiap kebijakan pembangunan yang menegaskan perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hak setiap individu, terutama tetapi tidak terbatas pada kelompok rentan, demi pembangunan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis, menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif. Pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029, Pemerintah berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia.

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sementara itu, kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain. Dalam kemandirian bangsa, Indonesia perlu fokus pada pencapaian swasembada dalam berbagai sektor krusial yang mencakup sektor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa; sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan; dan sektor air sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan. Prinsip pertama dari Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang religius dan mampu mewujudkan perekonomian yang berdaulat dan berdaya saing di tingkat global.

Prinsip ini diimplementasikan dengan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Sementara itu, era digitalisasi mengharuskan ekonomi digital menjadi akselerasi peningkatan daya saing. Dengan sumber daya alam yang melimpah, ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; ekonomi biru akan menekankan nilai penting dari kekayaan kelautan kita. Dengan mengoptimalkan kesempatan di setiap sektor tersebut secara berkelanjutan, Indonesia mempertegas posisinya sebagai negara yang berdaulat. Atas dasar hal tersebut, pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029 merumuskan pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

Pembangunan infrastruktur berkualitas, berkeadilan, ber-ketahanan, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional, program prioritas, dan program hasil terbaik cepat, terutama makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, hilirisasi komoditas, dan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur, pengembangan industri kreatif, dan industri agro maritim bertujuan mendukung

pemenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan mendorong kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi. Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan ketersediaan aset (stok infrastruktur) yang terbangun untuk meningkatkan akses; menurunkan biaya produksi, biaya transportasi dan biaya logistik; menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas; serta mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata. Dalam lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan mencakup penyediaan air, pembangunan rumah dan kawasan permukiman, pengelolaan sanitasi dan persampahan, pembangunan jaringan transportasi, serta penyediaan listrik dan penguatan transformasi digital.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terpadu, baik layanan transportasi, digital, maupun ketenagalistrikan dengan pengembangan industri kreatif diarahkan untuk memberi ruang yang luas bagi pengembangan kewirausahaan generasi muda, peningkatan inovasi dan perluasan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang, serta pengembangan dan peningkatan ekosistem digital. Dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya lokal, pengembangan industri kreatif melalui pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berpotensi menjadi pendorong utama ekonomi dan sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan infrastruktur terpadu dilakukan dengan memperhatikan pendekatan solusi berbasis alam untuk mengurangi risiko bencana dan perubahan iklim, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, dalam lima tahun ke depan (2025–2029), pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Keseluruhan upaya tersebut dapat didukung oleh peningkatan peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

Sumber daya manusia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing merupakan modal dasar pembangunan menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pembangunan harus diawali dengan pemenuhan pelayanan dasar dan pembentukan modal manusia sebagai aspek utama pembangunan untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi transformasi pembangunan.

Pembangunan manusia seutuhnya membuka peluang dan memperluas kesempatan setiap individu mendapatkan layanan publik pada seluruh siklus hidup, secara inklusif, dan menerapkan prinsip kesetaraan gender untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan agar setiap manusia dalam berbagai situasi dan kondisi mampu mengoptimalkan segenap potensi, berkembang maju, serta hidup sejahtera secara lahir dan batin. Pembangunan sumber daya manusia dilaksanakan dengan memberikan setiap individu kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Atas dasar hal tersebut, pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Sebuah negara yang maju harus mampu memaksimalkan potensi sumber daya alamnya untuk kemajuan perekonomian nasional dan rakyat. Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia dapat mengonversi komoditas dasar menjadi produk berdaya saing tinggi, yang juga dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Dengan demikian, tidak hanya menjadi negara penghasil bahan mentah, Indonesia dapat menjadi produsen dan manufaktur atas produk yang berkualitas dan dapat bersaing di kancah internasional. Prioritas Nasional ini dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif, dan juga menegaskan kedaulatan ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan menjamin pembangunan berkelanjutan untuk

generasi mendatang. Karena itu pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan program industrialisasi dan hilirisasi.

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh distribusi hasil pembangunan dan keseimbangan alokasi sumber daya pada setiap wilayah. Membangun dari desa dan dari bawah adalah strategi yang berorientasi pada penguatan akar perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat lokal serta memperhatikan pemenuhan hak dasar warga negara untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan inklusif. Desa, sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahan dan ekonomi, memegang potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional. Dengan mengedepankan pembangunan dari desa dan dari bawah, negara mengakui peran penting komunitas desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kelestarian lingkungan, dan ketahanan sosial budaya. Membangun dari desa tidak hanya dalam bentuk infrastruktur fisik, ekonomi, sosial-budaya, lingkungan dan tata kelola yang menggambarkan kemandirian desa, namun juga meliputi pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan aksesibilitas ke berbagai sumber daya. Melalui strategi yang berfokus pada pendekatan dari desa dan dari bawah, negara berupaya agar seluruh masyarakat mendapatkan dampak positif dari pembangunan menyeluruh, penurunan disparitas ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan dari desa dan dari bawah menjadi pendekatan utama dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Penduduk miskin dan rentan menjadi fokus dalam pelaksanaan perlindungan sosial, untuk membantu mengurangi beban kelompok tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, energi, pengasuhan, layanan sosial, perumahan dan sanitasi yang layak, serta kebutuhan individu maupun keluarga lainnya sesuai dengan hambatan yang dihadapi. Pendekatan untuk meningkatkan kemandirian penduduk miskin dan rentan dilakukan dengan mengedepankan potensi, kapasitas, motivasi, dan akses bagi mereka untuk dapat berdaya mendapatkan ruang untuk berpartisipasi pada sektor-sektor ekonomi utama. Kesempatan yang setara menjadi kebijakan kunci untuk memastikan infrastruktur dan layanan dasar,

serta kondisi pemampu lainnya, tersedia bagi penduduk untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi sejahtera. Upaya holistik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kapasitas penduduk miskin dan rentan diarahkan untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan secara berkesinambungan.

Kebijakan pemberantasan kemiskinan dikembangkan sebagai bagian dari agenda pembangunan utama untuk memperkuat sumber sumber pertumbuhan ekonomi. Penduduk miskin, rentan, dan menuju kelas menengah didorong untuk menjadi aktor dan rantai pasok utama yang berperan dalam kegiatan ekonomi utama yang dapat mengeluarkan mereka dari kondisi miskin dan rentan. Penguatan dan perbaikan tata kelola program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi menjadi agenda utama untuk mendukung kebijakan ini, termasuk integrasi program lintas lembaga dan sektor, peningkatan adaptabilitas dan inklusivitas, pemanfaatan dan peningkatan akses terhadap teknologi, penggunaan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi sebagai sumber rujukan dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk penargetan program, serta pemantauan yang intensif dan berkala dalam mengidentifikasi kebutuhan kelompok yang paling rentan dan mengakselerasi graduasi penduduk menuju sejahtera secara berkesinambungan. Perlindungan dan pemberdayaan penduduk didukung dengan kebijakan kewilayahan yang bersifat afirmatif. Untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, perencanaan regional yang terintegrasi menjadi langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan yang merata. Hubungan desa-kota yang saling mendukung sebagai satu kesatuan fungsi wilayah berperan sebagai kunci pemerataan ekonomi. Desa dapat menjadi bagian dari rantai pasok untuk mendukung ekosistem ekonomi kota, sementara kota menyediakan akses pasar, teknologi, dan inovasi. Kota-kota dirancang sebagai simpul pertumbuhan yang mendukung pembangunan wilayah sekitar. Selain itu, pembangunan di desa dan kota harus memastikan akses yang setara bagi kelompok rentan di daerah miskin perkotaan dan perdesaan terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Pembangunan perkotaan yang inklusif tidak hanya memperkuat perekonomian lokal tetapi juga mendorong pemerataan peluang ekonomi di wilayah tertinggal. Investasi pada kawasan strategis, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, diarahkan untuk memanfaatkan potensi wilayah tertinggal dan mempercepat pengurangan kesenjangan. Sebagai model pembangunan berkelanjutan dan inklusif, Ibu Kota Nusantara dirancang

untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperbaiki distribusi penduduk, dan menciptakan peluang baru di luar Jawa, sehingga mendukung penurunan kemiskinan secara lebih merata. Pelaksanaan pembangunan dirancang dengan pendekatan afirmatif, yang berfokus pada keberpihakan terhadap pemenuhan kebutuhan penduduk paling rentan, dimulai dari tingkat komunitas. Pendekatan ini memastikan bahwa kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), dan komunitas terpencil serta kelompok rentan lainnya, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar, peluang ekonomi, dan perlindungan sosial. Pendekatan "membangun dari desa dan dari bawah" bertujuan memberdayakan desa sebagai penggerak utama dalam rantai pasok ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan potensi lokal, pemerintah juga berupaya meningkatkan kontribusi desa dalam mendukung ekosistem ekonomi kota. Strategi ini tidak hanya menciptakan sinergi antara desa dan kota, tetapi juga memperkuat konektivitas ekonomi antarwilayah untuk memastikan pemerataan pembangunan.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi merupakan aspek krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Reformasi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi, pemakaian narkoba, judi, dan penyelundupan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan harus dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Kebijakan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, serta melindungi potensi yang dimiliki oleh generasi penerus dari berbagai hambatan dan ancaman. Langkah-langkah reformasi ini diharapkan dapat menjamin terciptanya situasi yang kondusif bagi jalannya pembangunan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029, Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjaga toleransi antarumat beragama, keberlanjutan alam, sekaligus melestarikan nilai dan warisan budaya sebagai landasan transformasi pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Toleransi antarumat beragama diwujudkan dalam tindakan nyata dengan menghargai perbedaan serta menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kekayaan alam dan budaya yang melimpah merupakan modal dasar pembangunan yang perlu dikelola secara berkelanjutan.

Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan kesejahteraan antargenerasi, serta menanggulangi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana. Penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan, guna melindungi kehidupan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Sementara itu, nilai dan warisan budaya perlu dikembangkan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar hal tersebut, pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029 Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan selaras dengan lingkungan alam dan budaya, serta memperkukuh toleransi antarumat beragama guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

B. Program Prioritas Presiden



Gambar 2. 91 Program Prioritas Presiden

Sumber: Dokumen RPJMN 2025-2029

.Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan **17 program prioritas nasional** yang mencakup berbagai aspek fundamental pembangunan. Program ini berfokus pada ketahanan pangan dan energi dengan menargetkan swasembada pangan, air, dan energi. Selain itu, reformasi politik, hukum, dan birokrasi menjadi agenda utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan narkoba. Dalam sektor ekonomi, penyempurnaan sistem penerimaan negara dilakukan untuk memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif pengentasan kemiskinan.

Pembangunan sumber daya manusia menjadi perhatian utama dengan menjamin akses layanan kesehatan yang merata, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan sains, teknologi, dan digitalisasi. Penguatan ekonomi rakyat juga dilakukan melalui dukungan terhadap UMKM, program kredit usaha, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pertumbuhan baru. Di sisi lain, hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam, termasuk sektor maritim, menjadi strategi utama dalam membuka lapangan kerja luas serta mewujudkan keadilan ekonomi yang inklusif bagi seluruh masyarakat.

Keamanan nasional dan keharmonisan sosial turut menjadi pilar penting dalam 17 program prioritas ini. Penguatan pertahanan negara serta hubungan internasional yang kondusif menjadi strategi untuk menjaga stabilitas nasional. Pemerintah juga menaruh perhatian pada perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta memastikan kebebasan beribadah dan perawatan rumah ibadah guna memperkuat persatuan bangsa. Selain itu, pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan pengembangan prestasi olahraga menjadi bagian dari agenda nasional untuk mempertahankan identitas dan daya saing Indonesia di tingkat global.

C. Program Hasil Terbaik Cepat / *Quick Wins*



Gambar 2. 92 Program Hasil Terbaik Cepat / Quick Wins
Sumber: Dokumen RPJMN 2025-2029

Pemerintah nasional menetapkan **delapan Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*)** yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara langsung dan berdampak cepat. Program ini mencakup pemberian makanan bergizi bagi anak balita, ibu hamil, serta di sekolah dan pesantren guna menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak. Selain itu, layanan kesehatan diperkuat melalui pemeriksaan gratis, penuntasan kasus TBC, dan pembangunan rumah sakit berkualitas di setiap kabupaten/kota. Di sektor pertanian, pemerintah berkomitmen mencetak serta meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui lumbung pangan desa, daerah, dan nasional untuk menjaga ketahanan pangan.

Dalam bidang pendidikan, pemerintah mendorong pembangunan sekolah unggul di setiap kabupaten/Kota serta renovasi sekolah yang membutuhkan perbaikan guna meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Program kesejahteraan sosial juga diperkuat melalui penguatan kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha guna menghapus kemiskinan absolut. Selain itu, peningkatan kesejahteraan aparatur negara menjadi perhatian utama, dengan rencana kenaikan gaji bagi ASN, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan pejabat negara sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional.

Pembangunan infrastruktur desa dan penyediaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetap menjadi prioritas, disertai dengan jaminan rumah murah bersanitasi baik bagi generasi muda dan masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk mendukung keberlanjutan ekonomi, pemerintah juga akan mendirikan Badan Penerimaan Negara guna meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 23%. Delapan Program Hasil Terbaik Cepat ini menjadi langkah strategis pemerintahan baru dalam mewujudkan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.3.3. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 – 2045

Telaah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) bertujuan untuk memastikan **linearitas dan integritas** dengan periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Hal ini dilakukan agar dokumen RPJPD memiliki kesinambungan dan keberlanjutan dalam implementasinya. Fokus utama telaah RPJPD meliputi isu strategis, visi, misi, arah kebijakan, dan **sasaran** utama yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan. Berikut adalah isu-isu strategis yang telah disusun melalui berbagai tahapan:

1. Upaya Kesehatan Preventif, Promotif, dan Pola Hidup Sehat serta Layanan Kesehatan Berkualitas
2. Inklusifitas dan Peningkatan Kualitas Pendidikan
3. Efektivitas Jaminan Sosial bagi Seluruh Lapisan Masyarakat
4. Kontribusi dan Daya Saing Seluruh Lapisan Masyarakat dalam Pembangunan
5. Masyarakat Berbudaya dan Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal
6. Infrastruktur Terintegrasi dalam Mewujudkan Pasuruan sebagai Kota Jasa dan Perdagangan
7. Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup dalam Menghadapi Ancaman Perubahan Iklim
8. Penguatan Kota sebagai Kota Jasa dan Perdagangan
9. Optimalisasi Daya Tarik Investasi
10. Kemandirian Fiskal
11. Layanan Publik Prima Berbasis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Visi Kota Pasuruan Tahun 2025-2045:

"KOTA PASURUAN MAJU, HARMONI, DAN BERKELANJUTAN"

Visi ini merupakan representasi dari cita-cita bersama masyarakat Kota Pasuruan yang menegaskan identitas dan arah pembangunan kota. Dengan visi ini, diharapkan dalam 20 tahun ke depan, Kota Pasuruan mampu mengoptimalkan potensinya sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang maju dan berdaya saing tinggi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan lima **sasaran** utama pembangunan Kota Pasuruan:

Sasaran Visi Pertama, SDM Unggul Mencapai Generasi Emas – Cita-cita besar Kota Pasuruan pada tahun 2045 Kota Pasuruan dipenuhi oleh generasi emas, generasi produktif yang tidak hanya berdasarkan usianya saja, melainkan juga produktivitas serta kontribusinya terhadap pembangunan. Representasi dari SDM terbangun dengan generasi emas ialah melalui Indeks Pembangunan Manusia. Yang mana fokus terhadap membangun manusia merujuk kepada pendidikan dan kesehatan yang menjadi pondasi utama pembangunan manusia.

Sasaran Visi Kedua, Kemiskinan Tuntas dan Ketimpangan Ditekan – Menjadikan kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama dengan target menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ekonomi, yang diukur melalui persentase kemiskinan dan indeks gini.

Sasaran Visi Ketiga, Ekonomi Progresif Pendapatan Perkapita Meningkat – Memanfaatkan posisi strategis Kota Pasuruan di antara kawasan megapolitan Malang dan Surabaya sebagai pusat perdagangan dan jasa, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita.

Sasaran Visi Keempat, Mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia – Melakukan reformasi birokrasi guna menciptakan sistem pemerintahan yang agile dan adaptif, dengan tolok ukur keberhasilan berupa indeks reformasi birokrasi.

Sasaran Visi Kelima, Infrastruktur Mantap Lingkungan Lestari – Mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan dengan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta meningkatkan upaya mitigasi terhadap ancaman perubahan iklim.

Berdasarkan uraian diatas guna memastikan visi tercapai serta sasaran visi dapat terkawal dan termonitor dengan baik dalam kurun waktu dua puluh tahun, maka berikut ditetapkan target yang dibagi berdasarkan periodesasi RPJPD Kota Pasuruan sebagai berikut:

Tabel 2. 66 Target Sasaran Visi Berdasarkan Periodesasi RPJPD Kota Pasuruan

Visi	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Target	
				Baseline 2025	Target 2045
KOTA PASURUAN MAJU, HARMONI DAN BERKELANJUTAN	SDM Unggul Mencapai Generasi Emas	Indeks Pembangunan Manusia	Skor	77,17	86,22
	Kemiskinan Tuntas dan Ketimpangan Ditekan	Tingkat Kemiskinan	%	5,99	0,45
		Indeks Gini	Skor	0,32	0,30
	Ekonomi Progresif dan Pendapatan Perkapita Meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,50	7,55
		PDRB Perkapita	Rp	55.162.150	154.483.244
	Mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia	Indeks Profesionalisme ASN	Skor	59,05	61,50
	Infrastruktur Mantap Lingkungan Lestari	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Skor	4,25	4,65
		Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO_2 eq)	%	1,00	83,71
		Indeks Kualitas Lingkungn Hidup	Indeks	62,01	63,59

Sumber: RPJPD Kota Pasuruan 2025-2045

Misi Kota Pasuruan Tahun 2025-2045:

1. Membangun SDM Berdaya Saing dan Berkarakter;
2. Masyarakat Berdaya dan Berbudaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial;
3. Akselerasi Penguatan Daya Saing Ekonomi Berlandaskan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan;
4. Birokrasi Adaptif Mewujudkan Layanan Publik Prima; dan
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Arah Kebijakan Kota Pasuruan 2025-2045

RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045, sesuai dengan konsep tersebut, dibagi menjadi empat arah kebijakan umum. Setiap arah kebijakan mencakup periode lima tahun, dengan tujuan mencapai sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD). Dengan mengikuti arah kebijakan nasional, Kota Pasuruan sebagai wilayah administratif di bawah Provinsi Jawa Timur berusaha memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

Periode Pertama (2025-2029) fokus terhadap Pemantapan Landasan Pembangunan, Fokus pembangunan Kota Pasuruan untuk periode 2025- 2029 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 adalah "Pemantapan Landasan Pembangunan". Tema ini mencerminkan komitmen kota dalam membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang berkelanjutan. Lima misi utama yang diusung dalam RPJPD ini memberikan panduan strategis yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan inklusif. Setiap misi memiliki fokus pembangunan khusus yang dirancang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan spesifik kota selama periode lima tahun ini.

Misi pertama, "Membangun SDM Berdaya Saing dan Berkarakter," menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif dan berintegritas. Fokus pembangunan pada periode 2025-2029 adalah pemenuhan layanan dasar sebagai landasan pembangunan. Ini mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum yang mendukung perkembangan individu sejak dini. Dengan layanan dasar yang memadai, diharapkan masyarakat Pasuruan dapat lebih produktif dan siap bersaing di kancah nasional maupun global.

Misi kedua, "Masyarakat Berdaya dan Berbudaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial," mengarahkan upaya pada akselerasi penanganan masalah kesejahteraan sosial. Fokus ini mencakup berbagai program pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup bagi kelompok rentan. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis budaya lokal, diharapkan masyarakat Pasuruan dapat lebih sejahtera dan berdaya, memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap pembangunan daerahnya.

Pada misi ketiga, "Akselerasi Penguatan Daya Saing Ekonomi Berlandaskan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan", fokus pembangunan adalah optimalisasi produktivitas sektor unggulan daerah. Pasuruan akan mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan bersaing, seperti industri kreatif, UMKM, Perdagangan, Jasa, dan pariwisata. Melalui

investasi infrastruktur, pelatihan, dan dukungan teknologi, diharapkan sektor-sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi keempat, "Birokrasi Adaptif Mewujudkan Layanan Publik Prima", menitikberatkan pada penataan regulasi dan kebutuhan dasar kelembagaan serta transformasi tata kelola pemerintah. Fokus pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif, transparan, dan efisien. Melalui reformasi regulasi dan peningkatan kapasitas aparatur, diharapkan layanan publik dapat lebih cepat, tepat, dan akuntabel, sehingga memberikan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Terakhir, misi kelima, "Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan", berfokus pada pembangunan infrastruktur penunjang dan dasar yang merata. Ini mencakup pengembangan jaringan transportasi, fasilitas umum, serta infrastruktur lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Dengan infrastruktur yang berkualitas dan merata, Kota Pasuruan diharapkan dapat menghadirkan lingkungan yang layak huni, mendukung aktivitas ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dengan menjalankan rangkaian fokus pada periode pertama ini, diharapkan Kota Pasuruan dapat membangun fondasi yang kuat dan berkelanjutan untuk mencapai cita-cita pembangunan jangka panjangnya.

1) Misi 1 Membangun SDM Berdaya Saing dan Berkarakter dengan fokus pembangunan 2025-2029 ialah : **Pemenuhan layanan dasar sebagai landasan pembangunan**;

2) Misi 2 Masyarakat Berdaya dan Berbudaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dengan fokus pembangunan 2025-2029 ialah : **Akselerasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial**

3) Misi 3 Akselerasi Penguatan Daya Saing Ekonomi Berlandaskan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan 2025-2029 ialah : **Optimalisasi Produktivitas Sektor Unggulan Daerah**

4) Misi 4 Transformasi Birokrasi Adaptif Mewujudkan Layanan Publik Prima dengan fokus pembangunan 2025-2029 ialah : **Penataan regulasi dan kebutuhan dasar kelembagaan serta transformasi tata kelola pemerintah**

5) Misi 5 Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berwawasan lingkungan dengan fokus pembangunan 2025-2029 ialah : **pembangunan infrastruktur penunjang dan dasar yang merata.**

2.3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan

Kota Pasuruan telah memiliki Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2021–2041. Akan tetapi perkembangan daerah yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas pemanfaatan ruang, yang banyak menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsional ruang wilayah sekaligus ketidakteraturan ruang wilayah. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam (faktor internal) maupun yang berasal dari luar wilayah (faktor eksternal). Peraturan terkait penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang memberikan peluang dilakukannya peninjauan kembali peraturan tata ruang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Tujuan dari kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pasuruan adalah untuk menyesuaikan perencanaan tata ruang dengan perkembangan terkini dan dinamika pembangunan, serta untuk memastikan bahwa rencana tersebut tetap relevan dan efektif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan perencanaan pembangunan yang terdapat dalam dokumen **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)** dan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** sehingga berjalan linear dan selaras terhadap perencanaan tata ruang wilayah**;** menyiapkan acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kota; menyiapkan acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota; menyiapkan acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta; menyiapkan materi RTRW sehingga dapat digunakan untuk penyusunan rencana rinci tata ruang (RDTR) kota Pasuruan; menyiapkan pedoman bagi pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, dan menyiapkan acuan dalam administrasi pertanahan.

Penataan ruang wilayah Kota bertujuan mewujudkan Kota sebagai pusat pariwisata yang didukung oleh industri dan perdagangan dan jasa yang bertaraf nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, berdaya saing dan berkearifan lokal. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kota maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut:

a) pengembangan sistem pusat pelayanan yang berjenjang dalam mendukung sistem pelayanan kota;
b) pengembangan dan peningkatan pelayanan prasarana wilayah kota secara terpadu dan berkelanjutan;
c) pengembangan pariwisata untuk mewujudkan kota transit yang didukung pemanfaatan kawasan pesisir, kota lama, dan wisata kota;
d) pengembangan fungsi kawasan peruntukan industri baru secara lengkap dengan tetap mendorong perkembangan industri yang sudah ada secara terpadu;
e) pengembangan perdagangan jasa secara terdistribusi dengan membentuk pusat perdagangan baru serta peningkatan perdagangan yang sudah ada;
f) pengembangan kawasan baru sebagai kawasan strategis pada bagian utara kota;
g) penyediaan RTH dalam menunjang pembangunan kota secara berkelanjutan; dan
h) Pengembangan kota mendukung kearifan lokal dan budaya masyarakatnya.

Struktur ruang merupakan rencana susunan pusat-pusat pelayanan (rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota dan mengintegrasikan wilayah kota. Sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kawasan baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Dalam RTRW terdapat Rencana pusat-pusat pelayanan wilayah kota yang diartikan sebagai kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Dalam sistem pusat pelayanan terdapat beberapa pembagian antara lain Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Sub pusat Pelayanan Kota (SPK) berikut gambaran pela sistem pusat pelayanan di Kota Pasuruan:

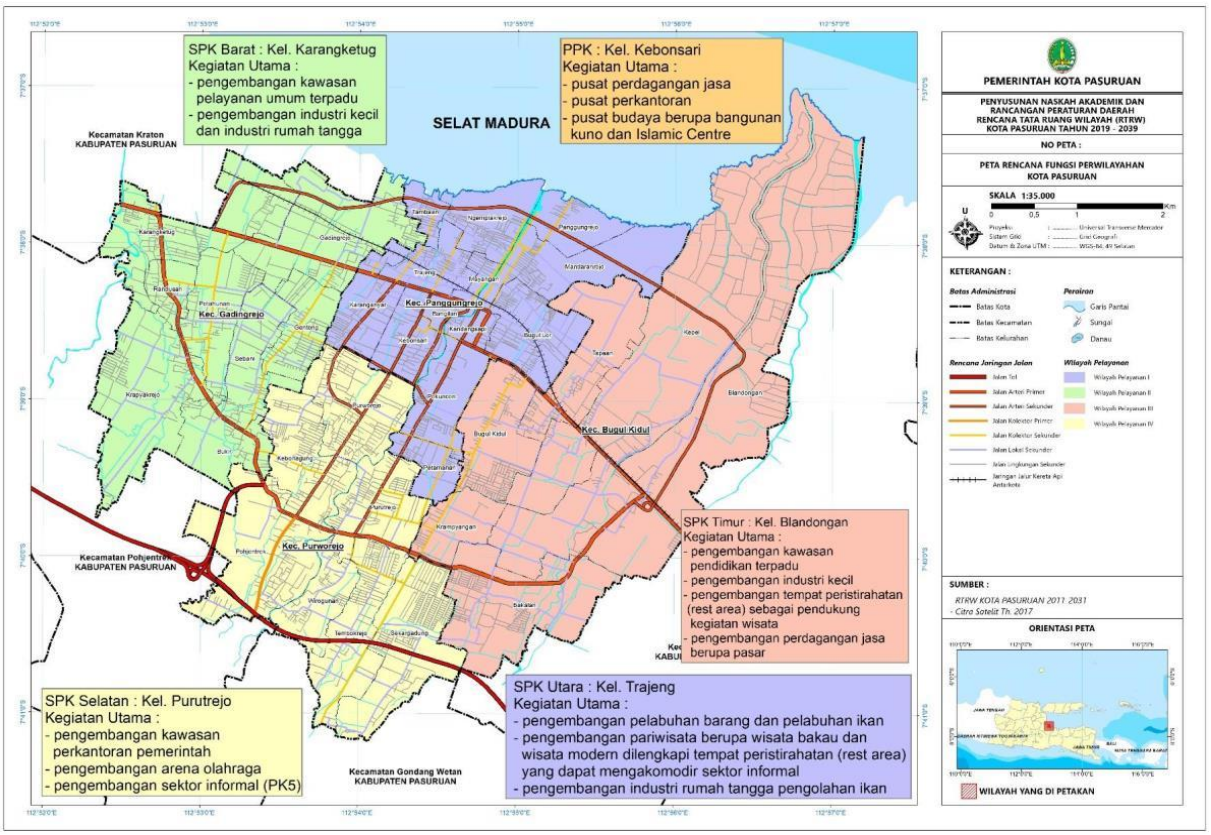

Gambar 2. 93 Peta Sistem Pusat Pelayanan Kota Pasuruan
Sumber: RTRW Kota Pasuruan Tahun 2021-2041

Kota Pasuruan memiliki 1 PPK dan 4 SPK dimana PPK terletak di Kelurahan Kebonsari sebagai pusat perdagangan jasa, pusat perkantoran, pusat budaya berupa bangunan kuno dan islamic centre. SPK Timur terletak di Kelurahan Blandongan dimana menjadi pusat pengembangan kawasan pendidikan terpadu, pengembangan industri kecil, pengembangan tempat peristirahatan (*rest area*) pendukung kegiatan wisata dan sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa berupa pasar. Pada sisi utara terdapat SPK Kelurahan Trajeng dimana wilayah ini ditujukan sebagai pusat pengembangan pelabuhan barang dan pelabuhan ikan, pengembangan pariwisata berupa wisata bakau dan wisata modern dilengkapi tempat peristirahatan (rest area) yang dapat mengakomodir sektor informal dan pengembangan industri rumah tangga pengelolaan ikan. Pada wilayah selatan terdapat SPK Kelurahan Purutrejo dimana wilayah ini berfokus sebagai wilayah pengembangan kawasan perkantoran pemerintah, pengembangan arena olahraga dan pengembangan sektor informal (PK5). Sedangkan pada sisi barat terdapat SPK Kelurahan Karangketug yang memiliki kegiatan utama sebagai pengembangan kawasan pelayanan umum terpadu dan kawasan pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga.

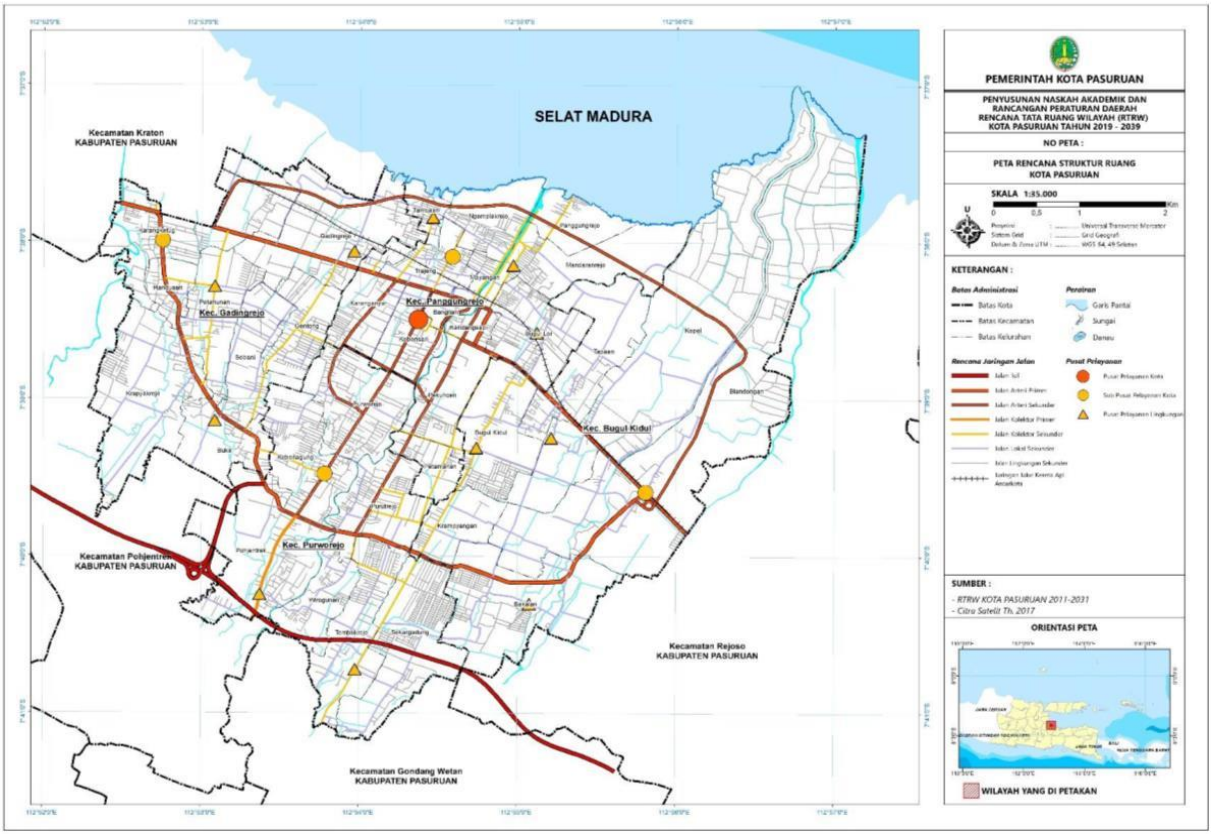

Gambar 2. 94 Peta Struktur Ruang Kota Pasuruan

Sumber: RTRW Kota Pasuruan Tahun 2021-2041

Peta diatas menggambarkan Peta Struktur Ruang Kota Pasuruan dimana beberapa penjelasan ringkas mengenai peta struktur ruang adalah sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Kota: Pusat Pelayanan Kota Pasuruan terletak di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo, dengan kegiatan utama Pusat Pelayanan Kota (PPK) Pasuruan, antara lain:
   a. Pusat pemerintahan skala kota;
   b. Pusat perdagangan jasa skala kota;
   c. Pusat peribadatan skala kota;
   d. Pusat wisata kota; dan
   e. Pusat kawasan pendidikan keagamaan.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Utara : Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) bagian Utara Kota Pasuruan adalah Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo yang melayani 7 kelurahan yaitu :
   a. Kelurahan Tamba'an;

b. Kelurahan Mandaranrejo;
c. Kelurahan Panggungrejo;
d. Kelurahan Bugul lor;
e. Kelurahan Tapa'an;
f. Kelurahan Mayangan; dan
g. Kelurahan Ngemplakrejo.

Adapun kegiatan utama Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) bagian Utara, antara lain:

a) Pusat perdagangan dan jasa skala kota;
b) Pusat wisata kota; dan
c) Pusat industri pengolahan

3. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Barat: Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) bagian Barat Kota Pasuruan adalah Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo yang melayani 8 kelurahan yaitu:
   a. Kelurahan Gadingrejo;
   b. Kelurahan Karangketug;
   c. Kelurahan Randusari;
   d. Kelurahan Petahunan;
   e. Kelurahan Sebani;
   f. Kelurahan Gentong;
   g. Kelurahan Krapyakrejo;dan
   h. Kelurahan Bukir.

   Adapun kegiatan utama pada Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) bagian Barat, antara lain:

   a. Pusat perdagangan dan jasa skala sub kota;
   b. Pusat industri;
   c. Pusat peribadatan;
   d. Pusat transportasi skala kota;dan
   e. Pusat kesehatan

4. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Timur : Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) bagian Timur Kota Pasuruan adalah Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul yang

melayani 5 kelurahan yaitu :

a. Kelurahan Kepel;
b. Kelurahan Bugul Kidul;
c. Kelurahan Krampyangan;
d. Kelurahan Bakalan;dan
e. Kelurahan Blandongan.

Adapun kegiatan utama pada Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) bagian Timur, antara lain:

a. Pusat perdagangan dan jasa skala kota;
b. Pusat wisata;
c. Pusat pendidikan;
d. Pusat perkantoran skala kota;dan
e. Pusat transportasi regional.

5. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Selatan: Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) bagian Selatan Kota Pasuruan adalah Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo yang melayani 6 kelurahan yaitu:

a. Kelurahan Sekargadung;
b. Kelurahan Kebonagung;
c. Kelurahan Pohjentrek;
d. Kelurahan Purutrejo;
e. Kelurahan Wirogunan;
f. Kelurahan Tembokrejo.

Adapun kegiatan utama pada Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) bagian Selatan, antara lain:

a. Pusat perdagangan dan jasa skala kota; dan
b. Pusat pendidikan skala regional.

2. Terkait dengan PPL dan beberapa poin yang lebih mendetail bisa dilihat pada peta struktur ruang maupun dokumen RTRW Kota Pasuruan 2021-2041.

Selanjutnya dalam RTRW Kota Pasuruan juga terdapat Rencana Pola Ruang yakni rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk

fungsi lindung dan fungsi budi daya kota. Dalam Rencana pola ruang terdapat penjelasan mengenai Kawasan Utama yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya selain itu juga terdapat kawasan bertampalan. Kawasan lindung kota adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. Kawasan peruntukan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Sedangkan Bertampalan atau Kawasan rawan bencana yang terdapat di Kota Pasuruan meliputi kawasan rawan bencana banjir dan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Berikut peta Rencana Pola Ruang Kota Pasuruan 2021-2041:

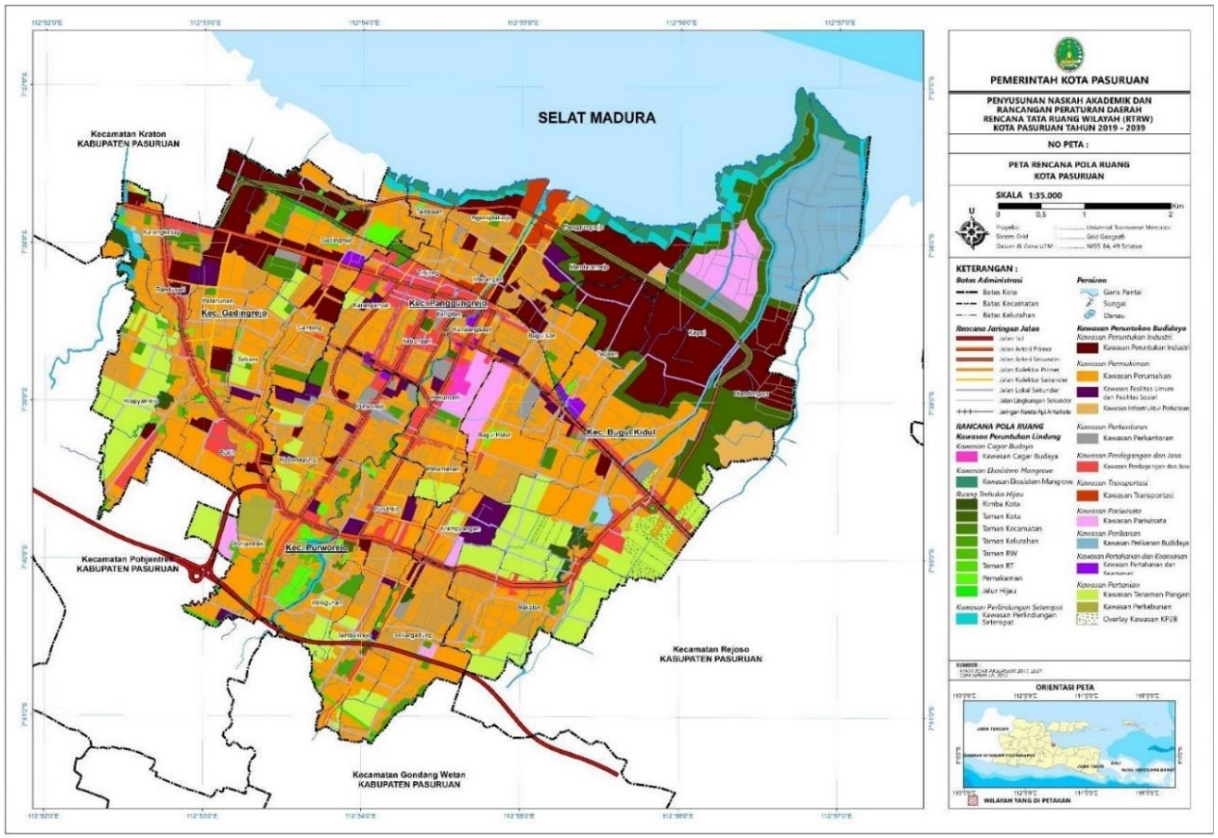

Gambar 2. 95 Rencana Pola Ruang Kota Pasuruan

Sumber: RTRW Kota Pasuruan Tahun 2021-2041

Adapun penjelasan secara ringkas mengenai peta tersebut dapat dilihat pada tabel kawasan utama dan kawasan bertampalan di Kota Pasuruan sebagai berikut:

Tabel 2. 67 Kawasan Utama Dan Kawasan Bertampalan Di Kota Pasuruan

No	Kawasan	Orde 1	Orde 2
A	**Kawasan Utama**		
1	Kawasan Lindung	1) Kawasan Perlindungan Setempat	-
		2) Ruang Terbuka Hijau	a) Rimba Kota
			b) Taman Kota
			c) Taman Kecamatan
			d) Taman Kelurahan
			e) Taman RW
			f) Taman RT
			g) Pemakaman
			h) Jalur Hijau
		3) Kawasan Cagar Budaya	-
		4) Kawasan Ekosistem Mangrove	-
2	Kawasan Budidaya	1) Badan Jalan	-
		2) Kawasan Pertanian	a) Kawasan Tanaman Pangan
			b) Kawasan Perkebunan
		3) Kawasan Perikanan	c) Kawasan Perikanan Tangkap
			d) Kawasan Perikanan Budidaya
		4) Kawasan Peruntukkan Industri	-
		5) Kawasan Pariwisata	-
		6) Kawasan Permukiman	a) Kawasan Perumahan
			b) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
			c) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau
			d) Tempat evakuasi bencana
			e) Kawasan infrastruktur perkotaan
			f) Kawasan Sumber Daya Air
		7) Kawasan Perdagangan dan Jasa	-
		8) Kawasan Perkantoran	-
		9) Kawasan transportasi	-
		10) Kawasan Pertahanan dan Keamanan	-
B	**Kawasan Bertampalan**		
		1) Kawasan Sempadan	-
		2) Kawasan Cagar Budaya	
		3) Kawasan Rawan Bencana	a) Kawasan Rawan b) Bencana Banjir c) Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim d) Kawasan Rawan Bencana Likuefaksi
		4) KP2B	-

Sumber: Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021

Rencana Tata Ruang Wilayah juga mengatur mengenai penetapan kawasan strategis kota sebagai bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Penentuan kawasan strategis kota lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kota akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis. Adapun arahan terhadap kawasan strategis Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Baru, meliputi:
   a. Kawasan peruntukkan industri baru dikembangkan dengan menggunakan akses

Jalan Lingkar Utara yang terhubung dengan pelabuhan dan jalan arteri primer;

b. Pengembangan kawasan peruntukan industri baru dilengkapi dengan sarana prasarana industri termasuk perumahan, sarana pelayanan umum dan ruang terbuka hijau;

c. Pengembangan kawasan peruntukan industri baru ditunjang dengan pengelolaan limbah secara mandiri; dan

d. Pengembangan kawasan peruntukan industri baru dikelilingin oleh jalur hijau.

2) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Logam, meliputi:

a. kawasan peruntukkan industri logam pada sentra-sentra industri yang telah ada;

b. kawasan peruntukkan industri logam dikembangkan menyatu dengan permukiman sehingga diperlukan penataan kawasan;

c. kawasan peruntukkan industri logam dilengkapi dengan pengelolaan limbah komunal; dan

d. perlu penyediaan ruang terbuka hijau yang menyatu dengan perumahan sebagai sentra industri logam

3) Pengembangan Kawasan Komplek Kota Lama, meliputi:

a. Penetapan kawasan komplek kota lama sebagai kawasan konservasi yang memiliki nilai sebagai kota pusaka;

b. Mengkonservasi dan memelihara bangunan yang termasuk sebagai bangunan cagar budaya;

c. Pengembangan atau pembangunan baru harus menyesuaikan dengan tipe bangunan bersejarah yang berdekatan;

d. Menjadikan kawasan kota lama sebagai bagian dari wisata kota; dan

e. Pengembangan kota lama dilengkapi dengan kuliner center.

4) Pengembangan Kawasan Religi, meliputi:

a. Menjadi komplek kawasan religi sebagai kawasan konservasi;

b. Didukung oleh prasarana pendukung berupa area parkir dan transportasi lokal;

c. Ditunjang oleh jalur pejalan kaki maupun pengguna becak wisata antara parkir wisata dan kompleks wisata religi; dan

d. Ditunjang oleh perdagangan jasa dan souvenir shop.

Untuk mengetahui lebih jelas kawasan strategis dapat dilihat melalui dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan 2021-2042 atau peta kawasan strategis berikut:

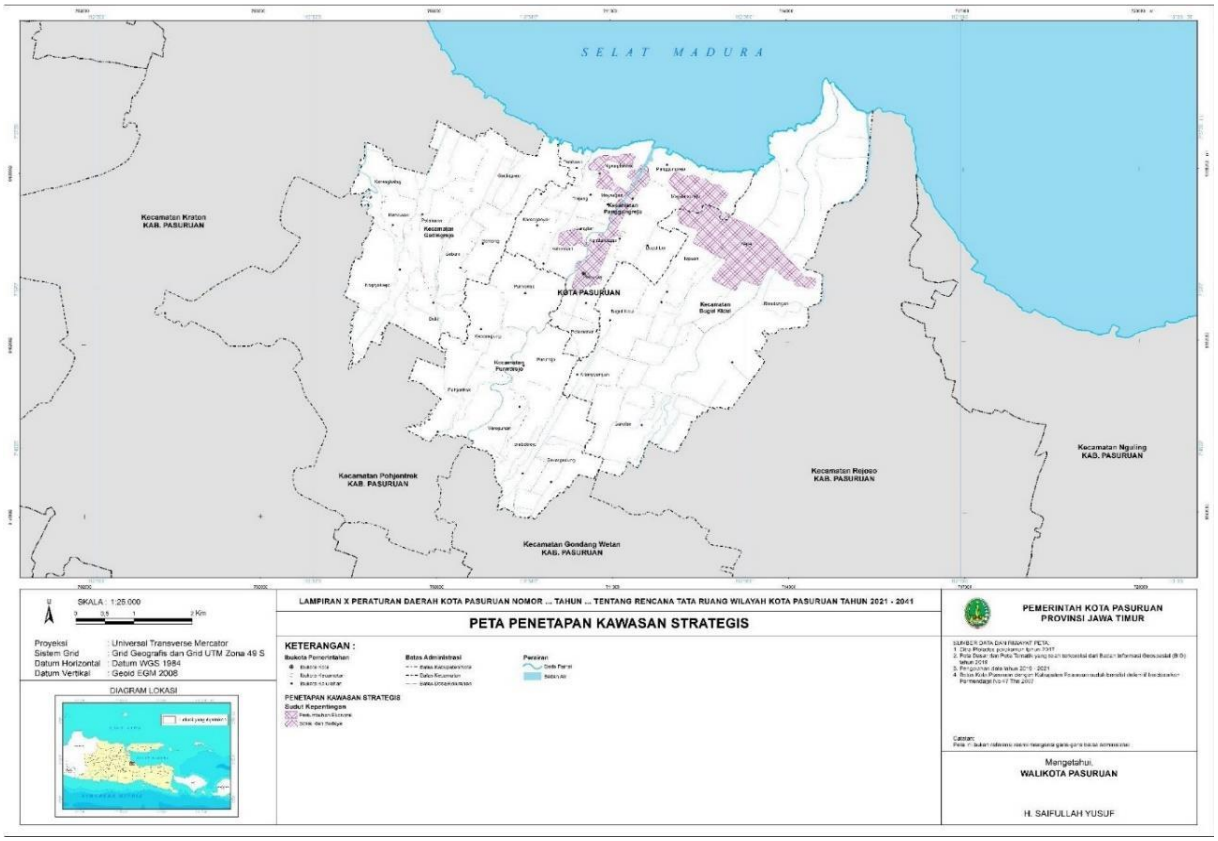

Gambar 2. 96 Kawasan Utama Dan Kawasan Bertampalan Di Kota Pasuruan
Sumber: RTRW Kota Pasuruan Tahun 2021-2041

2.3.5. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) diartikan sebagai Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi Pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam Pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan Rencana dan/atau Program. KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional dan RPJM Daerah.
2. Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak

dan/atau resiko Lingkungan Hidup.

Pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan RPJMD, pada pasal 23 menjelaskan bahwa pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pelaksanaan KLHS perubahan RPJMD dan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Oleh karenanya dalam dokumen RPJMD Teknokratik Kota Pasuruan 2025-2029 perlu memperhatikan poin-poin yang terdapat dalam dokumen KLHS RPJMD Kota Pasuruan. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang mencakup Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17, penyusunan RPJMD juga harus selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, strategi, dan program daerah berkontribusi terhadap pencapaian target-target TPB/SDGs, baik pada tingkat nasional maupun daerah, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan lingkungan secara berimbang. Berdasarkan hasil identifikasi indikator capaian indikator TPB Kota Pasuruan dapat disimpulkan bahwa, total indikator TPB yang digunakan oleh Kota Pasuruan berjumlah 201 indikator. Berdasarkan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sesuai dengan kewenangannya, indikator yang sesuai dengan tingkat Kota berjumlah 222 Indikator. Kriteria atau kategori capaian indikator TPB diklasifikasikan ke dalam 4 kriteria sebagai berikut:

1. Kategori SS dimana Indikator TPB SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target
2. Kategori SB dimana Indikator TPB SUDAH dilaksanakan namun BELUM mencapai target
3. Kategori BB dimana Indikator TPB BELUM dilaksanakan namun BELUM mencapai target
4. Kategori TAD dimana Indikator TPB BELUM ADA DATA
5. Kategori BKD bukan Kewenangan daerah

Tabel 2. 68 Capaian TPB KLHS Kota Pasuruan

PILAR	TPB	Kategori Tiap Indikator				
		SS	SB	BB	TAD	BKD
PILAR SOSIAL	TPB 1	17	5	0	3	**0**
	TPB 2	4	5	0	2	**0**

PILAR	TPB	Kategori Tiap Indikator				
		SS	SB	BB	TAD	BKD
	TPB 3	24	4	0	2	**4**
	TPB 4	8	3	0	2	**0**
	TPB 5	7	5	0	2	**0**
	TOTAL	**60**	**22**	**0**	**11**	**4**
	Persentase	**64.52%**	**23.66%**	**0.00%**	**11.83%**	
PILAR LINGKUNGAN	TPB 6	11	3	0	3	**1**
	TPB 11	7	1	1	0	**3**
	TPB 12	1	1	0	3	**0**
	TPB 13	2	0	0	0	**0**
	TPB 15	1	2	1	0	**0**
	TOTAL	**22**	**7**	**2**	**6**	**4**
	Persentase	**59.46%**	**18.92%**	**5.41%**	**16.22%**	
PILAR EKONOMI	TPB 8	12	3	0	3	**1**
	TPB 9	6	1	0	2	**4**
	TPB 10	5	3	0	0	**3**
	TPB 17	9	4	1	1	**0**
	TOTAL	**32**	**11**	**1**	**6**	**8**
	Persentase	**64.00%**	**22.00%**	**2.00%**	**12.00%**	
PILAR HUKUM	TPB 16	10	7	0	4	**0**
	TOTAL	**10**	**7**	**0**	**4**	**0**
	Persentase	**47.62%**	**33.33%**	**0.00%**	**19.05%**	
TOTAL PER KATEGORI		**124**	**47**	**3**	**27**	**16**
(Persentase Kategori Indikator TPB Kota Pasuruan 201)		**61.69%**	**23.38%**	**1.49%**	**13.43%**	
(Persentase Kategori Indikator TPB Kewenangan Kota 222)		**57.14%**	**21.66%**	**1.38%**	**12.44%**	**7.37%**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

Dari keseluruhan indikator, sejumlah 124 indikator (61,70%) merupakan kategori SS, sebanyak 47 indikator (23,38%) merupakan kategori SB, sebanyak 3 indikator (1,49%) merupakan kategori BB, dan sebanyak 27 indikator (13,43%) merupakan kategori TAD. Sedangkan untuk indikator yang bukan kewenangan Kota Pasuruan berjumlah 16 indikator atau sebesar 7,37% dari total indikator kewenangan kota (222 indikator). Berdasarkan capaian tersebut, dilakukan identifikasi permasalahan di pada isu nasional dan global, isu strategis pembangunan provinsi Jawa Timur, Isu PB dari dokumen perencanaan dan media massa. Isu TPB yang belum tercapai, serta dari isu penjaringan pada konsultasi publik. Dari seluruh rangkaian dan tahapan penyusunan KLHS RPJMD Kota Pasuruan tersebut diperoleh rumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Pasuruan sebagai berikut:

Tabel 2. 69 Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis Kota Pasuruan

Urutan	Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis
1	Potensi bencana hidrometeorologi yang memicu kerusakan lingkungan
2	Penguatan upaya persediaan kebutuhan dan ketahanan pangan
3	Optimalisasi pengelolaan persampahan serta pemerataan akses air bersih dan sanitasi layak/aman
4	Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar perkotaan sesuai peruntukan sebagai penunjang perekonomian dan masyarakat yang berkelanjutan
5	Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah
6	Pengentasan permasalahan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan serta kebutuhan dan kualitas SDM yang unggul
7	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan tata kelola pemerintah dan layanan publik yang bermutu

Sumber: Hasil Analisis,2025

2.3.6. Isu Strategis

1. Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Belum Merata

Kualitas pendidikan dan kesehatan di Kota Pasuruan masih menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) dibandingkan target jangka panjang. Faktor yang menyebabkan masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu ibu hamil belum sepenuhnya memahami akan pentingnya perawatan prenatal dan postnatal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan edukasi kesehatan yang lebih intensif bagi masyarakat.

Kualitas pendidikan di Kota Pasuruan masih menghadapi berbagai tantangan salah satunya belum meratanya kualitas sekolah di Kota Pasuruan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan wajib belajar 13 tahun. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan identifikasi terhadap Anak Putus Sekolah (ATS) agar mereka dapat bersekolah kembali.

2. Pengembangan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Strategis

Pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi strategis di Kota Pasuruan masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu isu utama adalah keterbatasan infrastruktur transportasi serta sarana transportasi publik yang menghubungkan pusat-pusat pemerintahan dan perekonomian dengan lokasi hunian masyarakat. Jalan-jalan utama yang ada membutuhkan penanganan intens untuk mempertahankan kemantapan jalan, sehingga tidak menghambat arus barang dan meningkatkan biaya logistik bagi pelaku usaha. Selain itu, akses transportasi publik yang belum optimal juga menyulitkan pekerja untuk mencapai tempat kerja dengan mudah dan efisien. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, pemerintah Kota Pasuruan perlu berinvestasi lebih besar dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi, serta meningkatkan kualitas dan jangkauan transportasi publik. Di era digital ini, akses yang memadai terhadap internet dan teknologi informasi adalah kunci untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Keberadaan akses internet vital bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk memanfaatkan teknologi dalam operasional dan pemasaran mereka. Dengan pengembangan infrastruktur yang

holistik dan strategis, Kota Pasuruan dapat meningkatkan daya saing ekonominya dan menarik lebih banyak investasi.

3. Penataan Kota sesuai Peruntukan dan Berkelanjutan

Salah satu isu utama adalah kurangnya perencanaan tata ruang yang komprehensif dan terpadu. Akibatnya, pembangunan sering kali tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan munculnya masalah seperti pemukiman liar, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau perumahan, dan terbatasnya ruang terbuka hijau. Kondisi ini tidak hanya mengganggu estetika kota tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan dan kualitas hidup warga. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perencanaan tata ruang yang lebih baik, pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran peruntukan lahan, serta partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengelolaan kota.

Selain itu, isu keberlanjutan juga menjadi tantangan dalam penataan kota Pasuruan. Pembangunan yang pesat sering kali mengabaikan aspek lingkungan, seperti pengelolaan limbah, pencemaran air dan udara. Banyak proyek pembangunan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan jangka panjang, sehingga menciptakan masalah yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan penataan kota yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kebijakan dan proyek pembangunan.

4. Peningkatan Investasi yang efektif dengan penyerapan tenaga kerja

Peningkatan investasi yang efektif di Kota Pasuruan dapat menjadi pendorong utama bagi penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu isu yang perlu diperhatikan adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah kota perlu fokus pada pembangunan infrastruktur ini dan memastikan bahwa fasilitas yang ada dapat mendukung kebutuhan bisnis. Dengan iklim investasi yang baik dan infrastruktur yang memadai, lebih banyak perusahaan akan tertarik untuk berinvestasi, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk lokal. peningkatan investasi harus diimbangi dengan program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja lokal untuk memastikan bahwa mereka siap mengisi posisi posisi baru yang

tercipta. Pemerintah kota dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri.

5. Peningkatan PAD

Pemerintah Kota Pasuruan perlu melakukan pemetaan potensi pajak yang lebih akurat dan memperkuat sistem pemungutan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi. Digitalisasi sistem perpajakan dapat membantu meminimalkan kebocoran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, perluasan basis pajak dengan mengidentifikasi dan mengelola objek-objek pajak baru seperti properti komersial dan industri yang belum terdaftar juga dapat meningkatkan PAD. Kebijakan insentif dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dapat mendorong mereka untuk lebih berkontribusi terhadap PAD melalui pembayaran retribusi dan pajak daerah.

Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan daerah juga menjadi kunci penting dalam meningkatkan PAD. Pemerintah Kota Pasuruan dapat mengembangkan sektor pariwisata dengan mengoptimalkan potensi wisata lokal, seperti situs sejarah dan budaya. Investasi dalam infrastruktur pariwisata dan promosi yang efektif dapat menarik lebih banyak wisatawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan dari pajak hotel, restoran, dan objek wisata. Selain pariwisata, pengembangan sektor ekonomi kreatif juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Dukungan bagi industri kreatif seperti kerajinan, kuliner, dan seni budaya dapat meningkatkan daya tarik kota dan membuka peluang ekonomi baru.

6. Layanan Publik Berbasis Digital

Layanan publik berbasis digital di Kota Pasuruan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan mengimplementasikan teknologi informasi dalam berbagai aspek pelayanan publik, pemerintah kota dapat mempermudah proses administrasi, mengurangi birokrasi yang berbelit, dan mempercepat waktu pelayanan. Selain itu, penerapan layanan publik berbasis digital juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan kota. Melalui platform digital, warga dapat lebih mudah

memberikan masukan, mengajukan keluhan, dan mengikuti perkembangan proyek-proyek pemerintah. *E-governance* ini membuka ruang dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat, mendorong transparansi dan responsivitas.

7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah

Salah satu langkah penting adalah memperkuat program pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan. Pemerintah kota dapat mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah berbasis pemilahan, pengurangan, dan daur ulang (*reduce, reuse, recycle* - 3R) untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Selain itu, penyediaan infrastruktur yang memadai seperti tempat pengolahan sampah terpadu dan pusat daur ulang sangat penting. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik juga harus ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, Kota Pasuruan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Selain pengelolaan sampah, peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Pasuruan juga harus fokus pada pelestarian alam dan mitigasi perubahan iklim. Pelestarian alam diarahkan pada peningkatan kualitas lahan dan penanganan pencemaran Air. Dengan integrasi kebijakan lingkungan yang kuat dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, Kota Pasuruan dapat meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana alam dan perubahan iklim, sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

8. Penurunan Kemiskinan Perkotaan

Angka kemiskinan Kota Pasuruan belum konsisten menurun, sehingga perlu adanya peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan. Program-program pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja akan memberikan peluang yang lebih besar bagi penduduk miskin untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah kota dapat mengembangkan program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi warga, terutama bagi mereka yang berada di sektor informal, untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menciptakan peluang

usaha mandiri. Dengan demikian, mereka tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi terhadap ekonomi lokal secara keseluruhan.

Selain peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, pengembangan infrastruktur dasar dan layanan sosial juga sangat penting untuk menurunkan kemiskinan perkotaan di Pasuruan. Penyediaan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, perumahan layak, serta akses air bersih dan sanitasi yang memadai, merupakan faktor-faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Program bantuan sosial yang tepat sasaran, seperti bantuan tunai langsung dan subsidi pangan, juga perlu terus diperkuat untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di samping itu, peningkatan akses terhadap kredit mikro dan dukungan bagi UMKM juga dapat memberikan dorongan bagi pengembangan ekonomi masyarakat miskin. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, penurunan kemiskinan perkotaan di Pasuruan dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 70 Linearitas Isu Strategis

Permasalahan/Potensi	Isu KLHS	Isu Lingkungan dinamis		Isu Kota Pasuruan
		Isu Nasional	Isu Regional	
- Persentase sampah yang diolah di TPA dari tahun 2022 terus menurun, hal tersebut menunjukkan kinerja pengolahan sampah skala lingkungan telah berjalan baik. Kinerja tersebut perlu diiringi dengan upaya pemerintah dalam menyediakan teknologi dan kebijakan yang efektif dalam mengelola sampah di TPA - IKLH dalam empat tahun terakhir cenderung memiliki skor yang rendah walaupun memiliki tren yang meningkat.	Potensi bencana hidrometeorologi serta penurunan kualitas lingkungan hidup Optimalisasi pengelolaan persampahan serta pemerataan akses air bersih dan sanitasi layak/aman	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah
- Secara umum Kota Pasuruan memiliki capaian yang baik dalam hal persentase kemiskinan. Meskipun persentase kemiskinan Kota Pasuruan cenderung dinamis dan fluktuatif namun angkanya selalu berada di bawah rata-rata skor provinsi dan nasional - Meskipun memiliki	Pengentasan permasalahan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan serta kebutuhan dan kualitas SDM yang unggul	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan	Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk	Penurunan Kemiskinan Perkotaan

Permasalahan/Potensi	Isu KLHS	Isu Lingkungan dinamis		Isu Kota Pasuruan
		Isu Nasional	Isu Regional	
persentase kemiskinan yang cenderung aman yakni dibawah rata-rata skor provinsi dan nasional namun jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan provinsi perlu menjadi perhatian karena angkanya yang sangat fluktuatif. - Pada tahun 2025 dan seterusnya jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan dikhawatirkan akan mengalami kenaikan jika melihat pola selama lima tahun terakhir. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus. - Pada tahun 2025 dan seterusnya indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan dikhawatirkan akan mengalami kenaikan jika melihat pola selama lima tahun terakhir. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus. - Dari tahun ke tahun persentase realisasi PPKS yang memperoleh bantuan sosial terus meningkat bahkan hingga mencapai 100%. Hal ini patut diapresiasi, berkaitan dengan wujud komitmen pemerintah Kota Pasuruan dalam memperhatikan masyarakatnya yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. - Namun, perlu diingat bahwa jumlah PPKS yang diberikan bantuan angkanya sangat fluktuatif setiap tahun, puncaknya berada pada 2020 dan 2022. Hal ini menandakan jumlah PPKS di Kota Pasuruan yang masih perlu diperhatikan - Organisasi kepemudaan yang menunjukkan pertumbuhan positif perlu diarahkan untuk penyelesaian permasalahan pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi,		Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan.	

Permasalahan/Potensi	Isu KLHS	Isu Lingkungan dinamis		Isu Kota Pasuruan
		Isu Nasional	Isu Regional	
kesenjangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.				
- Keterbatasan kemampuan daerah dalam pemenuhan pangan daerah	Penguatan upaya persediaan kebutuhan dan ketahanan pangan	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani	
Perkembangan Jaringan Jalan dalam kondisi baik menurun dalam 5 tahun terakhir	Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar perkotaan sesuai peruntukan sebagai penunjang perekonomian dan masyarakat yang berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Pengembangan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Strategis
- Terdapat beberapa capaian yang dapat diapresiasi seperti proporsi panjang jaringan jalan dengan kondisi baik yang terus meningkat di setiap tahunnya, hal ini diimbangi dengan menurunnya persentase permukiman rawan banjir yang ada di Kota Pasuruan. - Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik perlu menjadi perhatian karena angkanya yang cenderung menurun - Begitu pula dengan panjang jaringan irigasi primer yang memiliki tren cenderung turun dan konstan.		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		Penataan Kota sesuai Peruntukan dan Berkelanjutan

Permasalahan/Potensi	Isu KLHS	Isu Lingkungan dinamis		Isu Kota Pasuruan
		Isu Nasional	Isu Regional	
		Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		
Perkembangan investasi di Kota Pasuruan patut diapresiasi mengingat nilainya yang terus meningkat di setiap tahun. Namun perlu diingat bahwa nilai investasi dalam lima tahun terakhir masih lebih rendah dibanding nilai investasi pada tahun 2019 yang mencapai 467M. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Pasuruan untuk meningkatkan nilai investasi.		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		Peningkatan Investasi yang efektif dengan penyerapan tenaga kerja
- Perkembangan Teknologi dan informatika yang semakin cepat - Tuntutan layanan yang leih efektif dan efisien	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan tata kelola pemerintah dan layanan publik yang bermutu	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		Layanan Publik Berbasis Digital
- Pertumbuhan PAD perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Pasuruan. Dalam periode lima tahun terdapat tiga tahun pertumbuhan PAD mencapai minus yakni pada 2020, 2021 dan 2024. - Begitu pula dengan pertumbuhan PAD yang angkanya cenderung rendah dan naik turun. Hal ini perlu diperhatikan mengingat rasio PAD merupakan gambaran tingkat kemandirian suatu daerah. - Pemerintah perlu memperhatikan sumber pemasukan seperti pajak dan lain lain untuk dapat meningkatkan pertumbuhan serta rasio PAD.	Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah		Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Kemandirian Keuangan Daerah
- Indeks Pendidikan, rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kota Pasuruan berhasil meningkat di setiap tahunnya, capaian ini tentu		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi,	Pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan,	Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Belum Merata

Permasalahan/Potensi	Isu KLHS	Isu Lingkungan dinamis		Isu Kota Pasuruan
		Isu Nasional	Isu Regional	
perlu diapresiasi. - Beberapa hal perlu diperhatikan seperti angka partisipasi pendidikan dasar yang menurun cukup jauh di 2024. - Begitu pulan dengan APS SD/MI – SMP/MTs yang cenderung menurun dan selaras dengan penurunan rasio ketersediaan sekolah, sehingga pemerintah Kota Pasuruan perlu lebih memperhatikan ketersediaan fasilitas sekolah - Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. - Jumlah posyandu utama dan mandiri terus bertambah kuantitasnya setiap tahun. Hal tersebut merupakan prestasi yang baik, namun perlu diingat bahwa peningkatan jumlah posyandu perlu disesuaikan dengan jumlah balita yang ada. Karena rasio jumlah balita dan posyandu turun angkanya pada tahun 2024 - Jumlah tenaga medis yang terus meningkat serta kepuasan layanan masyarakat terhadap puskesmas memiliki capaian yang sangat bagus dan cenderung meningkat. - Pemerintah Kota Pasuruan perlu memperhatikan masyarakat yang menderita penyakit menular dan tidak menular seperti DBD, HIV/AIDS karena angka penderitanya yang terus meningkat di setiap tahun - Penanganan penyakit TBC BTA (+) juga menjadi tugas penting bagi Pemerintah Kota Pasuruan mengingat persentase penanganannya yang cenderung turun tahun ke tahun.		Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas.	

BAB III
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025 - 2029 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tanggal 27 November 2024, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode tahun 2025-2029, yang akan menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Pasuruan sesuai misi yang diemban. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam menjabarkan visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Dan sebagaimana diatur ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota terpilih, maka RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, mengacu pula pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045.

RPJMD Kota Pasuruan periode tahun 2025 - 2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 - 2045 yaitu Pemantapan Landasan Pembangunan, Pada tahapan periode pertama RPJPD Kota Pasuruan (2025-2029), terdapat fokus yang ditekankan untuk memantapkan landasan pondasi pembangunan. Rincian fokus pada periode ini mencakup pemenuhan layanan dasar, penguatan modal sosial, pembangunan infrastruktur penunjang dan dasar yang merata, serta penataan regulasi dan kebutuhan dasar kelembagaan, termasuk transformasi tata kelola pemerintah. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,

permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi tahun 2025 -2029 yaitu :

PASURUAN ANUGRAH

"Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya dan Indah Kotanya"

Pelayanan publik yang aktif diwujudkan melalui pendekatan yang responsif, efisien, dengan akses yang mudah dan kecepatan dalam prosesnya. Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen menghadirkan layanan yang mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, dengan mengutamakan kualitas dan kepuasan pengguna layanan. Responsivitas diwujudkan dalam bentuk keterbukaan terhadap aspirasi, keluhan, maupun permintaan masyarakat, yang langsung ditindaklanjuti melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Setiap pengaduan atau permohonan yang masuk dikelola secara profesional dengan standar waktu penyelesaian yang jelas. Efisiensi dicapai melalui penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini memungkinkan pelayanan dilakukan tanpa birokrasi yang berbelit-belit, namun tetap sesuai dengan regulasi dan prinsip akuntabilitas. Masyarakat juga diberikan kemudahan akses terhadap layanan, baik secara langsung di loket pelayanan, melalui aplikasi daring, maupun melalui layanan *mobile* yang menjangkau semua wilayah. Kemudahan ini memastikan tidak ada hambatan dalam mendapatkan pelayanan, kapanpun dan dimanapun masyarakat membutuhkan. Dengan perpaduan kecepatan dalam respon, efektivitas proses, kemudahan akses, serta penggunaan teknologi yang tepat, pelayanan publik diarahkan menjadi lebih modern, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

"Pemerintah Kota Pasuruan bertekad mewujudkan pelayanan publik yang aktif, responsif, dan efisien melalui inovasi berbasis teknologi. Dengan program AKTIF PELAYANAN PUBLIKNYA, setiap layanan dirancang untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah diakses, dan bebas birokrasi berbelit. Salah satu terobosan utamanya adalah pendekatan prinsip **SELESAI (Semua Efisien, Lengkap, dengan Satu Aplikasi Terintegrasi),** yang memungkinkan masyarakat menyelesaikan

berbagai keperluan administratif dalam satu platform digital—cepat, transparan, dan akuntabel. Dukungan sistem **BOS AKTIF (Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Efektif)** memperkuat komitmen Kota Pasuruan dalam memberikan layanan prima berstandar tinggi, memastikan kepuasan masyarakat melalui prosedur yang sederhana, SDM yang profesional, serta kemudahan akses baik secara luring maupun daring. Dengan pendekatan ini, pelayanan publik Kota Pasuruan siap menjadi contoh layanan modern, inklusif, dan berorientasi pada rakyat.

Mandiri ekonominya diwujudkan dengan terus mendorong penguatan ekonomi lokal melalui strategi terpadu yang mencakup perluasan lapangan kerja, pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil, serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Upaya perluasan lapangan kerja dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong masuknya sektor-sektor produktif, serta memberikan pelatihan dan pendampingan tenaga kerja agar memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, peluang kerja terus bertambah dan tingkat pengangguran dapat ditekan secara signifikan. Sejalan dengan itu, Usaha Mikro dan Kecil sebagai tulang punggung ekonomi rakyat terus didorong tumbuh dan berkembang. Pemerintah Kota Pasuruan memberikan berbagai bentuk dukungan, mulai dari penyederhanaan perizinan, peningkatan akses pasar, pelatihan manajemen usaha, hingga fasilitasi promosi produk lokal. Di sisi lain, BUMD dioptimalkan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Melalui revitalisasi tata kelola, penguatan modal, dan diversifikasi usaha, BUMD diarahkan untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mampu mendukung kebutuhan strategis daerah, menciptakan nilai tambah ekonomi, dan berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen mewujudkan kemandirian ekonomi melalui penguatan sektor lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dengan fokus pada program Perluasan Lapangan Kerja, Pertumbuhan UMKM, dan Optimalisasi BUMD, kami mendorong terciptanya kesempatan kerja yang inklusif serta pemberdayaan pelaku usaha kecil. Melalui **PRIMA (Pengembangan Rantai Investasi Mikro dan Angkatan Kerja)**, akses modal dan pelatihan keterampilan terfasilitasi agar tenaga kerja dapat bersaing di pasar yang dinamis. Dukungan terhadap ekonomi kreatif diwujudkan lewat **INSPIRE (Inovasi dan**

Skill Perkuat Industri Rekreasi dan Ekonomi Kreatif), yang mendorong kreativitas dan inovasi sebagai penggerak ekonomi baru. Selain itu, program **KERAP (Kesempatan Ekonomi Rakyat Produktif)** memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM, mendapatkan kemudahan berinvestasi, perluasan pasar, serta pendampingan usaha. Di sisi lain, BUMD diperkuat sebagai tulang punggung ekonomi daerah melalui tata kelola yang profesional dan diversifikasi usaha, sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan strategi terpadu ini, Kota Pasuruan siap menjadi daerah yang mandiri secara ekonomi, berbasis potensi lokal, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat

Guyub warganya, mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang guyub, rukun, dan saling peduli menjadi fondasi utama dalam memperkuat kohesi sosial dan ketahanan sosial budaya di daerah. Nilai-nilai kegotongroyongan dan solidaritas warga terus dipelihara dan diwujudkan melalui komunitas-komunitas yang aktif, terhubung, dan inklusif, baik dalam bidang sosial, lingkungan, kreatif, keagamaan, maupun pemberdayaan ekonomi. Komunitas-komunitas ini tidak hanya menjadi ruang ekspresi dan kolaborasi, tetapi juga menjadi jembatan penghubung antara warga dengan pemerintah, antara generasi tua dan muda, serta antara pelaku budaya dan masyarakat luas. Di sisi lain, pembangunan kepemudaan menjadi salah satu pilar strategis dalam menyiapkan generasi penerus yang kreatif, berdaya saing, dan berjiwa kepemimpinan. Pemerintah Kota Pasuruan mendorong partisipasi pemuda melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan organisasi kepemudaan, serta dukungan terhadap kegiatan positif yang menumbuhkan semangat inovasi, nasionalisme, dan kolaborasi lintas sektor. Pelestarian seni tradisi, revitalisasi ruang budaya, dan penguatan pelaku seni menjadi bagian dari upaya membangun peradaban yang berakar pada kearifan lokal namun terbuka terhadap perkembangan zaman. Keguyuban warga tidak hanya tercermin dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga diwujudkan melalui komitmen bersama dalam membangun akses yang merata dan kualitas yang baik di bidang pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua. Di bidang pendidikan, masyarakat bersama Pemerintah Kota Pasuruan membangun semangat gotong royong dalam mendukung akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Tidak hanya dalam bentuk fisik seperti pembangunan sekolah dan penyediaan sarana belajar, tetapi juga dalam bentuk

keterlibatan aktif orang tua, komunitas belajar, serta gerakan literasi yang menguatkan peran pendidikan sebagai jembatan masa depan generasi penerus. Pada sektor kesehatan, prinsip keguyuban diwujudkan melalui upaya kolektif untuk menjaga derajat kesehatan masyarakat, baik melalui pelayanan yang semakin merata dan mudah diakses, peningkatan fasilitas dan tenaga medis, hingga peran aktif warga dalam menjaga pola hidup bersih dan sehat.

Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen membangun masyarakat yang *guyub*, rukun, dan saling peduli sebagai fondasi ketahanan sosial budaya. Melalui program ***Komunitas yang Guyub dan Terhubung***, untuk memperkuat nilai kegotongroyongan dengan mendorong kolaborasi aktif di bidang sosial, lingkungan, ekonomi kreatif, dan keagamaan. Pemuda sebagai generasi penerus diberdayakan lewat ***KASIH (Kepemudaan Aktif Seiring Integrasi Harmonis)***, yang meliputi pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, serta penguatan organisasi kepemudaan untuk menciptakan pemuda inovatif dan berdaya saing. Di bidang pendidikan dan kesehatan, untuk menjamin akses yang merata dan berkualitas melalui program ***SIPASTI (Sistem Penanganan Stunting Terintegrasi)*** dan peningkatan fasilitas pendidikan, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan literasi dan hidup sehat. Keamanan dan kenyamanan warga menjadi prioritas, sementara pelestarian budaya dan seni tradisional terus digiatkan untuk menjaga identitas lokal yang dinamis. Untuk mewujudkan kesejahteraan inklusif, mengurangi kemiskinan, dan membangun Pasuruan yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan.

Indah kotanya mencerminkan keindahan sebuah kota tidak hanya terletak pada lanskap fisiknya, tetapi bagaimana kota itu mewujudkan ruang hidup yang inklusif, adil, terhubung, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya. Kota Pasuruan tumbuh dengan semangat inklusivitas dan keadilan, dimana setiap lapisan masyarakat memiliki ruang yang setara untuk berkembang, berpartisipasi, dan menikmati manfaat pembangunan tanpa diskriminasi. Keindahan kota juga diwujudkan melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua kelompok masyarakat. Akses terhadap perumahan berkualitas menjadi hak dasar yang dijamin, agar setiap keluarga dapat tinggal dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat, tertata, dan mendukung kualitas hidup. Dengan desain yang terintegrasi, semangat kebersamaan, dan komitmen terhadap keberlanjutan, kota tumbuh

sebagai ruang hidup yang tidak hanya indah dipandang mata, tetapi juga adil dirasakan oleh seluruh warganya.

Kota Pasuruan berkomitmen mewujudkan keindahan yang holistik melalui pembangunan berkelanjutan yang inklusif, adil, dan ramah lingkungan. Melalui ***REKAP (Revitalisasi Ekspansi Kawasan Aman dan Peduli Lingkungan)***, kawasan permukiman direvitalisasi menjadi hunian berkualitas yang terjangkau sekaligus ramah lingkungan, didukung oleh infrastruktur inklusif dalam program ***KERASAN (Kota dengan Infrastruktur Inklusif yang Nyaman)***. Konsep ***transit-oriented development*** diterapkan untuk menciptakan kawasan terpadu yang mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sekaligus memperkuat keterhubungan antar wilayah, serta menciptakan ***Lingkungan yang Sehat dan Lestari*** dengan memperbanyak ruang terbuka hijau, mengoptimalkan pengelolaan sampah, dan mendorong partisipasi warga dalam menjaga ekosistem kota.

3.1.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, perlu memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, yang mempengaruhi proses pembangunan. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk merumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan guna memperjelas langkah-langkah strategis dalam mewujudkan visi tersebut.

Perumusan rancangan teknokratik Misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 menjadi dasar dalam penentuan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025-2029. RPJMD 2025-2029 ini merupakan perwujudan pelaksanaan tahap pertama atau dari RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2055, yang dirancang untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Tabel 3. 1 Linearitas Misi Kota Pasuruan

Misi RPJPD Kota Pasuruan 2025 - 2045	Rancangan Teknokratik Misi RPJMD Tahun 2025- 2029	Misi RPJMD Kota Pasuruan 2025-2029
Membangun SDM Berdaya Saing dan Berkarakter	Terciptanya SDM Yang Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul melalui akses pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkualitas

Misi RPJPD Kota Pasuruan 2025 - 2045	Rancangan Teknokratik Misi RPJMD Tahun 2025- 2029	Misi RPJMD Kota Pasuruan 2025-2029
Masyarakat Berdaya dan Berbudaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat berorientasi pada peran Kepemudaan, Kebudayaan dan Harmonisasi Sosial
Akselerasi Penguatan Daya Saing Ekonomi Berlandaskan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dengan Daya Dukung Infrastruktur Berkelanjutan	Mewujudkan kota yang indah dan nyaman melalui penguatan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkelanjutan
Birokrasi Adaptif Mewujudkan Layanan Publik Prima	Terciptanya Birokrasi Yang Berkualitas Dan Adaptif	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Merata Berbasis Digital
Transformasi ekonomi berdaya saing	Meningkatnya Geliat Ekonomi Masyarakat	Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi lokal

Hasil rumusan Misi RPJPD, Misi Calon Kepala daerah dan Misi rancangan teknokratik, maka misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 sebanyak 5 (lima) misi sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Responsif dan Merata Berbasis Digital. Misi 1 menggambarkan salah satu cita-cita Kota Pasuruan ialah dapat menjawab seluruh tuntutan layanan masyarakat. Hal tersebut tentunya dapat dicapai dengan reformasi birokrasi sehingga birokrasi yang saat ini bertransformasi menjadi birokrasi yang agile, adaptif dan responsif.

Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Melalui Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Inklusif dan Berkualitas. Misi 2 menggambarkan cita-cita besar Kota Pasuruan pada tahun 2045 Kota Pasuruan dipenuhi oleh generasi emas, generasi produktif yang tidak hanya berdasarkan usianya saja, melainkan juga produktivitas serta kontribusinya terhadap pembangunan. Representasi dari SDM terbangun dengan generasi emas ialah kualitas pembangunan manusia yang mana fokus terhadap membangun manusia merujuk kepada pendidikan dan kesehatan yang menjadi pondasi utama pembangunan manusia

Misi 3 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal. Misi 3 diarahkan cita-cita Kota Pasuruan harus mampu memanfaatkan peluangnya yang berada di wilayah antara kawasan megapolitan Malang dan Surabaya. Kota Pasuruan yang fokus terhadap perdagangan dan jasa serta sangat identik menjadi wisata religi karena memiliki keunikan dan alasan tersendiri untuk dikunjungi.

Misi 4 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berorientasi pada Peran Kepemudaan, Kebudayaan dan Harmonisasi Sosial. Misi 4 memiliki gambaran kesejahteraan sosial khususnya penuntasan kemiskinan dijadikan prioritas utama Kota Pasuruan. Fokus kesejahteraan sosial tidak hanya terhadap kemiskinan, melainkan juga dalam mempersempit kesenjangan antar kelas pendapatan dengan meningkatkan peran kepemudaan dan sosial kemasyarakatan.

Misi 5 Mewujudkan Kota yang Indah dan Nyaman Melalui Penguatan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkelanjutan. Misi 5 menggambarkan salah satu cita-cita Kota Pasuruan yang mana dengan tipologi perkotaan dan letak yang cukup strategis diantara 2 kota megapolitan Malang dan Surabaya tentunya tidak hanya fokus terhadap pembangunan infrastruktur perkotaan yang mantap, melainkan titik tekannya justru kelestarian lingkungan menjadi poin utama. Degradasi lingkungan saat ini sangat mengkhawatirkan hingga dampaknya perubahan iklim menjadi ancaman yang nyata untuk manusia. Sehingga Kota Pasuruan harus memiliki *effort* yang lebih bila dibandingkan saat ini, untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lestari, seimbang dengan pembangunan pada sisi ekonomi maupun infrastrukturnya.

3.1.3. Tujuan dan Sasaran

Sebagai tata kinerja teknis dari Visi dan Misi Pembangunan RPJMD 2025-2029, dibuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan.

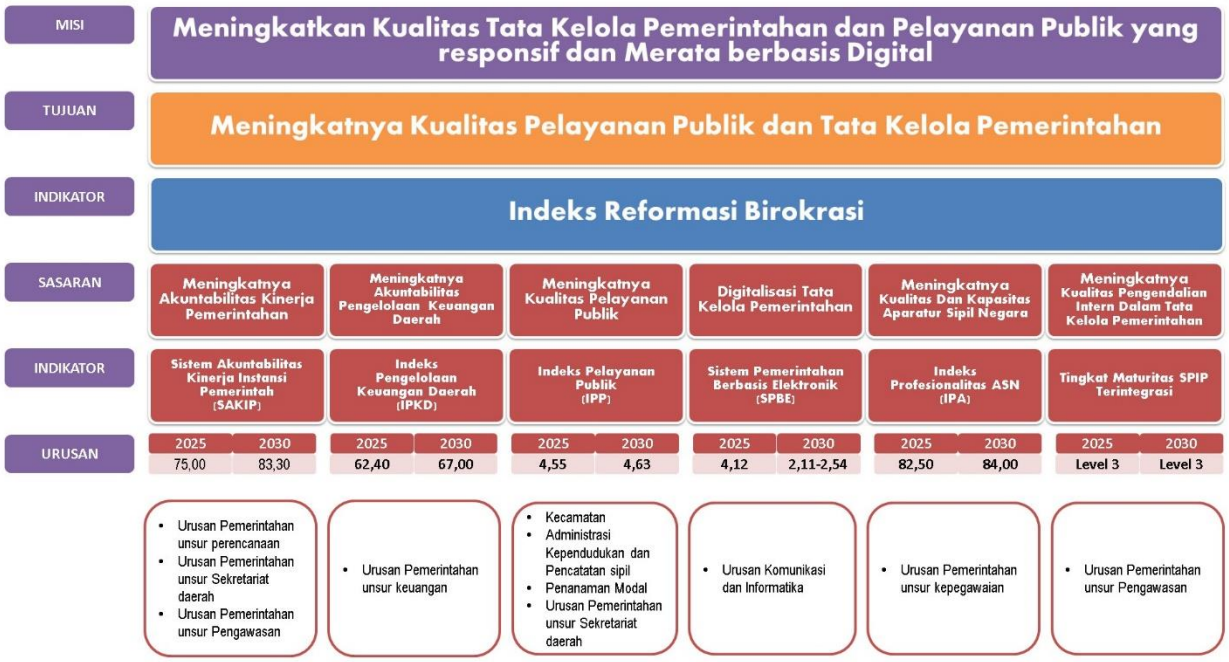

Gambar 3. 2 Tujuan dan Sasaran MISI 1 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

Misi pertama adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Merata Berbasis Digital. Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Indikator Reformasi Birokrasi digunakan sebagai tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan ini. Sasaran dari misi ini meliputi beberapa sasaran. Pertama, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, yang diukur melalui SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Kedua, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang dinilai melalui IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah). Ketiga, meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Pelayanan Publik, Keempat Digitalisasi tata kelola pemerintahan diukur melalui SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Kelima, meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dinilai melalui IPA (Indeks Profesionalitas ASN). Keenam, meningkatnya kualitas pengendalian intern dalam tata kelola pemerintahan, yang diukur melalui Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi.

Dengan kerangka ini, diharapkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan, menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong pemerataan pelayanan publik berbasis digital, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata.

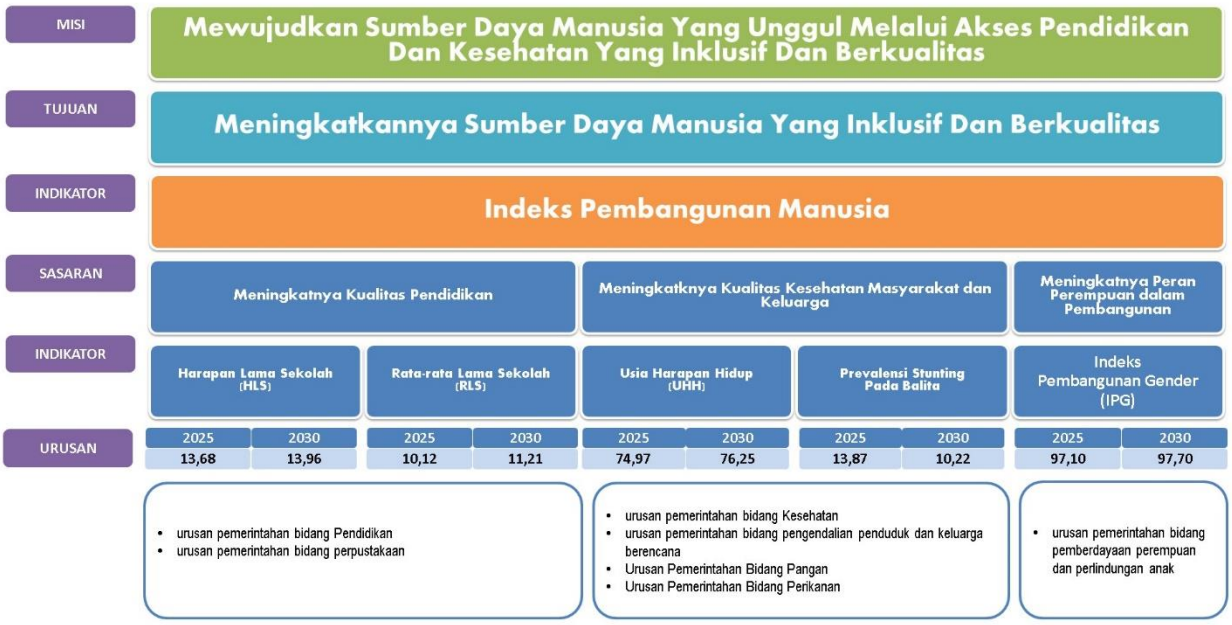

Gambar 3. 3 Tujuan Dan Sasaran MISI 2 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

Misi kedua adalah Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Melalui Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Inklusif Dan Berkualitas. Misi ini memiliki tujuan Meningkatkannya sumber daya manusia yang Inklusif Dan Berkualitas. Indikator Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan ini. Sasaran dari misi ini meliputi tiga sasaran. Pertama, meningkatnya kualitas pendidikan, yang diukur melalui HLS (Harapan Lama Sekolah) dan RLS (Rata-rata Lama Sekolah). Kedua, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang diukur melalui UHH (Usia Harapan Hidup) dan Prevalensi Stunting pada Balita. Ketiga, meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan, yang diukur melalui Indeks Pembangunan Gender.

Dengan kerangka ini, diharapkan sumber daya manusia yang unggul dapat terwujud melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkualitas. Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, sehingga

seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata dan berkelanjutan.



Gambar 3. 4 Tujuan Dan Sasaran MISI 3 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

Misi selanjutnya adalah Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi lokal. Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi. Laju Pertumbuhan Ekonomi digunakan sebagai tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan ini. Sasaran dari misi ini meliputi beberapa dua sasaran. Pertama, meningkatnya PDRB sektor unggulan, yang diukur melalui Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan, Nilai PDRB Sektor Perdagangan, dan Nilai PDRB Pariwisata. Kedua, meningkatnya nilai realisasi investasi, yang diukur melalui Nilai realisasi investasi

Dengan kerangka ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat terwujud melalui peningkatan PDRB sektor unggulan dan peningkatan investasi. Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong pemanfaatan potensi lokal secara optimal, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

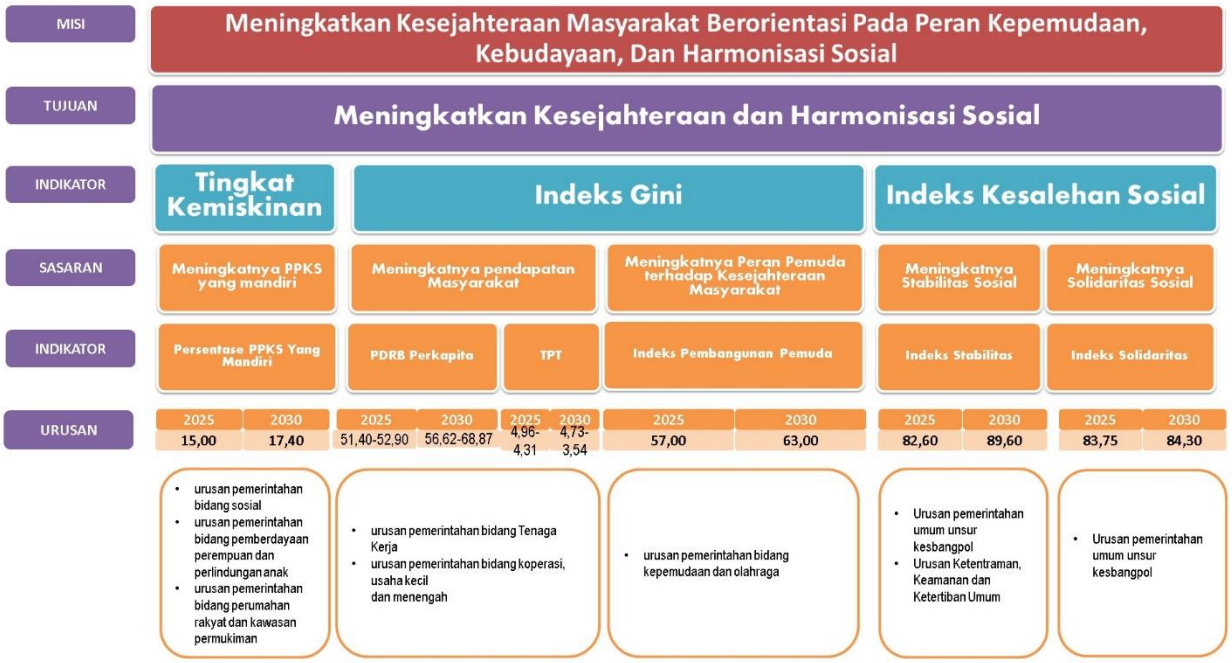

Gambar 3. 5 Tujuan Dan Sasaran MISI 4 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

Misi keempat adalah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berorientasi Pada Peran Kepemudaan, Kebudayaan, dan Harmonisasi Sosial. Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial. Angka Kemiskinan, Indeks Gini, dan Indeks Kesalehan Sosial digunakan sebagai indikator tujuan untuk menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan ini. Sasaran dari misi ini meliputi beberapa sasaran. Pertama, meningkatnya PPKS yang mandiri, yang diukur melalui persentase PPKS yang mandiri. Kedua, meningkatnya pendapatan masyarakat, yang dinilai melalui PDRB Perkapita dan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Ketiga meningkatnya Peran Pemuda terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda. Keempat, meningkatnya stabilitas sosial, yang diukur melalui Indeks Stabilitas. Kelima, meningkatnya solidaritas sosial, yang dinilai melalui Indeks solidaritas.

Dengan kerangka ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui peran aktif kepemudaan, kebudayaan, dan harmonisasi sosial. Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong stabilitas dan solidaritas sosial, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata dan berkelanjutan.



Gambar 3. 6 Tujuan Dan Sasaran MISI 5 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

Misi kelima adalah mewujudkan kota yang indah dan nyaman melalui penguatan infrastruktur penunjang ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Tujuan utama dari misi ini adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Dan Sosial, dengan memastikan bahwa pembangunan tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan misi ini adalah IKLI (Indikator Kualitas Layanan Infrastruktur), yang menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas infrastruktur yang dibangun.

Sasaran dari misi ini meliputi tiga aspek utama. Pertama, meningkatnya pembangunan infrastruktur, yang bertujuan untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik dengan memperhatikan prinsip ramah lingkungan. Kedua, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang fokus pada upaya-upaya seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan pengendalian polusi untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Ketiga, menurunnya resiko bencana yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dan sistem manajemen risiko yang efektif.

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran tersebut, digunakan beberapa Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indeks Infrastruktur digunakan untuk menilai kualitas dan

keberlanjutan infrastruktur yang dibangun. IKLH (Indeks Kualitas Layanan Hidup) digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup, termasuk kebersihan udara, air, dan tanah. Sementara itu, Indeks Resiko Bencana digunakan untuk menilai tingkat ketahanan daerah terhadap bencana, termasuk kesiapan infrastruktur dan sistem penanggulangan bencana. Dengan kerangka ini, diharapkan pembangunan kota dapat dilakukan secara terarah, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Berikut adalah rangkuman Tujuan, Sasaran, dan Indikator:

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Pasuruan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya Dan Indah Kotanya									
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan Merata berbasis Digitalisasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	88,70	88,90	89,00	89,50	90,00	90,20
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP	75,00	78,00	80,10	81,00	82,00	83,30
		Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Daerah	IPKD	62,40	63,00	64,00	65,00	66,00	67,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,55	4,57	4,59	4,61	4,62	4,63
		Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks SPBE*	4,12	1,71-1,96	1,81-2,10	1,91-2,25	2,01-2,39	2,11-2,54
		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas ASN	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	82,50	82,80	83,10	83,40	83,70	84,00
		meningkatnya kualitas pengendalian intern dalam tata kelola pemerintahan	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul melalui akses pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkualitas	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang inklusif dan berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia	79,17-79,52	79,27 - 79,87	79,56 - 80,46	79,86 - 81,06	80,16 - 82,36	80,56 - 83,12
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,68	13,70	13,77	13,86	13,92	13,96
			Rata-rata Lama Sekolah	10,15	10,35	10,56	10,76	10,97	11,17
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,97	75,23	75,48	75,74	76	76,25
			Prevalensi Stunting pada balita	13,87	13,37	12,87	12,37	10,67	10,22
		Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	97,10	97,30	97,35	97,50	97,60	97,70
Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi lokal	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	5,07-5,67	5,13-5,70	5,21-6,24	5,28-6,32	5,33-6,62	5,23-6,43
		Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (Miliar Rupiah)	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
			Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Miliar Rupiah)	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
			Nilai PDRB Pariwisata (Miliar Rupiah)	376	391	406	421	436	451
		Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)	60,00	61,20	62,42	63,67	64,95	66,24
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat berorientasi pada peran Kepemudaan, Kebudayaan dan Harmonisasi Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan	5,10-5,99	5,07-5,80	4,97-5,55	4,87-5,36	3,38-5,04	3,19-4,40
			Indeks Gini	0,313-0,353	0,311 - 0,351	0,31-0,35	0,309 - 0,349	0,307 - 0,347	0,306 - 0,346
			Indeks Kesalehan Sosial	86,80	87,16	87,30	87,60	88,00	88,60
		Meningkatnya PPKS yang mandiri	Persentase PPKS yang Mandiri	15,00	15,45	15,90	16,40	16,90	17,40
		Meningkatnya pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita	51,40-52,90	52,66 - 56,09	53,90 - 59,28	54,14 - 62,43	55,38 - 65,67	56,62 - 68,87
			TPT	4,96-4,31	4,95-4,09	4,94-3,87	4,84-3,70	4,78-3,60	4,73-3,54

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya Peran Pemuda terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Pemuda	57,00	58,00	59,00	60,00	61,00	63,00
		Meningkatnya Stabilitas Sosial	Indeks Stabilitas	82,60	83,60	84,60	87,60	88,60	89,60
		Meningkatnya Solidaritas Sosial	Indeks Solidaritas	83,75	83,86	83,97	84,08	84,19	84,3
Mewujudkan kota yang indah dan nyaman melalui penguatan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur		IKLI	3,12	3,15	3,18	3,20	3,24	3,28
		Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	82,60	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	62,01	62,09	62,17	62,24	62,32	62,40
		Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	88,01-85,86	85,86 - 83,82	83,82 - 81,87	81,87 - 80,01	80,01 - 78,23	78,23 - 75,88

Keterangan:

* : instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital mulai tahun 2026 sehingga target disesuaikan

3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

3.2.1. Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah *(strategy focussed-management)*. Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah. Berikut merupakan strategi pembangunan Kota Pasuruan

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan layanan publik yang efekif dan efisien berbasis teknologi informasi

2. Pemerataan akses, kualitas dan standarisasi layanan pendidikan maupun kesehatan, serta Kesetaraan Gender berbasis kebudayaan lokal
3. Penguatan UMKM, pangan, industri dan perdagangan sebagai daya tarik investasi daerah untuk menyerap tenaga kerja, mengakselerasi pertumbuhan Ekonomi Daerah serta penunjang wisata daerah
4. Pengentasan kemiskinan secara terpadu
5. Peningkatan Kondusifitas sosial, perlindungan anak dan perempuan serta peran pemuda dalam meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Masyarakat
6. Penyediaan infrastruktur strategis pengungkit ekonomi, Infrastruktur Penunjang Aksessibilitas dan sarana prasarana daya dukung lingkungan

3.2.2. Pentahapan Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah adalah arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prioritas pembangunan mencakup aspek-aspek utama yang menjadi fokus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan suatu daerah atau negara. Prioritas ini ditentukan berdasarkan kebutuhan, tantangan, dan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Tabel 3. 3 Tematik dan Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Penguatan Transformasi Ekonomi Dan Sosial Yang Harmoni Dan Berkelanjutan	**Meningkatkan Peran Industri Dan Perdagangan Dalam Menciptakan Daya Saing Daerah**	**Penguatan Infrastuktur Penunjang**	**Penguatan Integrasi Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Sosial**	**Mewujudkan Landasan Pembangunan Ekonomi Dan Sosial Menuju Kota Pasuruan Harmoni Maju Berkelanjutan**
1. Memperkuat Pembangunan SDM yang berkarakter 2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Penunjang Perekonomian 3. Stimulus Daya Tarik Investasi 4. Menumbuhkan Perekonomian sektor Unggulan 5. Efektifitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi 2. Meningkatkan kualitas angkatan kerja untuk memenuhi pasar tenaga kerja 3. Meningkatkan kualitas Produksi hasil olahan 4. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perdagangan	1. Layanan Publik Terintegrasi dan Efektif 2. Penguatan peran pemuda dalam pembangunan 3. Peningkatan Daya Beli dan Perlindungan Sosial 4. Pemantapan UMKM dan Industri Kreatif 5. Pendidikan dan kesehatan	1. Infrastruktur penunjang berkualitas 2. Infrastruktur Olahraga dan Sosial berkualitas 3. Pemantapan Distribusi Perdagangan dan Industri 4. Berkurangnya Rumah tidak layak huni 5. Penataan pusat Kegiatan di Pusat Kota	1. Angka stunting di bawah 5% 2. SDM berkualitas dan berdaya saing 3. Infrastruktur Perkotaan berkualitas dan Berkelanjutan 4. Pemerataan Perlindungan Sosial 5. Terjaminnya hunian layak bagi Masyarakat miskin 6. Penguatan karakter SDM yang religius

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial 7. Pengurangan Kemiskinan 8. Sarpras Pendidikan dan kesehatan berkualitas	5. Pengurangan stunting 6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor 7. Pemberdayaan UMKM penunjang Wisata 8. Peguatan Kelembagaan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	masyarakat berkualitas		

3.2.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman atau strategi yang digunakan oleh pemerintah atau organisasi dalam menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Arah kebijakan memberikan gambaran tentang bagaimana suatu visi dan misi akan diwujudkan melalui program dan tindakan konkret.

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pasuruan

MISI	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Merata Berbasis Digital	1. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. 3. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. 4. Penataan sarana prasarana kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. 5. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. 6. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah 7. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. 8. Optimalisasi peran posyandu dalam Pembangunan dan pelayanan publik 9. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital 10. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN yang profesional dan bebas korupsi. 11. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta,reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja 12. Penguatan sistem pengawasan internal
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Melalui Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Inklusif Dan Berkualitas	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 2. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. 3. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. 4. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. 5. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 6. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.

MISI	Arah Kebijakan
	7. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. 8. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. 9. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 10. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK 11. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama 12. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI. 13. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap. 14. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. 15. Peningkatan kualitas layanan sarana prasarana dan SDM Kesehatan 16. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. 17. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. 18. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. 19. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. 20. Memastikan keberlanjutan praktik stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan meningkatkan kualitas jamban menuju sanitasi aman. 21. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia 22. Pemberdayaan perempuan, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 23. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal	1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high value economy), 2. Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah melalui bertambahnya demand. 3. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan pangan 4. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi 5. Sinergitas dengan Pemerintah Daerah Sekitar khususnya dalam penguatan peran Kota Pasuruan sebagai kota perdagangan dan jasa. 6. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, dan pariwisata. 7. Pengembangan closed loop model pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi 8. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan 9. Pengembangan kepariwisataan & ekosistem ekraf yg holistik dengan pemenuhan paripurna 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif 10. Penataan dan penguatan daya tarik wisata perkotaan, kultural, dan religi secara kolaboratif dan partisipatif. 11. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. 12. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. 13. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. 14. Standarisasi Produk UKM dalam rangka meningkatkan daya saing. 15. Peningkatan produktivitas BUMD. 16. Dukungan terhadap program koperasi merah putih

MISI	Arah Kebijakan
	17. peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Daerah 18. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berorientasi Pada Peran Kepemudaan, Kebudayaan Dan Harmonisasi Sosial	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. 2. Perluasan penyediaan bantuan sosial dan jaminan sosial 3. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan 4. fasilitasi pasar tenaga kerja, unmk mempertemukan para pencari kerja dengan industry 5. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas 6. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. 7. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. 8. Sertifikasi Seniman, Budayawan agar mampu bersaing secara global. 9. Pemberdayaan pemuda, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam berbagai bidang pembangunan. 10. Pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan
Mewujudkan Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Penguatan Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Berkelanjutan	1. Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* 2. Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik yang saling terintegrasi 3. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal 4. Perencanaan dan penyiapan simpul dan layanan transportasi publik 5. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. 6. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri 7. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam kota 8. Percepatan pemerataan akses layanan dan pemenuhan air minum aman dan sanitasi aman Peningkatan akses rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah 9. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, berdaya saing, dan berketahanan 10. Penguatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah dalam kota untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan di sektor layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb 11. Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) diprioritaskan pada segmen yang signifikan mengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah 12. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. 13. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. 14. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis termasuk menjaga proporsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau 15. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. 16. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. 17. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. 18. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pencegahan mitigasi bencana 19. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. 20. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat

MISI	Arah Kebijakan
	akan potensi bahaya, seperti Banjir, Gempa Bumi, Tsunami Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Likuefaksi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.

3.2.4. Program Prioritas

Perumusan prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Wali Kota terpilih dalam 5 (lima) tahun. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji – janji kampanye Kepala daerah terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan subtansi dasar dari janji – janji Kepala daerah terpilih. Janji – janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam kegiatan atau program sesuai nomenklatur yang diatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 atau ke dalam kebijakan umum maupun strategi. Jika bunyi janji Kepala daerah terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Adapun program prioritas Kepala Daerah terpilih sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Linieritas Agenda dan Program Prioritas Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

	AGENDA PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PD PENGAMPU UURUSAN
1	Penurunan prevalensi stunting <5% dengan Pemberian makanan bergizi untuk penuntasan dan pencegahan stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kelautan Dan Perikanan
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Komunikasi Dan Informatika
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Unsur Kewilayahan
2	Optimalisasi peran pelabuhan bekerja sama dengan provinsi	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kelautan Dan Perikanan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

	AGENDA PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PD PENGAMPU UURUSAN
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan dan Aset
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
3	Pembangunan rintisan pasar baru di Bugul Kidul	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan dan Aset
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
4	Pendirian Islamic Center	Program Penataan Bangunan Gedung	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan dan Aset
		Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
5	Pendirian BUMD	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian Dan Pengembangan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
6	Pendirian Pasuruan Creative Center	Program Penataan Bangunan Gedung	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Kepemudaan	Kepemudaan Dan Olahraga
		Program Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian Dan Pengembangan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
7	Optimalisasi lahan pertanian dan mendorong penerapan urban farming	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	Pemberdayaan organisasi keagamaan/komunitas	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	

	AGENDA PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PD PENGAMPU UURUSAN
	santri terhadap pengembangan ekonomi (santripreneur)	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pemerintahan Umum
9	Pengurangan kantong-kantong kemiskinan	Program Kawasan Permukiman	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
10	Kenaikan insentif bagi RT dan RW di Kota Pasuruan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Unsur Kewilayahan
11	Optimalisasi Sekolah lanjut usia tangguh (Selantang) Mandiri	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
12	Perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi anak rentan, difabel, lansia telantar, masyarakat berpendapatan rendah, korban bencana dan lainnya	Program Penunjang Urusan Permerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan/RSUD
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
		Program Penanggulangan Bencana	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		Program Pemberdayaan Sosial	Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
		Program Penanganan Bencana	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
13	Optimalisasi anggaran untuk mendukung program MBG di Kota Pasuruan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
14	Pembuatan Co-Working Space di setiap kelurahan	Program Penataan Bangunan Gedung	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi Dan Informatika
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Kepemudaan	Kepemudaan Dan Olahraga
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD

	AGENDA PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PD PENGAMPU UURUSAN
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
15	Perbaikan perumahan untuk masyarakat miskin	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
16	Penguatan sistem transportasi terintegrasi dan tata kelola perparkiran	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi Dan Informatika
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
17	Perbaikan layanan infrastruktur dasar (jalan, drainase, sanitasi dan air bersih)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
		Program Penyelenggaraan Jalan	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
18	Beasiswa Pendidikan Masyarakat Miskin	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Dan Aset
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah

Program prioritas disusun berdasarkan visi dan misi kepala Daerah, dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan serta diselaraskan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Program Prioritas Pembangunan adalah serangkaian program yang ditetapkan sebagai fokus utama dalam upaya pembangunan. Program ini diprioritaskan karena dinilai memiliki dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan

ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pencapaian tujuan strategis nasional atau daerah.

Tabel 3. 6 Linieritas Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Kota Pasuruan Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya Dan Indah Kotanya					
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Merata Berbasis Digital	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan		Sakip	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Bpk Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan Masyarakat Yang Diakomodir Dalam Musrenbang Rkpd	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				Persentase Keselarasan Rpjmd Dengan Rkpd	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Sektoral	Persentase Keselarasan Rkpd Dengan Renja Pd	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Keselarasan Rpjmd Dengan Renstra Pd	
			Meningkatnya Capaian Area Reformasi Birokasi		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya Layanan Kebutuhan Pimpinan Yang Terfasilitasi		
		Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah		IPKD	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Potensi Pendapatan Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				Rasio Kepatuhan Wajib Pajak	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Persentase Administrasi Penatausahaan Dan Pelaporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Apbd	
				Persentase Penyusunan Apbd Sesuai Ketentuan	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Bmd	Persentase Administrasi Bmd Sesuai Ketentuan	Program Pengelolaan Bmd
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		IPP	
			Meningkatnya Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Ikd	Program Pendaftaran Penduduk
				Persentase Kepemilikan Kia	
				Persentase Kepemilikan Ktp	
			Meningkatnya Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Program Pencatatan Sipil
				Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	
				Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	
			Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Ketepatan Penetapan Perda Apbd Tahun N	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	
				Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Terlaksana	
		Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan		Spbe	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Terlaksananya Pengelolaaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Yang Terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penanganan Serangan Siber Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
			Terlaksananya Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengelolaan Komunikasi Dan Informasi Publik
				Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Yang Masuk	
			Terselenggaranya Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral Yang Dipublikasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip
		Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Asn		Indeks Profesionalitas Asn	
			Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Kelulusan Asn Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Predikat Baik	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Dalam Tata Kelola Pemerintahan		Tingkat Maturitas Spip Terintegrasi	
			Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas Apip	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
				Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip)	
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Melalui Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Inklusif Dan Berkualitas	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Inklusif Dan Berkualitas			Indeks Pembangunan Manusia	
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan		Harapan Lama Sekolah	
				Rata-Rata Lama Sekolah	
			Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan	Presentase Masyarakat Yang Puas Terhadap	Program Pembinaan Perpustakaan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Layanan Perpustakaan	
			Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar Paud/Sederajat	Program Pengelolaan Pendidikan
				Angka Partisipasi Kasar Sd/Sederajat	
				Angka Partisipasi Kasar Smp/Sederajat	
				Persentase Kelulusan Peserta Didik Kejar Paket	
			Meningkatnya Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Berkualitas	Presentase Guru Bersertifikat Pendidik.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Dan Keluarga		Usia Harapan Hidup	
				Prevalensi Stunting Pada Balita	
			Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Persentase Spm Yang Tercapai	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya Pemenuhan Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Ukp (Upaya Kesehatan Perorangan) Dan Ukm (Upaya Kesehatan Masyarakat)	
			Meningkatnya Pemenuhan Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bugul Kidul	Persentase Pemenuhan Ukp (Upaya Kesehatan Perorangan) Dan Ukm (Upaya Kesehatan Masyarakat)	
			Meningkatnya Pemenuhan Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gadingrejo	Persentase Pemenuhan Ukp (Upaya Kesehatan Perorangan) Dan Ukm (Upaya Kesehatan Masyarakat)	
			Meningkatnya Pemenuhan Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Ukp (Upaya Kesehatan Perorangan) Dan Ukm (Upaya	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Puskesmas Kandangsapi	Kesehatan Masyarakat)	
			Meningkatnya Pemenuhan Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Karangketug	Persentase Pemenuhan Ukp (Upaya Kesehatan Perorangan) Dan Ukm (Upaya Kesehatan Masyarakat)	
			Meningkatnya Pemenuhan Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebonagung	Persentase Pemenuhan Ukp (Upaya Kesehatan Perorangan) Dan Ukm (Upaya Kesehatan Masyarakat)	
			Meningkatnya Pemenuhan Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebonsari	Persentase Pemenuhan Ukp (Upaya Kesehatan Perorangan) Dan Ukm (Upaya Kesehatan Masyarakat)	
			Meningkatnya Pemenuhan Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sekargadung	Persentase Pemenuhan Ukp (Upaya Kesehatan Perorangan) Dan Ukm (Upaya Kesehatan Masyarakat)	
			Meningkatnya Pemenuhan Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Trajeng	Persentase Pemenuhan Ukp (Upaya Kesehatan Perorangan) Dan Ukm (Upaya Kesehatan Masyarakat)	
			Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis Terhadap Populasi	
			Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas Bugul Kidul	Rasio Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis Terhadap Populasi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan
			Terwujudnya Peningkatan	Rasio Tenaga Kesehatan Dan	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas Gadingrejo	Tenaga Medis Terhadap Populasi	
			Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas Karangketug	Rasio Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis Terhadap Populasi	
			Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas Kebonagung	Rasio Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis Terhadap Populasi	
			Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas Kebonsari	Rasio Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis Terhadap Populasi	
			Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas Sekargadung	Rasio Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis Terhadap Populasi	
			Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas Trajeng	Rasio Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis Terhadap Populasi	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Ukbm Dengan Strata Purnama Dan Mandiri	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Puskesmas Bugul Kidul	Persentase Ukbm Dengan Strata Purnama Dan Mandiri	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Puskesmas Gadingrejo	Persentase Ukbm Dengan Strata Purnama Dan Mandiri	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Puskesmas Kandangsapi	Persentase Ukbm Dengan Strata Purnama Dan Mandiri	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Puskesmas Karangketug	Persentase Ukbm Dengan Strata Purnama Dan Mandiri	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Puskesmas Kebonagung	Persentase Ukbm Dengan Strata Purnama Dan Mandiri	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Puskesmas Kebonsari	Persentase Ukbm Dengan Strata Purnama Dan Mandiri	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Puskesmas Sekargadung	Persentase Ukbm Dengan Strata Purnama Dan Mandiri	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Puskesmas Trajeng	Persentase Ukbm Dengan Strata Purnama Dan Mandiri	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dan Kebutuhan Pangan	Rasio Ketersediaan Dan Kebutuhan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Meningkatnya Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Bkb, Bkr, Bkl, Uppks, Dan Pik-R/M)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
		Meningkatnya Kesetaraan		Indeks Pembangunan Gender	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Gender Dalam Pembangunan			
			Meningkatnya Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Arg Kota Pasuruan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
				Persentase Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Yang Mendapatkan Pelatihan	
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi			Laju Pertumbuhan Ekonomi	
		Meningkatnya Pdrb Sektor Unggulan		Nilai Pdrb Sektor Industri Pengolahan	
				Nilai Pdrb Sektor Perdagangan	
				Nilai Pdrb Pariwisata	
			Meningkatnya Ikm Berkembang	Persentase Peningkatan Ikm Berkembang	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
			Meningkatnya Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan Yang Layak	Persentase Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan Yang Layak	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Meningkatnya Usaha Mikro Yang Telah Dikembangkan	Persentase Usaha Mikro Yang Lolos Kurasi Dan Memiliki Laporan Keuangan	Program Pengembangan Umkm
			Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
			Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata Yang Dikembangkan	Persentase Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Meningkatnya Pengembangan Sdm Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sdm Pariwisata Dan Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Ditingkatkan Kemampuan Teknis Dan Manajerialnya	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi		Nilai Realisasi Investasi	
			Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Target Realisasi Investasi	
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berorientasi Pada Peran Kepemudaan, Kebudayaan Dan Harmonisasi Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			Angka Kemiskinan	
				Indeks Gini	
				Indeks Kesalehan Sosial	
		Meningkatnya Ppks Yang Mandiri		Persentase Ppks Yang Mandiri	
			Meningkatnya Rumahtangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Yang Aman	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Yang Aman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Meningkatnya Pemenuhan Backlog Rumah	Jumlah Backlog Hunian	Program Pengembangan Perumahan
			Terlaksananya Program Kawasan Permukiman	Jumlah Ketersediaan Rumah Layak Huni	Program Kawasan Permukiman
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Ppks Yang Diberdayakan	Program Pemberdayaan Sosial
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Ppks Yang Tertangani	Program Rehabilitasi Sosial
			Meningkatnya Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Kelompok Rentan Yang Mendapatkan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Meningkatnya Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Arg Kota Pasuruan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
				Persentase Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Yang Mendapatkan Pelatihan	
		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		Pdrb Perkapita	
				Tpt	
			Meningkatnya Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Mendapat Pemeriksaan Dan Pengawasan	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
			Meningkatnya Koperasi Dengan Kriteria Sehat	Persentase Koperasi Sehat	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
			Meningkatnya Koperasi Yang Mendapat Pendidikan Dan Pelatihan	Prosentase Koperasi Yang Mendapat Pendidikan Dan Pelatihan	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
			Meningkatnya Koperasi Yang Telah Diberdayakan	Persentase Koperasi Yang Mendapatkan Pemberdayaan	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan	Persentase Usaha Mikro Bertransformasi Dari Informal Ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
			Meningkatnya Peserta Pelatihan Yang Sudah Mendapatkan Pekerjaan	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Meningkatnya Pencari Kerja Terdaftar Yang Telah Ditempatkan	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Telah Ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja
		Meningkatnya Peran Pemuda Terhadap Kesejahteraan Masyarakat		Indeks Pembangunan Pemuda	
			Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Meningkatnya Stabilitas Sosial		Indeks Stabilitas	
			Terwujudnya Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditangani	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
				Persentase Satlinmas Yang Aktif	
		Meningkatnya Solidaritas Sosial		Indeks Solidaritas	
			Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
			Meningkatnya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Lembaga Ekososbud Yang Dibina	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
Mewujudkan Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Penguatan Infrastruktur Ekonomi Dan	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur			IKLI	
		Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur		Indeks Infrastruktur	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
Sosial Yang Berkelanjutan			Meningkatnya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Kawasan Permukiman Dan Perumahan Yang Layak	Persentase Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Kawasan Permukiman Yang Layak	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
				Persentase Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Perumahan Yang Layak	
			Terselenggaranya Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Kelayakan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran
			Meningkatnya Kondisi Jalan Kota	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air	Program Penyelenggaraan Jalan
				Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	
			Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
			Terselenggaranya Program Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Iklh	
			Terlaksananya Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Parameter Air Dan Udara Yang Memenuhi Baku Mutu	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Di Kota Pasuruan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Terhadap Izin Lingkungan Dan/Atau Ipplh	Lingkungan Hidup (Pplh)
			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup Yang Tertangani	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			Terlaksananya Pengelolaan Persampahan	Proporsi Rumah Tangga (Rt) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan
				Timbulan Sampah Terolah Difasilitas Pengolahan Sampah	
		Menurunnya Resiko Bencana		Indeks Resiko Bencana	
			Meningkatnya Penanggulangan Bencana Yang Tertangani	Persentase Penanggulangan Bencana Yang Tertangani	Program Penanggulangan Bencana
			Meningkatnya Penanggulangan Kebakaran	Persentase Penanggulangan Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah adalah serangkaian kegiatan atau kebijakan yang dirancang oleh instansi atau organisasi di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tugasnya. Program ini biasanya tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Tujuan Program Perangkat Daerah adalah untuk Meningkatkan Pelayanan Publik, Mendukung visi dan misi kepala daerah dalam pembangunan daerah, Mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien sesuai prioritas daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 4. 1 Program Pembangunan Dan Pagu Indikatif

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				228.187.832.217,00		213.408.683.619,00		228.099.715.248,00		230.085.272.149,00		235.171.604.756,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				140.015.331.557,00		128.200.067.359,00		137.377.313.483,00		137.711.325.936,00		140.211.148.236,00	
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	140.015.331.557,00	3	128.200.067.359,00	3	137.377.313.483,00	3	137.711.325.936,00	3	140.211.148.236,00	PENDIDIKAN
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,51	75,3		76,9		78,6		80,3		82		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				88.110.888.160,00		85.147.556.783,00		90.657.371.385,00		92.307.712.793,00		94.892.328.754,00	
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar PAUD/Sederajat	91,83	100	58.907.268.160,00	100	56.936.859.863,00	100	60.636.050.025,00	100	61.746.007.657,00	100	63.474.895.870,00	PENDIDIKAN
	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100		100		100		100		100		
	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat	100,46	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase kelulusan peserta didik kejar paket	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Bakalan	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	363.100.000,00	100	350.754.600,00	100	373.266.800,00	100	379.985.603,00	100	390.625.200,00	PENDIDIKAN - UPT SDN BAKALAN
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Bangilan	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	512.020.000,00	100	494.611.320,00	100	526.356.560,00	100	535.830.978,00	100	550.834.246,00	PENDIDIKAN - UPT SDN BANGILAN
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Blandongan	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	229.560.000,00	100	221.754.960,00	100	235.987.680,00	100	240.235.459,00	100	246.962.051,00	PENDIDIKAN - UPT SDN BLANDONGAN
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Bugul Kidul I	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	96.700.000,00	100	93.412.200,00	100	99.407.600,00	100	101.196.936,00	100	104.030.451,00	PENDIDIKAN - UPT SDN Bugul Kidul 1
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Bugul Kidul II	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	216.880.000,00	100	209.506.080,00	100	222.952.640,00	100	226.965.787,00	100	233.320.829,00	PENDIDIKAN - UPT SDN BUGUL KIDUL II
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Bugul Lor	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	243.480.000,00	100	235.201.680,00	100	250.297.440,00	100	254.802.794,00	100	261.937.273,00	PENDIDIKAN - UPT SDN BUGUL LOR
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Bukir	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	677.100.000,00	100	654.078.600,00	100	696.058.800,00	100	708.587.858,00	100	728.428.318,00	PENDIDIKAN - UPT SDN BUKIR
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Gadingrejo I	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	279.280.000,00	100	269.784.480,00	100	287.099.840,00	100	292.267.637,00	100	300.451.131,00	PENDIDIKAN - UPT SDN GADINGREJO I
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di	Angka Partisipasi	101,06	100	342.840.000,00	100	331.183.440,00	100	352.439.520,00	100	358.783.432,00	100	368.829.367,00	PENDIDIKAN- UPT SDN GADINGREJO II

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SDN Gadingrejo II	Kasar SD/Sederajat												
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Gentong	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	565.700.000,00	100	546.466.200,00	100	581.539.600,00	100	592.007.313,00	100	608.583.518,00	PENDIDIKAN-UPT SDN GENTONG
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Kandangsapi I	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	123.260.000,00	100	119.069.160,00	100	126.711.280,00	100	128.992.083,00	100	132.603.862,00	PENDIDIKAN - UPT SDN KANDANGSAPI I
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Kandangsapi II	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	159.840.000,00	100	154.405.440,00	100	164.315.520,00	100	167.273.199,00	100	171.956.849,00	PENDIDIKAN - UPT SDN KANDANGSAPI II
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Karanganyar	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	399.660.000,00	100	386.071.560,00	100	410.850.480,00	100	418.245.788,00	100	429.956.670,00	PENDIDIKAN - UPT SDN KARANGANYAR
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Karangketug I	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	256.880.000,00	100	248.146.080,00	100	264.072.640,00	100	268.825.947,00	100	276.353.074,00	PENDIDIKAN - UPT SDN KARANGKETUG I
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Karangketug II	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	421.840.000,00	100	407.497.440,00	100	433.651.520,00	100	441.457.247,00	100	453.818.051,00	PENDIDIKAN - UPT SDN KARANGKETUG II
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Karangketug III	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	192.420.000,00	100	185.877.720,00	100	197.807.760,00	100	201.368.299,00	100	207.006.612,00	PENDIDIKAN - UPT SDN KARANGKETUG III
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Kebonagung	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	1.120.500.000,00	100	1.082.403.000,00	100	1.151.874.000,00	100	1.172.607.732,00	100	1.205.440.749,00	PENDIDIKAN - UPT SDN KEBONAGUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Kebonsari	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	730.820.000,00	100	705.972.120,00	100	751.282.960,00	100	764.806.053,00	100	786.220.623,00	PENDIDIKAN - UPT SDN KEBONSARI
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Kepel	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	200.380.000,00	100	193.567.080,00	100	205.990.640,00	100	209.698.472,00	100	215.570.029,00	PENDIDIKAN - UPT SDN KEPEL
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Krampyangan	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	458.160.000,00	100	442.582.560,00	100	470.988.480,00	100	479.466.273,00	100	492.891.329,00	PENDIDIKAN - UPT SDN KRAMPYANGAN
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Krapyakrejo I	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	229.900.000,00	100	222.083.400,00	100	236.337.200,00	100	240.591.270,00	100	247.327.826,00	PENDIDIKAN - UPT SDN KRAPYAKREJO I
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Krapyakrejo II	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	455.800.000,00	100	440.302.800,00	100	468.562.400,00	100	476.996.523,00	100	490.352.426,00	PENDIDIKAN - UPT SDN KRAPYAKREJO II
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Mandaranrejo I	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	552.340.000,00	100	533.560.440,00	100	567.805.520,00	100	578.026.019,00	100	594.210.748,00	PENDIDIKAN - UPT SDN MANDARANREJO I
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Mandaranrejo II	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	126.140.000,00	100	121.851.240,00	100	129.671.920,00	100	132.006.015,00	100	135.702.183,00	PENDIDIKAN - UPT SDN MANDARANREJO II
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Ngemplakrejo	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	278.460.000,00	100	268.992.360,00	100	286.256.880,00	100	291.409.504,00	100	299.568.970,00	PENDIDIKAN - UPT SDN NGEMPLAKREJO
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	308.880.000,00	100	298.378.080,00	100	317.528.640,00	100	323.244.156,00	100	332.294.992,00	PENDIDIKAN- UPT SDN PANGGUNGREJO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SDN Panggungrejo													
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Pekuncen	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	1.078.460.000,00	100	1.041.792.360,00	100	1.108.656.880,00	100	1.128.612.704,00	100	1.160.213.860,00	PENDIDIKAN-UPT SDN PEKUNCEN
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Petahunan I	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	497.020.000,00	100	480.121.320,00	100	510.936.560,00	100	520.133.418,00	100	534.697.153,00	PENDIDIKAN - UPT SDN PETAHUNAN I
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Petahunan II	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	255.820.000,00	100	247.122.120,00	100	262.982.960,00	100	267.716.653,00	100	275.212.720,00	PENDIDIKAN - UPT SDN PETAHUNAN II
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Petamanan	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	614.080.000,00	100	593.201.280,00	100	631.274.240,00	100	642.637.168,00	100	660.631.008,00	PENDIDIKAN-UPT SDN PETAMANAN
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Pohjentrek I	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	225.860.000,00	100	218.180.760,00	100	232.184.080,00	100	236.363.394,00	100	242.981.569,00	PENDIDIKAN-UPT SDN POHJENTREK I
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Pohjentrek II	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	153.540.000,00	100	148.319.640,00	100	157.839.120,00	100	160.680.224,00	100	165.179.270,00	PENDIDIKAN - UPT SDN POHJENTREK II
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Purutrejo I	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	333.760.000,00	100	322.412.160,00	100	343.105.280,00	100	349.281.175,00	100	359.061.048,00	PENDIDIKAN-UPT SDN PURUTREJO I
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Purutrejo II	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	434.220.000,00	100	419.456.520,00	100	446.378.160,00	100	454.412.967,00	100	467.136.530,00	PENDIDIKAN-UPT SDN PURUTREJO II

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Purworejo I	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	402.160.000,00	100	388.486.560,00	100	413.420.480,00	100	420.862.048,00	100	432.646.186,00	PENDIDIKAN - UPT SDN PURWOREJO I
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Purworejo III	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	176.220.000,00	100	170.228.520,00	100	181.154.160,00	100	184.414.935,00	100	189.578.553,00	PENDIDIKAN- UPT SDN PURWOREJO III
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Randusari	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	480.440.000,00	100	464.105.040,00	100	493.892.320,00	100	502.782.382,00	100	516.860.289,00	PENDIDIKAN - UPT SDN RANDUSARI
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Sebani	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	409.500.000,00	100	395.577.000,00	100	420.966.000,00	100	428.543.388,00	100	440.542.603,00	PENDIDIKAN- UPT SDN SEBANI
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Sekargadung	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	479.100.000,00	100	462.810.600,00	100	492.514.800,00	100	501.380.066,00	100	515.418.708,00	PENDIDIKAN - UPT SDN SEKARGADUNG
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Tapaan I	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	177.540.000,00	100	171.503.640,00	100	182.511.120,00	100	185.796.321,00	100	190.998.618,00	PENDIDIKAN - UPT SDN TAPAAN I
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Tapaan II	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	122.800.000,00	100	118.624.800,00	100	126.238.400,00	100	128.510.691,00	100	132.108.990,00	PENDIDIKAN - UPT SDN TAPAAN II
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Tembokrejo I	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	380.980.000,00	100	368.026.680,00	100	391.647.440,00	100	398.697.094,00	100	409.860.613,00	PENDIDIKAN - UPT SDN TEMBOKREJO I
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Tembokrejo II	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	244.540.000,00	100	236.225.640,00	100	251.387.120,00	100	255.912.089,00	100	263.077.626,00	PENDIDIKAN- UPT SDN TEMBOKREJO II

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Trajeng I	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	653.500.000,00	100	631.281.000,00	100	671.798.000,00	100	683.890.364,00	100	703.039.294,00	PENDIDIKAN - UPT SDN TRAJENG I
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Trajeng II	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	166.980.000,00	100	161.302.680,00	100	171.655.440,00	100	174.745.238,00	100	179.638.104,00	PENDIDIKAN - UPT SDN TRAJENG II
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SDN Wirogunan	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	101,06	100	340.760.000,00	100	329.174.160,00	100	350.301.280,00	100	356.606.703,00	100	366.591.691,00	PENDIDIKAN - UPT SDN WIROGUNAN
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SMPN 1	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat	100,46	100	1.213.100.000,00	100	1.171.854.600,00	100	1.247.066.800,00	100	1.269.514.002,00	100	1.305.060.394,00	PENDIDIKAN- UPT SMPN 1
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SMPN 10	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat	100,46	100	888.225.000,00	100	858.025.350,00	100	913.095.300,00	100	929.531.015,00	100	955.557.884,00	PENDIDIKAN- UPT SMPN 10
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SMPN 11	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat	100,46	100	640.550.000,00	100	618.771.300,00	100	658.485.400,00	100	670.338.138,00	100	689.107.605,00	PENDIDIKAN - UPT SMPN 11
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SMPN 2	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat	100,46	100	1.240.725.000,00	100	1.198.540.350,00	100	1.275.465.300,00	100	1.298.423.676,00	100	1.334.779.538,00	ENDIDIKAN - UPT SMPN 2
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SMPN 3	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat	100,46	100	767.750.000,00	100	741.646.500,00	100	789.247.000,00	100	803.453.446,00	100	825.950.143,00	PENDIDIKAN - UPT SMPN 3
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SMPN 4	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat	100,46	100	1.248.700.000,00	100	1.206.244.200,00	100	1.283.663.600,00	100	1.306.769.545,00	100	1.343.359.092,00	PENDIDIKAN- UPT SMPN 4

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SMPN 5	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat	100,46	100	1.281.575.000,00	100	1.238.001.450,00	100	1.317.459.100,00	100	1.341.173.364,00	100	1.378.726.218,00	PENDIDIKAN-UPT SMPN 5
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SMPN 6	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat	100,46	100	1.158.325.000,00	100	1.118.941.950,00	100	1.190.758.100,00	100	1.212.191.745,00	100	1.246.133.114,00	PENDIDIKAN-UPT SMPN 6
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SMPN 7	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat	100,46	100	1.232.025.000,00	100	1.190.136.150,00	100	1.266.521.700,00	100	1.289.319.090,00	100	1.325.420.025,00	PENDIDIKAN-UPT SMPN 7
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SMPN 8	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat	100,46	100	1.038.975.000,00	100	1.003.649.850,00	100	1.068.066.300,00	100	1.087.291.494,00	100	1.117.735.656,00	PENDIDIKAN - UPT SMPN 8
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di SMPN 9	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat	100,46	100	899.250.000,00	100	868.675.500,00	100	924.429.000,00	100	941.068.722,00	100	967.418.647,00	PENDIDIKAN - UPT SMPN 9
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di TK Negeri Pembina Bugul Kidul	Angka Partisipasi Kasar PAUD/Sederajat	91,83	100	212.600.000,00	100	205.371.600,00	100	218.552.800,00	100	222.486.750,00	100	228.716.379,00	PENDIDIKAN - TK NEGERI PEMBINA BUGUL KIDUL
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di TK Negeri Pembina Purworejo	Angka Partisipasi Kasar PAUD/Sederajat	91,83	100	212.600.000,00	100	205.371.600,00	100	218.552.800,00	100	222.486.750,00	100	228.716.379,00	PENDIDIKAN(TK NEGERI PEMBINA PURWOREJO)
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				61.612.500,00		61.059.477,00		65.030.380,00		66.233.420,00		68.127.766,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualitas	Presentase guru bersertifikat Pendidik.	87,08	85,59	61.612.500,00	86,59	61.059.477,00	87,59	65.030.380,00	88,59	66.233.420,00	89,59	68.127.766,00	PENDIDIKAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				270.762.294.640,00		279.953.691.068,00		272.913.317.674,00		263.788.249.564,00		263.579.417.274,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				176.655.172.063,00		160.941.998.115,00		166.475.915.799,00		163.015.930.470,00		161.789.503.160,00	
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Pelayanan Rumah Sakit	Cost Recovery Rate (CRR)	92,25	86,53	94.813.346.961,00	90,86	85.069.867.731,00	95,4	87.775.308.706,00	100,17	85.762.742.700,00	105,18	84.967.319.349,00	KESEHATAN
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan PemerintahanÂ Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	68.715.482.902,00	3	65.833.861.837,00	3	66.782.281.720,00	3	65.846.945.896,00	3	65.549.496.334,00	KESEHATAN
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,8	84		84,2		84,4		84,6		84,8		
Meningkatnya Pelayanan BLUD Puskesmas Bugul Kidul	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	-	1	1.741.100.000,00	1	1.240.533.750,00	1	1.511.156.520,00	1	1.446.189.409,00	1	1.379.874.299,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL)
Meningkatnya Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan	-	1	1.641.260.000,00	1	1.231.486.616,00	1	1.465.930.493,00	1	1.387.733.419,00	1	1.328.345.307,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS GADINGREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Puskesmas Gadingrejo	pelayanan dan penunjang pelayanan												
Meningkatnya Pelayanan BLUD Puskesmas Kandangsapi	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	-	1	1.716.828.000,00	1	1.321.777.500,00	1	1.510.318.250,00	1	1.329.877.500,00	1	1.335.712.500,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI)
Meningkatnya Pelayanan BLUD Puskesmas Karangketug	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	-	1	1.662.870.000,00	1	1.374.911.212,00	1	1.636.144.343,00	1	1.515.839.610,00	1	1.591.631.591,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS KARANGKETUG)
Meningkatnya Pelayanan BLUD Puskesmas Kebonagung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	-	1	1.798.215.000,00	1	1.173.371.063,00	1	1.396.311.564,00	1	1.379.884.370,00	1	1.358.323.676,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG)
Meningkatnya Pelayanan BLUD Puskesmas Kebonsari	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	-	1	1.369.750.000,00	1	1.105.995.649,00	1	1.316.134.822,00	1	1.300.650.883,00	1	1.280.328.213,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS KEBONSARI)
Meningkatnya Pelayanan BLUD Puskesmas Sekargadung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	-	1	1.620.889.200,00	1	1.340.272.757,00	1	1.594.924.581,00	1	1.576.160.763,00	1	1.551.533.251,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG)
Meningkatnya Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan	-	1	1.575.430.000,00	1	1.249.920.000,00	1	1.487.404.800,00	1	1.469.905.920,00	1	1.446.938.640,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS TRAJENG)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Puskesmas Trajeng	dan penunjang pelayanan												
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				86.776.939.264,00		111.763.940.010,00		98.716.452.359,00		92.913.398.476,00		93.709.390.404,00	
Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Persentase SPM yang tercapai	91,11	80,2	10.186.653.039,00	81,19	30.399.544.988,00	82,18	12.060.656.631,00	83,17	4.654.499.817,00	84,16	15.581.791.623,00	KESEHATAN(RSUD DR. R. SOEDARSONO)
Meningkatnya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100	100	64.578.803.535,00	100	69.005.856.250,00	100	74.136.421.147,00	100	75.579.857.356,00	100	65.198.661.462,00	KESEHATAN
Meningkatnya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bugul Kidul	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100	100	1.618.656.000,00	100	1.599.788.800,00	100	1.562.148.800,00	100	1.578.588.800,00	100	1.657.518.240,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL)
Meningkatnya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya	100	100	1.906.598.900,00	100	1.958.832.070,00	100	2.056.773.674,00	100	2.159.612.357,00	100	2.267.592.975,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS GADINGREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Puskesmas Gadingrejo	Kesehatan Masyarakat)												
Meningkatnya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kandangsapi	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100	100	1.593.459.990 ,00	100	1.497.714.490 ,00	100	1.407.838.790 ,00	100	1.312.026.390 ,00	100	1.232.841.390 ,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI)
Meningkatnya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Karangketug	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100	100	1.457.752.500 ,00	100	1.513.442.595 ,00	100	1.589.114.723 ,00	100	1.668.570.461 ,00	100	1.751.998.984 ,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS KARANGKETUG)
Meningkatnya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebonagung	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100	100	1.518.505.400 ,00	100	1.626.578.524 ,00	100	1.670.746.259 ,00	100	1.710.383.994 ,00	100	1.608.151.739 ,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG)
Meningkatnya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebonsari	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100	100	1.108.358.700 ,00	100	1.026.622.100 ,00	100	994.295.500,0 0	100	986.065.500,0 0	100	983.850.500,0 0	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS KEBONSARI)
Meningkatnya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Kesehatan	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan)	100	100	1.659.638.700 ,00	100	1.718.029.743 ,00	100	1.750.049.862 ,00	100	1.700.966.480 ,00	100	1.786.014.804 ,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Masyarakat Puskesmas Sekargadung	dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)												
Meningkatnya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Trajeng	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100	100	1.148.512.500,00	100	1.417.530.450,00	100	1.488.406.973,00	100	1.562.827.321,00	100	1.640.968.687,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS TRAJENG)
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				933.994.000,00		1.347.073.997,00		1.434.678.757,00		1.461.219.829,00		1.503.012.274,00	
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	4,79	4,8	479.230.000,00	4,81	875.333.397,00	4,82	945.994.277,00	4,83	951.623.125,00	4,84	980.039.165,00	KESEHATAN
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas Bugul Kidul	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	4,79	4,8	23.520.000,00	4,81	18.870.000,00	4,82	18.870.000,00	4,83	19.813.500,00	4,84	20.804.175,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL)
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas Gadingrejo	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	4,79	4,8	94.080.000,00	4,81	98.784.000,00	4,82	103.723.200,00	4,83	108.909.360,00	4,84	114.354.828,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS GADINGREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas Karangketug	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	4,79	4,8	25.340.000,00	4,81	27.510.000,00	4,82	28.885.500,00	4,83	30.329.775,00	4,84	31.846.264,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI)
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas Kebonagung	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	4,79	4,8	105.844.000,00	4,81	107.960.600,00	4,82	111.180.980,00	4,83	116.740.029,00	4,84	113.995.600,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS KARANGKETUG)
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas Kebonsari	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	4,79	4,8	70.560.000,00	4,81	70.440.000,00	4,82	70.440.000,00	4,83	70.440.000,00	4,84	70.440.000,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG)
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas Sekargadung	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	4,79	4,8	45.240.000,00	4,81	49.392.000,00	4,82	51.861.600,00	4,83	54.454.680,00	4,84	57.177.414,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS KEBONSARI)
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas Trajeng	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	4,79	4,8	90.180.000,00	4,81	98.784.000,00	4,82	103.723.200,00	4,83	108.909.360,00	4,84	114.354.828,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG)
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN				619.946.113,00		577.875.585,00		617.307.565,00		623.863.693,00		638.536.444,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN													
Meningkatnya Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Kefarmasian yang berlzin	100	100	619.946.113,00	100	577.875.585,00	100	617.307.565,00	100	623.863.693,00	100	638.536.444,00	KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				5.776.243.200,00		5.322.803.361,00		5.668.963.194,00		5.773.837.096,00		5.938.974.992,00	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	-	10	607.801.000,00	15	180.071.025,00	20	192.973.021,00	25	198.528.305,00	30	208.454.720,00	KESEHATAN
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Puskesmas Bugul Kidul	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	-	10	831.380.000,00	15	709.060.000,00	20	727.925.000,00	25	761.321.250,00	30	799.837.313,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL)
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Puskesmas Gadingrejo	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	-	10	642.327.600,00	15	755.064.639,00	20	795.595.409,00	25	832.374.980,00	30	874.443.939,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS GADINGREJO)
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang	Persentase UKBM dengan strata	-	10	766.312.100,00	15	738.340.700,00	20	787.468.475,00	25	772.896.047,00	30	775.603.791,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kesehatan Puskesmas Kandangsapi	Purnama dan Mandiri												
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Puskesmas Karangketug	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	-	10	571.445.000,00	15	643.044.278,00	20	690.476.890,00	25	720.088.555,00	30	757.318.682,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS KARANGKETUG)
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Puskesmas Kebonagung	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	-	10	618.330.000,00	15	616.696.600,00	20	651.136.700,00	25	654.886.850,00	30	610.545.800,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG)
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Puskesmas Kebonsari	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	-	10	535.738.500,00	15	399.370.500,00	20	415.856.500,00	25	368.196.000,00	30	366.416.000,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS KEBONSARI)
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Puskesmas Sekargadung	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	-	10	641.269.000,00	15	657.011.119,00	20	719.846.749,00	25	746.476.436,00	30	790.882.641,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG)
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Puskesmas Trajeng	Persentase UKBM dengan strata Purnama dan Mandiri	-	10	561.640.000,00	15	624.144.500,00	20	687.684.450,00	25	719.068.673,00	30	755.472.106,00	KESEHATAN(UPT PUSKESMAS TRAJENG)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN				49.193.587.563,00		79.114.495.039,00		71.538.696.071,00		67.511.345.775,00		66.797.577.543,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				9.246.921.810,00		8.813.557.987,00		8.540.955.026,00		9.042.920.628,00		8.320.840.443,00	
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan PemerintahanÂ Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	9.246.921.810,00	3	8.813.557.987,00	3	8.540.955.026,00	3	9.042.920.628,00	3	8.320.840.443,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,26	80,2		81,1		82		82,9		83,8		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				4.695.036.600,00		5.086.634.922,00		5.571.559.720,00		5.777.256.841,00		6.070.155.501,00	
Terkelolanya Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kota dalam kondisi baik	72,38	73,68	4.695.036.600,00	74,97	5.086.634.922,00	76,46	5.571.559.720,00	77,94	5.777.256.841,00	79,43	6.070.155.501,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				1.844.079.099,00		2.359.761.805,00		1.158.922.645,00		1.146.637.685,00		1.145.734.666,00	
Meningkatnya RumahTangga yang Mendapatkan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatka	88,61	89,28	1.844.079.099,00	89,44	2.359.761.805,00	89,59	1.158.922.645,00	89,75	1.146.637.685,00	89,91	1.145.734.666,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Akses Air Minum yang Aman	n Akses Air Minum yang Aman												
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				2.224.737.720,00		2.295.673.101,00		2.375.112.214,00		2.326.896.664,00		2.302.269.403,00	
Meningkatnya Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	91,14	91,23	2.224.737.720,00	91,39	2.295.673.101,00	91,54	2.375.112.214,00	91,7	2.326.896.664,00	91,86	2.302.269.403,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				2.224.737.720,00		2.295.673.101,00		2.375.112.214,00		2.326.896.664,00		2.302.269.403,00	
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	73,15	74,51	3.129.641.200,00	75,88	12.297.989.406,00	77,24	3.483.532.470,00	78,6	3.602.894.736,00	79,97	3.705.998.226,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				12.913.402.500,00		13.334.729.610,00		14.170.639.729,00		11.423.267.314,00		11.155.833.209,00	
Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	87,25	88,15	12.913.402.500,00	88,49	13.334.729.610,00	88,83	14.170.639.729,00	89,16	11.423.267.314,00	89,5	11.155.833.209,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM				11.615.919.001,00		32.590.682.240,00		34.156.519.156,00		32.055.316.894,00		31.926.311.885,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENYELENGGARAAN JALAN													
Meningkatnya Kondisi Jalan Kota	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	16,33	16,49	11.615.919.001,00	16,57	32.590.682.240,00	16,65	34.156.519.156,00	16,73	32.055.316.894,00	16,81	31.926.311.885,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,5564	0,5599		0,5624		0,5702		0,5842		0,59		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				1.315.185.633,00		1.562.190.177,00		1.683.757.958,00		1.750.388.903,00		1.792.529.989,00	
Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi Yang ada di Kota Pasuruan	persentase Jasa Konstruksi yang berkualitas	65	71	1.315.185.633,00	74	1.562.190.177,00	77	1.683.757.958,00	80	1.750.388.903,00	83	1.792.529.989,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				2.208.664.000,00		773.275.791,00		397.697.153,00		385.766.110,00		377.904.221,00	
Terselenggaranya Program Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	82,67	82,67	2.208.664.000,00	84,42	773.275.791,00	86,17	397.697.153,00	87,92	385.766.110,00	92,35	377.904.221,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN				41.894.011.969,00		32.108.255.235,00		33.775.492.029,00		33.923.875.842,00		34.549.313.883,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KAWASAN PERMUKIMAN													
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				7.053.108.867,00		7.213.053.817,00		7.476.445.362,00		7.333.421.813,00		7.374.718.733,00	
Meningkatnya fasilitasi Kebutuhan Penunjang Pemerintahan	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	7.053.108.867,00	3	7.213.053.817,00	3	7.476.445.362,00	3	7.333.421.813,00	3	7.374.718.733,00	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Nilai SAKIP perangkat daerah	74,75	76,25		77,75		79,25		80,75		82,25		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1.409.999.900,00		1.443.175.864,00		1.536.427.462,00		1.564.261.486,00		1.608.419.304,00	
Meningkatnya pemenuhan Backlog Rumah	Jumlah Backlog Hunian	10042	8962	1.409.999.900,00	8422	1.443.175.864,00	7882	1.536.427.462,00	7342	1.564.261.486,00	6802	1.608.419.304,00	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				5.672.788.900,00		4.857.382.514,00		4.931.618.206,00		4.788.444.986,00		4.695.770.315,00	
Terlaksananya Program Kawasan Permukiman	Jumlah Ketersediaan Rumah Layak Huni	54721	55801	5.672.788.900,00	56341	4.857.382.514,00	56881	4.931.618.206,00	57421	4.788.444.986,00	57961	4.695.770.315,00	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				27.758.114.302,00		18.594.643.040,00		19.831.000.999,00		20.237.747.557,00		20.870.405.531,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman dan Perumahan yang Layak	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	83,41	88,36	27.758.114.302,00	90,32	18.594.643.040,00	91,88	19.831.000.999,00	93,18	20.237.747.557,00	94,49	20.870.405.531,00	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak	55,87	57,82		59,1		60,38		61,65		62,93		
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				19.152.318.875,00		20.524.193.839,00		23.804.615.827,00		24.110.299.987,00		27.317.787.538,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				15.860.805.085,00		16.345.083.459,00		19.261.907.360,00		19.322.864.802,00		22.214.842.769,00	
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan PemerintahanÂ Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	10.732.730.342,00	3	11.104.147.168,00	3	12.405.839.947,00	3	13.028.193.511,00	3	13.896.341.323,00	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,3	76,3		77,8		79,3		80,8		82,3		
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan PemerintahanÂ Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	5.128.074.743,00	3	5.240.936.291,00	3	6.856.067.413,00	3	6.294.671.291,00	3	8.318.501.446,00	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (KEBENCANAAN)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,1	74,1		76,1		78,1		80,1		82,1		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				2.323.516.650,00		2.635.900.342,00		2.941.003.812,00		3.138.050.026,00		3.381.506.439,00	
Terwujudnya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase perda dan perkada yang ditangani	77	78	2.323.516.650,00	79	2.635.900.342,00	80	2.941.003.812,00	81	3.138.050.026,00	82	3.381.506.439,00	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	Persentase satlinmas yang aktif	34,35	35		35,5		36		36,5		37		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				579.676.750,00		1.092.725.135,00		1.121.618.108,00		1.179.163.742,00		1.266.068.012,00	
Meningkatnya Penanggulangan Bencana yang Tertangani	Persentase Penanggulangan Bencana Yang Tertangani	100	100	579.676.750,00	100	1.092.725.135,00	100	1.121.618.108,00	100	1.179.163.742,00	100	1.266.068.012,00	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (KEBENCANAAN)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				388.320.390,00		450.484.903,00		480.086.547,00		470.221.417,00		455.370.318,00	
Meningkatnya Penanggulangan Kebakaran	Persentase Penanggulangan Kebakaran	100	100	388.320.390,00	100	450.484.903,00	100	480.086.547,00	100	470.221.417,00	100	455.370.318,00	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (KEBENCANAAN)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				18.287.103.461,00		17.899.196.692,00		19.094.558.383,00		19.365.501.284,00		19.865.729.484,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				4.992.121.264,00		4.423.901.704,00		4.740.588.237,00		4.752.114.270,00		4.838.377.627,00	
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	4.992.121.264,00	3	4.423.901.704,00	3	4.740.588.237,00	3	4.752.114.270,00	3	4.838.377.627,00	SOSIAL
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,26	78,5		79,7		80,9		82,1		83,3		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				3.502.725.300,00		6.213.011.801,00		6.617.064.888,00		6.739.478.352,00		6.932.234.616,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PPKS yang diberdayakan	100	100	3.502.725.300,00	100	6.213.011.801,00	100	6.617.064.888,00	100	6.739.478.352,00	100	6.932.234.616,00	SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.498.935.900,00		1.428.457.732,00		1.521.355.150,00		1.549.499.706,00		1.593.817.049,00	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Yang Tertangani	9,2	9,5	1.498.935.900,00	10	1.428.457.732,00	10	1.521.355.150,00	11	1.549.499.706,00	12	1.593.817.049,00	SOSIAL
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				7.995.865.197,00		5.478.004.336,00		5.834.257.412,00		5.942.189.203,00		6.112.142.147,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase kelompok rentan yang mendapatkan jaminan sosial	64	64	7.995.865.197,00	65	5.478.004.336,00	66	5.834.257.412,00	67	5.942.189.203,00	68	6.112.142.147,00	SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				249.279.600,00		274.737.364,00		294.404.533,00		295.120.334,00		300.477.543,00	
Meningkatnya Penanganan Bencana	Persentase Korban bencana yang tertangani	100	100	249.279.600,00	100	274.737.364,00	100	294.404.533,00	100	295.120.334,00	100	300.477.543,00	SOSIAL
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				48.176.200,00		81.083.755,00		86.888.163,00		87.099.419,00		88.680.502,00	
Meningkatnya Pengelolaan	Persentase Taman	100	100	48.176.200,00	100	81.083.755,00	100	86.888.163,00	100	87.099.419,00	100	88.680.502,00	SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Taman Makam Pahlawan	Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik												
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				14.915.492.656,00		17.415.491.636,00		18.139.702.727,00		19.087.271.667,00		20.207.722.815,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				10.044.956.439,00		12.071.044.998,00		12.629.325.632,00		13.429.234.730,00		14.280.497.217,00	
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.044.956.439,00		12.071.044.998,00		12.629.325.632,00		13.429.234.730,00		14.280.497.217,00	TENAGA KERJA
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3*	3	10.044.956.439,00	3	12.071.044.998,00	3	12.629.325.632,00	3	13.429.234.730,00	3	14.280.497.217,00	TENAGA KERJA
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,6	77,7		80		81,2		82,35		83,5		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				100.000.000,00		21.697.526,00		22.143.572,00		22.831.623,00		22.959.088,00	
Meningkatnya perencanaan tenaga kerja	Persentase Program dan Kegiatan	43	43	100.000.000,00	43	21.697.526,00	43	22.143.572,00	43	22.831.623,00	43	22.959.088,00	TENAGA KERJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	yang mengacu Perencanaan Tenaga Kerja												
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				2.320.685.617,00		2.436.719.898,00		2.558.555.893,00		2.686.483.687,00		2.820.807.872,00	
Meningkatnya peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	25	28	2.320.685.617,00	30	2.436.719.898,00	32	2.558.555.893,00	35	2.686.483.687,00	37	2.820.807.872,00	TENAGA KERJA
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				217.264.600,00		444.206.414,00		474.517.330,00		479.556.952,00		490.835.729,00	
Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan	Persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan	40	40	217.264.600,00	43	444.206.414,00	43	474.517.330,00	44	479.556.952,00	45	490.835.729,00	TENAGA KERJA
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				2.232.586.000,00		2.441.822.800,00		2.455.160.300,00		2.469.164.675,00		2.592.622.909,00	
Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	73	74	2.232.586.000,00	74	2.441.822.800,00	75	2.455.160.300,00	75	2.469.164.675,00	76	2.592.622.909,00	TENAGA KERJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	peserta BPJS Ketenagakerjaan)												
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.464.512.369,00		5.469.065.924,00		5.758.187.374,00		5.668.948.276,00		5.725.418.199,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				4.911.977.945,00		4.770.578.951,00		5.002.414.717,00		4.894.349.551,00		4.877.054.359,00	
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, efektif, efisien, dan transparan	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	4.911.977.945,00	3	4.770.578.951,00	3	5.002.414.717,00	3	4.894.349.551,00	3	4.877.054.359,00	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,9	79,2		80,3		81,4		82,5		83,6		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				151.360.514,00		294.737.353,00		323.591.518,00		340.136.484,00		405.200.151,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG Kota Pasuruan	31,93	32	151.360.514,00	32,2	294.737.353,00	32,4	323.591.518,00	32,6	340.136.484,00	32,8	405.200.151,00	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapatkan pelatihan	18	18,91		19,1		19,3		19,5		19,7		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				11.694.813,00		11.360.157,00		12.135.330,00		12.264.214,00		12.552.658,00	
Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	11.694.813,00	100	11.360.157,00	100	12.135.330,00	100	12.264.214,00	100	12.552.658,00	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				143.174.655,00		136.694.414,00		146.479.731,00		146.835.874,00		149.501.331,00	
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga yang menerima Layanan Komporehensif bagi Keluarga	100	100	143.174.655,00	100	136.694.414,00	100	146.479.731,00	100	146.835.874,00	100	149.501.331,00	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05 - PROGRAM				7.125.134,00		6.802.643,00		7.289.613,00		7.307.336,00		7.439.984,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK													
Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	100	100	7.125.134,00	100	6.802.643,00	100	7.289.613,00	100	7.307.336,00	100	7.439.984,00	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				125.282.405,00		119.611.986,00		128.174.452,00		128.486.089,00		130.818.449,00	
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	69,35	71	125.282.405,00	71,7	119.611.986,00	73,4	128.174.452,00	75,1	128.486.089,00	76,8	130.818.449,00	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				113.896.903,00		129.280.420,00		138.102.013,00		139.568.728,00		142.851.267,00	
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKHA) (Indeks)	83,67	83,99		84,31		84,63		84,95		85,27		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09 - URUSAN PEMERINTAH				15.581.710.115,00		16.559.326.819,00		17.373.543.160,00		18.242.220.318,00		19.154.331.334,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
AN BIDANG PANGAN													
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				14.856.931.285,00		15.464.930.659,00		16.238.177.192,00		17.050.086.052,00		17.902.590.354,00	
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3*	3	14.856.931.285,00	3	15.464.930.659,00	3	16.238.177.192,00	3	17.050.086.052,00	3	17.902.590.354,00	PANGAN
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	77		81,5		82,35		83		84,15		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				666.078.300,00		909.678.826,00		941.412.767,00		988.483.405,00		1.037.907.576,00	
Meningkatnya Rasio ketersediaan dan kebutuhan pangan	Rasio ketersediaan dan kebutuhan pangan	1,5	1,2	666.078.300,00	1,2	909.678.826,00	1,2	941.412.767,00	1,2	988.483.405,00	1,2	1.037.907.576,00	PANGAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				-		120.000.000,00		126.000.000,00		132.300.000,00		138.915.000,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah rawan	100	0	-	100	120.000.000,00	100	126.000.000,00	100	132.300.000,00	100	138.915.000,00	PANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	pangan yang tertangani												
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				58.700.530,00		64.717.334,00		67.953.201,00		71.350.861,00		74.918.404,00	
Meningkatnya Produk Pangan Yang Aman	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	85	85	58.700.530,00	86	64.717.334,00	86	67.953.201,00	87	71.350.861,00	87	74.918.404,00	PANGAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				44.575.812.485,00		58.710.656,00		661.783.018,00		1.176.112.547,00		853.134.759,00	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				44.533.812.485,00		32.673.625,00		635.210.731,00		1.150.744.077,00		828.535.736,00	
terselesaikannya ganti kerugian tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	16,67	21,43	44.533.812.485,00	33,33	32.673.625,00	40,48	635.210.731,00	42,86	1.150.744.077,00	42,86	828.535.736,00	PERTANAHAN
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI				42.000.000,00		26.037.031,00		26.572.287,00		25.368.470,00		24.599.023,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE													
meningkatnya petak tanah yang bersertifikat	Persentase petak tanah yang bersertifikat	52,94	64,71	42.000.000,00	70,59	26.037.031,00	76,47	26.572.287,00	82,35	25.368.470,00	88,24	24.599.023,00	PERTANAHAN
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				46.925.049.999,00		57.608.697.678,00		62.023.974.850,00		54.319.676.235,00		55.346.334.333,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				12.948.182.924,00		12.768.961.610,00		13.182.799.248,00		12.609.016.899,00		12.268.386.709,00	
TERLAKSANANYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	12.948.182.924,00	3	12.768.961.610,00	3	13.182.799.248,00	3	12.609.016.899,00	3	12.268.386.709,00	LINGKUNGAN HIDUP
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,36	76,5		78		79,5		81		82,5		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				8.000.000,00		146.408.370,00		171.293.822,00		189.600.010,00		212.541.075,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
TERLAKSANANYA PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lingkungan Hidup yang telah Dilakukan Evaluasi dan Pemantauan	20	20	8.000.000,00	20	146.408.370,00	20	171.293.822,00	20	189.600.010,00	20	212.541.075,00	LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				616.098.450,00		859.105.574,00		999.946.412,00		1.069.532.676,00		1.140.131.531,00	
TERLAKSANANYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Parameter Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	30	30	616.098.450,00	30,5	859.105.574,00	31	999.946.412,00	31,5	1.069.532.676,00	32	1.140.131.531,00	LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				10.217.338.200,00		12.258.674.004,00		13.055.896.823,00		13.297.425.872,00		13.677.747.236,00	
TERLAKSANANYA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	22,29	22,29	10.217.338.200,00	22,29	12.258.674.004,00	22,29	13.055.896.823,00	22,29	13.297.425.872,00	22,29	13.677.747.236,00	LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM				105.548.900,00		109.383.591,00		111.940.230,00		133.563.043,00		149.137.624,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)													
TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Pasuruan Terhadap Izin Lingkungan dan/atau IPPLH	74	70	105.548.900,00	69,5	109.383.591,00	69	111.940.230,00	68,5	133.563.043,00	68	149.137.624,00	LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				475.461.800,00		494.341.132,00		529.728.713,00		531.016.669,00		540.656.017,00	
TERLAKSANANYA PENINGKATAN	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang	0	10	475.461.800,00	20	494.341.132,00	30	529.728.713,00	40	531.016.669,00	50	540.656.017,00	LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Ditingkatkan Kompetensinya												
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				-		138.864.167,00		148.804.806,00		149.166.603,00		151.874.368,00	
TERLAKSANANYA PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Jumlah Peserta Penghargaan Lingkungan Hidup	76,47	-	-	85,29	138.864.167,00	88,23	148.804.806,00	91,17	149.166.603,00	92,11	151.874.368,00	LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				5.403.000,00		5.391.986,00		9.394.313,00		10.924.448,00		13.376.628,00	
TERLAKSANANYA PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan lingkungan hidup yang Tertangani	100	100	5.403.000,00	100	5.391.986,00	100	9.394.313,00	100	10.924.448,00	100	13.376.628,00	LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				22.549.016.725,00		30.827.567.244,00		33.814.170.483,00		26.329.430.015,00		27.192.483.145,00	
TERLAKSANANYA	Proporsi Rumah	26*	27,98	22.549.016.725,00	29,01	30.827.567.244,00	30,04	33.814.170.483,00	31,08	26.329.430.015,00	32,11	27.192.483.145,00	LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah												
	Timbulan Sampah terolah difasilitas pengolahan sampah	69*	69,06		69,26		69,46		69,66		69,86		
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.346.609.948,00		5.637.960.396,00		6.015.820.358,00		5.938.529.227,00		5.876.278.598,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				4.759.866.948,00		4.692.463.549,00		5.020.084.868,00		4.939.822.438,00		4.861.928.972,00	
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan PemerintahanÂ Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	4.759.866.948,00	3	4.692.463.549,00	3	5.020.084.868,00	3	4.939.822.438,00	3	4.861.928.972,00	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,46	82,1		82,7		83,3		83,9		84,5		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				352.503.100,00		524.157.281,00		556.110.148,00		564.327.063,00		578.438.803,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan IKD	12,91	14	352.503.100,00	15	524.157.281,00	16	556.110.148,00	17	564.327.063,00	18	578.438.803,00	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase kepemilikan KIA	99,44	97		97,5		98		98,5		99		
	Persentase kepemilikan KTP	99,68	98		98,1		98,2		98,3		98,4		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				198.082.200,00		230.249.492,00		243.181.867,00		244.369.615,00		249.418.973,00	
Meningkatnya Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	100	99,94	198.082.200,00	99,95	230.249.492,00	99,96	243.181.867,00	99,97	244.369.615,00	99,98	249.418.973,00	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase kepemilikan akta perceraian	85*	85		86		87		88		89		
	Persentase kepemilikan akta perkawinan	98,47	97		98		98,2		98,4		98,6		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				36.157.700,00		90.760.453,00		94.051.331,00		92.256.687,00		91.703.369,00	
Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	50*	50	36.157.700,00	50	90.760.453,00	50	94.051.331,00	50	92.256.687,00	50	91.703.369,00	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM				-		100.329.621,00		102.392.144,00		97.753.424,00		94.788.481,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN													
Terwujudnya Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100*	0	-	100	100.329.621,00	100	102.392.144,00	100	97.753.424,00	100	94.788.481,00	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.142.931.586,00		3.138.273.390,00		3.270.242.553,00		3.261.354.260,00		3.279.077.623,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				140.036.067,00		85.607.592,00		89.508.842,00		79.606.903,00		84.936.726,00	
Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility/ASFR 15-19)	13,6	15	140.036.067,00	15	85.607.592,00	14,9	89.508.842,00	14,9	79.606.903,00	14,8	84.936.726,00	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1.218.355.292,00		1.207.361.801,00		1.264.767.285,00		1.278.199.773,00		1.283.037.939,00	
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Unmetneed	9,06	8,89	1.218.355.292,00	8,61	1.207.361.801,00	8,34	1.264.767.285,00	8,06	1.278.199.773,00	7,78	1.283.037.939,00	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	64,77	68,2		68,6		69		69,3		69,6		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1.784.540.227,00		1.845.303.997,00		1.915.966.426,00		1.903.547.584,00		1.911.102.958,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-R/M)	6,7	6,7	1.784.540.227,00	6,8	1.845.303.997,00	6,8	1.915.966.426,00	6,9	1.903.547.584,00	6,9	1.911.102.958,00	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				22.967.374.473,00		23.464.615.973,00		24.524.647.947,00		28.264.291.588,00		30.311.234.963,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.749.875.228,00		7.953.240.704,00		8.277.230.600,00		8.060.782.565,00		7.975.415.534,00	
Terlaksananya Penunjang	Level Maturitas	3	3	8.749.875.228,00	3	7.953.240.704,00	3	8.277.230.600,00	3	8.060.782.565,00	3	7.975.415.534,00	PERHUBUNGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Urusan Perhubungan	SPIP Perangkat Daerah												
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,4	74		76		78		80		82		
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				12.717.299.245,00		13.819.275.605,00		14.272.592.778,00		14.274.611.668,00		14.286.530.665,00	
Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelayakan Sarana dan Prasarana Perhubungan	78	80	12.717.299.245,00	83	13.819.275.605,00	86	14.272.592.778,00	89	14.274.611.668,00	92	14.286.530.665,00	PERHUBUNGAN
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				500.200.000,00		815.519.612,00		1.071.278.244,00		5.057.658.694,00		7.147.324.585,00	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pelayaran	100	100	500.200.000,00	100	815.519.612,00	100	1.071.278.244,00	100	5.057.658.694,00	100	7.147.324.585,00	PERHUBUNGAN
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				1.000.000.000,00		876.580.052,00		903.546.325,00		871.238.661,00		901.964.179,00	
Terselenggaranya Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api	16,7	100	1.000.000.000,00	100	876.580.052,00	100	903.546.325,00	100	871.238.661,00	100	901.964.179,00	PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				15.677.420.911,00		15.517.537.773,00		17.305.437.145,00		18.018.958.805,00		19.150.661.718,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				6.007.023.361,00		5.600.765.377,00		5.833.600.056,00		5.683.950.349,00		5.624.951.562,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	6.007.023.361,00	3	5.600.765.377,00	3	5.833.600.056,00	3	5.683.950.349,00	3	5.624.951.562,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,3	76,9		78,5		80,1		81,7		83,3		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				2.023.832.750,00		2.374.408.229,00		2.872.330.924,00		3.355.793.386,00		3.648.573.579,00	
Terlaksananya Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Implementasi keterbukaan informasi publik	54,67	70	2.023.832.750,00	85	2.374.408.229,00	100	2.872.330.924,00	100	3.355.793.386,00	100	3.648.573.579,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase Tindak lanjut pengaduan yang masuk	100	100		100		100		100		100		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				7.646.564.800,00		7.542.364.167,00		8.599.506.165,00		8.979.215.070,00		9.877.136.577,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pengelolaaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi yang terintegrasi	40	52	7.646.564.800,00	64	7.542.364.167,00	76	8.599.506.165,00	88	8.979.215.070,00	100	9.877.136.577,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				700.973.400,00		725.760.573,00		755.131.205,00		792.887.764,00		783.132.369,00	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				38.454.300,00		39.569.475,00		40.558.712,00		42.586.647,00		44.715.980,00	
Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi mendapat pemeriksaan dan pengawasan	60	66	38.454.300,00	67	39.569.475,00	68	40.558.712,00	69	42.586.647,00	69	44.715.980,00	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				13.779.600,00		14.179.208,00		14.533.689,00		15.260.373,00		16.023.392,00	
Meningkatnya Koperasi Dengan Kriteria Sehat	Persentase Koperasi Sehat	12	14	13.779.600,00	15,3	14.179.208,00	16,1	14.533.689,00	16,7	15.260.373,00	16,9	16.023.392,00	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				212.330.700,00		222.947.235,00		228.520.916,00		239.946.962,00		251.944.310,00	
Meningkatnya Koperasi Yang Mendapat	Prosentase Koperasi Yang	50	56,2	212.330.700,00	57,9	222.947.235,00	60,3	228.520.916,00	63,6	239.946.962,00	67,8	251.944.310,00	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pendidikan dan Pelatihan	Mendapat Pendidikan dan Pelatihan												
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				109.940.200,00		113.128.466,00		118.784.889,00		124.724.134,00		118.515.536,00	
Meningkatnya Koperasi yang telah diberdayakan	Persentase koperasi yang mendapatkan pemberdayaan	40	41,32	109.940.200,00	42,98	113.128.466,00	45,5	118.784.889,00	48,8	124.724.134,00	52,9	118.515.536,00	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				296.805.000,00		305.412.345,00		320.682.962,00		336.717.110,00		319.955.790,00	
Meningkatnya Usaha Mikro yang telah diberdayakan	Persentase Usaha mikro bertransformasi dari informal ke formal	40	45	296.805.000,00	48	305.412.345,00	52	320.682.962,00	55	336.717.110,00	58	319.955.790,00	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				29.663.600,00		30.523.844,00		32.050.037,00		33.652.538,00		31.977.361,00	
Meningkatnya Usaha Mikro yang telah dikembangkan	Persentase Usaha Mikro yang lolos kurasi dan memiliki laporan keuangan	20	25	29.663.600,00	29	30.523.844,00	33	32.050.037,00	38	33.652.538,00	42	31.977.361,00	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.963.321.524,00		6.069.906.168,00		6.082.545.800,00		6.064.306.395,00		6.147.692.901,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				4.591.310.148,00		4.591.310.148,00		4.591.310.148,00		4.591.310.148,00		4.591.310.148,00	
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3*	3	4.591.310.148,00	3	4.591.310.148,00	3	4.591.310.148,00	3	4.591.310.148,00	3	4.591.310.148,00	PENANAMAN MODAL
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,7	77		80		82		84		84		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				88.432.800,00		88.200.000,00		98.000.000,00		-		-	
Meningkatnya pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah bidang usaha yang terealisasi	145	150	88.432.800,00	155	88.200.000,00	160	98.000.000,00	0	-	0	-	PENANAMAN MODAL
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				173.581.000,00		225.400.000,00		166.600.000,00		181.300.000,00		196.000.000,00	
Meningkatnya investor yang berinvestasi	Presentase peningkatan investor yang berinvestasi	8	10	173.581.000,00	10	225.400.000,00	10	166.600.000,00	10	181.300.000,00	10	196.000.000,00	PENANAMAN MODAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				949.691.076,00		977.232.322,00		1.026.093.939,00		1.077.398.635,00		1.131.268.566,00	
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan	Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perizinan	80	80	949.691.076,00	81	977.232.322,00	82	1.026.093.939,00	83	1.077.398.635,00	84	1.131.268.566,00	PENANAMAN MODAL
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				97.415.400,00		119.967.092,00		125.965.447,00		132.263.719,00		138.876.905,00	
Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase capaian realisasi investasi terhadap target realisasi investasi	68	70	97.415.400,00	73	119.967.092,00	75	125.965.447,00	78	132.263.719,00	80	138.876.905,00	ENANAMAN MODAL
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				62.891.100,00		67.796.606,00		74.576.266,00		82.033.893,00		90.237.282,00	
Meningkatnya pemanfaatan Data dan Informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	10	15	62.891.100,00	10	67.796.606,00	10	74.576.266,00	10	82.033.893,00	10	90.237.282,00	PENANAMAN MODAL
2.19 - URUSAN				11.885.092.675,00		11.502.935.574,00		12.302.686.426,00		12.394.477.136,00		12.660.450.427,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				5.251.338.151,00		5.071.764.149,00		5.434.828.139,00		5.448.042.113,00		5.546.938.388,00	
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan PemerintahanÂ Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3*	3	5.251.338.151,00	3	5.071.764.149,00	3	5.434.828.139,00	3	5.448.042.113,00	3	5.546.938.388,00	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,51	74		74		74		74		75		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				639.828.300,00		671.687.787,00		715.369.907,00		728.604.008,00		749.442.859,00	
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio wirausaha Pemuda	0,1	0,1	639.828.300,00	0,11	671.687.787,00	0,12	715.369.907,00	0,13	728.604.008,00	0,14	749.442.859,00	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				5.993.926.224,00		5.759.483.638,00		6.152.488.380,00		6.217.831.015,00		6.364.069.180,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlit Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan	36	36	5.993.926.224,00	61	5.759.483.638,00	37	6.152.488.380,00	62	6.217.831.015,00	38	6.364.069.180,00	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				154.221.900,00		400.372.114,00		494.794.342,00		588.573.564,00		711.446.671,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				154.221.900,00		400.372.114,00		494.794.342,00		588.573.564,00		711.446.671,00	
Terselenggaranya Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang dipublikasi	94,56	95	154.221.900,00	95,25	400.372.114,00	95,5	494.794.342,00	95,75	588.573.564,00	96	711.446.671,00	STATISTIK
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				136.540.700,00		64.696.321,00		85.834.207,00		106.529.305,00		134.287.638,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				136.540.700,00		64.696.321,00		85.834.207,00		106.529.305,00		134.287.638,00	
Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase penanganan serangan siber yang ditindaklanjuti tepat waktu	79*	80	136.540.700,00	82	64.696.321,00	85	85.834.207,00	87	106.529.305,00	90	134.287.638,00	PERSANDIAN
2.22 - URUSAN PEMERINTAH				3.287.357.138,00		3.351.808.124,00		3.578.941.917,00		3.615.430.878,00		3.698.979.874,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
AN BIDANG KEBUDAYAAN													
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				2.663.233.800,00		2.767.921.844,00		2.955.213.509,00		2.985.078.149,00		3.053.801.779,00	
Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok seni lokal yang aktif	99,25	100	2.663.233.800,00	100	2.767.921.844,00	100	2.955.213.509,00	100	2.985.078.149,00	100	3.053.801.779,00	KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				92.017.566,00		86.085.219,00		91.959.340,00		92.935.996,00		95.121.772,00	
Meningkatnya Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pelestarian Seni Budaya	66,67	63,64	92.017.566,00	72,73	86.085.219,00	81,82	91.959.340,00	90,91	92.935.996,00	100	95.121.772,00	KEBUDAYAAN
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				70.000.000,00		59.062.993,00		63.093.222,00		63.763.305,00		65.262.964,00	
Meningkatnya Pembinaan Sejarah	Jumlah literasi yang dikaji	16	18	70.000.000,00	19	59.062.993,00	20	63.093.222,00	21	63.763.305,00	22	65.262.964,00	KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				462.105.772,00		438.738.068,00		468.675.846,00		473.653.428,00		484.793.359,00	
Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase pelestarian cagar budaya	100	100	462.105.772,00	100	438.738.068,00	100	468.675.846,00	100	473.653.428,00	100	484.793.359,00	KEBUDAYAAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				4.784.899.094,00		5.714.151.726,00		6.120.390.354,00		6.142.613.033,00		6.230.799.655,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PERPUSTAKAAN													
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				4.708.296.094,00		5.233.392.115,00		5.608.026.298,00		5.621.661.378,00		5.723.709.299,00	
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan PemerintahanÂ Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3*	3	4.708.296.094,00	3	5.233.392.115,00	3	5.608.026.298,00	3	5.621.661.378,00	3	5.723.709.299,00	PERPUSTAKAAN
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,3	79,4		80,4		81,4		82,4		83,4		
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				76.603.000,00		429.015.351,00		456.915.665,00		465.368.450,00		478.678.484,00	
Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan	Presentase Masyarakat Yang Puas Terhadap layanan Perpustakaan	95,65	95,7	76.603.000,00	95,8	429.015.351,00	95,9	456.915.665,00	96	465.368.450,00	96,1	478.678.484,00	PERPUSTAKAAN
				13.772.100,00		214.686.051,00		227.586.365,00		221.039.150,00		219.349.184,00	
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				-		51.744.260,00		55.448.391,00		55.583.205,00		28.411.872,00	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi	Presentase Arsip Sejarah	10	0	-	10	51.744.260,00	10	55.448.391,00	10	55.583.205,00	10	28.411.872,00	PERPUSTAKAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Nasional dan Naskah Kuno	Kuno Yang dilestarikan													
				-		51.744.260,00		55.448.391,00		55.583.205,00		28.411.872,00		
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				59.658.200,00		309.128.586,00		330.365.622,00		333.498.800,00		341.095.757,00		
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				58.091.600,00		266.341.151,00		284.515.234,00		287.536.934,00		294.299.562,00		
Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	61,88	61,88	58.091.600,00	62	266.341.151,00	62,3	284.515.234,00	62,7	287.536.934,00	63	294.299.562,00	KEARSIPAN	
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				1.566.600,00		42.787.435,00		45.850.388,00		45.961.866,00		46.796.195,00		
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip yang diselamatkan	20	100	1.566.600,00	100	42.787.435,00	100	45.850.388,00	100	45.961.866,00	100	46.796.195,00	KEARSIPAN	
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.331.003.726,00		1.347.086.159,00		1.404.615.148,00		1.490.215.196,00		1.510.194.779,00		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				135.740.900,00		191.984.254,00		177.656.983,00		233.377.701,00		212.288.241,00		
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2	2	135.740.900,00	2	191.984.254,00	2	177.656.983,00	2	233.377.701,00	2	212.288.241,00	KELAUTAN DAN PERIKANAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap				135.740.900,00		191.984.254,00		177.656.983,00		233.377.701,00		212.288.241,00	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				984.270.726,00		937.991.034,00		998.991.751,00		1.017.472.760,00		1.046.573.566,00	
Meningkatnya produksi garam				-		-		-		-		-	KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Jumlah produksi garam	3000	3000	984.270.726,00	3100	937.991.034,00	3150	998.991.751,00	3200	1.017.472.760,00	3250	1.046.573.566,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1	1		1		1		1		1		KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				24.537.800,00		25.249.396,00		26.511.866,00		27.837.459,00		29.229.332,00	
Meningkatnya kasus pelanggaran/ilegal fishing yang ditangani	Persentase kasus pelanggaran/ ilegal fishing yang ditangani	80	80	24.537.800,00	80	25.249.396,00	80	26.511.866,00	80	27.837.459,00	80	29.229.332,00	KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				186.454.300,00		191.861.475,00		201.454.548,00		211.527.276,00		222.103.640,00	
Meningkatnya produksi pengolahan	Persentase peningkatan produksi	-2,84	1	186.454.300,00	1	191.861.475,00	1	201.454.548,00	1	211.527.276,00	1	222.103.640,00	KELAUTAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
dan pemasaran hasil perikanan	pengolahan dan pemasaran hasil perikanan												
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				17.984.125.404,00		9.708.308.023,00		10.232.318.261,00		10.440.511.564,00		10.770.327.677,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				17.192.042.704,00		8.921.236.729,00		9.394.315.734,00		9.591.386.210,00		9.898.297.838,00	
Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata yang Dikembangkan	Persentase Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan	30	32	17.192.042.704,00	32	8.921.236.729,00	35	9.394.315.734,00	38	9.591.386.210,00	40	9.898.297.838,00	PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				371.799.900,00		351.116.672,00		373.837.364,00		378.799.316,00		389.017.128,00	
Meningkatnya pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	15	20	371.799.900,00	20	351.116.672,00	30	373.837.364,00	30	378.799.316,00	30	389.017.128,00	PARIWISATA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				214.408.800,00		222.645.993,00		237.053.373,00		240.199.788,00		246.678.987,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Persentase sub sektor yang meningkat produksinya	15	18	214.408.800,00	24	222.645.993,00	24	237.053.373,00	29	240.199.788,00	29	246.678.987,00	PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				205.874.000,00		213.308.629,00		227.111.790,00		230.126.250,00		236.333.724,00	
Meningkatnya pengembangan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kemampuan teknis dan manajerialnya	45	47	205.874.000,00	59	213.308.629,00	47	227.111.790,00	59	230.126.250,00	47	236.333.724,00	PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.829.145.890,00		2.146.319.371,00		2.150.735.340,00		2.258.272.105,00		2.369.483.547,00	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				759.118.080,00		697.277.918,00		732.141.814,00		768.748.904,00		805.484.185,00	
Tercukupinya sarana pertanian	Persentase sarana pertanian tercukupi	100	100	759.118.080,00	100	697.277.918,00	100	732.141.814,00	100	768.748.904,00	100	805.484.185,00	PERTANIAN
3.27.03 - PROGRAM				823.071.170,00		1.056.254.314,00		1.006.167.030,00		1.056.475.381,00		1.109.299.150,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN													
Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	74	75	823.071.170,00	75	1.056.254.314,00	75	1.006.167.030,00	75	1.056.475.381,00	75	1.109.299.150,00	PERTANIAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				156.652.740,00		273.326.990,00		286.993.340,00		301.343.006,00		316.410.157,00	
Meningkatnya status kesehatan hewan	Persentase hewan sakit tertangani	100	100	156.652.740,00	100	273.326.990,00	100	286.993.340,00	100	301.343.006,00	100	316.410.157,00	PERTANIAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				60.000.000,00		86.718.300,00		91.054.215,00		95.606.926,00		100.387.272,00	
Meningkatnya bencana pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang tertangani	Persentase bencana pertanian tertangani	90	90	60.000.000,00	90	86.718.300,00	90	91.054.215,00	90	95.606.926,00	90	100.387.272,00	PERTANIAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				30.303.900,00		32.741.849,00		34.378.941,00		36.097.888,00		37.902.783,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penyuluhan pertanian	Persentase kelompok tani mendapat pembinaan	100	90	30.303.900,00	90	32.741.849,00	90	34.378.941,00	90	36.097.888,00	90	37.902.783,00	PERTANIAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				28.560.891.409,00		39.706.803.108,00		21.326.941.761,00		22.417.114.575,00		23.512.179.234,00	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				8.878.776.709,00		9.519.189.523,00		9.995.148.999,00		10.494.906.449,00		11.019.651.771,00	
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3*	3	8.878.776.709,00	3	9.519.189.523,00	3	9.995.148.999,00	3	10.494.906.449,00	3	11.019.651.771,00	PERDAGANGAN
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73	75		80		81		83		83		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				53.217.000,00		109.355.531,00		117.183.785,00		117.468.700,00		119.601.065,00	
Meningkatnya Kepatuhan pedagang/produsen terhadap perlindungan konsumen	Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen	70	70	53.217.000,00	73	109.355.531,00	75	117.183.785,00	78	117.468.700,00	80	119.601.065,00	PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				17.953.281.500,00		27.880.479.929,00		8.906.941.945,00		9.381.689.043,00		9.828.723.495,00	
Meningkatnya sarana prasarana distribusi perdagangan yang layak	Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang layak	10	10	17.953.281.500,00	12	27.880.479.929,00	13	8.906.941.945,00	14	9.381.689.043,00	15	9.828.723.495,00	PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				595.912.300,00		793.501.928,00		833.177.025,00		874.835.876,00		918.577.670,00	
Terkontrolnya Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok	Indeks Perkembangan Harga	2	2	595.912.300,00	2	793.501.928,00	2	833.177.025,00	2	874.835.876,00	2	918.577.670,00	PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				110.164.400,00		169.476.197,00		177.950.007,00		186.847.507,00		196.189.883,00	
Meningkatnya Kepatuhan Pedagang/pelaku usaha terhadap tertib niaga	Persentase Kepatuhan Pedagang/pelaku usaha terhadap tertib niaga	60	65	110.164.400,00	68	169.476.197,00	70	177.950.007,00	72	186.847.507,00	75	196.189.883,00	PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN				969.539.500,00		1.234.800.000,00		1.296.540.000,00		1.361.367.000,00		1.429.435.350,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI													
Meningkatnya pemasaran IKM	Persentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran	30	30	969.539.500,00	30	1.234.800.000,00	30	1.296.540.000,00	30	1.361.367.000,00	30	1.429.435.350,00	PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				932.865.500,00		592.598.630,00		853.763.595,00		653.339.990,00		941.274.363,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				932.865.500,00		592.598.630,00		853.763.595,00		653.339.990,00		941.274.363,00	
Meningkatnya IKM Berkembang	Persentase Peningkatan IKM Berkembang	5	5	932.865.500,00	5	592.598.630,00	5	853.763.595,00	5	653.339.990,00	5	941.274.363,00	PERINDUSTRIAN
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				41.188.909.716,00		43.798.568.053,00		46.083.852.584,00		48.067.780.617,00		50.227.451.295,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				35.107.973.871,00		36.768.999.864,00		38.584.061.961,00		40.497.479.377,00		42.488.015.459,00	
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	33.955.415.971,00	3	35.250.759.386,00	3	36.913.997.356,00	3	38.660.397.223,00	3	40.494.117.085,00	SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,61	80,5		81,3		82,1		82,9		83,7		
Meningkatnya Capaian area Reformasi Birokrasi	Persentase realisasi kebijakan bidang administrasi umum perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100	100	439.796.400,00	100	701.192.278,00	100	771.311.505,00	100	848.442.654,00	100	906.394.774,00	SEKRETARIAT DAERAHI
Meningkatnya Layanan Kebutuhan Pimpinan yang Terfasilitasi	Persentase layanan kebutuhan pimpinan yang difasilitasi	100	100	712.761.500,00	100	817.048.200,00	100	898.753.100,00	100	988.639.500,00	100	1.087.503.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				4.848.524.077,00		5.694.160.299,00		6.082.708.453,00		6.147.309.988,00		6.291.888.870,00	
Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	80	100	3.428.331.877,00	100	4.313.728.655,00	100	4.608.081.528,00	100	4.657.021.756,00	100	4.766.550.310,00	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kebijakan Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	80	100	382.496.500,00	100	372.431.335,00	100	397.844.599,00	100	402.069.916,00	100	411.526.263,00	SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Reformasi Hukum	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	80*	100	1.037.695.700,00	100	1.008.000.309,00	100	1.076.782.326,00	100	1.088.218.316,00	100	1.113.812.297,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				1.232.411.768,00		1.335.407.890,00		1.417.082.170,00		1.422.991.252,00		1.447.546.966,00	
Meningkatnya Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	417.428.515,00	100	426.885.476,00	100	456.014.480,00	100	460.857.591,00	100	471.696.575,00	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kebijakan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	Persentase Kebijakan Bidang Pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100	100	384.599.800,00	100	450.250.373,00	100	481.023.335,00	100	486.133.140,00	100	497.566.329,00	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang	85	90	430.383.453,00	90	458.272.041,00	90	480.044.355,00	90	476.000.521,00	90	478.284.062,00	SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	ditindaklanjuti												
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				45.344.867.159,00		55.766.092.792,00		62.397.731.028,00		66.346.803.253,00		70.089.019.861,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				29.328.214.059,00		29.398.956.079,00		32.797.634.803,00		34.822.455.580,00		36.932.615.932,00	
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan PemerintahanÂ Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	29.328.214.059,00	3	29.398.956.079,00	3	32.797.634.803,00	3	34.822.455.580,00	3	36.932.615.932,00	SEKRETARIAT DPRD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,8	74,8		76,6		78,4		80,2		82		
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				16.016.653.100,00		26.367.136.713,00		29.600.096.225,00		31.524.347.673,00		33.156.403.929,00	
Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100	100	16.016.653.100,00	100	26.367.136.713,00	100	29.600.096.225,00	100	31.524.347.673,00	100	33.156.403.929,00	SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaha	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	n yang terlaksana												
5.01 - PERENCANAAN				7.474.322.681,00		7.331.915.583,00		7.814.685.858,00		7.821.802.990,00		8.145.963.903,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				5.459.196.800,00		5.246.821.105,00		5.617.195.419,00		5.626.417.960,00		5.725.092.168,00	
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, efektif, efisien, dan transparan	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3*	3	5.459.196.800,00	3	5.246.821.105,00	3	5.617.195.419,00	3	5.626.417.960,00	3	5.725.092.168,00	PERENCANAAN
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,95	77		78,5		80		81,5		83		
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, efektif, efisien, dan transparan				5.459.196.800,00		5.246.821.105,00		5.617.195.419,00		5.626.417.960,00		5.725.092.168,00	PERENCANAAN
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.041.457.281,00		979.243.152,00		1.016.175.382,00		1.001.521.661,00		1.198.926.355,00	
Meningkatnya kualitas	Persentase usulan	97,96	85	1.041.457.281,00	86	979.243.152,00	87	1.016.175.382,00	88	1.001.521.661,00	89	1.198.926.355,00	PERENCANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
perencanaan pembangunan daerah	masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD												
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	0	90		90		90		90		90		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				973.668.600,00		1.105.851.326,00		1.181.315.057,00		1.193.863.369,00		1.221.945.380,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan bidang sektoral	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	100	100	973.668.600,00	100	1.105.851.326,00	100	1.181.315.057,00	100	1.193.863.369,00	100	1.221.945.380,00	PERENCANAAN
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	100		100		100		100		100		
5.02 - KEUANGAN				25.255.664.961,00		25.119.440.438,00		26.406.910.937,00		26.796.321.619,00		27.503.534.870,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				16.409.730.173,00		16.172.247.259,00		16.912.716.191,00		17.165.674.744,00		17.545.545.330,00	
Meningkatnya Fasilitasi	Level Maturitas	3*	3	8.991.963.832,00	3	8.984.987.270,00	3	9.210.953.712,00	3	9.445.186.578,00	3	9.684.910.023,00	KEUANGAN(PENDAPATAN)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SPIP Perangkat Daerah												
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,7	77		80		81		82		83		
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan PemerintahanÂ Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	7.417.766.341,00	3	7.187.259.989,00	3	7.701.762.479,00	3	7.720.488.166,00	3	7.860.635.307,00	KEUANGAN
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,65	79,7		80,7		81,7		82,7		83,7		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				5.422.162.400,00		5.685.554.402,00		6.055.305.158,00		6.167.326.257,00		6.343.718.361,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran dan akuntabilitas keuangan daerah	Persentase administrasi penatausahaan dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan	100	100	5.422.162.400,00	100	5.685.554.402,00	100	6.055.305.158,00	100	6.167.326.257,00	100	6.343.718.361,00	KEUANGAN
	Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penyusunan APBD sesuai ketentuan	100	100		100		100		100		100		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG				1.452.563.600,00		1.425.464.720,00		1.522.732.883,00		1.538.905.100,00		1.575.098.856,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MILIK DAERAH													
Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD	Persentase administrasi BMD sesuai ketentuan	100	100	1.452.563.600 ,00	100	1.425.464.720 ,00	100	1.522.732.883 ,00	100	1.538.905.100 ,00	100	1.575.098.856 ,00	KEUANGAN
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.971.208.788 ,00		1.836.174.057 ,00		1.916.156.705 ,00		1.924.415.518 ,00		2.039.172.323 ,00	
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai potensi pendapatan pajak daerah	0	103.895.345. 898,00	1.971.208.788 ,00	108.611.872. 899,00	1.836.174.057 ,00	113.807.173. 564,00	1.916.156.705 ,00	118.841.465.893, 00	1.924.415.518 ,00	123.951.648.927, 00	2.039.172.323 ,00	KEUANGAN(PENDAPATAN)
	Rasio kepatuhan Wajib Pajak	0	87		87		87		87		87		
5.03 - KEPEGAWAIAN				7.154.470.605 ,00		7.043.526.226 ,00		7.695.810.406 ,00		7.765.358.982 ,00		8.010.202.236 ,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				5.981.710.875 ,00		5.904.269.233 ,00		6.478.814.950 ,00		6.535.438.400 ,00		6.751.354.955 ,00	
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan PemerintahanÂ Daerah				5.981.710.875 ,00		5.904.269.233 ,00		6.478.814.950 ,00		6.535.438.400 ,00		6.751.354.955 ,00	KEPEGAWAIAN
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan PemerintahanÂ Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	5.981.710.875 ,00	3	5.904.269.233 ,00	3	6.478.814.950 ,00	3	6.535.438.400 ,00	3	6.751.354.955 ,00	KEPEGAWAIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	84,1		84,2		84,3		84,4		84,5		
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1.172.759.730,00		1.139.256.993,00		1.216.995.456,00		1.229.920.582,00		1.258.847.281,00	
Meningkatnya Fasilitasi Kepegawaiaan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan ASN	87	90	1.172.759.730,00	91	1.139.256.993,00	92	1.216.995.456,00	93	1.229.920.582,00	94	1.258.847.281,00	KEPEGAWAIAN
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.500.000.000,00		1.645.978.434,00		1.753.021.957,00		1.785.452.271,00		1.830.874.479,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1.500.000.000,00		1.645.978.434,00		1.753.021.957,00		1.785.452.271,00		1.830.874.479,00	
Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan predikat baik	98	99	1.500.000.000,00	99	1.645.978.434,00	99	1.753.021.957,00	99	1.785.452.271,00	99	1.830.874.479,00	KEPEGAWAIAN
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				480.000.000,00		707.339.349,00		757.310.173,00		790.650.643,00		766.669.552,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				480.000.000,00		-		-		-		-	
Meningkatnya hasil penelitian dan	Persentase hasil penelitian	0	82	480.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan	dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan												
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				-		707.339.349,00		757.310.173,00		790.650.643,00		766.669.552,00	
Meningkatnya hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan	Persentase hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan	0	0	-	83	707.339.349,00	83	757.310.173,00	84	790.650.643,00	84	766.669.552,00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				14.694.913.745,00		13.557.808.775,00		14.522.958.521,00		14.572.348.993,00		14.846.200.359,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				13.871.864.745,00		12.735.052.577,00		13.646.695.716,00		13.679.875.622,00		13.928.201.298,00	
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	13.871.864.745,00	3	12.735.052.577,00	3	13.646.695.716,00	3	13.679.875.622,00	3	13.928.201.298,00	PENGAWASAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	73		75,3		77,6		79,9		82,2		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				427.406.500,00		433.354.835,00		461.537.360,00		470.075.645,00		483.520.310,00	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	100	100	427.406.500,00	100	433.354.835,00	100	461.537.360,00	100	470.075.645,00	100	483.520.310,00	PENGAWASAN
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				395.642.500,00		389.401.363,00		414.725.445,00		422.397.726,00		434.478.751,00	
Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3	3	395.642.500,00	3	389.401.363,00	3	414.725.445,00	3	422.397.726,00	3	434.478.751,00	PENGAWASAN
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3		3		3		3		3		
7.01 - KECAMATAN				70.460.780.389,00		71.262.519.539,00		83.007.212.628,00				91.208.629.744,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				52.558.631.372,00		53.026.170.392,00		61.940.061.962,00				67.985.537.190,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KABUPATEN/ KOTA													
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kecamatan Bugul Kidul	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	9.037.108.450 ,00	3	8.780.270.653 ,00	3	9.874.562.683 ,00	3		10.372.045.778,0 0	3	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,35	77		78,6		80,2		81,8		83,4		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Bakalan	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	69.610.100,00	3	67.260.300,00	3	75.507.300,00	3	79.295.200,00	3	84.579.100,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,35	77		78,6		80,2		81,8		83,4		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Blandongan	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	79.984.100,00	3	72.452.800,00	3	81.336.500,00	3	85.416.900,00	3	91.108.700,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,35	77		78,6		80,2		81,8		83,4		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Bugul Kidul	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	68.335.100,00	3	66.028.300,00	3	74.124.300,00	3	77.842.800,00	3	83.030.000,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,35	77		78,6		80,2		81,8		83,4		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	70.686.000,00	3	68.299.900,00	3	76.674.400,00	3	80.520.800,00	3	85.886.400,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kelurahan Kepel													
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,35	77		78,6		80,2		81,8		83,4		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Krampyangan	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	75.091.400,00	3	72.556.500,00	3	81.452.900,00	3	85.539.100,00	3	91.239.100,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,35	77		78,6		80,2		81,8		83,4		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Tapaan	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	70.879.100,00	3	68.486.500,00	3	76.883.800,00	3	80.740.800,00	3	86.121.100,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,35	77		78,6		80,2		81,8		83,4		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kecamatan Gadingrejo	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	11.416.623.187,00	3	11.707.469.277,00	3	13.423.172.807,00	3	14.610.721.241,00	3	16.256.515.143,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.71	80		81		82		83		84		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Krapyakrejo	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	67.343.000,00	3	67.696.300,00	3	79.451.100,00	3	87.267.500,00	3	97.330.100,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.71	80		81		82		83		84		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Bukir	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	72.013.600,00	3	72.903.700,00	3	85.562.800,00	3	93.947.900,00	3	104.791.800,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.71	80		81		82		83		84		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Petahunan	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	79.255.900,00	3	80.628.000,00	3	94.597.300,00	3	103.841.600,00	3	115.779.400,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.71	80		81		82		83		84		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Randusari	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	68.662.300,00	3	69.866.000,00	3	82.019.800,00	3	90.058.100,00	3	100.446.000,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.71	80		81		82		83		84		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Gentong	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	68.662.300,00	3	69.866.000,00	3	82.019.800,00	3	90.058.100,00	3	100.446.000,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.71	80		81		82		83		84		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Sebani	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	68.662.300,00	3	69.866.000,00	3	82.019.800,00	3	90.058.100,00	3	100.446.000,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.71	80		81		82		83		84		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Gadingrejo	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	68.662.300,00	3	69.866.000,00	3	82.019.800,00	3	90.058.100,00	3	100.446.000,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.71	80		81		82		83		84		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Karangketug	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	58.853.300,00	3	59.017.300,00	3	69.265.100,00	3	76.020.800,00	3	84.784.600,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.71	80		81		82		83		84		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kecamatan Panggungrejo	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	18.492.733.604,00	3	19.385.878.598,00	3	23.729.119.367,00	3	27.173.020.741,00	3	31.607.341.187,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,05	81,5		82,25		83		83,75		84,5		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Bangilan	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	74.568.200,00	3	78.214.800,00	3	95.766.000,00	3	109.692.800,00	3	127.602.900,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,05	81,5		82,25		83		83,75		84,5		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan	Level Maturitas SPIP	3	3	60.664.300,00	3	63.628.300,00	3	77.956.700,00	3	89.307.800,00	3	103.900.400,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kelurahan Bugul Lor	Perangkat Daerah												
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,05	81,5		82,25		83		83,75		84,5		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Kandangsapi	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	74.909.600,00	3	78.600.100,00	3	96.247.800,00	3	110.237.300,00	3	128.294.900,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,05	81,5		82,25		83		83,75		84,5		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Karanganyar	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	65.508.400,00	3	72.923.000,00	3	89.302.500,00	3	102.338.300,00	3	119.077.500,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,05	81,5		82,25		83		83,75		84,5		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Kebonsari	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	69.583.400,00	3	72.988.600,00	3	89.369.500,00	3	102.402.200,00	3	119.139.500,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,05	81,5		82,25		83		83,75		84,5		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Mandaranrejo	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	70.521.200,00	3	73.982.100,00	3	90.560.600,00	3	103.708.400,00	3	120.652.100,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,05	81,5		82,25		83		83,75		84,5		
Terlaksananya Penunjang	Level Maturitas	3	3	69.616.700,00	3	73.017.600,00	3	89.339.200,00	3	102.430.500,00	3	119.116.900,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Urusan Kewilayahan Kelurahan Mayangan	SPIP Perangkat Daerah												PANGGUNGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,05	81,5		82,25		83		83,75		84,5		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Ngemplakrejo	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	58.831.300,00	3	61.765.200,00	3	75.612.500,00	3	86.647.000,00	3	100.828.300,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,05	81,5		82,25		83		83,75		84,5		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Panggungrejo	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	70.061.300,00	3	73.493.100,00	3	89.973.000,00	3	103.062.900,00	3	119.944.200,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,05	81,5		82,25		83		83,75		84,5		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Pekuncen	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	67.496.100,00	3	70.816.500,00	3	86.709.900,00	3	99.355.700,00	3	115.611.400,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,05	81,5		82,25		83		83,75		84,5		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Petamanan	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	80.885.700,00	3	84.866.500,00	3	103.971.700,00	3	119.133.400,00	3	138.643.000,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,05	81,5		82,25		83		83,75		84,5		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Tambaan	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	82.788.600,00	3	86.877.400,00	3	106.378.300,00	3	121.853.700,00	3	141.772.900,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,05	81,5		82,25		83		83,75		84,5		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Trajeng	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	79.549.300,00	3	83.437.700,00	3	102.159.300,00	3	117.064.800,00	3	136.227.300,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,05	81,5		82,25		83		83,75		84,5		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kecamatan Purworejo	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	11.309.345.631,00	3	10.828.636.964,00	3	12.175.822.605,00	3	12.808.852.330,00	3	13.688.253.294,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,25	80		81		82		83		84		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Pohjentrek	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	67.919.700,00	3	65.032.800,00	3	73.123.500,00	3	76.925.200,00	3	82.206.600,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,25	80		81		82		83		84		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Wirogunan	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	49.502.400,00	3	47.398.300,00	3	53.295.100,00	3	56.066.000,00	3	59.915.200,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,25	80		81		82		83		84		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Tembokrejo	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	73.150.900,00	3	70.041.600,00	3	78.755.400,00	3	82.850.000,00	3	88.538.100,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,25	80		81		82		83		84		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Purutrejo	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	62.419.600,00	3	59.766.400,00	3	67.201.900,00	3	70.695.800,00	3	75.549.500,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,25	80		81		82		83		84		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Kebonagung	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	33.678.800,00	3	32.247.300,00	3	36.259.100,00	3	38.144.300,00	3	40.763.100,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,25	80		81		82		83		84		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan Kelurahan Purworejo	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	54.946.100,00	3	52.610.600,00	3	59.155.800,00	3	62.231.400,00	3	66.503.900,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,25	80		81		82		83		84		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewilayahan	Level Maturitas SPIP	3	3	49.518.100,00	3	47.413.400,00	3	53.312.000,00	3	56.083.800,00	3	59.934.200,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kelurahan Sekargadung	Perangkat Daerah												
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,25	80		81		82		83		84		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				201.411.000,00		212.270.093,00		248.889.412,00		276.517.187,00		311.633.976,00	
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Bugul Kidul	Persentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot	74,78	75	49.359.900,00	76,5	58.591.557,00	78	65.570.075,00	79,5	69.422.009,00	81	74.438.316,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Gadingrejo	Persentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot	74	75	38.376.100,00	76,5	31.493.849,00	78	36.827.622,00	79,5	40.749.137,00	81	45.653.060,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Panggungrejo	Persentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot	74,36	75	90.000.000,00	76,5	95.877.093,00	78	117.050.712,00	79,5	135.175.587,00	81	158.119.776,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam	87	87,3	23.675.000,00	88,89	26.307.609,00	90,48	29.440.963,00	92,06	31.170.482,00	95,24	33.422.804,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kecamatan Purworejo	musrenbangkot												
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				7.787.275.800,00		8.075.526.100,00		9.120.192.499,00		9.799.947.698,00		10.723.625.193,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Bugul Kidul	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	194.570.100,00	100	195.305.034,00	100	218.567.188,00	100	231.406.598,00	100	248.127.509,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Bakalan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	206.731.000,00	100	189.756.800,00	100	194.294.200,00	100	188.322.200,00	100	184.982.600,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Blandongan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	205.879.800,00	100	188.902.300,00	100	193.338.000,00	100	187.309.800,00	100	183.897.000,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Bugul Kidul	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	204.882.600,00	100	187.901.400,00	100	192.217.800,00	100	186.123.900,00	100	182.625.400,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Kepel	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	207.217.500,00	100	190.245.000,00	100	194.840.600,00	100	188.900.700,00	100	185.602.900,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	204.947.400,00	100	187.966.400,00	100	192.290.600,00	100	186.200.900,00	100	182.708.000,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kelurahan Krampyangan													
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Tapaan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	209.163.200,00	100	192.198.100,00	100	197.026.300,00	100	191.214.800,00	100	188.084.200,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	115.972.200,00	100	119.728.883,00	100	140.052.645,00	100	155.054.557,00	100	173.853.745,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Bukir	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	215.591.600,00	100	195.926.600,00	100	202.129.200,00	100	197.678.000,00	100	196.166.700,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Gadingrejo	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	213.119.400,00	100	193.352.200,00	100	199.148.800,00	100	194.374.700,00	100	192.438.400,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Gentong	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	212.624.800,00	100	192.908.300,00	100	198.606.900,00	100	193.766.200,00	100	191.760.500,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Karangketug	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	213.416.000,00	100	193.529.700,00	100	199.329.400,00	100	194.548.500,00	100	192.692.600,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	216.267.100,00	100	196.193.000,00	100	202.490.500,00	100	198.025.700,00	100	196.590.500,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kelurahan Krapyakrejo													
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Petahunan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	213.119.300,00	100	193.352.200,00	100	199.148.800,00	100	194.374.700,00	100	192.438.400,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Randusari	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	221.518.700,00	100	200.631.800,00	100	207.006.300,00	100	202.372.200,00	100	200.827.400,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sebani	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	213.514.900,00	100	193.796.000,00	100	199.600.400,00	100	194.896.300,00	100	193.031.600,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	192.905.900,00	100	213.060.550,00	100	260.112.957,00	100	300.428.421,00	100	351.405.397,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Bangilan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	212.470.100,00	100	234.707.100,00	100	286.561.200,00	100	331.014.300,00	100	387.151.200,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Bugul Lor	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	205.313.100,00	100	226.788.300,00	100	276.879.000,00	100	319.782.700,00	100	374.084.500,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	201.775.300,00	100	222.821.900,00	100	272.030.900,00	100	314.160.200,00	100	367.502.200,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kelurahan Kandangsapi													
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Karanganyar	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	200.748.800,00	100	221.699.600,00	100	270.618.200,00	100	312.539.700,00	100	365.668.400,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Kebonsari	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	205.864.700,00	100	227.384.800,00	100	277.576.200,00	100	320.627.700,00	100	374.992.800,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Mandaranrejo	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	203.563.200,00	100	224.822.600,00	100	274.427.700,00	100	316.988.700,00	100	370.852.500,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Mayangan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	204.917.700,00	100	226.335.600,00	100	276.328.200,00	100	319.165.700,00	100	373.398.200,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Ngemplakrejo	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	212.220.200,00	100	234.388.400,00	100	286.146.500,00	100	330.528.200,00	100	386.677.500,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Panggungrejo	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	204.479.800,00	100	225.843.800,00	100	275.737.500,00	100	318.510.300,00	100	372.674.600,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	205.406.800,00	100	226.874.600,00	100	276.966.700,00	100	319.867.200,00	100	374.166.900,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kelurahan Pekuncen													
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Petamanan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	221.841.300,00	100	245.019.200,00	100	299.129.600,00	100	345.458.500,00	100	404.196.800,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Tambaan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	192.905.500,00	100	213.060.200,00	100	260.112.600,00	100	300.428.900,00	100	351.405.600,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Trajeng	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	212.361.700,00	100	234.518.600,00	100	286.279.000,00	100	330.655.800,00	100	386.886.500,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Purworejo	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	143.502.300,00	100	164.874.433,00	100	184.511.809,00	100	195.351.122,00	100	209.466.542,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Pohjentrek	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	222.242.900,00	100	255.341.900,00	100	285.754.300,00	100	302.541.000,00	100	324.402.200,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Wirogunan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	211.297.200,00	100	242.766.100,00	100	271.680.600,00	100	287.640.500,00	100	308.424.900,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	214.500.300,00	100	246.446.200,00	100	275.799.000,00	100	292.000.900,00	100	313.100.400,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kelurahan Tembokrejo													
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Purutrejo	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	215.426.200,00	100	247.510.000,00	100	276.989.500,00	100	293.261.400,00	100	314.451.900,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Kebonagung	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	215.292.100,00	100	247.355.900,00	100	276.817.100,00	100	293.078.800,00	100	314.256.100,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Purworejo	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	211.611.000,00	100	243.126.700,00	100	272.084.200,00	100	288.067.800,00	100	308.883.100,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sekargadung	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina	100	100	208.094.100,00	100	239.085.900,00	100	267.562.100,00	100	283.280.100,00	100	303.749.500,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.871.403.700,00		2.206.410.748,00		2.437.258.546,00		2.730.496.169,00		2.730.496.169,00	
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kecamatan Bugul Kidul	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	221.351.600,00	100	205.558.785,00	100	230.041.639,00	100	243.555.526,00	100	261.154.311,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman	Persentase Penanganan Pengaduan	100	100	21.031.000,00	100	19.530.500,00	100	21.856.700,00	100	23.140.700,00	100	24.812.800,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
dan ketertiban Umum Kelurahan Bakalan	Trantibmas dan Kebencanaan												
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Blandongan	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	32.562.600,00	100	30.239.300,00	100	33.840.900,00	100	35.828.900,00	100	38.417.900,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Bugul Kidul	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	20.505.300,00	100	19.042.300,00	100	21.310.300,00	100	22.562.200,00	100	24.192.500,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Kepel	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	26.288.800,00	100	24.413.100,00	100	27.320.900,00	100	28.925.800,00	100	31.016.000,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Krampyangan	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	19.762.800,00	100	18.352.700,00	100	20.538.600,00	100	21.745.200,00	100	23.316.400,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Tapaan	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	24.028.000,00	100	22.313.600,00	100	24.971.300,00	100	26.438.200,00	100	28.348.600,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas	100	100	200.518.200,00	100	209.432.803,00	100	245.042.472,00	100	271.232.675,00	100	304.049.277,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Umum Kecamatan Gadingrejo	dan Kebencanaan												
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Bukir	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	29.327.700,00	100	31.071.300,00	100	36.397.700,00	100	40.248.400,00	100	45.080.200,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Gadingrejo	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	24.439.700,00	100	25.567.200,00	100	29.894.900,00	100	33.120.200,00	100	37.114.900,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Gentong	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	21.507.000,00	100	22.460.100,00	100	26.282.200,00	100	29.121.400,00	100	32.623.900,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Karangketug	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	21.507.000,00	100	22.460.100,00	100	26.282.200,00	100	29.121.400,00	100	32.623.900,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Krapyakrejo	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	28.496.600,00	100	29.739.700,00	100	34.772.000,00	100	38.509.800,00	100	43.131.300,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan	100	100	18.769.700,00	100	19.619.300,00	100	22.940.500,00	100	25.383.500,00	100	28.471.700,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kelurahan Petahunan	Kebencanaan												
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Randusari	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	26.881.900,00	100	27.520.300,00	100	32.243.100,00	100	35.728.100,00	100	40.080.700,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Sebani	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	21.154.700,00	100	21.306.000,00	100	24.927.500,00	100	27.556.700,00	100	30.929.100,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Panggungrejo	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	332.819.600,00	100	351.549.471,00	100	429.185.933,00	100	495.672.702,00	100	579.772.443,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Bangilan	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	22.001.100,00	100	23.272.100,00	100	28.372.800,00	100	32.785.300,00	100	38.313.700,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Bugul Lor	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	19.758.500,00	100	20.854.200,00	100	25.461.300,00	100	29.374.500,00	100	34.395.800,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan	100	100	18.902.100,00	100	19.922.900,00	100	24.333.200,00	100	28.114.800,00	100	32.913.700,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kelurahan Kandangsapi	Kebencanaan												
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Karanganyar	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	19.737.200,00	100	20.835.500,00	100	25.442.300,00	100	29.356.100,00	100	34.377.900,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Kebonsari	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	23.668.200,00	100	25.005.900,00	100	30.497.900,00	100	35.265.400,00	100	41.239.700,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Mandaranrejo	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	29.273.800,00	100	30.916.600,00	100	37.775.800,00	100	43.661.100,00	100	51.033.700,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Mayangan	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	21.277.500,00	100	22.457.600,00	100	27.453.800,00	100	31.726.900,00	100	37.112.600,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Ngemplakrejo	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	23.510.600,00	100	24.867.100,00	100	30.356.800,00	100	35.042.600,00	100	41.022.500,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan	100	100	26.423.500,00	100	27.875.000,00	100	34.049.100,00	100	39.291.800,00	100	45.927.300,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kelurahan Panggungrejo	Kebencanaan												
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Pekuncen	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	22.707.700,00	100	23.982.900,00	100	29.276.500,00	100	33.828.900,00	100	39.585.300,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Petamanan	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	24.073.100,00	100	25.451.100,00	100	31.041.200,00	100	35.875.200,00	100	42.003.600,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Tambaan	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	21.048.300,00	100	22.255.900,00	100	27.158.300,00	100	31.355.500,00	100	36.665.800,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Trajeng	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	23.992.800,00	100	25.380.400,00	100	30.969.200,00	100	35.805.900,00	100	41.851.300,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kecamatan Purworejo	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	245.952.600,00	100	243.519.513,00	100	272.523.804,00	100	288.533.243,00	100	309.382.138,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan	100	100	30.350.700,00	100	30.050.500,00	100	33.629.600,00	100	35.605.200,00	100	38.177.900,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kelurahan Pohjentrek	Kebencanaan												
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Wirogunan	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	29.591.100,00	100	29.298.300,00	100	32.787.900,00	100	34.714.000,00	100	37.222.400,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Tembokrejo	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	33.931.800,00	100	33.596.100,00	100	37.597.600,00	100	39.806.300,00	100	42.682.600,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Purutrejo	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	37.247.500,00	100	36.879.100,00	100	41.271.500,00	100	43.696.000,00	100	46.853.400,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Kebonagung	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	29.558.600,00	100	29.266.200,00	100	32.751.900,00	100	34.676.000,00	100	37.181.600,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Purworejo	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	100	100	49.447.000,00	100	48.957.800,00	100	54.788.900,00	100	58.007.500,00	100	62.199.000,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan	100	100	27.997.800,00	100	27.720.800,00	100	31.022.500,00	100	32.844.900,00	100	35.218.300,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kelurahan Sekargadung	Kebencanaan												
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				6.056.227.152,00		6.078.635.191,00		7.084.836.899,00		7.907.757.228,00		8.926.266.638,00	
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Bugul Kidul	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	77.066.456,00	100	79.868.970,00	100	89.113.611,00	100	95.084.247,00	100	102.461.095,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Bakalan	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	160.780.100,00	100	166.626.400,00	100	185.913.300,00	100	198.369.400,00	100	213.759.300,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Blandongan	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	140.895.200,00	100	146.018.400,00	100	162.920.000,00	100	173.835.600,00	100	187.322.100,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Bugul Kidul	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	208.079.700,00	100	215.645.900,00	100	240.606.800,00	100	256.727.300,00	100	276.644.800,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Kepel	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	121.765.100,00	100	126.192.800,00	100	140.799.500,00	100	150.233.000,00	100	161.888.400,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peneyelenggaraan Urusan	100	100	85.501.600,00	100	88.610.600,00	100	98.867.200,00	100	105.491.300,00	100	113.675.500,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kelurahan Krampyangan	Pemerintahaan Umum												
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Tapaan	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahaan Umum	100	100	95.369.900,00	100	98.837.700,00	100	110.278.100,00	100	117.666.700,00	100	126.795.500,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN BUGUL KIDUL)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Gadingrejo	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahaan Umum	100	100	61.566.200,00	100	64.227.216,00	100	74.905.079,00	100	83.552.421,00	100	94.096.398,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Bukir	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahaan Umum	100	100	177.500.000,00	100	185.241.300,00	100	216.063.700,00	100	241.014.500,00	100	271.531.200,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Gadingrejo	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahaan Umum	100	100	180.200.000,00	100	188.054.900,00	100	219.377.900,00	100	244.675.700,00	100	275.642.600,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Gentong	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahaan Umum	100	100	177.700.000,00	100	185.513.600,00	100	216.431.900,00	100	241.461.000,00	100	272.056.000,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Karangketug	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahaan Umum	100	100	199.900.000,00	100	208.657.400,00	100	243.405.400,00	100	271.554.300,00	100	305.910.000,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahaan Umum	100	100	202.999.400,00	100	173.351.700,00	100	202.254.800,00	100	225.655.300,00	100	254.210.600,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kelurahan Krapyakrejo													
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Petahunan	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	244.600.000,00	100	255.308.100,00	100	297.812.600,00	100	332.187.500,00	100	374.230.200,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Randusari	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	165.700.000,00	100	172.988.700,00	100	201.794.500,00	100	225.119.500,00	100	253.598.200,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Sebani	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	150.317.800,00	100	128.879.300,00	100	150.333.200,00	100	167.701.100,00	100	188.952.100,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN GADINGREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Panggungrejo	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	201.484.196,00	100	223.269.800,00	100	271.759.719,00	100	316.292.702,00	100	371.870.785,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Bangilan	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	99.901.100,00	100	110.676.700,00	100	134.723.900,00	100	156.846.300,00	100	184.354.500,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Bugul Lor	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	236.300.900,00	100	261.864.800,00	100	318.732.400,00	100	370.964.300,00	100	436.098.100,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	80.801.500,00	100	89.499.800,00	100	108.916.900,00	100	126.812.900,00	100	149.072.200,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kelurahan Kandangsapi													
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Karanganyar	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	200.383.500,00	100	0	100	0	100	0	100	0	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Kebonsari	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	217.865.100,00	100	241.391.600,00	100	293.823.400,00	100	341.980.500,00	100	402.019.000,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Mandaranrejo	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	134.903.200,00	100	149.533.700,00	100	182.054.300,00	100	211.954.500,00	100	249.186.900,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Mayangan	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	104.914.800,00	100	116.214.200,00	100	141.445.300,00	100	164.616.300,00	100	193.450.800,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Ngemplakrejo	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	204.807.700,00	100	226.974.100,00	100	276.253.500,00	100	321.544.400,00	100	377.975.400,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Panggungrejo	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	105.707.100,00	100	117.127.300,00	100	142.555.600,00	100	165.961.200,00	100	195.120.700,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	105.986.100,00	100	117.475.700,00	100	143.001.100,00	100	166.482.600,00	100	195.719.000,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kelurahan Pekuncen													
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Petamanan	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	154.579.900,00	100	171.334.300,00	100	208.585.900,00	100	242.780.100,00	100	285.420.200,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Tambaan	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	161.433.000,00	100	178.842.600,00	100	217.674.700,00	100	253.382.200,00	100	297.818.200,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Trajeng	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	177.246.100,00	100	196.440.100,00	100	239.114.400,00	100	278.286.400,00	100	327.113.600,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PANGGUNGREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Purworejo	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	49.021.300,00	100	48.123.705,00	100	53.693.890,00	100	57.291.358,00	100	61.736.160,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Pohjentrek	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	163.493.600,00	100	160.499.500,00	100	179.077.200,00	100	191.075.300,00	100	205.899.300,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Wirogunan	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	142.464.900,00	100	139.855.900,00	100	156.044.100,00	100	166.499.000,00	100	179.416.300,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	164.581.400,00	100	161.567.400,00	100	180.268.700,00	100	192.346.600,00	100	207.269.300,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kelurahan Tembokrejo													
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Purutrejo	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	167.826.600,00	100	164.753.200,00	100	183.823.300,00	100	196.139.400,00	100	211.356.300,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Kebonagung	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	216.610.300,00	100	212.643.500,00	100	237.256.800,00	100	253.153.000,00	100	272.793.100,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Purworejo	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	275.220.200,00	100	270.180.100,00	100	301.453.300,00	100	321.650.500,00	100	346.604.800,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Kelurahan Sekargadung	Persentase Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	240.753.200,00	100	236.344.200,00	100	263.700.900,00	100	281.368.800,00	100	303.198.000,00	KEWILAYAHAN (KECAMATAN PURWOREJO)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				8.583.589.689,00		8.514.026.410,00		9.109.206.900,00		32.425.295.122,00		9.359.873.525,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				3.829.989.091,00		3.898.296.352,00		4.177.357.243,00		4.187.513.865,00		4.263.528.241,00	
Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3*	3	3.829.989.091,00	3	3.898.296.352,00	3	4.177.357.243,00	3	4.187.513.865,00	3	4.263.528.241,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemerintahan Daerah													
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,6	78,8		80		81,2		82,4		83,5		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				998.471.400,00		941.551.631,00		1.002.783.905,00		1.021.335.069,00		1.050.546.340,00	
Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90	90	998.471.400,00	90	941.551.631,00	95	1.002.783.905,00	95	1.021.335.069,00	95	1.050.546.340,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.433.054.598,00		1.368.192.980,00		1.466.135.547,00		24.726.292.748,00		1.496.379.158,00	
TERWUJUDNYA PENINGKATAN PERAN PARTAI	Persentase lembaga pendidikan yang mendapatka	73,3	73,3	1.433.054.598,00	80	1.368.192.980,00	86,6	1.466.135.547,00	93,3	24.726.292.748,00	100	1.496.379.158,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	n pendidikan politik pemilih pemula												
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				311.859.400,00		274.503.525,00		294.153.955,00		294.869.147,00		300.221.796,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang teregister	89	89	311.859.400,00	90	274.503.525,00	91	294.153.955,00	92	294.869.147,00	93	300.221.796,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				394.796.800,00		414.048.494,00		440.975.462,00		449.133.359,00		461.979.052,00	
MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGEMBAN	Persentase lembaga ekososbud yang dibina	36,08	36,08	394.796.800,00	41,23	414.048.494,00	46,39	440.975.462,00	51,54	449.133.359,00	56,7	461.979.052,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
GAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA													
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1.615.418.400,00		1.617.433.428,00		1.727.800.788,00		1.746.150.934,00		1.787.218.938,00	
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik yang terselesaikan	100	100	1.615.418.400,00	100	1.617.433.428,00	100	1.727.800.788,00	100	1.746.150.934,00	100	1.787.218.938,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL				**1.099.835.847.407,00**		**1.102.287.910.137,00**		**1.127.160.678.186,00**		**1.154.838.510.196,00**		**1.166.495.754.818,00**	

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan publik, menjalankan pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan secara menyeluruh dalam RPJMD dan menjadi tanggung jawab kepala daerah dalam pencapaiannya.

Tabel 4. 2 Target Idikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indikator Tujuan								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	88,70	88,90	89,00	89,50	90,00	90,20
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,17-79,52	79,27-79,87	79,56-80,46	79,86-81,06	80,16-82,36	80,56-83,12
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,07-5,67	5,13-5,70	5,21-6,24	5,28-6,32	5,33-6,62	5,23-6,43
4	Tingkat Kemiskinan	%	5,10-5,99	5,07-5,80	4,97-5,55	4,87-5,36	3,38-5,04	3,19-4,40
5	Rasio Gini	Indeks	0,313-0,353	0,311-0,351	0,31-0,35	0,309-0,349	0,307-0,347	0,306-0,346
6	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	86,80	87,16	87,30	87,60	88,00	88,60
7	IKLI	Indeks	3,12	3,15	3,18	3,20	3,24	3,28
Indikator Sasaran								
8	SAKIP	Nilai	75,00	78,00	80,10	81,00	82,00	83,30
9	IPKD	Indeks	62,40	63,00	64,00	65,00	66,00	67,00
10	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,55	4,57	4,59	4,61	4,62	4,63
11	Indeks SPBE*	Indeks	4,12	1,71-1,96	1,81-2,1	1,91-2,25	2,01-2,39	2,11-2,54
12	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks	82,50	82,80	83,10	83,40	83,70	84,00
13	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,68	13,7	13,77	13,86	13,92	13,96
15	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,15	10,35	10,56	10,76	10,97	11,17
16	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,97	75,23	75,48	75,74	76	76,25

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Prevalensi Stunting pada balita	%	13,87	13,37	12,87	12,37	10,67	10,22
18	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,10	97,30	97,35	97,50	97,60	97,70
19	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Miliar Rupiah	1350	1400	1450	1500	1550	1600
20	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Miliar Rupiah	2100	2200	2300	2400	2500	2600
21	Nilai PDRB Pariwisata	Miliar Rupiah	376	391	406	421	436	451
22	Nilai Realisasi Investasi	Miliar Rupiah	60,00	61,20	62,42	63,67	64,95	66,24
23	Persentase PPKS yang Mandiri	%	15,00	15,45	15,90	16,40	16,90	17,40
24	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	51,40-52,90	52,66-56,09	53,90-59,28	54,14-62,43	55,38-65,67	56,62-68,87
25	TPT	%	4,96-4,31	4,95-4,09	4,94-3,87	4,84-3,70	4,78-3,60	4,73-3,54
26	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	57,00	58,00	59,00	60,00	61,00	63,00
27	Indeks Stabilitas	Indeks	82,60	83,60	84,60	87,60	88,60	89,60
28	Indeks Solidaritas	Indeks	83,75	83,86	83,97	84,08	84,19	84,3
29	Indeks Infrastruktur	Indeks	82,60	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00
30	IKLH	Indeks	62,01	62,09	62,17	62,24	62,32	62,40
31	Indeks Resiko Bencana	Indeks	88,01-85,86	85,86-83,82	83,82-81,87	81,87-80,01	80,01-78,23	78,23-75,88

Keterangan:

* : instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital mulai tahun 2026 sehingga target disesuaikan

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator Kinerja yang mewakili urusan pemerintahan dan Indikator Jangka panjang yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Adapun indikator yang menjadi indikator urusan merupakan indikator yang digunakan oleh Perangkat Daerah di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tabel 4. 3 Target Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Indeks Resiko Bencana	Indeks	88,01-85,86	85,86-83,82	83,82-81,87	81,87-80,01	80,01-78,23	78,23-75,88
2	IKLH	Indeks	62,01	62,09	62,17	62,24	62,32	62,40

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	9,42	12,06	14,69	17,32	19,96	22,59
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	49,04	51,39	53,74	56,09	58,43	60,00
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	26,95	27,98	29,01	30,04	31,08	32,11
6	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	68,86	69,06	69,26	69,46	69,66	69,86
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	10	10,05	10,12	10,23	10,28	10,28
2	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	10,85	10,88	10,96	11,03	11,32	12,43
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,68	13,70	13,77	13,86	13,92	13,96
4	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,15	10,35	10,56	10,76	10,97	11,17
5	Persentase seni budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100
6	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	56,32-66,72	54,32-65,72	52,32-64,72	50,32-63,72	48,32-62,72	46,32-61,72
7	Prevalensi Stunting pada balita	%	13,87	13,37	12,87	12,37	10,67	10,22
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,97	75,23	75,48	75,74	76	76,25
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	63,1	63,62	64,13	64,65	65,16	65,68
10	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,304	0,288	0,28	0,271	0,263	0,255
11	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	69,60	69,70	69,80	69,90	70,00	70,10

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Tingkat Kemiskinan	%	5,10-5,99	5,07-5,80	4,97-5,55	4,87-5,36	3,38-5,04	3,19-4,40
13	Persentase PPKS yang Mandiri	%	15,00	15,45	15,90	16,40	16,90	17,40
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	85,40	85,70	85,90	86,20	86,40	86,70
15	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	79,00	79,20	79,40	79,60	79,80	79,90
16	TPT	%	4,96-4,31	4,95-4,09	4,94-3,87	4,84-3,70	4,78-3,60	4,73-3,54
17	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	66,24	69,43	74,66	77,85	83,08	86,84
18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,00	73,50	74,00	74,50	75,50	76,00
19	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
20	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	%	98,60	98,70	98,80	98,90	99,00	99,00
21	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :	%	66,29	68,09	69,69	71,69	73,49	75,29
	Literasi Membaca							
	Numerasi	%	58,90	61,10	63,30	65,50	67,70	69,90
22	Indeks pembangunan keluarga (iBangga)	Indeks	66,62	67,56	68,50	69,44	70,38	71,32
23	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78,35	78,70	79,10	79,50	79,70	80,00
24	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	57,61	58,00	58,50	60,00	60,50	61,00
25	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50
26	Jumlah Medali Yang Diperoleh	medali	27	28	29	41	30	31
27	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of	%	4,87	4,67	4,48	4,29	4,09	3,9

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Undernourishment)							
28	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	16,00	15,50	15,00	14,50	14,00	13,50
29	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Indeks	88,95	89,00	89,05	89,10	89,15	89,20
30	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	58,40	59,60	60,80	62,00	63,20	64,40
31	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	32,40	47,05	64,70	64,70	64,70	64,70
32	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	89,75	89,80	89,85	89,90	89,95	90,00
33	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	58,26	58,28	58,30	58,32	58,34	58,36
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	ICOR	Nilai	3,53	3,78	3,78	3,77	3,77	3,76
2	Jumlah investor aktif	Investor	250	260	270	280	290	300
3	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Miliar Rupiah	1350	1400	1450	1500	1550	1600
4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	19,04	19,84	19,85	19,86	19,88	19,89
5	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Miliar Rupiah	2100	2200	2300	2400	2500	2600
6	Nilai PDRB Pariwisata	Miliar Rupiah	376	391	406	421	436	451
7	Rasio PDRB Pariwisata	%	5,47-5,83	5,47-5,95	5,51-6,12	5,55-6,27	5,57-6,39	5,60-6,51
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	19,20-20,15	19,21-20,23	19,27-20,24	19,31-20,25	19,34-20,27	19,36-20,28
9	Indeks Inovasi Daerah	indeks	53,23	56,71	60,12	63,32	66,87	69,13
10	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	23,67	24,23	24,78	25,03	25,31	25,40
11	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	%	0,80	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40
12	Persentase peningkatan omset usaha mikro	%	20	20	30	40	50	60
13	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84,3	84,4	84,5	84,6	84,7	84,8

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Milyar Rupiah	139,56	142,78	146,08	149,48	152,98	155,58
15	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	5,47-5,83	5,47-5,95	5,51-6,12	5,55-6,27	5,57-6,39	5,60-6,51
16	Nilai tambah produk hasil perikanan	Miliar Rupiah	85.183	85.609	86.037	86.467	86.899	87.334
17	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Indeks	75,98	77,63	78,84	80,21	81,52	83,05
18	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Indeks	85,66	86,45	87,26	87,95	88,56	89,17
19	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Indeks	80	80	82	84	86	88
20	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	85,9	86,5	87,78	89,04	90,12	91,34
21	IKAD	Indeks	5,56	5,57	5,58	5,59	5,6	5,6
22	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	%	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
23	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	1,626	1,676	1,736	1,806	1,896	1990
24	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,48	0,52	0,56	0,6	0,64	0,68
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	Indeks	81	82	83	84	85	86
2	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja dalam SAKIP	Nilai	11	12	13	14	15	16
3	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	3	3	3	3
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Capil)	Indeks	91,40	91,50	91,60	91,70	91,80	91,90
5	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Indeks Keharmonisan Sosial	Indeks	59,83	60,00	61,00	61,67	62,67	63,33
7	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	%	22,50	23,00	23,50	24,00	24,50	25,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Nilai Komponen Perencanaan dalam SAKIP	Nilai	23,80	23,86	23,92	23,98	24,00	24,10
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Panggungrejo)	Indeks	85,25	90,25	91,25	92,25	93,25	94,00
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Gadingrejo)	Indeks	86,50	88,00	89,50	91,00	92,50	94,00
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Purworejo)	Indeks	87,50	89,20	90,90	92,60	94,30	96,00
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Bugul Kidul)	Indeks	93,50	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00
13	Indeks SPBE*	Indeks	4,12	1,71-1,96	1,81-2,1	1,91-2,25	2,01-2,39	2,11-2,54
14	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,50	82,80	83,10	83,40	83,70	84,00
15	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,73	0,735	0,74	0,745	0,75	0,76
16	Indeks Integritas	Indeks	74,1	74,2	74,3	74,4	74,5	74,6
17	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,55	4,57	4,59	4,61	4,62	4,63
18	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2Eq	828,99	845,57	862,48	879,73	897,32	915,27
19	Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD)	Indeks	81,27	81,68	82,08	82,50	82,91	83,32

Tabel 4. 4 Target Indikator Kinerja Kunci

NO	Indikator	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	**Urusan Pendidikan**						
1.1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5.	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	70,46	72,96	75,46	77,96	80,46	82,96
1.6.	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	59,25	62,15	65,05	67,95	70,85	73,75

NO	Indikator	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.7.	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	82,15	83,25	84,35	85,45	86,55	87,65
1.8.	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	70,32	71,82	73,32	74,82	76,32	77,82
1.9.	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	67,56	67,97	68,38	68,79	69,21	69,62
1.10.	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	90,05	90,55	91,05	91,55	92,05	92,55
1.11.	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	73,99	74,89	75,79	76,69	77,59	78,49
1.12.	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	74,25	75,75	77,25	78,75	80,25	81,75
1.13.	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	72,88	73,88	74,88	75,88	76,88	77,88
1.14.	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	75,04	76,04	77,04	78,04	79,04	80,04
1.15.	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	58,91	61,41	63,91	66,41	68,91	71,41
1.16.	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	63,22	65,62	68,02	70,42	72,82	75,22
2.	**Urusan Kesehatan**						
2.1.	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	1,33	1,24	1,27	1,29	1,32	1,35
2.2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100
2.3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	100	100
2.4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100	100	100	100
2.5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	100	100
2.6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100	100	100	100
2.7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
2.8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
2.9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
2.10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
2.11.	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
2.12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar;	100	100	100	100	100	100
2.13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	100	100	100
2.14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
3.1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	93	94	94	94	95	95
3.2.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100	100	100	100	100	100
3.3.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	89,12	89,28	89,44	89,59	89,75	89,91
3.4.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik;	91,18	91,25	91,40	91,56	91,72	91,87
3.5.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100	100	100	100	100
3.6.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	86,53	86,89	87,25	87,61	87,97	88,33
3.7.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100	100	100	100
3.8.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**						
4.1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-
4.3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	18,063	34,450	50,838	67,225	83,613	100,00
4.4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni	2,96	2,38	1,81	1,23	0,65	0,08
4.5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	70,69	70,77	70,84	70,91	70,98	71,05
5.	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**						
5.1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00	72,00
5.2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00	72,00
5.3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	7,50	9,75	12,82	15,33	16,22	18,19

NO	Indikator	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6.	**Urusan Sosial**						
6.1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	80,4000	80,4100	80,4200	80,4300	80,4400	80,4500
6.2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
7.	**Urusan Tenaga Kerja**						
7.1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	43	43	43	43	43	43
7.2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	26	28	30	32	35	37
7.3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-
7.4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	73	74	74	75	75	78
7.5.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	42,61	40,00	43,00	43,00	44,00	45,00
8.	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
8.1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	25,00	32,00	32,20	32,40	32,60	32,80
8.2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	48,85	48,16	47,45	46,71	45,94	45,15
9.	**Urusan Pangan**						
9.1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan	58,98	58,98	58,98	63,98	63,98	63,98
10.	**Urusan Pertanahan**						
10.1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	70,00	70,59	71,15	71,70	72,22	72,73
10.2.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100,00	21,31	30,28	40,97	50,47	61,47
10.3.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	70,00	70,59	71,15	71,70	72,22	72,73

NO	Indikator	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.4.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	33,33	50,00	66,66	83,33	100,00	100,00
11.	**Urusan Lingkungan Hidup**						
11.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	62,01	62,09	62,17	62,24	62,32	64,40
11.2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	99,28	99,29	99,30	99,30	99,31	99,31
11.3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	70,50	70,00	69,50	69,00	68,50	68,00
12.	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
12.1.	Perekaman KTP elektronik	98,90	98,00	98,10	98,20	98,30	98,40
12.2.	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	96,00	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00
12.3.	Kepemilikan akta kelahiran	99,90	99,94	99,95	99,96	99,97	99,98
12.4.	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
13.	**Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana**						
13.1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,05	2,04	2,03	2,02	2,01	2,00
13.2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	-	68,20	68,60	69,00	69,30	69,50
13.3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,48	8,89	8,61	8,34	8,06	7,78
14.	**Urusan Perhubungan**						
14.1.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
14.2.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,545	0,545	0,543	0,541	0,539	0,537
15.	**Urusan Komunikasi dan Informatika**						
15.1.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	5,71	8,57	11,43	14,29	17,14	20,00
15.3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
16.	**Urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah**						
16.1.	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	4,1	5,0	5,8	6,6	7,4	8,2
16.2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	20	40	60	80	100	100
17.	**Urusan Penanaman Modal**						
17.1.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	2	2	2	2	2	2
18.	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**						

NO	Indikator	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
18.1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50
18.2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,27	2,28	2,29	2,30	2,31	2,32
18.3.	Peningkatan prestasi olahraga;	27,00	28,00	29,00	41,00	30,00	31,00
19.	**Urusan Statistik**						
19.1.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.2.	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	**Urusan Persandian**						
20.1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	79,07	79,22	79,38	79,53	79,69	79,84
21.	**Ueusan Kebudayaan**						
21.1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
22.	**Urusan Perpustakaan**						
22.1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	76,8	77	77,3	77,5	77,8	78
22.2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	85,4	85,7	85,9	86,2	86,4	86,7
23.	**Urusan Kearsipan**						
23.1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	61,88	61,88	62	62,3	62,7	63
23.2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100	100	100	100	100	100
24.	**Urusan Kelautan dan Perikanan**						
24.1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP	11627,3	12826,37	13056,44	13291,78	13530,38	13774,24
25.	**Urusan Pariwisata**						
25.1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	3%	3%	3%	3%	3%	3%
25.2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	7%	7%	7%	7%	7%	7%
25.3.	Tingkat hunian akomodasi	15%	15%	15%	15%	15%	15%
25.4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4%	4%	4%	4%	4%	4%
25.5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4%	4%	4%	4%	4%	4%
26.	**Urusan Pertanian**						
26.1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	7,1	6,6	6,5	6,3	6,2	6,2

NO	Indikator	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
26.2.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	25%	26%	27%	28%	29%	30%
27.	**Urusan Perdagangan**						
27.1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27.2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27.3.	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	11,00	16,00	16,00	17,00	18,00	19,00
28.	**Urusan Perindustrian**						
28.1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	0,56	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
28.2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
28.3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
28.4.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29.	**Urusan Transmigrasi**						
29.1.	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-
30.	**Urusan Perencanaan dan Keuangan**						
30.1.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	24,24	21,67	20,63	19,95	19,21	18,67
30.2.	Rasio PAD	23,67	24,23	24,78	25,03	25,31	25,40
30.3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
30.4.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
30.5.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	47,98	48,41	46,78	46,03	49,47	51,07
30.6.	Opini Laporan Keuangan;	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.	**Urusan Pengadaan**						
31.1.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif;	60 %	65%	70 %	75 %	80 %	85 %
31.2.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
31.3.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
32.	**Urusan Kepegawaian**						
32.1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	62,70	62,90	63,00	63,15	63,30	63,50

NO	Indikator	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
32.2.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	17,30	17,45	17,50	17,65	17,90	18,10
32.3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	75,25	75,35	75,50	75,70	75,85	76,00
33.	**Urusan Manajemen Keuangan**						
33.1.	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	92,00	92,00	92,00	93,00	93,00	93,00
33.2.	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	93,08	93,23	89,93	91,31	91,13	92,23
33.3.	Manajemen Aset	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
33.4.	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	7,09	13,15	13,29	17,30	18,75	14,08
34.	**Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik**						
34.1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34.2.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

* : instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital mulai tahun 2026 sehingga target disesuaikan

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Pasuruan dalam melaksanakan pembangunan selama periode lima tahun. Dalam pelaksanaannya, RPJMD dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaannya, dan selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Pemerintah Kota Pasuruan berkewajiban menjaga konsistensi dan keselarasan RPJMD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun pusat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, konsisten, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

. RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tahap pertama RPJPD Kota Pasuruan tahun 2025-2045. Dokumen ini disusun sebagai upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pemerintah Kota Pasuruan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029. Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Kota Pasuruan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Wali Kota dibantu oleh Perangkat Daerah yang mengampu urusan perencanaan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
3. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 dengan penuh tanggung jawab;
4. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan/Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, serta Kegiatan Prioritas dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra PD berpedoman pada RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029;

5. Renstra-PD menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan Perangkat Daerah (Renja–PD) yang selanjutnya diimplementasikan melalui program dan kegiatan;
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 setiap tahunnya harus diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan;
7. Penyusunan RKPD Kota Pasuruan dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota, hingga sinkronisasi dengan provinsi;
8. RKPD Kota Pasuruan menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD dengan pendekatan berbasis kinerja;
9. RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) tahun anggaran berikutnya;
10. Seluruh Perangkat Daerah perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD, serta melakukan sosialisasi baik kepada perangkat pemerintah maupun masyarakat sipil.;
11. Berkaitan dengan program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas nasional dimana dimungkinkan pemerintah daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public Private Partnership), melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pelaku usaha daerah yang tersebar diberbagai daerah di Kota Pasuruan, dan Penerbitan Obligasi Daerah serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga dalam Negeri maupun Lembaga Internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Jika terdapat perubahan atau pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTKD) baru setelah RPJMD ditetapkan, maka dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen RPJMD;
13. Dalam hal terdapat perkembangan atau dinamika yang berada di luar kendali Pemerintah Kota Pasuruan dan berpotensi menghambat pelaksanaan RPJMD, maka strategi, arah kebijakan, serta program dapat ditinjau kembali. Hasil peninjauan

tersebut wajib dikonsultasikan dengan DPRD Kota Pasuruan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut..

Pengendalian dan evaluasi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan kebijakan pembangunan berjalan sesuai dengan arah, sasaran, dan target yang telah ditetapkan. Proses pengendalian dilakukan secara berkesinambungan melalui pemantauan capaian kinerja pembangunan, sedangkan evaluasi dilaksanakan untuk menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pelaksanaan RPJMD.

Melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi yang terencana, sistematis, dan berbasis data, Pemerintah Kota Pasuruan bersama DPRD dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengidentifikasi permasalahan, hambatan, maupun peluang yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, langkah perbaikan dapat segera ditempuh agar sasaran dan target pembangunan daerah tetap tercapai.

Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025–2029 sangat ditentukan oleh komitmen seluruh Perangkat Daerah, dukungan DPRD, partisipasi masyarakat, serta sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan kerja sama yang erat, diharapkan seluruh visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Pasuruan dapat terwujud secara optimal, demi terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat

.